



# RPJMD

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*

## KABUPATEN BENGKAYANG

2016 - 2021



**Adil Ka' Talino**

**Bacuramin Ka' Saruga**

**Basengat Ka' Jubata**





BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);



14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
dan  
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2016-2021.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah keputusan politik Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah untuk mencapai tujuan.
15. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
16. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD.
- (2) RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
  - a. penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
  - b. penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan;
  - c. penyusunan Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk :
  - a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Perencanaan Penganggaran;
  - c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

### BAB IV PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

#### Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 setiap tahun dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menjabarkan RPJMD ini ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tahun 2016–2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing urusan.
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam setiap tahun dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD).

### BAB V SISTEMATIKA

#### Pasal 5

Sistematika RPJMD terdiri dari beberapa bab, meliputi :

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
- d. Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis

- e. Bab V : Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan
- f. Bab VI : Strategis dan Arah Kebijakan
- g. Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- h. Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas
- i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- j. Bab X : Penutup

## BAB VI

### ISI DAN URAIAN RPJMD

#### Pasal 6

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode masa jabatan Kepala Daerah berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Kepala Daerah berikutnya.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN -LAIN

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011-2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 3 Oktober 2016  
BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 5 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

SILVERIUS SINOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR : 12 .  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 12/2016

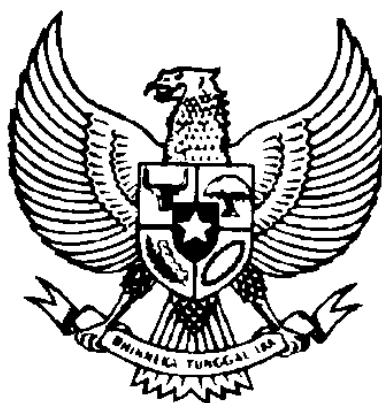
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKAYANG

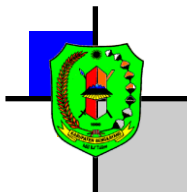


BERNADETA, SH, MH  
NIP. 197104162000032005

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016-2021



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016-2021

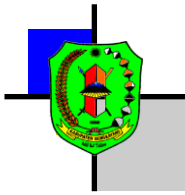


# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Daftar isi .....	i
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Grafik .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-8
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-10
1.5. Maksud dan Tujuan .....	I-12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Aspek Geografis, Demografi dan Potensi Daerah .....	II-1
2.1.1 Aspek Geografis .....	II-1
2.1.2 Aspek Demografi .....	II-5
2.1.3 Potensi Daerah .....	II-7
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-12
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II-12
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-19
2.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II-27
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib .....	II-27
2.3.2 Layanan Urusan Pilihan .....	II-43
2.4. Aspek Daya Saing .....	II-54
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II-54
2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II-56
2.4.3 Keamanan dan Ketertiban .....	II-61
2.4.4 Tingkat Ketergantungan .....	II-63
2.4.5 Pariwisata .....	II-64
<b>BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2011-2015 .....	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III-2
3.1.2 Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III-37
3.1.3 Analisis Pembiayaan .....	III-38
3.2. Kerangka Pendanaan .....	III-41
3.2.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama .....	III-41
3.2.2 Proyeksi Kedepan .....	III-43
3.2.3 Kebijakan Alokasi Anggaran .....	III-48
<b>BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Permasalahan Pembangunan .....	IV-1



4.1.1	Identifikasi Lingkungan Internal ....	IV-1
4.1.2	Identifikasi Lingkungan Eksternal ..	IV-4
4.2.	Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah .....	IV-5
4.2.1	Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Urusan Wajib/Pilihan) .....	IV-6
4.2.2	Identifikasi Permasalahan Bidang Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang .....	IV-29
4.3.	Isu Strategis .....	IV-31
4.3.1	Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional .....	IV-32
4.3.2	Kebijakan Pembangunan Daerah ..	IV-37
4.3.3	Penetapan Isu Strategis .....	IV-37
<b>BAB V</b>	<b>VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN .....</b>	<b>V-1</b>
5.1.	Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021 .....	V-1
5.2.	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021 .....	V-6
<b>BAB VI</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan .....	VI-1
<b>BAB VII</b>	<b>KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS ....</b>	<b>VIII-1</b>
<b>BAB IX</b>	<b>PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ...</b>	<b>IX-1</b>
<b>BAB X</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>X-1</b>
10.1.	Pedoman Transisi .....	X-1
10.2.	Kaidah Pelaksanaan .....	X-1



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>	
Table 2.1	Jumlah Desa, dan Luas Wilayah Untuk Setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkayang.....	II-3
Table 2.2	Nama – nama Pulau dan Luas Menurut Desa di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang.....	II-4
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Rasio Tahun 2014.....	II-5
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2013.....	II-7
Tabel 2.5	Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Bengkayang 2011-2014.....	II-12
Tabel 2.6	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Bengkayang Tahun 2011-2014.....	II-14
Tabel 2.7	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) di Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014 .....	II-15
Tabel 2.8	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014 (Rp)..	II-16
Tabel 2.9	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014 .....	II-17
Tabel 2.10	IPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014..	II-17
Tabel 2.11	Angka Kemiskinan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014 .....	II-18
Tabel 2.12	Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Bengkayang dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2014 .....	II-18
Tabel 2.13	Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014 .....	II-19
Tabel 2.14	Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bengkayang 2011-2015 .....	II-19
Tabel 2.15	Perbandingan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bengkayang Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2014 .....	II-21
Tabel 2.16	Presentase balita Gizi Buruk Per Jumlah Balita yang ada di Kabupaten Bengkayang Selama Tahun 2010-2014 .....	II-23
Tabel 2.17	Kondisi Ketenagakerjaan Kab. Bengkayang.....	II-23
Tabel 2.18	Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014 .....	II-24

Tabel 2.19	Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Bekerja dan Pencari Kerja di Kabupaten Bengkulu 2014 .....	II-24
Tabel 2.20	Partisipasi Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2014 .....	II-25
Tabel 2.21	Partisipasi Perempuan dalam Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2014 .....	II-26
Tabel 2.22	Realisasi Peserta KB Aktif Kabupaten Bengkulu 2014 .....	II-26
Tabel 2.23	Aspek Layanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2015 .....	II-28
Tabel 2.24	Banyak Sekolah Guru dan Murid di Kabupaten Bengkulu .....	II-29
Tabel 2.25	Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Bidang Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tahun 2010-2014 .....	II-30
Tabel 2.26	Aspek Pelayanan Umum Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tahun 2010-2014 .....	II-34
Tabel 2.27	Aspek Pelayanan Umum Bidang Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkulu Tahun 2010-2014 .....	II-34
Tabel 2.28	Perkembangan Koperasi Unit Desa di Kabupaten Bengkulu Tahun 2010-2014.....	II-35
Tabel 2.29	Jumlah Koperasi Primer di Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 .....	II-36
Tabel 2.30	Kondisi Penanaman Modal di Kabupaten Bengkulu Tahun 2014 .....	II-36
Tabel 2.31	Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMDN di Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2014 .....	II-37
Tabel 2.32	Rencana dan Realisasi Kumulatif Investasi PMA di Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2014 ....	II-37
Tabel 2.33	Panjang Jalan di Kabupaten Bengkulu Menurut Status Pengawasan.....	II-38
Tabel 2.34	Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Bengkulu Menurut Jenis Permukaan Tahun 2010-2014.....	II-39
Tabel 2.35	Panjang Jalan di Kabupaten Bengkulu Menurut Kondisi Jalan dan Status Pengawasan Tahun 2010-2014.....	II-39
Tabel 2.36	Aspek Pelayanan Umum di Bidang Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tahun 2010-2014.....	II-40
Tabel 2.37	Data Rumah Ibadah di Kabupaten Bengkulu.....	II-40
Tabel 2.38	Kondisi Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Bengkulu 2011-2015.....	II-41
Tabel 2.39	Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Bengkulu.....	II-42

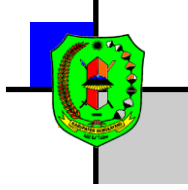


Tabel 2.40	Aspek Pelayanan Umum Bidang Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014.....	II-43
Tabel 2.41	Aspek Pelayanan Urusan Pilihan Bidang Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014.....	II-43
Tabel 2.42	Realisasi Produksi Tanaman Padi dan Jagung di Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014.....	II-46
Tabel 2.43	Realisasi Produksi Perkebunan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014.....	II-47
Tabel 2.44	Realisasi Produksi Ternak (Ton) di Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014.....	II-48
Tabel 2.45	Realisasi Produksi Perikanan di Kabupaten Bengkayang Selama Tahun 2011-2014.....	II-49
Tabel 2.46	Aspek Urusan Pilihan Bidang Kehutanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014.....	II-50
Tabel 2.47	Luas Hutan di Kabupaten Bengkayang Menurut Status Hutan Tahun 2014.....	II-50
Tabel 2.48	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Kecil Formal di Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014.....	II-53
Tabel 2.49	Kontribusi Sektor Energi ESDM Terhadap PDRB ADHK Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014.....	II-53
Tabel 2.50	Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014.....	II-54
Tabel 2.51	Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014.....	II-55
Tabel 2.52	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014.....	II-57
Tabel 2.53	Kawasan Lindung di Kabupaten Bengkayang Berdasarkan RTRW Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014.....	II-57
Tabel 2.54	Produksi Air Bersih PDAM Bengkayang Menurut Jenis Pelanggan Tahun 2014.....	II-59
Tabel 2.55	Jumlah Pelanggan Pengguna Listrik di Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014.....	II-61
Tabel 2.56	Banyaknya Produksi Terjual dan Nilai Penjualan Listrik Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014.....	II-61
Tabel 2.57	Angka Kriminalitas yang DiLaporkan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2013-2014.....	II-62
Tabel 2.58	Rasio Ketergantungan Tahun 2010-2014.....	II-64
Tabel 3.1	Perkembangan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2011-2015.....	III-3
Tabel 3.2	Target Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-5
Tabel 3.3	Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-6

Tabel 3.4	Rata-rata Kontribusi Pendapatan Kabupaten Bengkulu Terhadap Nasional Tahun 2011-2014.....	III-7
Tabel 3.5	Target dan Realisasi PAD Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-8
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Pajak Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-9
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Retribusi Pajak Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-10
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-11
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-12
Tabel 3.10	Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-13
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-13
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-14
Tabel 3.13	Target dan Realisasi dana Alokasi Umum Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-14
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-15
Tabel 3.15	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-16
Tabel 3.16	Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-16
Tabel 3.17	Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-17
Tabel 3.18	Rincian dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-18
Tabel 3.19	Target dan Realisasi Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Bengkulu 2011-2015.....	III-18
Tabel 3.20	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2015.....	III-19
Tabel 3.21	Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-20

Tabel 3.22	Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2014.....	III-20
Tabel 3.23	Alokasi dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-21
Tabel 3.24	Alokasi dan Realisasi Rincian Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bengkulu 2012-2015.....	III-22
Tabel 3.25	Alokasi dan Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-22
Tabel 3.26	Alokasi dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-23
Tabel 3.27	Alokasi dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-23
Tabel 3.28	Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-24
Tabel 3.29	Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-24
Tabel 3.30	Alokasi dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-25
Tabel 3.31	Alokasi dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-25
Tabel 3.32	Alokasi dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-26
Tabel 3.33	Perbandingan Alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-26
Tabel 3.34	Struktur Belanja Kabupaten Bengkulu Terhadap Nasional Tahun 2011-2015 (%).....	III-27
Tabel 3.35	Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-29
Tabel 3.36	Analisa Rasio Keuangan Kabupaten Bengkulu.....	III-36
Tabel 3.37	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015.....	III-37
Tabel 3.38	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2011-2015.....	III-38
Tabel 3.39	Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2014.....	III-39
Tabel 3.40	Komposisi SILPA Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2014.....	III-40
Tabel 3.41	Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2015.....	III-40

Tabel 3.42	Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Operasional (Rutin) Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2012-2015.....	III-41
Tabel 3.43	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020 (Milyar Rp).....	III-43
Tabel 3.44	Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib, Mengikat dan Prioritas Utama, Serta Pengeluaran Rutin Operasional (Rutin) Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-44
Table 3.45	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016-2021.....	III-48
Tabel 3.46	Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun Anggaran 2016-2021 (Juta Rp).....	III-49
Tabel 3.47	Proyeksi Struktur APBD Periode 2016-2021 Berdasarkan Prioritas.....	III-50
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 1.....	VI-6
Tabel 6.2	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 2.....	VI-13
Tabel 6.3	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 3.....	VI-16
Tabel 6.4	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 4.....	VI-18
Tabel 6.5	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 5.....	VI-20
Tabel 6.6	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 6.....	VI-23
Tabel 6.7	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 7.....	VI-26
Tabel 6.8	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 8.....	VI-27
Tabel 7.1	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi Satu.....	VII-8
Tabel 7.2	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi Dua.....	VII-21
Tabel 7.3	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi Tiga.....	VII-31
Tabel 7.4	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi Empat.....	VII-34
Tabel 7.5	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi Lima.....	VII-39
Tabel 7.6	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi Enam.....	VII-42
Tabel 7.7	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi Tujuh.....	VII-52
Tabel 7.8	Strategi dan Arah Kebijakan di Misi Delapan.....	VII-56
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan.....	VIII-2
Tabel 9.1	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021.....	IX-2
Tabel 9.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah di Kabupaten Bengkulu 2016-2021.....	IX-2



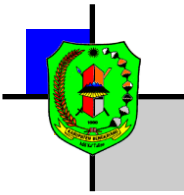
## DAFTAR GRAFIK

	<b>Halaman</b>
Grafik 2.1 Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014.....	II-22
Grafik 2.2 Grafik Perkembangan Posyandu Kabupaten Bengkayang Periode Tahun 2010-2014.....	II-31
Grafik 2.3 Produksi Padi 124.157 Ton Kabupaten Bengkayang Tahun 2014.....	II-45
Grafik 2.4 Laju Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran dan PDRB Kabupaten Bengkayang Tahun 2011-2014.....	II-51

1

Pendahuluan  
Pendahuluan





## *BAB I*

# *PENDAHULUAN*

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJM ini adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 (dua puluh) tahunan.

Dalam menyusun RPJM ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala/Wakil Kepala Daerah terpilih, yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dan dalam Sidang Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung.

RPJM Kabupaten Bengkayang sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional/Provinsi. RPJM Daerah berisi informasi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak. Keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, peran dan fungsi daerah sebagaimana telah disepakati, pandangan Kepala Daerah tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Daerah yang disusun dalam mencapai visi Kepala Daerah terpilih.

Pembangunan yang sudah berjalan masih menemui banyak kendala yang sangat mendasar baik di bidang politik, hukum dan pemerintahan, sosial kemasyarakatan serta pembangunan daerah khusus. Permasalahan di bidang politik meliputi ideologi yang mudah terpengaruh; politik masih relatif rendah dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahan di bidang hukum dan pemerintahan meliputi belum optimalnya sistem otonomi daerah; masih lemahnya pendidikan/pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat; masih lemahnya dukungan untuk penanganan bidang hukum dan pemerintahan; belum optimalnya pelayanan publik baik dari segi kuantitas maupun kualitas; serta masih lemahnya penanganan masalah-masalah perbatasan di semua level. Permasalahan di bidang ekonomi meliputi kurangnya dukungan dalam bentuk peraturan daerah yang mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi; kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terutama masyarakat kecil dalam mengembangkan cara kerja dengan menggunakan teknologi tepat guna; rendahnya tingkat ekonomi dibandingkan negara tetangga (Serawak) khususnya ekonomi masyarakat perbatasan; serta belum optimalnya pemanfaatan potensi-potensi SDA untuk kemakmuran rakyat. Permasalahan dibidang sosial kemasyarakatan meliputi masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup; masih rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), masih rendah dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia; masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran dan buta huruf; masih terbatasnya fasilitas pendidikan yang berkualitas serta kurangnya guru dalam bidang studi sesuai kebutuhan setiap jenjang pendidikan; Selain itu krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan makin mahalnya biaya pengobatan yang dikhawatirkan akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan permasalahan pada pembangunan daerah khusus meliputi masih minimnya sarana dan prasarana baik transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, kelistrikan/penerangan, air bersih serta infrastruktur di wilayah terisolir, perbatasan, pedalaman, kepulauan dan pesisir; adanya anggapan sulitnya memindahkan faktor-faktor produksi (manusia, bahan baku,

uang, teknologi dan mesin) ke daerah tertinggal dan terisolir khususnya wilayah perbatasan akibat terbatasnya infrastruktur tersebut; belum tersusunnya suatu kebijakan nasional yang memuat arah, pendekatan dan strategi pengembangan daerah tertinggal yang bersifat menyeluruh yang mengintegrasikan fungsi dan peran seluruh stakeholder daerah tertinggal yang berada di wilayah perbatasan ditingkat pusat maupun daerah secara terpadu; serta belum optimalnya identifikasi dan inventarisasi lahan potensial bagi pengembangan pertanian dan air baku

Berkenaan dengan kondisi nyata tersebut maka pemerintah Kabupaten Bengkayang memerlukan suatu visi yang dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang di masa yang akan datang, dapat memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, dapat menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis, memiliki orientasi terhadap masa depan, dapat menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam organisasi serta dapat menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah.

Dalam upaya mendapatkan RPJM Daerah yang dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan maka penyusunannya perlu dilakukan secara komprehensif dan lintas pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan.

## **I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Penyusunan RPJM Kabupaten Bengkayang ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2015 tentang Luas Wilayah dan Batas Administrasi;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
33. Peraturan Daerah Provinsi kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang RPJPD Provinsi kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.

### **I.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkayang merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, penyusunan RPJMD merupakan penjabaran lima tahunan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025.

Dokumen RPJMD periode 2016-2021 merupakan kelanjutan dari RPJMD sebelumnya dan mempersiapkan landasan bagi RPJMD berikutnya untuk mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Bengkayang pada tahun 2025.

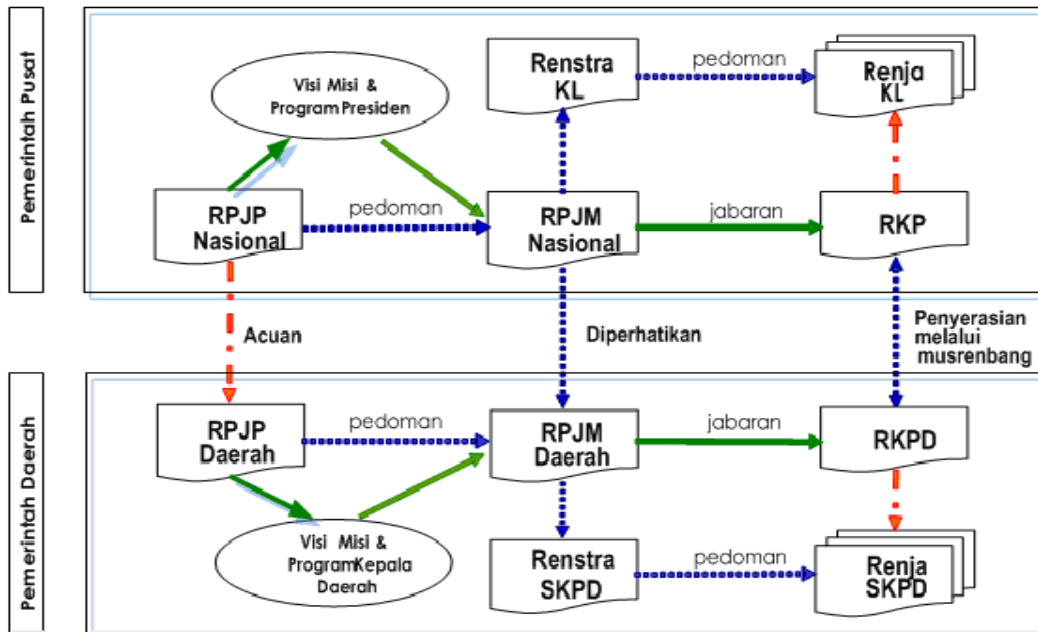
Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 agar terwujud sinergi antara kebijakan, strategi, program dan kegiatan didalam RPJMD ini. Selain itu, penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang yang memberikan acuan mengenai pola dan struktur ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan.

Selanjutnya, RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indikasi program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam jangka waktu lima tahun. Dalam rangka mengefektifkan dampak kebijakan pembangunan dalam RPJMD ini di Kabupaten Bengkayang, diharapkan kepada SKPD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang untuk menjadikan RPJMD Kabupaten sebagai acuan guna menyusun dan/atau mengevaluasi Renstra SKPD.

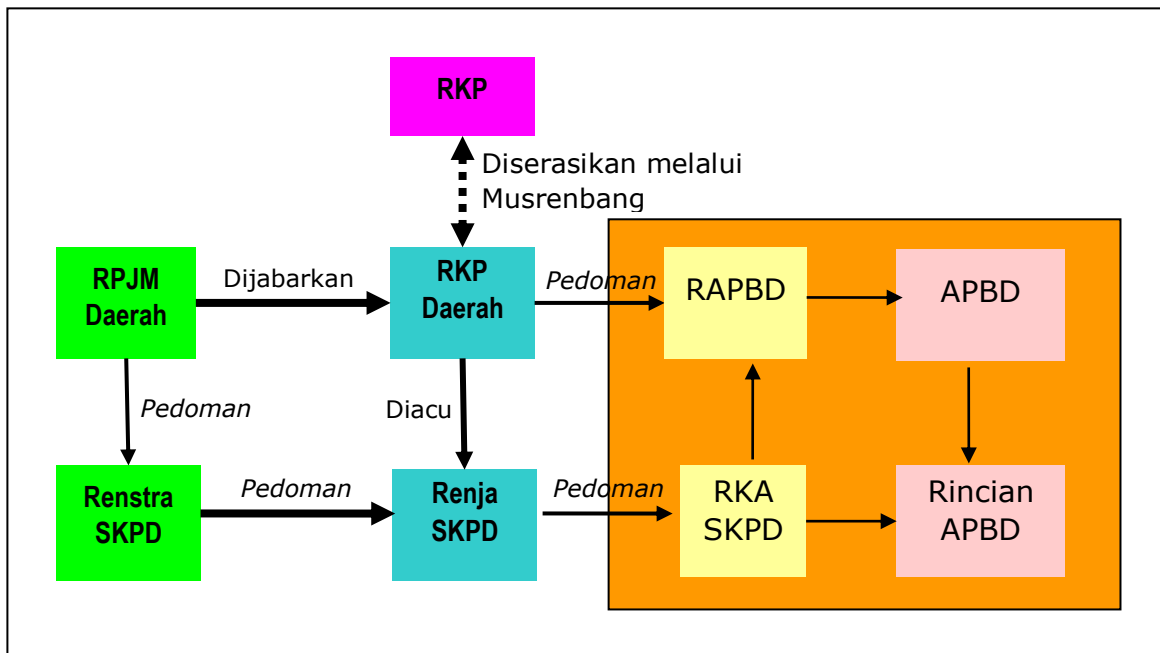
Setiap tahun dalam periode pelaksanaannya, RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di dalam RKPD inilah rencana program dan kegiatan indikatif RPJMD dijabarkan menurut urusan dan fungsi, dilengkapi dengan indikator keluaran, alokasi pendanaan serta lokasi pelaksanaan kegiatan dan menjadi

dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Alur Pikir yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut:



Alur Pikir integrasi RPJM Kabupaten Bengkulu Tahun 2016–2021 dengan proses penganggaran adalah sebagai berikut:



## **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

### **BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Analisis isu-isu strategis merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan pernyataan visi kepala daerah dan menjelaskan pernyataan misi sebagai penjabaran dari visi selain itu, juga disajikan uraian mengenai pernyataan tujuan dan sasaran serta matrik yang menggambarkan keterkaitan elemen-elemen misi, tujuan dan sasaran.

## **BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Penyajian strategi dan arah kebijakan dibuat menurut misi dan memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

## **BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.

## **BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN**

Dalam bagian ini program-program prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.

## **BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

## **BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN**

Pada bab ini diuraikan pedoman transisi untuk menjembatani RPJMD Tahun 2016-2021 dengan RPJMD periode sebelumnya dan RPJMD yang akan disusun pada periode berikutnya. Selain itu, juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan untuk diperhatikan oleh para pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Bengkayang.

## **I.5 MAKSUD DAN TUJUAN**

RPJMD Kabupaten Bengkayang 2016 – 2021 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan–pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang.

Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJM Kabupaten Bengkayang ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD setempat dan sumber pembiayaan APBN.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJM Kabupaten Bengkayang tahun 2016-2021 adalah :

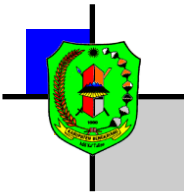
1. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.



2. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan rencana kinerja satuan kerja perangkat daerah.
3. Membangun partisipasi stakeholder Kabupaten Bengkayang dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Bengkayang.

2

Gambaran Umum  
Gambaran Umum  
Kondisi Daerah  
Kondisi Daerah



## BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1 ASPEK GEOGRAFIS, DEMOGRAFI DAN POTENSI DAERAH

### 2.1.1 Aspek Geografis

Kabupaten Bengkayang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di sebelah Utara Provinsi Kalimantan Barat secara geografis. Kabupaten Bengkayang terletak di 0° 33' 00" Lintang Utara sampai 1° 30' 00" Lintang Utara dan 108° 39' 00" Bujur Timur sampai 110° 10' 00" Bujur Timur.

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Sambas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pontianak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Kabupaten Singkawang
- Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak

Kabupaten Bengkayang merupakan bagian Utara dari Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 5.396,30 Km<sup>2</sup> atau sekitar 3,68% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Jagoi Babang Merupakan Kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 Km<sup>2</sup> atau sekitar 12,14% dari luas wilayah Kabupaten Bengkayang. Sedangkan kecamatan dengan cakupan wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 Km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 0,86% dari total wilayah Kabupaten Bengkayang.

Terbentuk dan pemekaran kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bengkayang berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Suti Semarang.
2. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Capkala
3. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Lumar
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Betung
6. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Bumi emas dan Kelurahan Sebalu.
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Sungai Raya dimekarkan menjadi Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Sanggau Ledo dimekarkan menjadi Kecamatan Tujuh Belas.
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Samalantan dimekarkan menjadi Kecamatan Lembah Bawang.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding.

Rincian 17 (tujuh belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu disajikan pada Tabel Berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Desa, Dusun, dan Luas Wilayah Untuk Setiap Kecamatan di**  
**Kabupaten Bengkayang Tahun 2015**

No.	Kecamatan	Jumlah			Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
		Kelurahan	Desa	Dusun	
1	Sungai Raya		5	19	75,85
2	Capkala		6	11	46,35
3	Samalantan		7	28	420,50
4	Monterado		11	29	291,00
5	Bengkayang	2	4	9	167,04
6	Teriak		18	29	231,51
7	Sungai Betung		4	13	205,95
8	Ledo		12	32	481,75
9	Suti Semarang		8	13	280,84
10	Lumar		5	14	275,21
11	Sanggau Ledo		5	17	392,50
12	Seluas		6	24	506,50
13	Jagoi Babang		6	14	655,00
14	Siding		8	21	563,30
15	Tujuh Belas		4	12	221,00
16	Sungai Raya Kepulauan		5	19	394,00
17	Lembah Bawang		8	16	188,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>122</b>	<b>320</b>	<b>5.396,30</b>

Sumber: Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2016

Secara topografi wilayah Kabupaten Bengkayang memiliki dua kondisi alam, yaitu:

1. Pesisir pantai yang termasuk dalam wilayah administrasi kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan.
2. Daratan dan Perbukitan yang terdiri dari Kecamatan Capkala, Samalantan, Monterado, Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti Semarang, Lumar, Sanggau Ledo, Seluas, Jagoi Babang, dan Siding.

Terdapat tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) Utama yang melintasi wilayah kabupaten Bengkayang, yaitu DAS Sambas dengan luas 722.500 Ha, DAS Sungai Raya dengan luas 50.00 Ha, dan DAS Sungai Duri dengan Luas 24.375 Ha.

Sedangkan dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Bengkayang adalah jenis tanah Podsolik merah kuning, yaitu sebesar 322.347 Ha dan yang paling kecil adalah jenis OGH, yaitu hanya sekitar 6.700 Ha.

Kabupaten Bengkayang pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur udara rata-rata perbulan berkisar antara 22,9°C sampai 31,05°C, kelembaban nisbi rata-rata perbulan sekitar 86%, intensitas penyinaran matahari adalah 38%. Curah hujan yang cukup tinggi pada bulan September sampai bulan Januari dan curah hujan yang rendah antara bulan Juni sampai bulan Agustus.

Kabupaten Bengkayang juga memiliki wilayah pesisir dan wilayah kepulauan, yakni sebanyak 12 buah pulau yang secara administrasi terdapat di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Secara detailnya data mengenai kepulauan tersebut dapat dilihat pada Tabel Berikut:

**Tabel 2.2**  
**Nama-nama Pulau dan Luas Menurut Desa di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang**

<b>Desa</b>	<b>Nama Pulau</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Jarak (Km)</b>	<b>Keterangan</b>
Sungai Besar	Penatah Besar	259	28,00	Berpenghuni
	Penatah Kecil	81	22,00	Berpenghuni
	Seluas	38	33,00	Tidak Berpenghuni
	Semesak	58	0,80	Tidak Berpenghuni
	Kera	22	0,80	Tidak Berpenghuni
	Baru	48	42,00	Berpenghuni
	Batu Rakit	13	31,00	Tidak Berpenghuni
	Tempurung	30	0,80	Tidak Berpenghuni
Karimunting	Kabung	341	20,0	Berpenghuni
	Batu Payung	21	1,00	Tidak Berpenghuni
P. Lumukutan	Lumukutan	1.235	38,00	Berpenghuni
	Randayan	27	38,00	Berpenghuni

Sumber: Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2016

Berdasarkan deskripsi kondisi geografis Kabupaten Bengkayang di atas, maka potensi yang dimiliki Kabupaten Bengkayang sangat besar



terutama yang berkaitan pada pengembangan sektor agroforestry (pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan) dan sektor pariwisata.

### 2.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkayang, jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 238.610 Jiwa yang tersebar pada 17 Kecamatan. Jumlah tersebut terbagi atas 123.874 jiwa penduduk Laki-laki dan 114.736 Jiwa penduduk perempuan, dengan rasio perbandingan penduduk berjenis kelamin Laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yaitu dengan angka rasio sebesar 108. Adapun secara lengkap informasi mengenai jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Rasio Tahun 2015**

No.	Kecamatan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)	Rasio
1	2	3	4	5	6
1	Sungai Raya	9475	9720	19195	97
2	Capkala	4359	3973	8332	110
3	Sungai Raya Kepulauan	11291	11109	22400	102
4	Samalantan	11025	9888	20913	111
5	Monterado	13675	12815	26490	107
6	Lembah Bawang	3209	2737	5946	117
7	Bengkayang	15092	13889	28981	109
8	Teriak	7181	6631	13812	108
9	Sungai Betung	5153	4601	9754	112
10	Ledo	5577	5434	11011	103
11	Suti Semarang	2576	2377	4953	108
12	Lumar	3255	3037	6292	107
13	Sanggau Ledo	6247	5968	12215	105
14	Tujuh Belas	6274	5832	12106	108

15	Seluas	10862	9294	20156	117
16	Jagoi Babang	5341	4250	9591	126
17	Siding	3282	3181	6463	103
<b>Jumlah</b>		<b>123.874</b>	<b>114.736</b>	<b>238.610</b>	<b>108</b>

Sumber: Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2016

Kecamatan Bengkayang merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi yaitu sebanyak 28.981 Jiwa, sedangkan daerah yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Suti Semarang yaitu hanya sebanyak 4.953 Jiwa. Meskipun Kecamatan Bengkayang memiliki jumlah penduduk terbanyak tetapi yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Sungai Raya yaitu mencapai 253 Jiwa per Km<sup>2</sup>. Hal ini menjelaskan bahwa Kecamatan Sungai Raya memiliki luasan yang relatif kecil, sehingga dengan jumlah penduduk yang tidak begitu besar telah berpengaruh yang signifikan pada kepadatan penduduk.

Terdapat 4 Kecamatan yang memiliki peluang menjadi daerah yang padat penduduknya jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk yang merupakan hasil dari sensus penduduk periode 2000-2010, yaitu Kecamatan Bengkayang, Samalantan, Seluas, dan Jagoi Babang. Empat Kecamatan tersebut memiliki tingkat laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dibandingkan 13 kecamatan lainnya, yaitu mencapai 3%. Kecamatan Bengkayang adalah daerah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk paling tinggi, yaitu mencapai 4,56%, hal ini wajar mengingat kecamatan tersebut merupakan ibu Kabupaten dan pusat perekonomian Kabupaten Bengkayang. Deskripsi secara jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Luas Wilayah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk**  
**Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bengkayang**  
**pada Tahun 2015**

No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan 2000-2010 (%)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km <sup>2</sup> )
1	2	3	4	5
1	Sungai Raya	0,69	75,85	253
2	Capkala	1,93	46,35	180
3	Sungai Raya Kepulauan	1,25	394,00	57
4	Samalantan	3,00	420,50	50
5	Monterado	1,56	291,00	91
6	Lembah Bawang	2,99	188,00	32
7	Bengkayang	4,56	167,04	173
8	Teriak	2,13	231,51	60
9	Sungai Betung	1,181	205,95	47
10	Ledo	-0,57	481,75	23
11	Suti Semarang	1,53	280,84	18
12	Lumar	1,75	275,21	23
13	Sanggau Ledo	1,73	392,50	31
14	Tujuh Belas	1,47	221,00	55
15	Seluas	3,79	506,50	40
16	Jagoi Babang	3,31	655,00	15
17	Siding	0,39	563,30	11
<b>Jumlah</b>		<b>2,01</b>	<b>5.396,30</b>	<b>44</b>

Sumber: Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2016

### 2.1.3 Potensi Daerah

#### 1. Potensi Pertanian

Potensi pertanian Kabupaten Bengkayang sangat bervariasi dan tersebar pada seluruh kecamatan. Sektor pertanian tidak saja merupakan memiliki potensi yang paling besar tetapi juga merupakan

sektor yang menjadi andalan bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkayang sebagai mata pencarian utama. Dengan demikian pengembangan sektor pertanian merupakan hal yang sangat esensi dalam peningkatan perekonomian daerah secara keseluruhan. Adapun hal yang sangat berperan adalah ketersediaan lahan yang cukup besar dalam mengembangkan sektor pertanian, terutama pada beberapa kecamatan yang memiliki jenis tanah yang tergolong sangat subur, diantaranya adalah yang tersebar pada kecamatan Ledo, Sanggau Ledo, Seluas, dan Kecamatan Tujuh Belas.

Komoditas unggulan Kabupaten Bengkayang didominasi oleh beberapa tanaman semusim jenis seperti Jagung, Padi, Ubi Kayu, dan beberapa jenis tanaman hortikultura (sayur-sayuran) yang tersebar pada hampir semua kecamatan. Berkaitan dengan pemasaran produk sektor pertanian, meskipun masih pada tahap pasar tradisional namun permintaan pada pasar yang terdapat di wilayah perbatasan (Negara Malaysia) sangat tinggi dan hal ini merupakan peluang besar dalam pengelolaan pemasaran produk pertanian di masa yang akan datang. Khusus untuk komoditas Jagung, Kecamatan Sanggau Ledo dan Tujuh Belas merupakan dua daerah yang memproduksi paling besar komoditas tersebut, bahkan untuk regional Kalimantan Kabupaten Bengkayang merupakan daerah terbesar menghasilkan komoditas jagung, yang arahnya menjadi bahan baku dalam memproduksi pakan ternak.

## 2. Potensi Peternakan

Potensi pengembangan peternakan di wilayah Kabupaten Bengkayang sangat besar mengingat lokasi yang tersedia cukup besar. Ketersediaan dan penyediaan habitat untuk penanaman pakan ternak juga memiliki potensi yang cukup besar serta kesesuaian iklim yang tidak bermasalah untuk syarat hidup dari beberapa jenis ternak yang akan dikembangkan. Hal-hal negatif berkaitan dengan serangan penyakit ternak yang berpengaruh pada produksi dan pemasaran juga belum terjadi di wilayah Kabupaten Bengkayang. Kondisi ini tentu saja merupakan keunggulan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkayang untuk berpeluang dalam mengembangkan sektor

peternakan baik pada bentuk usahatani maupun dalam bentuk investasi.

### 3. Potensi Perkebunan

Sebagian besar dari PDRB bidang pertanian secara umum di Kabupaten Bengkayang adalah berasal dari perkebunan. Dengan ketersediaan lahan yang cukup luas yang belum dimanfaatkan peluang pengembangan untuk sektor perkebunan masih sangat terbuka lebar. Sampai saat ini perkebunan yang menjadi primadona di Kabupaten Bengkayang adalah komoditas Kelapa Sawir baik dalam bentuk usaha rakyat maupun perkebunan skala besar yang dikelola oleh investor melalui Hak Guna Usaha (HGU).

Selain kelapa sawit, komoditas perkebunan yang berpeluang besar dalam pengembangan melalui ekstensifikasi maupun pembudidayaan yang intensif adalah lada, kakao, dan karet. Ketiga komoditas tersebut merupakan komoditas unggulan yang mampu berperan dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan kondisi tersebut peranan kelembagaan baik Pemerintah maupun non Pemerintah sangat penting dalam usaha pendampingan untuk mengoptimalkan dalam pengelolaan usahatani yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang melalui sektor perkebunan.

### 4. Potensi Kehutanan

Potensi kehutanan Kabupaten Bengkayang masih sangat besar mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkayang masih tertutupi oleh kawasan hutan, baik yang masih primer maupun yang sekunder. Namun demikian potensi tersebut tentunya tidak mengarah pada pemanfaatan hasil hutan kayu mengingat adanya pertimbangan kelestarian hutan dan alam. Potensi hutan tidak hanya dilihat dari hasil yang berasal dari kayu saja tetapi banyak hasil hutan nonkayu dan atau hasil yang secara tidak langsung dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang pada khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya. Terdapat dua kawasan hutan yang besar dan memiliki status taman nasional dan hutan lindung, yaitu kawasan

hutan Gunung Bawang dan Gunung Niut yang masing-masing terdapat di Kecamatan Lembah Bawang dan Kecamatan Tujuh Belas.

Fungsi hutan sebagai kawasan penyangga tentunya perlu dilestarikan yang manfaatnya tidak saja menjaga kondisi alam tetapi juga memberikan manfaat secara tidak langsung yang sangat besar, yaitu menciptakan sumber air bersih yang berlimpah dan terciptanya potensi wisata alam yang sangat menjanjikan jika dalam pengelolaannya dapat dilakukan secara optimal. Manfaat lain yang diperoleh dari potensi hutan yang besar adalah tersedianya beberapa hasil hutan non kayu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan dikelola untuk diproduksi pada skala besar dan industri, antara lain hasil rotan, kulit kayu, tanaman obat-obatan, dan spesies lain yang cukup banyak kegunaannya. Tentunya hal ini akan tercipta jika pengelolaan yang baik selalu diimbangi dengan kegiatan kajian dan penelitian yang fokus agar terciptanya pemanfaatan potensi hutan yang lestari dan berkelanjutan.

#### 5. Potensi Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Bengkulu cukup besar terutama di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang merupakan wilayah pesisir Kabupaten Bengkulu. Potensi perikanan laut baik berupa tangkapan maupun tambak cukup menjanjikan sepanjang tahun dari dua wilayah tersebut. Namun demikian di kecamatan lainnya juga memiliki potensi perikanan darat yang cukup menjanjikan mengingat semua wilayah kecamatan di Kabupaten Bengkulu dilewati oleh (Daerah Aliran Sungai) DAS besar dan kecil yang merupakan indikasi peluang pengembangan sektor perikanan darat (ikan air tawar) dengan cara tambak ikan.

#### 6. Potensi Perindustrian

Potensi agroforestry yang sangat menjanjikan tentunya memberikan peluang juga pada pengembangan sektor industri. Hal ini wajar mengingat ketersediaan bahan baku yang memiliki potensi dalam pengembangannya dan biaya produksi yang relatif kecil sebagai akibat dari efisiensi pembiayaan dari faktor transportasi tentunya menjadi pertimbangan yang positif untuk pengembangan pada sektor industri,

terutama yang menggunakan bahan baku dari komoditas pertanian secara umum.

Fasilitasi dan pengembangan sumberdaya manusia sebagai aktor utama dari pelaku sektor industri tentunya menjadi faktor utama yang perlu dipersiapkan, karena lambannya kegiatan industri di Kabupaten Bengkayang disebabkan oleh faktor industri yang berasal dari tenaga kerja, yaitu pengetahuan manajemen dan tingkat keahlian pada suatu produk industri. Secara ekonomi makro menjelaskan bahwa perkembangan sektor industri akan mempercepat perkembangan ekonomi suatu daerah jika dibandingkan eksploitasi sumberdaya alam, karena nilai tambah yang diperoleh dari industri yang merupakan kegiatan *off farm* relatif lebih tinggi dibandingkan kegiatan produksi lapangan dari segala sektor yang merupakan kegiatan *on farm*.

#### 7. Potensi Pertambangan

Kegiatan sektor pertambangan di Kabupaten Bengkayang sebagian besar masih dilakukan secara tradisional oleh masyarakat. Namun demikian hal ini menjadi indikator bahwa pertambangan merupakan sektor yang cukup berpotensi di Kabupaten Bengkayang. Hampir seluruh Kabupaten Bengkayang memiliki potensi bahan tambang emas yang tersebar di berbagai daerah, namun hanya sedikit perusahaan dan investor yang aktif dalam usaha pertambangan tersebut. Bahan tambang lainnya yang memiliki potensi besar di Kabupaten Bengkayang antara lain adalah Kaolin dan Mangan, disamping beberapa jenis bahan tambang lainnya yang tidak terlalu berpotensi sesuai data geologi dan BPS Kabupaten Bengkayang.

#### 8. Potensi Pariwisata

Sebagai wilayah yang cukup besar memiliki kawasan hutan dan garis pantai yang cukup panjang, Kabupaten Bengkayang memiliki potensi sektor pariwisata yang sangat menjanjikan terutama untuk wisata alam (Ecotourism). Kawasan gunung, air terjun, pantai, dan hutan primer yang menjadi pusat untuk wisata dan penelitian merupakan aset besar yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkayang. Namun demikian investasi yang diperlukan akan sangat besar untuk menjadikan potensi tersebut berguna bagi kesejahteraan masyarakat

dan bersifat ekonomis bagi daerah. Untuk itu diperlukan perencanaan yang terpadu, manajemen pengelolaan yang optimal, penyediaan fasilitas (terutama sarana transportasi) serta investasi yang cukup besar untuk menjadikan potensi tersebut dapat termanfaatkan dengan baik dengan tetap memperhatikan asas kelestarian dan sustainability.

## 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Gambaran kondisi aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkayang diuraikan dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan fokus kesejahteraan sosial.

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan secara umum tidak dapat hanya diukur dari persoalan ekonomi namun pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dari dampak kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang.

**Tabel 2.5**  
**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**  
**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten**  
**Bengkayang 2011-2015**

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan PDRB (%) - ADHK	5,09	5,87	5,90	4,02	3,96
2	PDRB (Rp. Juta) - ADHK - ADHB	3.834.739,5 4.060.051,1	4.059.787,0 4.548.960,3	4.299.252,6 5.061.276,2	4.471.874,3 5.565.536,8	4.649.241,7 6.153.043,1



3	Angka Pengeluaran per kapita (Rp.ribu)					
	- Makanan	393.539	361.426	398.376	461.018	563.454
	- Non Makanan	268.261	300.615	304.694	305.901	390.452
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,98	68,50	69,38	64,40	64,65
5	Angka Kemiskinan	7,25	6,74	8,01	7,20	n/a
6	Angka Pengangguran	3,32	3,30	2,30	3,74	3,15

Sumber : Kabupaten Bengkulu Dalam Angka 2016

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi kinerja pembangunan terkait dengan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Bengkulu dalam kurun waktu tahun 2011 secara umum menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Angka pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2011 dan 2012 tumbuh sebesar 5,09% dan 5,87% sebagai imbas kondisi eksternal yaitu krisis ekonomi global mulai menunjukkan perkembangan positif pada tahun 2013 yaitu sebesar 5,90%. Selanjutnya, pada tahun 2014 dan tahun 2015 tumbuh sebesar 4,02% dan 3,96% sehingga rata-rata pertumbuhan selama lima tahun adalah sebesar 4,97%.

Secara sektoral semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut dialami oleh sektor informasi dan telekomunikasi 8,22%, sektor konstruksi yaitu 7,20% dan sektor transportasi dan pergudangan 7,19%. Sektor-sektor yang memiliki peranan cukup besar sebagai penggerak utama (*primemover*) perekonomian Kabupaten Bengkulu adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan pertumbuhan adalah 32,22%, selanjutnya sektor perdagangan dan eceran sebesar 16,15% dan sektor konstruksi sebesar 11,11%.

**Tabel 2.6**  
**Pertumbuhan Sektoral Ekonomi Kabupaten Bengkulu**  
**Tahun 2011-2015**

No	Sektor	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	5	6	7	8	9
1.	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	6,24	5,85	6,13	0,81	1,24
2.	Pertambangan & Penggalian	4,37	5,91	5,79	5,81	4,64
3.	Industri Pengolahan	2,73	3,19	4,18	3,58	3,04
4.	Listrik dan Gas	5,61	7,80	2,85	7,07	4,02
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,70	3,09	5,82	4,98	5,27
6.	Konstruksi	7,86	8,74	7,76	9,32	7,20
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	4,55	5,42	5,81	5,59	5,43
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,62	5,59	5,23	5,78	7,19
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,23	4,18	3,76	4,48	5,22
10.	Informasi dan Komunikasi	10,45	10,10	10,70	9,25	8,22
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,91	9,66	11,87	8,70	5,41
12.	Real Estat	4,05	4,63	8,82	5,74	5,04
13.	Jasa Perusahaan	4,69	5,67	5,76	3,73	5,50
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,79	4,96	-0,86	3,28	6,02
15.	Jasa Pendidikan /Education	4,71	6,15	4,90	3,30	3,40
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,28	5,74	5,46	4,00	3,70
17.	Jasa Lainnya	4,52	4,72	1,25	6,84	6,52
	<b>Pertumbuhan</b>	<b>5,09</b>	<b>5,87</b>	<b>5,90</b>	<b>4,02</b>	<b>3,96</b>

Sumber : Kabupaten Bengkulu Dalam Angka 2016

**Tabel 2.7**  
**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen)**  
**di Kabupaten Bengkulu**  
**Tahun 2011-2015**

No	Sektor	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	35,78	35,23	34,49	33,15	32,22
2.	Pertambangan & Penggalian	2,79	2,82	2,87	3,02	3,14
3.	Industri Pengolahan	10,87	10,25	10,04	9,88	9,90
4.	Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
6.	Konstruksi	8,64	9,21	9,81	10,60	11,11
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	16,61	16,17	16,02	16,32	16,15
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,92	1,89	1,89	1,95	2,06
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,05	1,98	2,00	2,05	2,14
10.	Informasi dan Komunikasi	4,26	4,21	4,28	4,29	4,28
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,41	2,60	2,70	2,77	2,76
12.	Real Estat	3,39	3,44	3,55	3,63	3,62
13.	Jasa Perusahaan	0,35	0,36	0,37	0,37	0,37
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,23	6,26	6,40	6,45	6,71
15.	Jasa Pendidikan /Education	2,90	2,80	2,88	2,86	2,83
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,87	1,88	1,83	1,78	1,81
17.	Jasa Lainnya	0,85	0,82	0,81	0,81	0,82
	Pertumbuhan	100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Bengkulu Dalam Angka 2016

Selama kurun waktu 2009-2015, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling besar memberikan sumbangan bagi pembentukan PDRB Bengkulu namun peranannya terus berkurang, kondisi ini dapat menjadi indikasi terjadinya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Bengkulu.

Tahun 2015 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan PDRB sebesar 32,22%. Hampir seluruh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, peternakan, kehutanan dan perikanan peranannya mengecil dibandingkan tahun 2013. Meski demikian, secara umum sektor pertanian masih menjadi tumpuan bagi perekonomian daerah di Kabupaten Bengkayang terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

### **b. PDRB per Kapita**

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Barat, PDRB Kabupaten Bengkayang setiap tahun mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan di atas satu juta rupiah per tahun. Dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan inflasi, maka pengaruh pertumbuhan PDRB per kapita terhadap peningkatan daya beli masyarakat menjadi tidak begitu besar.

**Tabel 2.8**  
**Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kabupaten Bengkayang**  
**Tahun 2011-2015 (Rp)**

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
PDRB Perkapita ADHB	18,44915	20,27103	22,12376	23,89945	25,78703
PDRB Perkapita ADHK	17,42533	18,09118	18,79282	19,20306	19,48469

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2016

### **c. Pengeluaran per Kapita**

Pengeluaran per kapita Kabupaten Bengkayang diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Selama periode 2010-2014, angka pengeluaran per kapita selalu menunjukkan peningkatan meskipun masih kurang dari 1% dan di bawah rata-rata nasional.

**Tabel 2.9**  
**Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bengkayang**  
**Tahun 2011-2015**

<b>Pengeluaran per Kapita Disesuaikan</b>					
<b>(ribu rupiah PPP)</b>					
<b>Tahun</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kab. Bengkayang	606,88	609,85	612,23	8.363	8.489

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2016

### **Indeks Pembangunan Manusia**

Angka capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bengkayang sejak tahun 2011 terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 67,98. Pada tahun 2012, meningkat sedikit menjadi 68,50. Selanjutnya pada tahun 2013 dan 2014 mencapai 69,38 dan 64,40. Dan pada tahun 2015 kembali kembali meningkat menjadi 64,65.

**Tabel 2.10**  
**IPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
IPM Kabupaten Bengkayang	67,98	68,50	69,38	64,40	64,65
IPM Prov. Kalimantan Barat	62,35	63,41	64,30	64,89	65,59
IPM Nasional	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat 2016

#### **d. Angka Kemiskinan dan Kesenjangan**

Kinerja penurunan angka kemiskinan Kabupaten Bengkayang pada periode 2010-2014 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, yaitu dari 7,82% pada tahun 2010 menjadi 7,20% pada tahun 2014. Berdasarkan data BPS, sebagian besar penduduk miskin berada di kawasan pedesaan.

**Tabel 2.11**  
**Angka Kemiskinan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014**

<b>Indikator</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Penduduk Miskin (%)	7,82	7,25	6,74	8,01	7,20
Garis Kemiskinan Rp/kapita/Bulan)	185.843	210.755	239.006	240.704	261.184
Jumlah penduduk miskin (ribu)	16.800	15.785	14.943	18.400	16.870

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat 2010-2015

**Tabel 2.12**  
**Perbandingan Angka Kemiskinan**  
**Kabupaten Bengkayang dengan Provinsi dan Nasional**  
**Tahun 2010-2014**

<b>Uraian</b>	<b>Angka Kemiskinan (%)</b>					<b>RATA- RATA</b>
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Kab.Bengkayang	7,82	7,25	6,74	8,01	7,20	9,25
Kalimantan Barat	9,02	8,48	7,96	8,74	8,07	10,57
Nasional	13,30	12,36	11,66	11,46	11,25	9,71

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat 2015

#### **f. Tingkat Pengangguran**

Angka pengangguran di Kabupaten Bengkayang selama periode 2010-2014 juga menunjukkan penurunan melampaui target yang ditetapkan. Kondisi di kecamatan juga pada umumnya demikian.

Gambaran mengenai kondisi angka pengangguran di Kabupaten Bengkayang dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.13**  
**Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bengkayang**  
**Tahun 2010-2014**

Uraian	Angka Pengangguran				
	(%)				
	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
Kab.Bengkayang	3,21	3,32	3,30	2,30	3,74
Kalimantan Barat	4,62	3,88	3,48	4,03	5,14
Nasional	7,14	6,56	6,13	6,17	5,94

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat 2015

### 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Gambaran mengenai kinerja pembangunan Kabupaten Bengkayang pada fokus kesejahteraan sosial yang dicapai melalui bidang-bidang Pendidikan dan kebudayaan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.14**  
**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**  
**Fokus Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bengkayang 2011-2015**

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1.	Angka melek huruf	88,72	91,57	91,42	92,10	91,42
2.	Angka rata-rata lama sekolah	6,50	6,54	6,55	6,63	5,98
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	114,84	114,25	102,66	107,32	105,74
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	69,96	67,71	59,42	66,47	77,24
5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	46,48	49,13	40,59	42,54	50,90
6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	82,45	95,30	97,03	77,27	88,48
7.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	77,13	80,04	59,42	66,47	49,25
8.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	46,61	42,44	44,27	48,70	45,11
9.	Angka usia harapan hidup	68,97	69,11	72,89	72,89	72,99
10.	Angka kematian Ibu Maternal	47,4	168,2	98,2	90	n/a
11.	Angka kematian bayi	8,54	5,53	7,97	7,82	n/a

12.	Persentase balita gizi buruk	0,12	0,09	0,02	0,04	0,06
13.	Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja	1,01	1,00	3,80	0,96	0,97

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Bengkulu

### a. Pendidikan dan Kebudayaan

Angka melek huruf di Kabupaten Bengkulu menunjukkan *trend* peningkatan sejak tahun 2011 sampai dengan 2015. Tahun 2011 mencapai 88,72 % dan di tahun 2012 mencapai 91,57 %. Selanjutnya di tahun 2013 dan 2014, 2015 berturut-turut 91,42; 92,10; 91,42. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, maka angka melek huruf Kabupaten Bengkulu masih berada di bawah capaian nasional.

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan dari 6,50 tahun pada tahun 2011 menjadi 5,98 tahun pada tahun 2015.

Angka Partisipasi Kasar (APK) baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA juga mengalami peningkatan. Data penurunan APK SD/MI pada tahun 2015 perlu disandingkan dengan peningkatan APM SD/MI, APK SMP/MTs dan Rata-rata Lama Sekolah yang mengalami peningkatan.

Untuk fokus seni budaya dan olahraga, di Bidang Kebudayaan khususnya dalam sektor Pemuda dan Olahraga, indikator yang menjadi ukuran diantaranya adalah jumlah klub olahraga yang ada di Kabupaten Bengkulu semakin meningkat. Pada tahun 2010, jumlah klub olahraga sebanyak 30 klub, dan semakin bertambah sampai dengan tahun 2014 yaitu sebanyak 42 klub olahraga. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah klub olahraga di Kabupaten Bengkulu, sarana olahraga yang utama yaitu 1 buah gedung olahraga dengan kondisi yang masih minim dan belum memadai untuk menampung seluruh kegiatan olahraga yang ada di Kabupaten Bengkulu.



## b. Kesehatan

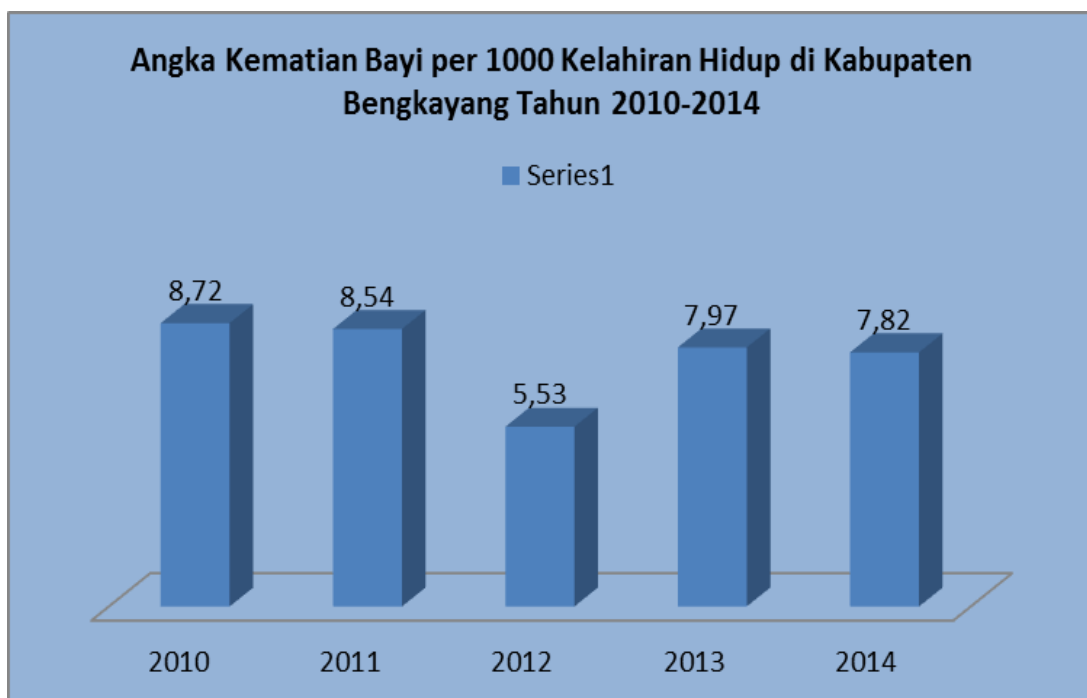
Angka usia harapan hidup di Kabupaten Bengkayang secara umum terus meningkat. Pada tahun 2010 Angka Usia Harapan Hidup mencapai 68,84 tahun, di tahun 2011 meningkat menjadi 68,97 tahun. Pada tahun 2012 angka tersebut naik menjadi menjadi 69,11. Pada tahun 2013 angka tersebut semakin meningkat menjadi 72,89 dan tidak berubah sampai di tahun 2015. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi maka angka usia harapan hidup Kabupaten Bengkayang masih berada di bawah capaian Provinsi.

**Tabel 2.15**  
**Perbandingan Angka Harapan Hidup**  
**di Kabupaten Bengkayang terhadap Provinsi**  
**Tahun 2011-2015**

Uraian	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)				
	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
Kab.Bengkayang	68,97	69,11	72,89	72,89	72,99
Kalimantan Barat	69,26	69,46	69,66	69,76	69,87

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2016

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 tercatat 7,82 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi sejak tahun 2010-2012 telah terjadi penurunan dari 8,72 menjadi 5,53 per 1.000 kelahiran hidup. Namun di tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 7,97 per 1.000 kelahiran hidup.

**Grafik 2.1**

Sumber : Analisa Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang Tahun 2015

Berdasarkan data analisa Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bengkayang mengalami pasang surut. Di tahun 2010 sebesar 0,08%, kemudian meningkat di tahun 2011 menjadi 0,12%, selanjutnya di tahun 2012-2013 berturut-turut turun menjadi 0,09% dan 0,02% dan di tahun 2014 dan 2015 berturut-turut meningkat menjadi 0,04% dan 0,58%. Angka persentasi balita gizi buruk ini dihitung dengan membandingkan banyaknya jumlah balita gizi buruk dibagi dengan ajumlah balita yang ada di Kabupaten Bengkayang. Pada dasarnya, data jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Bengkayang mengalami fluktuasi selama rentang waktu 2010-2015, namun karena dipengaruhi oleh bertambah dan berkurangnya jumlah balita yang ada di Kabupaten Bengkayang selama rentang waktu tersebut, sehingga mengakibatkan pasang surut angka persentasi balita gizi buruk sebagaimana dapat dilihat di tabel berikut :

**Tabel 2.16**  
**Persentasi Balita Gizi Buruk per Jumlah Balita yang ada di**  
**Kabupaten Bengkulu selama Tahun 2010-2015**

No	Indikator	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	20	20	20	7	11	16
2	Jumlah Balita	19.367	9.918	6.411	7.465	27.835	27.586
3	Persentase (%)	0,08	0,12	0,09	0,02	0,04	0,58

Sumber : Analisa Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tahun 2015

### c. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan untuk pengangguran terbuka dari 2010 sampai dengan 2014 mengalami pasang surut dari 3,21 % menjadi 3,74%. Sedangkan pada angkatan kerja mengalami fluktuasi dari tahun 2010 sampai tahun 2014, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.17**  
**Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Bengkulu**

Kondisi Ketenagakerjaan	Satuan	Tahun (Bulan Agustus)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	7
Angkatan Kerja	Ribu Jiwa	110.930	107.957	110.434	111.373	126.452
Bekerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	Ribu Jiwa	107.244	104.394	107.894	107.207	122.473
	%	76,60	74,35	75,81	70,31	77,67
Pengangguran Terbuka	Ribu Jiwa	3686	3563	2540	4166	3979
	%	3,32	3,30	2,30	3,74	3,15

Sumber: Kabupaten Bengkulu Dalam Angka 2011-2016

Berdasarkan lapangan usaha dan tingkat pendidikan, komposisi tenaga kerja usia 15 tahun ke atas adalah sebagaimana tabel-tabel berikut:

**Tabel 2.18**  
**Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun 2012- 2015**

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuhan dan Perikanan	70.216	74.768	2.535	90.426
2.	Pertambangan dan Penggalian Industri	N/a	n/a	n/a	2.561
3.	Listrik, Gas dan Air Minum	1.846	1551	2.004	3.140
4.	Konstruksi	n/a	n/a	n/a	367
5.	Konstruksi	n/a	n/a	n/a	1.487
6.	Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi	10.397	8.219	13.234	11.015
7.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	n/a	n/a	n/a	1453
8.	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	n/a	n/a	n/a	845
9.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	8.083	7.933	5.355	11.179
10.	Lainnya	13.582	15.423	14.079	n/a
	<b>JUMLAH</b>	<b>104.394</b>	<b>107.894</b>	<b>107.207</b>	<b>122.473</b>

Sumber Kabupaten Bengkulu Dalam Angka 2013-2016

**Tabel 2.19**  
**Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Bekerja dan Pencari Kerja di Kabupaten Bengkulu 2015**

No	Tingkat Pendidikan	2015			
		Bekerja	%	Pencari Kerja	%
1.	Tidak/belum Sekolah	9.569	7,81	-	-
2.	Tidak/belum tamat SD	29.797	24,33	-	-
3.	SD Sederajat	32.829	26,81	1	0,6
4.	SMP sederajat	19.800	16,17	8	4,42
5.	SMA sedearajat	23.555	19,23	88	48,62
6.	Diploma I/II ke atas	6.923	5,65	37	20,44
7.	Sarjana	n/a	n/a	47	25,97
	<b>Jumlah</b>	<b>122.473</b>	<b>100</b>	<b>181</b>	<b>100</b>

Sumber Kabupaten Bengkulu Dalam Angka 2016

#### d. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan.

Data jumlah pekerja perempuan yang ada di Kabupaten Bengkayang dari tahun 2011-2015 terlihat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011, jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Bengkayang mencapai 42.642 Jiwa atau sekitar 39,76% dari banyaknya jumlah pekerja yang ada di Kabupaten Bengkayang. Kemudian mengalami jumlahnya menurun menjadi 38.816 jiwa atau sebesar 37% dari total jumlah pekerja pada tahun tsb. Kemudian meningkat kembali di tahun 2013 menjadi 40.250 jiwa dan kembali turun di tahun 2014 menjadi 39.584 jiwa atau sebesar 36,92% dari total jumlah pekerja. Kemudian di tahun 2015 meningkat kembali sebesar 49.605 Jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.20**  
**Partisipasi Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Bengkayang 2011- 2015**

No	Indikator	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Jumlah angkatan kerja perempuan yang bekerja	42.642	38.816	40.250	39.584	49.605
2.	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (PNS)	2.029	2.037	2033	2.027	2.256
3.	Jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif	3	3	3	3	3
4.	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	64,70	58,74	60,30	53,84	65,69
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Perempuan)	3,76	4,07	3,25	2,77	2,53
6.	Jumlah angkatan kerja perempuan	44.307	40.464	41.600	40.711	50.893

Sumber Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2016

### e. Keluarga Berencana

Jumlah akseptor aktif dari masing-masing kecamatan menunjukkan kinerja yang sangat baik dimana realisasi capaian melampaui target yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa kesadaran akseptor dalam menggunakan alat kontrasepsi sudah baik dalam penentuan metode apa yang sebaiknya digunakan. Partisipasi laki-laki dalam ber KB sudah mulai membaik yang dibuktikan dengan meningkatnya penggunaan kondom.

Begitu juga dengan akseptor baru masing-masing kecamatan menunjukkan kinerja yang baik, walaupun capaiannya bervariasi.

**Tabel 2.21**  
**Partisipasi Perempuan dalam Keluarga Berencana**  
**di Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2014**

No	Indikator	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Jumlah pasangan usia subur	38.012	38.651	39.038	40.996
2.	Jumlah peserta program KB aktif	28.073	26.367	26.935	27.962

Sumber Kabupaten Bengkulu Dalam Angka 2015

**Tabel 2.22**  
**Realisasi Peserta KB Aktif**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun 2014**

No.	Kecamatan	Jenis Kontrasepsi						
		Suntik	Pil	MOW	IUD	Implant	MOP	Kondom
1	Sungai Raya	497	467	98	97	248	15	132
2	Capkela	338	256	134	62	116	7	19
3	Sungai Raya Kepulauan	915	965	99	107	251	3	138
4	Samalantan	904	905	213	123	312	8	228
5	Monterado	1155	1107	267	112	376	12	171
6	Lembah Bawang	288	179	95	69	114	2	5
7	Bengkayang	1106	1239	299	236	351	18	420
8	Teriak	969	887	154	91	293	6	125
9	Sungai Betung	347	342	92	71	112	6	7
10	Ledo	347	319	106	92	211	4	11
11	Suti Semarang	176	152	82	32	51	2	3
12	Lumar	252	247	93	52	124	3	6
13	Sanggau Ledo	398	379	115	96	347	14	41

14	Tujuh Belas	770	769	127	73	316	4	91
15	Seluas	590	537	127	93	295	7	102
16	Jagoi Babang	247	202	98	49	168	4	115
17	Siding	247	198	75	31	87	2	3
<b>JUMLAH</b>		<b>9.546</b>	<b>9.150</b>	<b>2.274</b>	<b>1.486</b>	<b>3.772</b>	<b>117</b>	<b>1.617</b>

Sumber Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2015

### 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Data yang ditampilkan pada aspek pelayanan umum merupakan bentuk- bentuk jasa pelayanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Capaian indikator aspek pelayanan umum ini secara garis besar disajikan dalam fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

#### 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

##### a. Pendidikan

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan pada setiap jenjang pendidikan pada tingkat tertentu, sebagai satu upaya peningkatan pelayanan pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup dan produktivitas. Beberapa indikator yang dapat mengindikasikan tingkat kemajuan pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.23**  
**Aspek Layanan Umum**  
**Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Pendidikan di**  
**Kabupaten Bengkayang**  
**Tahun 2011-2015**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN					Rata- Rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	n.a	95,89	96,19	98,14	88,48	94,68
2	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	n.a	85,81	90,15	95,39	49,25	80,15
3	Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK	n.a	64,28	60,88	71,25	45,12	60,38
4	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	114,84	114,25	102,66	107,32	105,74	108,96
5	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	69,96	67,71	59,42	66,47	77,24	68,16
6	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	46,48	49,13	40,59	42,54	50,90	45,93
7	Rasio guru terhadap murid SD/MI, SMP/MTs	6,61	6,87	6,55	6,79	6,85	6,73
8	Rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK	9,55	14,64	9,09	7,51	11,82	10,52
9	Pendidikan Anak Usia Dini	11,07	5,68	8,97	11,72	28,02	13,09
10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	56,20	93,41	99,13	100	100	89,75
11	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	81,02	95,02	99,09	100	100	95,02
12	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	94,45	95,72	99,25	98,02	100	97,67
13	Jumlah Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	203.721	204.791	198.725	197.471	197.102	200,362
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	38,23	25,88	52,07	58,73	77,89	50,56

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang Tahun 2015

Angka Partisipasi Sekolah SD sejak tahun 2011-2015 berfluktuasi dengan rata-rata 94,68, begitu juga di tingkat pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dengan rata-rata 80,15 dan masih dibawah



nasional. Selain itu, ketersediaan tenaga pengajar yang ditunjukkan dari angka rasio guru terhadap murid juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada tahun 2011 angka rasio guru terhadap murid di tingkat SD maupun SMP meningkat daripada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah murid yang memasuki jenjang SD maupun SMP.

**Tabel 2.24**

**Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Bengkayang**

<b>Jenis Sekolah</b>	<b>Sekolah</b>	<b>Guru</b>	<b>Murid</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
TK Negeri/Swasta	43	131	1302
SD Negeri/Swasta	256	2430	37054
MI Negeri/Swasta	7	62	690
SLTP Negeri/Swasta	69	744	11937
MTs Negeri/Swasta	8	92	767
SLTA Negeri/Swasta	26	729	6239
Aliyah Negeri/Swasta	3	30	271
SMK Negeri/Swasta	6	69	1030

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2015

**b. Kesehatan**

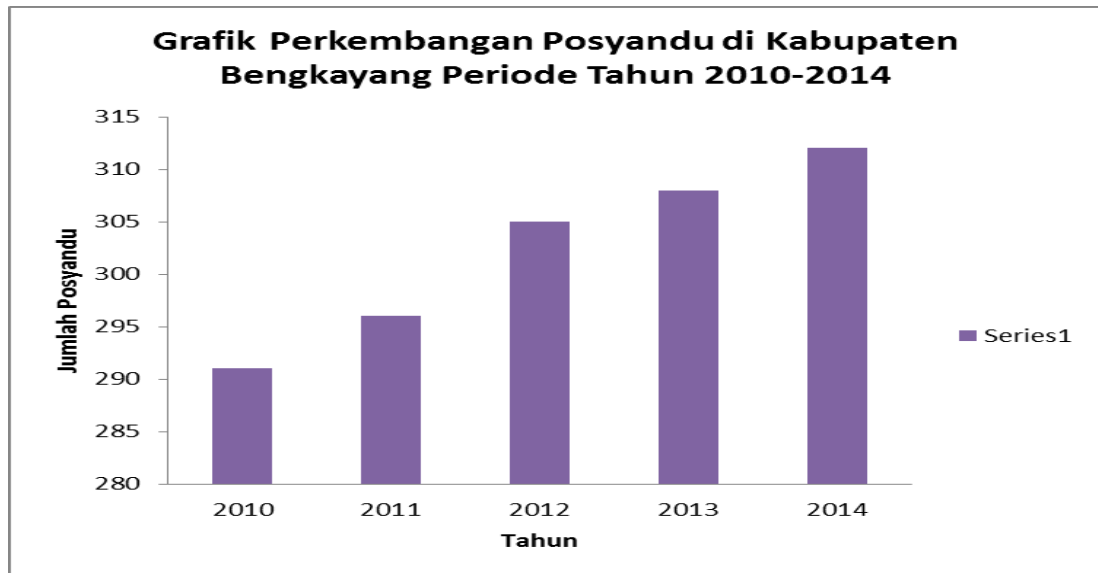
Jumlah posyandu pada tahun 2010 sebanyak 291 posyandu dan pada tahun 2014 bertambah menjadi 312 posyandu, berarti terjadi penambahan 21 unit posyandu selama 5 tahun terakhir.

Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah antara 75 – 100 balita. Apabila 1 unit posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit posyandu.

**Tabel 2.25**  
**Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Bidang Kesehatan**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun 2010-2014**

<b>Indikator</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Rasio posyandu per satuan balita	12,32	12,36	12,61	12,55	12,55
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,37	0,36	0,37	0,37	0,36
Rasio dokter per satuan penduduk	0,037	0,054	0,045	0,039	0,043
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	18	28	42	66	100
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	87	77	83	88	86
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	44	51	70	71	71
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	59,62	53,71	100	53,32	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	60,57	60,57	53,15	47,02	71,93
Cakupan kunjungan bayi	92,21	91,48	50,84	90,19	98,66
Cakupan puskesmas	100	100	100	100	100
Cakupan pembantu puskesmas	50	50	54	54	54

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu 2016 (olahan)

**Grafik 2.2**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bengkayang 2016 (olahan)

Terkait ketersediaan Puskesmas/poliklinik/pustu bagi masyarakat diketahui bahwa dari periode 2010-2014 rasio Puskesmas per 1000 penduduk di Kabupaten Bengkayang mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, di Kabupaten Bengkayang 1 Puskesmas/poliklinik/pustu melayani 2.219 orang penduduk. Sampai di tahun 2014, 1 Puskesmas/poliklinik/pustu melayani 2.587 orang penduduk.

Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Bengkayang selama periode 2010-2012 mengalami kenaikan. Namun di tahun 2013-2014 berturut-turut mengalami penurunan. Jika pada tahun 2010 tercatat terdapat 291 Posyandu, maka pada tahun 2014 telah mencapai 312 Posyandu. Rasio posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per jumlah balita. Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2010 mencapai 14,71 dimana 1 Posyandu dapat melayani 68 balita. Namun pada tahun 2014 rasio posyandu mengalami penurunan menjadi 11,21 sehingga dapat dikatakan bahwa 1 posyandu melayani sebanyak 89 balita .

Dalam ketersediaan SDM kesehatan, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Pada tahun 2011, rasio dokter per satuan penduduk mencapai 0,037 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 0,043. Namun berdasarkan data tersebut diatas,

dapat dikatakan bahwa 1 orang dokter melayani 23.288 jiwa dan kondisi ini sungguh sangat tidak ideal untuk Kabupaten Bengkayang.

Untuk perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Bengkayang selama periode 2010-2014 mengalami peningkatan. Dalam hal ini, komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Pada tahun 2010 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 18%, selanjutnya mengalami peningkatan berturut-turut menjadi 28% dan 42% di tahun 2011 dan 2012. Pada tahun 2013 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Bengkayang sudah mencapai 66% dan di tahun 2014 meningkat kembali menjadi 100%.

Perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Bengkayang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jika pada tahun 2010 cakupannya mencapai 87%, maka pada tahun 2014 turun menjadi 86%.

Perkembangan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Bengkayang selama periode 2010-2014 mulai dari 44%-71%. Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah desa/kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa cakupan desa/kelurahan UCI di kabupaten Bengkayang belum memenuhi standar UCI yang artinya masih ada jumlah bayi pada suatu desa/kelurahan dalam satu tahun belum mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap.

Untuk kinerja cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Bengkayang sudah mencapai tingkat yang optimal, dimana dari periode 2010 hingga 2014 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kasus balita gizi buruk sudah tertangani seluruhnya.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Bengkayang juga sudah cukup optimal dilakukan,

walaupun masih terjadi fluktuasi disetiap tahunnya Pada tahun 2010-2011 tingkat cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di bawah 100%. Kemudian di tahun 2012 meningkat menjadi 100%, namun kembali terjadi penurunan di tahun 2013 yaitu mencapai 53,32% dan kembali meningkat 100% di tahun 2014.

Dalam cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD selama ini di Kabupaten Bengkayang telah menunjukkan tingkat yang optimal. Selama periode 2010-2014 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sudah mencapai 100%.

Kinerja cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin selama periode 2010-2014 mengalami fluktuasi dan berkisar antara 47,02-71,93%. Dari tahun 2010-2011 tidak mengalami perubahan dengan angka 60,57%, namun ditahun 2012-2013 mengalami penurunan dari angka 53,15% menjadi 47,02%. Kemudian di tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 71,93%. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat miskin belum optimal mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Perkembangan cakupan kunjungan bayi selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Cakupan kunjungan bayi di tahun 2010 telah mencapai 92,21%. Namun mengalami penurunan di tahun 2011 menjadi sebesar 91,48%. Di tahun 2012 cakupan kunjungan bayi melonjak turun menjadi 50,84%, namun terakhir di tahun 2013-2014 berturut-turut mengalami peningkatan lagi, menjadi 90,19% dan 98,66%.

Untuk cakupan puskesmas di Kabupaten Bengkayang selama periode 2010-2014 sudah di angka 100%. Ini berarti bahwa jumlah puskesmas di suatu kecamatan sama dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang, dalam arti 1 puskesmas untuk 1 kecamatan.

Terkait capaian indikator SPM di urusan kesehatan, diketahui bahwa tahun 2014 baru beberapa indikator yang tercapai dan masih banyak indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah target. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkayang belum cukup maksimal.

### c. Lingkungan Hidup

**Tabel 2.26**  
**Aspek Pelayanan Umum Bidang Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014**

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber data air yang dipantau mutu airnya	10	10	10	10	10
Jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air	10	10	10	10	10
Jumlah perusahaan wajib amdal yg telah diawasi	10	9	11	5	10
Jumlah seluruh perusahaan wajib amdal	15	15	15	28	28
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	0	1	1	0	8
Jumlah kasus lingkungan yang ada	0	1	1	0	8

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang Tahun 2016

### d. Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bengkayang dapat terlihat seperti tabel berikut :

**Tabel 2.27**  
**Aspek Pelayanan Umum Bidang Koperasi dan UMKM Kabupaten**  
**Bengkayang tahun 2010-2014**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah koperasi aktif	75	81	93	97	113
Jumlah seluruh koperasi	160	166	174	175	186
Jumlah UKM aktif non PR/LKM UKM	n.a	n.a	8.724	11.447	n.a
Jumlah usaha mikro dan kecil	n.a	82	86	10	2270
Jumlah seluruh IKM	n.a	305	305	99	n.a

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag Kab. Bengkayang Tahun 2016

**Tabel 2.28**  
**Perkembangan Koperasi Unit Desa di Kabupaten Bengkayang**  
**Tahun 2010-2014**

No.	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Unit	19	19	20	20	20
2	Anggota (Orang)	3275	3275	3809	3809	3779
3.	Simpanan (Juta)	841	941	976	976	980
4..	Donasi (Juta)	0	0	0	0	0
5.	Dari Luar (Juta)	550	550	1394	1394	1398
6.	Cadangan (Juta)	666	666	0	0	0
7.	Sisa Hasil Usaha (Juta)	556	575	0	8438	14000
8.	Dana-Dana	625	634	892	0	0
9.	Volume Usaha	11675	12143	1845	1730	1795

Sumber: Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2015

Koperasi merupakan wadah kegiatan ekonomi yang sesuai dalam negara kita seperti tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Namun demikian, peran koperasi dalam perekonomian masyarakat masih sangat kecil. Untuk itu, peran koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi yang tangguh dan berakar dalam masyarakat perlu ditingkatkan. Pada tahun 2014, terdapat 177 unit koperasi yang ada di Kabupaten Bengkayang. Dilihat menurut jenisnya, jumlah KUD (Koperasi Unit Desa) yang ada adalah sebanyak 20 unit sedangkan koperasi non KUD ada sebanyak 157 unit dan semuanya tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Jumlah anggota koperasi yang tercatat selama tahun 2014 adalah sebanyak 9.049 orang dengan anggota KUD sebanyak 3.779 orang dan anggota non KUD sebanyak 5.270 orang.

**Tabel 2.29**  
**Jumlah Koperasi Primer di Kabupaten Bengkayang tahun 2014**

No	Jenis Koperasi	Jumlah
1	Koperasi Umum	48
2	Koperasi Serba Usaha	40
3	Koperasi Perkebunan	21
4	Koperasi Unit Desa	20
5	Koperasi Pertanian	20
6	Koperasi Simpan Pinjam	8
7	Koperasi Karyawan	7
8	Koperasi Pegawai Negeri	6
9	Koperasi Pondok Pesantren	5
10	Koperasi Pemuda	1
11	Koperasi Wanita	1

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2015

#### e. Penanaman Modal

Aspek pelayanan umum di bidang penanaman modal dapat diuraikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.30**  
**Kondisi Penanaman Modal di Kabupaten Bengkayang tahun 2014**

No.	Indikator	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	27	26	25	27	27
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Juta rupiah	243.334,94	506.786,05	510.936,49	2.626.717,58	1.436.0031,20
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	471	484,5	503,88	453,78	134,37
	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan	12.740	12.597	12.597	12.252	3.628
	PMA/PMDN jumlah seluruh PMA/PMDN	27	26	25	27	27

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bengkayang 2015



## 1) Penanaman Modal Dalam Negeri

Secara kumulatif, capaian kinerja penanaman modal sampai tahun 2014 (realisasi investasi PMDN) mencapai Rp.2.486.223,05 atau terjadi peningkatan sebesar 96,50% dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2012, sementara peningkatan realisasi jumlah proyek sebesar 62,5% dari target rencana jumlah proyek.

**Tabel 2.31**  
**Rencana dan Realisasi Kumulatif**  
**Perkembangan Investasi PMDN di Kabupaten Bengkayang**  
**Tahun 2011-2014**

TAHUN	P M A					
	RENCANA		REALISASI		Persentase %	
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. Juta)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. Juta)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI
1	2	3	4	5	6	7
2011	10	2.576.326,85	3	106.991,30	30%	4,15%
2012	8	2.576.326,85	3	370.442,41	37,5%	14,38%
2013	8	2.576.326,85	5	2.486.223,05	62,5%	96,50%
2014	8	2.576.326,85	5	2.486.223,05	62,5%	96,50%

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2015

## 2) Penanaman Modal Asing

Tabel rencana dan realisasi kumulatif perkembangan investasi PMA di Kabupaten Bengkayang Tahun 2011-2014 sebagai berikut :

**Tabel 2.32**  
**Rencana dan Realisasi Kumulatif Investasi PMA di**  
**Kabupaten Bengkayang**  
**Tahun 2011-2014**

TAHUN	P M A					
	RENCANA		REALISASI		Persentase %	
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US \$ RIBU)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US \$ RIBU)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI
1	2	3	4	5	6	7
2011	17	120.662,00	3	11.361,97	9,42%	17,65%
2012	19	175.095,90	3	11.707,84	6,69%	15,79%
2013	19	175.095,90	3	11.707,84	6,69%	15,79%
2014	19	175.095,90	3	11.707,84	6,69%	15,79%

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2015

Dapat dilihat bahwa nilai realisasi investasi PMA tahun 2014 tidak mengalami perubahan selama kurun waktu 2012-2014 yaitu senilai US \$.11.707,84 dengan jumlah proyek sebanyak 3 proyek.

**e. Sarana & Prasarana Umum**

1) Perhubungan /Transportasi

Panjang jalan di Kabupaten Bengkulu menurut data pada tahun 2014 sepanjang 1.677,67 Km terdiri dari : Jalan Negara 35,29 Km, Jalan Provinsi 242,38 Km serta Jalan Kabupaten 1.400,00. Jalan negara sepanjang 35,29 Km (84%) dalam kondisi baik, 5,69 Km (16,12%) dalam kondisi sedang. Untuk Jalan Provinsi sepanjang 242,38 Km (72,17%) dalam kondisi baik; 58,96 Km (24,33%) dalam kondisi sedang; dan 8,50 Km (3,51%) dalam kondisi rusak. Sedang untuk jalan Kabupaten sepanjang 385,72 Km (27,70%) dalam kondisi baik dan 315,42 Km (22,65%) dalam kondisi sedang, 334,01 Km (23,98%) dalam kondisi rusak dan 357,56 Km (25,67%) dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini mengakibatkan tingginya biaya transportasi barang dan penumpang serta menurunnya keselamatan transportasi. Hal tersebut disebabkan karena alokasi anggaran yang disediakan tidak sebanding dengan panjang jalan yang harus ditangani serta masih banyaknya kendaraan yang lewat melebihi daya dukung jalan.

**Tabel 2.33**  
**Panjang Jalan Di Kabupaten Bengkulu Menurut Status Pengawasan**

Tahun	Panjang Jalan (km)			
	Negara	Provinsi	Kabupaten	Lainnya
1	2	3	4	5
2010	35,29	242,38	1.400,00	0,00
2011	35,29	242,38	1.400,00	0,00
2012	35,29	242,38	1.400,00	0,00
2013	35,29	242,38	1.400,00	0,00
2014	35,29	242,38	1.392,71	0,00

Sumber : Kabupaten Bengkulu Dalam Angka 2015

**Tabel 2.34**  
**Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Bengkayang**  
**Menurut Jenis Permukaan**  
**Tahun 2010-2014**

Jenis Permukaan	Jalan Kabupaten (Km)				
	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
Aspal	702,67	754,51	758,06	758,06	755,16
Kerikil	275,00	272,10	270,45	270,45	283,49
Tanah	564,00	539,06	537,16	537,16	519,73
Lainnya	136,00	112,00	112,00	112,00	112,00

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2015

**Tabel 2.35**  
**Panjang Jalan di Kabupaten Bengkayang menurut Kondisi Jalan dan**  
**Status Pengawasan**  
**Tahun 2010-2014**

Kondisi Jalan	Jalan Propinsi (%)					Jalan Kabupaten (%)				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Baik	134,92	174,92	174,92	174,92	174,92	159,80	536,69	575,83	575,83	385,72
Sedang	98,96	58,96	63,46	63,46	58,96	630,00	342,32	341,59	341,59	315,42
Rusak	8,50	8,50	4,00	4,00	8,50	410,75	346,52	308,10	308,10	334,01
Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,45	174,47	174,47	174,47	357,56
Jumlah	242,38	242,38	242,38	242,38	242,38	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.392,71

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2015

Adapun aspek pelayanan umum di bidang perhubungan sebagaimana dalam tabel berikut ini, antara lain:

**Tabel 2.36**  
Aspek Pelayanan Umum di Bidang Perhubungan  
Kabupaten Bengkayang 2010-2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1 tahun	222,52	247,68	276,48	304,7	304,7
Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	55	46	11	n.a	n.a
Jumlah uji KIR angkutan umum	122	123	125	126	168
Jumlah angkutan umum	708	738	799	984	1027
Jumlah angkutan darat	17.323	18.000	8.300	18.328	18.328

Sumber : Dinas Hubkominfo Kab. Bengkayang (2016)

## 2) Tempat Ibadah

Pengembangan tempat ibadah merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mencapai Visi Masyarakat Beriman. Data tempat ibadah enam agama di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.37**  
Data Rumah Ibadah di Kabupaten Bengkayang

Tempat Ibadah	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5
Masjid	173	173	173	174
Surau	142	142	144	144
Gereja Katolik	130	130	136	157
Gereja Kristen	365	365	358	366
Pura	2	2	2	2
Vihara	7	7	6	6
Kelenteng	30	30	47	48

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2015

## 3) Perumahan dan Permukiman

**Tabel 2.38**  
**Kondisi Perumahan dan Permukiman**  
**Kabupaten Bengkayang 2011-2015**

Perumahan	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2013	2104	2015
Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	39	40,8	40,7	26,5	26,7
	jumlah seluruh rumah tangga					
Rumah tangga ber-Sanitasi	Jumlah rumah tangga bersanitasi	5,22	5,65	6,45	65,25	66,5
	jumlah seluruh rumah tangga					
Lingkungan permukiman kumuh	Luas lingkungan permukiman kumuh	17,5	17,22	18,4	54,46	43,95
	Luas wilayah					
Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni	17,4	18,4	18,5	18,7	19
	Jumlah seluruh rumah					

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkayang 2016

## 4) Penataan Ruang

Kabupaten Bengkayang memiliki 5 Tingkatan Pusat Kegiatan antara lain PKS (Pusat Kegiatan Strategis Nasional), PKWP (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi), dan PKL (Pusat Kegiatan Lokal), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.39**  
**Sistem Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupatenn Bengkayang**

<b>No</b>	<b>Sistem Pusat-Pusat Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>
1.	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Jagoi Babang
2.	Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP)	Bengkayang
3.	Pusat Kegiatan Lokal (PPL)	Seluas, Ledo, Samalantan, Sungai Duri
4.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Sungai Raya, Monterado, Sanggau Ledo
5.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Capkala, Pisak, Suti Semarang, Sekaruh, Sungai Betung, Tempapan, Lumar, Sebujiit

Sumber : RTRW Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034

### **g. Pemuda dan Olah Raga**

Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Bengkayang dari tahun 2010 s/d 2012 sebanyak 8 buah, namun pada tahun 2013-2014 jumlah organisasi pemuda mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 19 buah.

Adapun jumlah kegiatan kepemudaan yang ada di Kabupaten Bengkayang sampai dengan tahun 2014 menurut data dari kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang berjumlah 5 buah, sedangkan kegiatan olahraga yang sampai sekarang masih aktif berjumlah 20 buah.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Pemuda dan olahraga di Kabupaten Bengkayang belum maksimal karena belum optimalnya peran aktif pemuda. Dari angka jumlah kegiatan kepemudaan dapat dilihat bahwa rendahnya kemampuan pemuda dalam berwirausaha, berkreasi dalam menciptakan berbagai kegiatan kepemudaan.

Namun disisi lain, jumlah kegiatan olahraga justru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hanya saja seiring dengan bertambahnya jumlah kegiatan olahraga, prasarana gedung olahraga di Kabupaten Bengkayang tidak dapat menampung kegiatan olah raga tersebut, dimana di Kabupaten Bengkayang hanya memiliki 1 (satu) gedung olahraga yang masih memerlukan peningkatan pembangunan supaya dapat menampung seluruh kegiatan olahraga di Kabupaten Bengkayang.

**Tabel 2.40**  
**Aspek Pelayanan Umum Bidang Pemuda dan Olah Raga**  
**Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014**

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah organisasi pemuda	8	8	8	19	19
Jumlah organisasi olahraga	27	27	27	27	27
Jumlah kegiatan kepemudaan	4	4	4	5	5
Jumlah kegiatan olahraga	8	12	12	14	20

Sumber : Kantor Pemuda dan Olahraga Kab. Bengkayang Tahun 2016

### 2.3.2 Layanan Urusan Pilihan

Penyelenggaraan urusan pilihan meliputi bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian yang dirinci seperti berikut :

#### a. Pertanian

Fokus pelayanan pertanian di kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.41**  
**Aspek pelayanan urusan pilihan Bidang Pertanian**  
**Kabupaten Bengkayang tahun 2010-2014**

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	269.6779	369.5462	333.889	322.924	838.601
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	971.224	881.713	774.462	618.448	595,624

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	922.246	870.582	806.696	701.018	609.961
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	100	94.481	90.554	113.441	84.146
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100	100	100	100	100
Cakupan bina kelompok petani	2,42	3,10	2,52	7,15	14,8

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2015 dan Dinas Pertanian Kab. Bengkayang

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan secara umum masih menjadi tulang punggung pembangunan perekonomian Kabupaten Bengkayang, karena sektor ini memberikan kontribusi terbesar yaitu 31,82% dari total PDRB tahun 2013 dan 33,15% pada tahun 2014. Sedangkan laju pertumbuhan sektor pertanian tahun 2014 tumbuh 0,84% berasal dari subsektor tanaman pangan (10,35%), subsektor tanaman hortikultura tumbuh 8,82% dan subsektor perkebunan tumbuh 7,20%, sub sektor peternakan tumbuh 12,07% dan sub sektor jasa pertanian dan perburuan tumbuh 13,70%.

Begitu juga untuk sektor kehutanan dan penebangan kayu tumbuh 0,61% dan sektor perikanan tumbuh 3,61%. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kontribusi sektor ini, dibutuhkan pelaksanaan teknologi pertanian yang utuh terutama penyediaan benih/bibit unggul bermutu. Adapun kontribusi sektor pertanian terdiri dari :

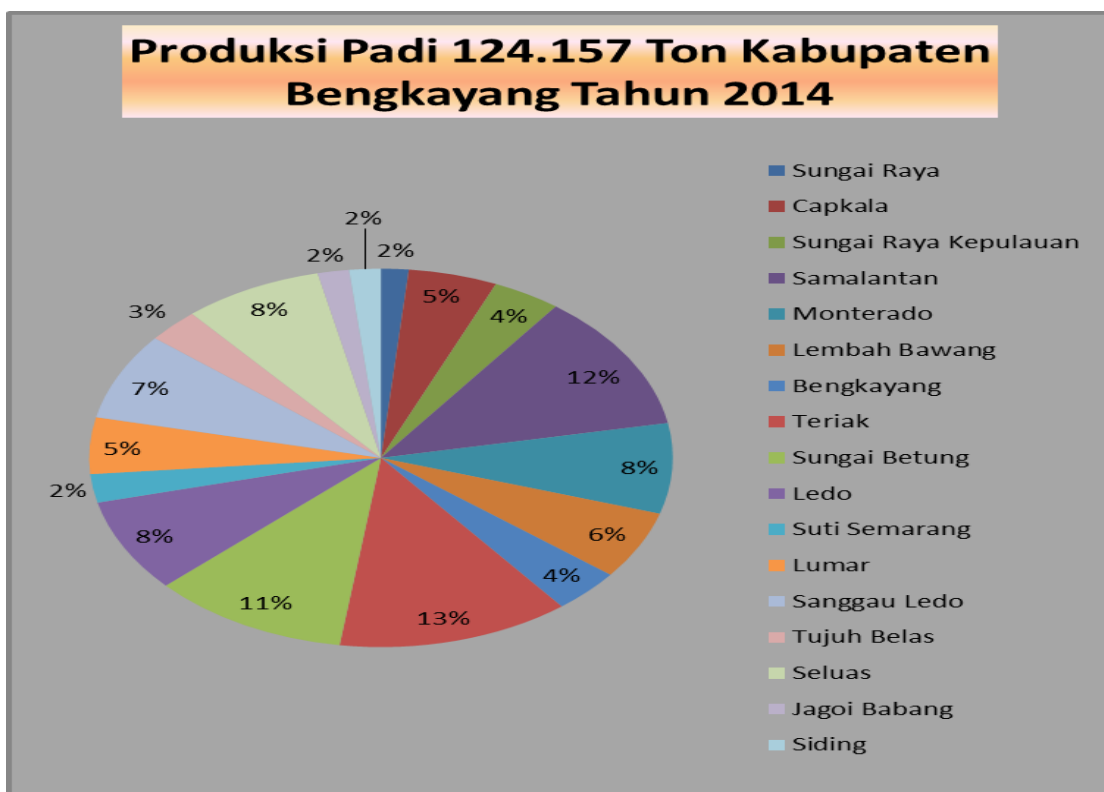
#### 1. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan

Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan sangat dipengaruhi oleh produksi padi. Perubahan musim dan cuaca serta bertambahnya luas panen menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya produksi padi, yaitu dari 147.071 ton di tahun 2011 menurun menjadi 124.157 ton tahun 2014. Sentra padi di Kabupaten Bengkayang tahun 2014 yaitu Kecamatan Teriak memberi kontribusi sekitar 12,90% terhadap produksi padi Kabupaten. Kecamatan lainnya yang memberi daya dukung produksi padi cukup besar yaitu Kecamatan Samalantan sekitar 11,82 % dan Sungai Betung sekitar 10,93 %.



Sektor pertanian khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Penyediaan sub sektor tanaman pangan ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat khususnya dalam hal penyediaan pangan di Kabupaten Bengkayang. Dengan semakin meningkatnya produksi di sub sektor ini, diharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkayang akan semakin baik. Pada tahun 2014, luas panen tanaman padi sebesar 39.139 hektar, yaitu luas panen padi sawah sebesar 27 657 hektar dan padi ladang sebesar 11.482 hektar. Produksi padi selama tahun 2014 adalah sebesar 124.157 ton dan jika dipilah menurut jenisnya, produksi padi sawah sebesar 101.735 ton dan produksi padi ladang sebesar 22.422 ton (produksi dalam bentuk gabah kering giling). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 rata-rata produksi padi di Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 31,72 kwintal per hektar dan jika dilihat menurut jenisnya, padi sawah memiliki rata-rata produksi sebesar 36,78 kwintal per hektar dan padi ladang sebesar 19,53 kwintal per hektar.

**Grafik 2.3**



**Tabel 2.42**  
**Realisasi Produksi Tanaman Padi dan Jagung**  
**di Kabupaten Bengkayang**  
**Tahun 2010-2014**

Tahun	PADI			JAGUNG		
	L. Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	L. Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	2	3	4	5	6	7
2011	44.631	32,95	147.072	29.481	38,51	113.520
2012	39.514	34,80	137.489	29.444	42,32	124.621
2013	41.005	32,94	135.075	30.168	40,97	123.613
2014	39.139	31,72	124.157	25.640	40,51	103.855
rata-rata prod/th	41.073	33,11	135.949	28.684	40,58	116.403
Pertumbuhan/th	4,081	1,14	5,45	4,23	5,45 1,86	2,34

Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang KDA 2015

Produksi jagung merupakan salah satu unggulan tanaman pangan Kabupaten Bengkayang yang memberikan pertumbuhan produksi sebesar 2,34% selama lima tahun terakhir atau rata-rata produksi sebesar 116.403 ton per tahun.

Luas panen tanaman jagung di Kabupaten Bengkayang selama tahun 2014 sebesar 25.640 hektar dengan produksi sebesar 103.855 ton atau rata-rata produksinya sebesar 40,51 kwintal per hektar dan ini merupakan produksi jagung terbesar di Kalimantan Barat (produksi dalam bentuk pipilan (kering).

Dilihat menurut kecamatan, produksi jagung terbesar berada di Kecamatan Sanggau Ledo dengan produksinya sebesar 29.982 ton dan luas panen sebesar 7.249 hektar atau rata-rata produksinya sebesar 41,36 kwintal per hektar.

## 2. Sub Sektor Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang menjadi komoditas utama Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 adalah kelapa sawit dan karet. Produksi tanaman perkebunan yang terbesar di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2014 adalah kelapa sawit, yaitu sebesar 51.455 ton dengan luas tanam sebesar 66.843 hektar. Kecamatan yang paling luas tanaman sawitnya adalah Kecamatan Seluas, sebesar

20.774 hektar namun produksi sawit yang terbesar di Kecamatan Ledo sebesar 19.659 ton.

**Tabel 2.43**  
**Realisasi Produksi Perkebunan di Kabupaten Bengkulu**  
**Tahun 2010-2014**

Tahun	Karet		Sawit		Kelapa Dalam	
	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)
1	2	3	4	5	6	7
2010	52.199	21.952	45.335	26.413	4.168	2.447
2011	51.100	23.227	51.762	37.178	4.121	2.622
2012	51.984	23.529	53.213	42.738	4.131	2.682
2013	52.441	23.748	63.248	38.539	4.306	2.715
2014	52.104	23.306	66.843	51.455	4.270	2.668
<b>rata-rata /th</b>	<b>52.180</b>	<b>23.152</b>	<b>56.080</b>	<b>39.265</b>	<b>4.199</b>	<b>2.627</b>
<b>Pertumbuhan/th</b>	<b>0,0122</b>	<b>1,544</b>	<b>10,38</b>	<b>19,85</b>	<b>0,629</b>	<b>2,23</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu KDA 2015

Dari ketiga produk unggulan sektor perkebunan yang memberikan kontribusi produksi yang paling tinggi adalah produksi sawit dengan pertumbuhan produksi rata-rata 19,85 % per tahun. Peningkatan pertumbuhan kelapa sawit sejalan dengan meningkatnya investasi di perkebunan besar.

### 3. Sub Sektor Peternakan

Sub Sektor peternakan sebagai penyumbang protein yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Beberapa komoditi yang sudah dikembangkan di Kabupaten Bengkulu antara lain ayam, sapi, kambing dan babi. Pertumbuhan sub sektor peternakan menunjukkan nilai yang positif selama lima tahun terakhir, kondisi ini didukung dengan program Ketahanan Pangan dan Swasembada Daging tahun 2014.

Data perkembangan komoditas peternakan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.44**  
**Realisasi Produksi Ternak (Ton)**  
**Di Kabupaten Bengkulu Tahun 2010-2014**

Tahun	Sapi	Kambing	Babi	Ayam	Itik
1	2	3	4	5	6
2010	55.512	5.270	355.352	270.934	1.889
2011	59.972	7.654	404.396	347.334	1.807
2012	62.748	7.923	41.032	341.200	1.850
2013	68.101	8.795	411.786	217.807	1.244
2014	57.891	7.671	439.327	318.054	1.830
rata-rata/thn	60.845	7.463	330.379	299.066	1.724
Pertumb %	1,55	11,74	208,55	9,07	3,10

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu KDA 2015

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian, populasi ternak besar yang paling dominan di Kabupaten Bengkulu pada tahun 2014 adalah jenis ternak sapi yaitu sebesar 11.415 ekor. Jenis ternak kecil unggulan di Bengkulu adalah babi yang populasinya pada tahun 2014 adalah sebanyak 23.525 ekor, diikuti jenis ternak kambing, yaitu sebanyak 15.232 ekor. Jenis unggas yang paling banyak diusahakan di Kabupaten Bengkulu adalah jenis ayam buras.

Peningkatan produksi daging sapi dan kambing masih belum mampu memenuhi kebutuhan daerah sehingga setiap tahun daerah masih harus mengimpor sapi dan kambing dari luar Kalbar. Hal ini disebabkan karena daerah belum mampu menyiapkan bibit/benih ternak sendiri dan masih bergantung terhadap produk dari luar Kabupaten Bengkulu.

## b. Perikanan

Sektor Perikanan dan Kelautan merupakan salah satu potensi dari Kabupaten Bengkayang. Selama lima tahun terakhir sektor perikanan sudah memberikan kontribusi baik produksi serta nilai finansial dari produk-produknya sebagai berikut :

**Tabel 2.45**  
**Realisasi Produksi Perikanan di Kabupaten Bengkayang**  
**Selama Tahun 2011-2014**

Tahun	Produksi (Ton)					Total
	Laut	Umum	Budidaya	Udang	Keramba	
1	2	3	4	5	6	7
2011	5.978,28	67,90	539,70	7.610,00	48,75	14.244,63
2012	58.891,80	4.344,00	489,20	5.676,90	108,90	69.510,80
2013	1.297,10	548,60	1.061,72	93,54	0,00	3.000,96
2014	1.314,40	413,65	3.128,93	992,80	1.240,32	7.090,10
Rata2	16.870,40	1.343,54	1.304,89	3.593,31	349,49	23.461,62
Pertumbuhan %	262,88	2061,89	100,79	279,20	11,62	142,85

Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang KDA 2015

Sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang terdiri dari perairan, baik berupa laut maupun sungai. Laut dan sungai-sungai yang mengalir di berbagai kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkayang merupakan suatu potensi yang baik untuk mengembangkan sektor perikanan, baik perikanan laut, perikanan perairan umum, maupun budidaya. Namun demikian, pada kenyataannya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Produksi perikanan laut pada tahun 2014 sebesar 1.314,4 ton, produksi perikanan perairan umum sebesar 413,65 ton, tambak udang sebesar 992,8 ton.

### c. Kehutanan

Aspek urusan pilihan Bidang Kehutanan Kabupaten Bengkulu sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 2.46**  
**Aspek Urusan Pilihan Bidang Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tahun 2010-2014**

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	0,158	0,158	0,163	0,142	0,118
Kerusakan Kawasan Hutan (%)	0,029	0,017	0,010	0,007	0,012
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkulu 2016

Data luas hutan di Kabupaten Bengkulu menurut status hutan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.47**  
**Luas Hutan Di Kabupaten Bengkulu Menurut Status Hutan Tahun 2014**

No	Status Hutan	Luas Area (Ha)
1	Taman Nasional	41.400
2	Hutan Lindung	35.359
3	Hutan Produksi Terbatas	44.135
4	Hutan Produksi Dikonversi	7440
5	Hutan Produksi Biasa	81.890
	<b>Total</b>	<b>210.260</b>

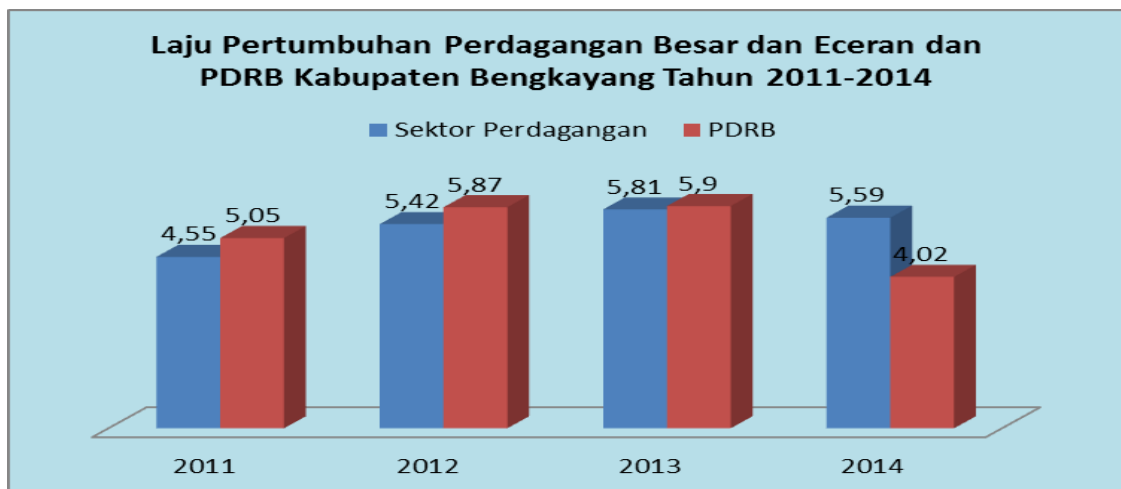
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu KDA 2015

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar hutan di Kabupaten Bengkulu merupakan hutan produksi biasa (38,95%) dari total wilayah hutan di Kabupaten Bengkulu. Selanjutnya hutan produksi terbatas sebesar 21%, Taman Nasional 19,69%, hutan lindung 16,82% dan terakhir hutan produksi diskonversi 3,54%.

#### d. Perdagangan

Sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor penunjang dengan pertumbuhan positif dan fluktuatif sepanjang tahun 2011-2015. Tahun 2011 kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 16,61% yang tumbuh 4,55%, sedangkan tahun 2012 kontribusinya sebesar 16,17% bagi PDRB atau tumbuh 5,42%, tahun 2013 kontribusinya sebesar 16,02 atau tumbuh 5,81% dan tahun 2014 sebesar 16,32 atau tumbuh 5,59%. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2011, dimana peningkatannya didorong oleh meningkatnya peran subsektor perdagangan besar dan eceran.

**Grafik 2.4**



Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang KDA 2015

Pada tahun 2014, sektor perdagangan besar dan eceran, memberikan kontribusi sebesar Rp. 743.027,3 juta dalam PDRB dimana merupakan penyumbang terbanyak ke dua setelah sektor pertanian sebesar Rp. 1.556.094,6 juta.

Dilihat dari laju pertumbuhan, sektor perdagangan besar dan eceran menunjukkan tren lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkayang tahun 2014.

**e. Perindustrian**

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bengkulu (Kabupaten Dalam Angka 2015), perindustrian atau industri pengolahan memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bengkulu tahun 2011-2013 sebesar 0,09% dan tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 0,08%.

Salah satu sektor yang menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Bengkulu adalah sektor industri. Sektor industri yang ada sebagian besar adalah industri rumah tangga, kecil, dan menengah. Untuk itu, sektor ini perlu lebih dipacu untuk dapat lebih berperan dalam perekonomian apalagi mengingat pada saat awal krisis moneter, sektor ini mampu bertahan. Penggerak sektor industri di Kabupaten Bengkulu sebagian besar masih berupa industri rumah tangga dan industri kecil tetapi sampai saat ini, direktori jumlah usahanya juga belum tersedia. Banyaknya industri kecil formal yang tercatat pada tahun 2014 sebanyak 135 unit usaha dan industri kecil non formal sebanyak 170 unit usaha.

Kontribusi sektor industri mengalami penurunan dikarenakan dalam kurun 5 tahun terakhir industri Kabupaten Bengkulu masih bertumpu pada industri barang logam yang secara perlahan peranan industri logam mengalami penurunan potensi sumber daya alam dan manusia dalam upaya meningkatkan industri logam tersebut. Disamping itu, terbatasnya infrastruktur dasar, jalan, pelabuhan, dan energi menjadi kendala utama masuknya investasi industri skala besar.

Sesuai dengan potensi sumberdaya alam Kabupaten Bengkulu, industri yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri makanan (industri berbasis CPO) dan industri karet yang merupakan komoditi utama daerah.



**Tabel 2.48**  
**Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Kecil Formal**  
**Di Kabupaten Bengkulu Tahun 2010-2014**

Tahun	IHPK		ILMK		Jumlah	
	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja
2010	79	287	56	154	135	441
2011	79	287	56	154	135	441
2012	137	360	168	399	305	759
2013	137	360	168	399	305	759
2014	137	360	168	399	305	759

**f. Energi dan Sumberdaya Mineral**

Potensi bahan tambang di Kabupaten Bengkulu cukup menjanjikan jika dapat dimanfaatkan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menarik investor sehingga potensi pertambangan yang ada dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Bengkulu. Bahan tambang yang sudah dimanfaatkan antara lain jenis kaolin, bauksit, mangan, andesite, serta emas.

Adapun kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral terhadap PDRB ABHK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.49**  
**Kontribusi sektor Energi dan SDM terhadap PDRB ADHK**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun 2010-2014**

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Kontribusi PDRB sektor Pertambangan	104.833,9	109.414,5	115.877,1	122.585,1	129.706,4
Jumlah Kontribusi sektor Pengadaan Listrik dan Gas	388,5	410,3	442,3	455,2	484,1
Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Energi dan SDM	105.222,4	109.824,8	116.319,4	123.040,3	130.190,5
Jumlah PDRB ADHK	3.649.149,7	3.834.739,5	4.059.787,0	4.299.252,6	4.471.874,3
Kontribusi Sektor Energi dan SDM terhadap PDRB	2,883	2,864	2,865	2,862	2,911

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu KDA 2015

## g. Pariwisata

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bengkayang (KDA 2015), Hotel atau penginapan merupakan salah satu sarana akomodasi yang penting khususnya dalam sektor pariwisata. Pada tahun 2014, tercatat ada 12 penginapan di Kabupaten Bengkayang, yaitu 6 penginapan terdapat di Kecamatan Bengkayang, 3 penginapan di Kecamatan Samalantan, 2 penginapan di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, dan 1 penginapan di Kecamatan Sanggau Ledo. Dari seluruh penginapan yang ada, hanya tersedia 229 kamar.

## 2.4 ASPEK DAYA SAING

### 2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

#### a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa besarnya tingkat pengeluaran rumah tangga. Angka konsumsi rumah tangga per kapita Tahun 2011 sampai dengan 2014 di Kabupaten Bengkayang sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.50**  
**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita**  
**Di Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014**

URAIAN	TAHUN			
	2011	2012	2013	2014
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Makanan/Food	393.539	361.426	398.376	461.018
Non Makanan/Non Food	268.261	300.615	304.694	305.901
Total Pengeluaran RT	661.800	662.041	703.070	766.919
Jumlah Rumah Tangga	50.213	51.170	52.071	53.005
Pengeluaran Konsumsi rumah tangga perkapita	783,739	706,324	765,063	869,763

Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang KDA 2015

**b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk non pangan)**

Proporsi total pengeluaran rumah tangga non pangan terhadap total pengeluaran untuk Kabupaten Bengkayang adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.51**  
**Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Total Pengeluaran RT non	268.261	300.615	304.694	305.901	268.261
Total Pengeluaran RT	431.851	661.800	662.041	703.070	766.919
<b>Rasio</b>	35,918	40,535	45,407	43,337	39,887

Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang KDA 2015

Tahun 2010 diperoleh rasio konsumsi rumah tangga non pangan sebesar 35,92 %, terus membaik atau meningkat tahun 2011 menjadi 40,535 % selanjutnya di tahun 2012 terus meningkat menjadi 45,407 %. Namun di tahun 2013 dan 2014 berturut-turut menurun menjadi 43,337% dan 39,887%. Hal ini berarti bahwa semakin besar rasio maka semakin besar pula atraktif bagi kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Bengkayang.

Besar kecilnya proporsi pengeluaran merupakan salah satu cerminan kesejahteraan penduduk. Hal ini sesuai dengan teori Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran bukan makanan biasanya diidentikkan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, semakin besar proporsi pengeluaran makanan merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2014, dapat diketahui bahwa rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk kelompok makanan sebesar 461.018 rupiah dan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan pada kelompok non makanan pada tahun yang sama adalah sebesar 305.901 rupiah. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengeluaran penduduk Kabupaten

Bengkayang masih dalam kelompok barang makanan, yaitu sebesar 61,59 persen dari total pengeluaran yang digunakan adalah untuk konsumsi makanan sedangkan sisanya, yaitu sebesar 38,41 persen digunakan untuk kebutuhan non makanan.

Jika dilihat menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan, pola konsumsi berubah seiring dengan meningkatnya pengeluaran perkapita sebulan. Semakin tinggi total pengeluaran perkapita sebulannya, semakin kecil pula porsi pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi barang makanan dan sebaliknya, konsumsi untuk barang non makanan akan semakin besar.

#### **2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi sertasarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah.

##### **a. Aksesibilitas Daerah**

Tingkat aksesibilitas daerah dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses setiap kendaraan, melalui rasio dengan perbandingan panjang jalan yang tersedia per jumlah kendaraan bermotor.

##### **1) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan**

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan yang memberikan akses tiap kendaraan. Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan rasio diantara 0,16 - 0,41, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.52**  
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan**  
**Kabupaten Bengkayang Tahun 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
Panjang jalan (Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota)	1677,67	1677,67	1677,67	1677,67	1670,38
Jumlah kendaraan	5598	10475	7868	n.a	4112
<b>Ratio</b>	<b>0,30</b>	<b>0,16</b>	<b>0,21</b>	<b>n.a</b>	<b>0,41</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang KDA 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa penambahan panjang ruas jalan tidak berimbang dengan penambahan jumlah kendaraan.

#### **b. Penataan Wilayah**

Berdasarkan arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang, meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Bengkayang berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan No.733/Menhut-II/Tahun 2014 tanggal 20 Desember 2014 adalah sebesar 73.912 hektar yang terbagi atas kawasan Lindung dan kawasan Budidaya. Dalam kawasan Lindung, Hutan Taman Nasional Gn. Nyiut memiliki area terluas yaitu 39.440 hektar, kemudian hutan Lindung seluas 33.839 hektar dan cagar alam seluas 633 hektar.

**Tabel 2.53**  
**Kawasan Lindung di Kabupaten Bengkayang**  
**Berdasarkan RTRW Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034**

NO.	KAWASAN LINDUNG	LOKASI	LUAS (Ha)
1.	Taman Nasional Gunung Nyiut	Kec. Ledo, Suti Semarang, Tujuh Belas, Seluas dan Siding	39.440
2.	Taman Wisata Alam Laut Bengkayang	Kec. Sungai Raya Kepulauan	-
3.	Cagar Alam Gunung Nyiut Gunung Raya Pasi Lo Pat Fun Fui	Kec. Ledo, Tujuh Belas Kec. Monterado Kec. Monterado	111 514 8
4.	Hutan Lindung		

	Gunung Bawang	Kec. Lembah Bawang, Sungai Betung, Bengkayang dan Lumar.	9.969
	Gunung Pandan Puloh	Kec. Samalantan, Sungai Betung, Bengkayang, dan Teriak	6.589
	Penrinssen Sinjang Kawasan Hutan Lainnya	Kec. Seluas dan Siding Kec. Lumar, Suti Semarang dan Samalantan	17.079 202
5.	Kawasan Bergambut	Kec. Sungai Raya, Capkala, Sungai Raya Kepulauan, Samalantan, Monterado, Lembah Bawang, Seluas, Jagoi Babang dan Siding	-
6.	Kawasan Resapan Air	Gunung Bawang, Gunung Nyut, Gunung Pandan Puloh, Gunung Penrinsen Sinjang, Gunung Raya Pasi, Gunung Jalo dan Bukit Vandring	-
7.	Kawasan Sempadan Pantai	Kec. Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan	-
8.	Kawasan Sempadan Sungai Sungai Besar  Sungai Kecil	WS Sambas (Sungai Kumba, Bantanan, Selakau dan Sambas Kecil), WS Mempawah (Sungai Raya dan Sungai Duri) Tersebar di seluruh kecamatan	-
9.	Kawasan Sekitar Danau/Waduk Danau Sentagi Danau Tempoak, Separit, Payak, Batuk, Timo Amot dan Tekean Danau Kayu Abok Danau Kara Danau Serantangan, Taipi dan Kacamtai Danau Papan Tembawang	Kec. Bengkayang Kec. Lumar  Kec. Samalantan Kec. Teriak Kec. Monterado  Kec. Lembah Bawang	-
10.	Kawasan Sekitar Mata Air	Tersebar	-
11.	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	Kec. Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan	-
12.	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Rumah Adat Panjang, Tugu Perdamaian, Makam Nek Dari, Kubu Pertahanan/Intai Belanda Rumah Adat Baluk Gedung Pancasila Salip Raksasa, Tiang Bendera Cina dan Makam Asisten Residen Australia, Tugu peringatan Perang Kenceng Tiang Bendera Kesultanan Goa Romo Tugu Perbatasan Malindo	Kecamatan Samalantan  Kecamatan Siding Kecamatan Bengkayang Kecamatan Monterado  Kecamatan Teriak  Kecamatan Sanggau Ledo Kecamatan Jagoi Babang	-

13.	Kawasan Terumbu Karang	Pulau Lemukutan, Randayan dan Kabung di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan	-
14.	Kawasan pelestarian habitat populasi penyu	Pulau Baru dan Randayan	-

### c. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan hidup paling pokok bagi seluruh masyarakat. Penyedia kebutuhan air bersih Kabupaten Bengkayang adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Air bersih yang diproduksi oleh PDAM diharapkan dapat menjadi air baku yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum dan memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, jumlah air yang didistribusikan kepada pelanggan oleh PDAM selama tahun 2014 jumlah air bersih yang disalurkan mencapai 1.706.620 m<sup>3</sup> dengan nilai penjualan sebesar Rp. 2.557.923.375 rupiah.

Tingkat pelayanan air minum perpipaan kepada masyarakat di Kecamatan masih belum optimal karena belum semua lapisan masyarakat bisa mengaksesnya.

Penyebab utama kondisi ini adalah luasnya jangkauan wilayah pelayanan serta terbatasnya kapasitas produksi sumber air bersih PDAM. Untuk itu perlu segera dirumuskan kebijakan pelayanan air minum terutama pada daerah yang cakupan pelayanannya masih rendah.

**Tabel 2.54**  
**Produksi Air Bersih PDAM Bengkayang Menurut Jenis Pelanggan Tahun 2014**

Jenis Pelanggan	Produksi Terjual (M3)	Jumlah Pelanggan	Nilai Penjualan (Rp)
1	2	3	4
Sosial Umum	2.478	19	76.8180
Sosial Khusus	77.454	140	36.087.890
Rumah Tangga	1.068.282	4.196	1.402.245.105
Instansi Pemerintah	266.075	280	465.590.900
Niaga Kecil	234.311	826	488.394.220
Niaga Besar	47.847	143	124.837.135
Industri Kecil	1.682	2	5.401.180
Industri Besar	337	1	1.173.255
Industri Khusus	8.154	2	33.425.510
<b>Jumlah Total</b>	<b>1.706.620</b>	<b>5.609</b>	<b>2.557.923.375</b>

#### **d. Fasilitas Listrik dan Telekomunikasi**

Kebutuhan listrik masyarakat Bengkayang dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya Kabupaten Bengkayang. Pada tahun 2014, jumlah pelanggan listrik yang ada sebanyak 25.206 pelanggan dengan total produksi listrik sebesar 37.436.454 kwh pada tahun 2014.

Dilihat dari jenis pelanggannya, pelanggan jenis rumah tangga ada sebanyak 22.065 pelanggan, jenis usaha sebanyak 2.071 pelanggan, jenis industri sebanyak 2 pelanggan, jenis badan sosial sebanyak 788 pelanggan, dan jenis perkantoran sebanyak 280 pelanggan.

Di masa yang akan datang, diperlukan energi alternatif untuk membangkitkan kapasitas listrik yang semakin besar mengingat kebutuhan masyarakat akan listrik yang semakin meningkat.

Pada umumnya, di Kabupaten Bengkayang, listrik yang dihasilkan berasal dari pembangkit disel yang menggunakan bahan bakar minyak sehingga biaya operasional yang harus dikeluarkan sangat tinggi.

Kapasitas mesin yang ada dirasa sudah tidak mampu menampung kebutuhan listrik masyarakat. Pengembangan masalah kelistrikan juga harus mampu menjangkau ke wilayah yang paling terpencil sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat listrik.



**Tabel 2.55**  
**Jumlah Pelanggan Pengguna Listrik**  
**di Kabupaten Bengkayang**  
**Tahun 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
Rumah Tangga	14.037	15.978	15.575	20.593	22.065
Industri	1	1	1	2	2
Badan Sosial	614	653	653	770	788
Usaha	1.689	1.862	1.820	1.951	2.071
Perkantoran	183	189	189	272	280
Multi Guna	0	0	0	75	0
<b>Jumlah</b>	<b>16.524</b>	<b>18.503</b>	<b>18.238</b>	<b>23.663</b>	<b>25.206</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, KDA 2011-2015

**Tabel 2.56**  
**Banyaknya Produksi Terjual dan Nilai Penjualan Listrik**  
**Kabupaten Bengkayang**  
**Tahun 2010-2014**

Tahun	Produksi Terjual (KWH)	Nilai Penjualan (Rp)
1	2	3
2010	24.838.930	14.344.888.865
2011	26.952.534	18.472.187.020
2012	31.442.460	22.520.483.260
2013	38.700.337	25.559.926.288
2014	37.436.454	28.493.534.176

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, KDA 2011-2015

### 2.4.3 Keamanan dan Ketertiban

#### a. Angka Kriminalitas

Tindak kriminal yang tercatat di Kabupaten Bengkayang mengalami penurunan dari tahun 2010 (302 kasus) sampai tahun 2014 (133 kasus), atau turun sebesar 56,29%. Kasus kriminal yang terbesar adalah kasus pencurian. Dilihat dari angka kriminal, tahun 2013 sebesar 7,6%, sedangkan tahun 2014 menjadi 5,71% sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.57**  
**Angka Kriminalitas yang Dilaporkan di Kabupaten Bengkulu**  
**Tahun 2013-2014**

<b>Jenis Kriminal</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Pencurian	38	20	26	76	70
Penganiayaan	49	55	66	58	39
Pencurian Kendaraan Bermotor	5	5	11	-	-
Pengrusakan	20	9	14	-	-
Penggelapan	14	18	14	-	-
Kekerasan dalam rumah tangga	19	14	22	-	-
Penipuan	10	17	17	6	6
Pengeroyokan	15	9	8	-	-
Pencurian dengan pemberatan	6	8	4	-	-
Pemeriksaan	6	5	1	27	10
Perbuatan tidak menyenangkan	12	11	3	-	-
Penyerobotan Tanah	8	11	1	-	-
Pengancaman	4	14	2	-	-
Penemuan Mayat	6	13	8	3	1
Perjudian	3	9	8	-	-
Narkoba	3	0	0	5	7
Illegal Logging	5	10	3	-	-
Kejahatan lainnya	79	88	114	-	-
Jumlah Tindak Kriminal	302	316	322	175	133
Jumlah Penduduk	215.277	220.067	224.407	228.771	232.873
<b>Angka Kriminal</b>	14,03	14,36	14,37	7,6	5,71

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu, KDA 2011-2015

## **b. Bencana Alam**

Kondisi Bencana Alam di Kabupaten Bengkayang sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 didominasi oleh bencana banjir, angin ribut dan kebakaran hutan. Banjir sering terjadi terutama pada puncak musim penghujan yang disusul dengan kejadian angin ribut/angin puting Beliung. Sedangkan bencana alam yang dipandang cukup berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan dan perekonomian adalah kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun.

Jumlah titik api (*hot spot*) di Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2015 mencapai 35 titik dari 12 kasus yang terjadi. Hal ini dikarenakan musim kemarau yang dialami oleh seluruh daerah di Kabupaten Bengkayang.

Untuk bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bengkayang, pada tahun 2015 terdapat 7 kasus banjir yang terjadi yang menyebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Daerah Kabupaten Bengkayang yang berisiko terkena banjir adalah Kecamatan Kecamatan Ledo dan Seluas.

### **2.4.4 Tingkat Ketergantungan**

Penduduk Kabupaten Bengkayang termasuk dalam kelompok usia muda. Hal ini terlihat dari masih banyaknya penduduk yang masuk dalam kelompok usia muda (dibawah 20 tahun), yaitu sebesar 42,15 persen. Dari pembagian penduduk berdasarkan kelompok umur, dapat kita peroleh rasio beban ketergantungannya (*Dependency Ratio*). Rasio beban ketergantungan di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2013 adalah sebesar 55,74. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung sekitar 56 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

Bertambahnya jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) berakibat pada menurunnya rasio ketergantungan yaitu 59,58% pada tahun 2010 menurun menjadi 55,42% pada tahun 2014.

**Tabel 2.58**  
**Rasio Ketergantungan Tahun 2010-2014**

<b>Uraian</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Jumlah penduduk usia < dibawah 15th	73.832	75.300	76.791	74.299	75.077
Jumlah penduduk usia > 64 tahun	6.540	6.619	6.747	7.579	7.962
Jumlah penduduk Usia tidak produktif	80.372	81.919	83.538	81.878	83.039
Jumlah penduduk usia 15 - 64	134.905	138.148	140.869	146.893	149.834
<b>Total Jumlah Penduduk</b>	<b>215.277</b>	<b>220.067</b>	<b>224.407</b>	<b>228.771</b>	<b>232.873</b>
<b>Rasio ketergantungan</b>	<b>59,58,</b>	<b>59,28</b>	<b>59,31</b>	<b>55,74</b>	<b>55,42</b>

#### 2.4.5 Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah.

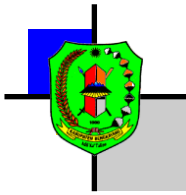
Adapun destinasi prioritas yang ada di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Gunung Nyiut dan sekitarnya
2. Bukit Jamur Bengkayang
3. Riam Palayo
4. Pengembangan Kota Bengkayang
5. Desa Wisata, Desa Pisak Dan Sekitar
6. Arung Jeram
7. Wisata Religi Merasap
8. Air Terjun Merasap
9. Air Terjun Panggar.
10. Bendungan Sinar Tebudak
11. Pertanian Organik Terpadu
12. Pusat Oleh-Oleh
13. Desa Wisata Dawar Dan Sekitar
14. Desa Wisata Jagoi Babang
15. Kampung Budaya Jagoi Babang
16. Sentra Produksi Kerajinan Rotan
17. Pasar Tradisional Perbatasan

18. Teckno Wisata
19. Pantai Kura-Kura
20. Pulau Kabung
21. Pulau Lemukutan
22. Pulau Seluas

# 3

## Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan



## *BAB III*

# *GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN*

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

### **3.1 KINERJA KEUANGAN TAHUN 2011-2015**

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah terkait erat dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD baik dilihat dari sisi Pendapatan daerah yang meliputi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang

sah, sisi Belanja Daerah berdasarkan ketepatan pengalokasian Belanja Daerah serta Sisi Pembiayaan daerah untuk melihat sejauh mana kinerja Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD ditahun sebelumnya.

### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkayang tergambar pada struktur APBD yaitu : (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang terdiri dari komponen Belanja daerah dan Pengeluaran Pembiayaan daerah.

Secara umum Komponen APBD terdiri dari :

#### **Komponen Pendapatan :**

1. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah;
2. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/ Bagi hasil Bukan Pajak, dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; dan
3. Lain-lain PAD yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

#### **Komponen Belanja :**

1. Belanja Tidak langsung yang didalamnya terdiri atas belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya dan Belanja Tidak Terduga; dan
2. Belanja langsung yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.



**Komponen Pembiayaan :**

1. Penerimaan Pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan.

Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Bengkulu berdasarkan rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Perkembangan APBD Kabupaten Bengkulu**  
**Tahun 2011-2015**

NO	URAIAN	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>546,838,883,530.15</b>	<b>579,631,583,692.00</b>	<b>680,490,962,984.00</b>	<b>749,976,898,959.00</b>	<b>972.868.785.894,21</b>
<b>I.1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH ASLI</b>	<b>19,383,549,571.03</b>	<b>20,592,734,600.00</b>	<b>25,000,000,000.00</b>	<b>33,551,000,000.00</b>	<b>54,395,300,163.21</b>
1	PAJAK DAERAH	3,000,000,000.00	3,437,000,000.00	4,500,000,000.00	8,648,186,489.00	10,900,000,000.00
2	RETRIBUSI DAERAH	6,000,000,000.00	9,272,734,600.00	10,000,000,000.00	12,608,538,574.00	15,870,880,000.00
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	2,120,241,565.43	2,077,492,686.00	3,500,000,000.00	1,746,813,511.00	2,379,794,370.21
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	8,263,308,005.60	5,805,507,314.00	7,000,000,000.00	10,547,461,426.00	25,244,625,793.00
<b>I.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN/ PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>865.203.181.839,00</b>	<b>970.706.170.952,00</b>	<b>920.636.282.350,00</b>	<b>1.115.660.159.302,00</b>	<b>739.245.099.000,00</b>
5	BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK/SUMBER ALAM	36,808,336,591.00	37,239,263,660.53	26,012,201,874.00	29,099,986,442.00	29,633,778,000.00
6	DANA ALOKASI UMUM	340,561,423,000.00	399,692,985,000.00	457,245,355,000.00	494,245,071,000.00	529,863,441,000.00
7	DANA ALOKASI KHUSUS	59,116,700,000.00	60,067,270,000.00	91,999,300,000.00	89,401,960,000.00	179,747,880,000.00
<b>I.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>22.344.843.744,00</b>	<b>27.608.888.026,00</b>	<b>81.047.836.439,00</b>	<b>6.095.293.000,00</b>	<b>179.228.386.731,00</b>
8	DBH PAJAK DARI PROV DAN PEMDA LAIN	15,735,107,928.12	20,623,696,431.47	18,756,047,270.00	23,296,178,517.00	39,810,875,731.00
9	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	59,021,766,440.00	29,702,434,000.00	38,621,858,840.00	40,096,503,000.00	101,801,311,000.00

10	BANTUAN KEUANGAN DARI PROV/ PEMDA LAINNYA	16,212,000,000.00	11,713,200,000.00	22,856,200,000.00	40,286,200,000.00	37,616,200,000.00
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	<b>580.794.642.651,15</b>	<b>602.933.441.005</b>	<b>734.574.606.544</b>	<b>855.616.845.963</b>	<b>1.022.199.118.992</b>
<b>II.1</b>	<b>BELANJA TAK LANGSUNG</b>	<b>267.104.183.143,72</b>	<b>290.993.051.400,00</b>	<b>309.807.711.365,00</b>	<b>338.782.174.001,00</b>	<b>462.192.465.975,24</b>
11	BELANJA PEGAWAI	228,923,937,572.72	252,323,014,342.00	280,329,943,382.00	298,363,575,806.00	359,235,843,825.00
12	BELANJA HIBAH	16,901,809,621.00	15,466,650,000.00	4,172,755,000.00	10,139,000,000.00	34,140,166,028.00
13	BELANJA BANTUAN SOSIAL	5,775,000,000.00	4,178,000,000.00	6,160,000,000.00	5,554,500,000.00	13.276.651.000.00
14	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	14,603,435,950.00	16,953,200,000.00	18,212,200,000.00	23,886,884,415.00	59.433.908.581.00
15	BELANJA TIDAK TERDUGA	900,000,000.00	2,072,187,058.00	932,812,983.00	838,213,780.00	2,000,000,000.00
<b>II.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>313.690.459.507,43</b>	<b>311.940.389.605,00</b>	<b>424.766.895.179,00</b>	<b>516.834.671.962,00</b>	<b>560.006.653.017,00</b>
16	BELANJA PEGAWAI	19,827,539,580.00	24,968,346,528.48	30,862,782,380.00	40,160,864,120.00	42,107,690,365.00
17	BELANJA BARANG DAN JASA	138,404,835,480.43	144,007,139,206.52	167,839,089,787.00	179,235,691,992.95	186,131,151,001.66
18	BELANJA MODAL	155,458,084,447.00	142,964,903,870.00	226,065,023,012.00	297,438,115,849.05	179,801,413,533.34
	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(33,955,759,121.00)</b>	<b>(23,301,857,313.00)</b>	<b>(54,083,643,560.00)</b>	<b>(105,639,947,004.00)</b>	<b>(49.330.333.050)</b>
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>					
21	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	38,935,504,993.00	43,513,118,985.00	63,263,389,432.00	114,662,004,964.00	56.400.318.463,03
22	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4,979,745,872.00	20,211,261,672.00	9,179,745,872.00	9,022,057,960.00	5,569,553,802.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>33,955,759,121.00</b>	<b>23,301,857,313.00</b>	<b>54,083,643,560.00</b>	<b>105,639,947,004.00</b>	<b>16,231,903,685.00</b>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	38,935,504,993.00	43,513,118,985.00	63,263,389,432.00	114,662,004,964.00	25,000,000,000.00

Sumber : BPKAD Kab. Bengkulu (2015)

Dalam melihat kinerja keuangan daerah maka setiap komponen pendapatan, Belanja dan pembiayaan perlu dilihat kembali seberapa besar realisasi dan kontribusi disetiap tahun. hal ini dilakukan untuk mendapat gambaran perkembangan kemampuan keuangan daerah selama ini.

### 3.1.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Didalam struktur APBD selama kurun waktu tahun 2011-2015, berdasarkan target dan realisasi yang ada, maka diperoleh gambaran tingkat perkembangan realisasi Pendapatan Daerah atas target yang telah ditetapkan. Realisasi yang terjadi sebenarnya belum bisa dikatakan efektif karena berdasarkan persentase dari total target yang ditetapkan dari tahun 2011-2015, Pemerintah Kabupaten Bengkayang baru merealisasikan sebesar 97,82% dan belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan pada tiga tahun awal Pemerintah kabupaten Bengkayang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Walaupun kondisi tersebut berkembang pada tahun 2014 dimana realisasi yang terjadi dapat melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 100,43 %, akan tetapi pada tahun 2015 realisasi yang terjadi kembali tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah kabupaten Bengkayang**  
**Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Setelah Perubahan APBD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2011	546.838.883.530,15	531.259.371.404,26	97.15
2012	579.631.583.692,00	574.111.043.436,53	99.05
2013	680.490.962.984,00	676.220.249.538,70	99.37
2014	749.976.898.959,00	753.205.688.895,26	100.43
2015	972.868.785.894,21	917.929.130.693,17	94,35
<b>Total</b>	<b>3.529.807.115.059,36</b>	<b>3.452.725.483.967,92</b>	<b>97,82</b>

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Selama periode 2011-2015, target pendapatan daerah sebesar Rp. **3.529.807.115.059,36** dengan realisasi Rp **3.452.725.483.967,92** atau pencapaian target sebesar **97,82** persen.

Berdasarkan pencermatan terhadap realisasi Pendapatan Daerah, Proporsi Komponen pendapatan terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang selama Tahun Anggaran 2011-2015 ditunjukkan pada table 3.3

**Tabel 3.3**  
**Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan terhadap Total**  
**Pendapatan daerah Kabupaten Bengkayang**  
**Tahun Anggaran 2011-2015**

NO	JENIS PENERIMAAN	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	RATA-RATA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.91	3.12	3.35	5.54	4.30	3.88
2	DANA PERIMBANGAN/ PENDAPATAN TRANSFER	80.80	86.08	84.85	83.02	76.47	81.98
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	16.29	10.81	11.79	11.54	19.23	14.14
	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Dari table diatas terlihat bahwa Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Kabupaten Bengkayang dalam kurun waktu 2011–2015 mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2014, ditahun 2011 PAD berada pada angka 2.91% dan hingga pada tahun 2014 masuk pada angka 5.54%. hal ini merupakan gambaran positif bagi perkembangan PAD Kabupaten Bengkayang. walaupun pada tahun 2015 kontribusi PAD mengalami penurunan, akan tetapi hal tersebut diakibatkan adanya perubahan kebijakan ditingkat Pemerintah pusat sehingga berpengaruh signifikan pada besaran Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah yang diterima oleh daerah sehingga secara tidak langsung mempengaruhi persentase kontribusi PAD pada Pendapatan Daerah.

Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi PAD Kabupaten Bengkayang masih dapat terus berkembang jika dikelola dengan baik dan didukung dengan data-data yang valid. Perkembangan yang terjadi kiranya perlu terus didukung, karena jika dilihat secara lebih spesifik kontribusi PAD masih belum terlalu signifikan. Hal tersebut juga bisa terlihat pada kurun waktu tahun 2011-2015,

kontribusi Dana Perimbangan terhadap APBD Kabupaten Bengkayang mencapai 81,98% sedangkan Kontribusi rata-rata PAD hanya mencapai 3.88%. Dari kondisi yang ada terlihat jelas bahwa struktur pendapatan daerah Kabupaten Bengkayang masih sangat didominasi oleh Dana Perimbangan dan hal ini menggambarkan bahwa masih besarnya ketergantungan daerah terhadap Pemerintah pusat.

Selain itu jika dilihat dari Kontribusi Rata-rata PAD Kabupaten Bengkayang terhadap Kontribusi Rata-rata PAD secara Nasional mulai tahun 2011-2014, juga masih terdapat kesenjangan yang sangat tinggi, Kontribusi yang diberikan oleh PAD Kabupaten Bengkayang terhadap total Pendapatan daerah masih berada jauh diangka rata-rata Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan daerah Secara Nasional. Kondisi tersebut bisa dilihat pada table 3.4

**Tabel 3.4**  
**Rata-Rata Kontribusi Pendapatan Kabupaten Bengkayang terhadap Nasional Tahun 2011-2014**

WILAYAH	PAD (%)	DANA PERIMBANGAN (%)	PENDAPATAN LAIN YANG SAH (%)
1	2	3	4
Kab/Kota Se-Indonesia	12.31	74.02	13.67
Kab. Bengkayang	3.88	81.98	14.14

Sumber : Data Dirjen Keuangan daerah yang Diolah

Dari data yang ada terlihat bahwa PAD Kabupaten Bengkayang sangat kecil memberikan kontribusinya bagi Pendapatan Daerah. Selain itu data yang ada juga menunjukkan angka kontribusi PAD Kabupaten Bengkayang yang masih berada jauh dibawah angka Kontribusi Rata-rata PAD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kondisi yang ada ini harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal dengan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Kabupaten Bengkayang untuk kedepannya.

Secara terperinci, target dan realisasi pendapatan daerah selama periode tahun anggaran 2011-2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

## 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terdiri atas: (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain PAD yang sah. Selama periode 2011-2015, dari hasil akumulasi target tahunan sebesar Rp 98.527.284.171.03, realisasi yang ada Rp. 93.626.085.168,22 atau capaiannya sebesar 95.03%, seperti pada table 3.5

**Tabel 3.5**  
**Target dan Realisasi PAD**  
**Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011-2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%
2011	19.383.549.571,03	15.459.810.618,11	79.76
2012	20.592.734.600,00	17.887.747.406,06	86.86
2013	25.000.000.000,00	22.686.811.973,70	90.75
2014	33.551.000.000,00	37.591.715.170,35	112.04
2015	54.395.300.163,21	39.464.145.352,07	72.55
<b>TOTAL</b>	<b>152.922.584.334.24</b>	<b>133.090.230.520,29</b>	<b>87.03</b>

Berdasarkan data yang tersedia, realisasi PAD selalu mengalami peningkatan pada tahun 2011-2014, akan tetapi pada tahun 2015 terjadi penurunan yang sangat signifikan secara persentase. Hal ini jika di lihat lebih rinci, dipengaruhi oleh faktor tidak tercapainya target yang telah ditetapkan karena terjadi kenaikan penargetan yang cukup signifikan pada tahun 2015.

Oleh karenanya secara umum sektor Pendapatan belum bisa dikatakan sepenuhnya efektif, karena dari target Rp 152.922.584.334,24 terealisasi sebesar Rp **133.090.230.520,29** atau realisasi berada pada 87,03%. Namun perkembangan realisasi yang terus meningkat pada tahun 2011-2015 menunjukkan konsistensi Pemerintah kabupaten Bengkayang untuk mendorong peningkatan Pendapatan dari komponen PAD.

Capaian yang ada merupakan kontribusi dari komponen-komponen pendukung PAD. Masing-masing komponen akan dijelaskan kembali secara rinci tentang target dan realisasi yang dicapai.

**Tabel 3.5**  
**Target dan Realisasi Pajak**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Setelah Perubahan APBD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2011	3.000.000.000,00	1.848.663.690,83	61.62
2012	3.437.000.000,00	3.976.908.980,44	115.71
2013	4.500.000.000,00	6.150.675.417,38	136.68
2014	8.648.186.489,00	8.900.909.054,04	102.92
2015	10.900.000.000,00	7.894.485.133,51	72.43
<b>TOTAL</b>	<b>30.485.786.489,00</b>	<b>28.771.642.276,20</b>	<b>94.38</b>

Pertumbuhan pada Pajak daerah dinilai sudah sangat baik, hal tersebut terlihat dari peningkatan realisasi yang terjadi dari tahun 2011 hingga tahun 2014 dan rata-rata disetiap tahunnya telah melampaui target yang telah ditetapkan. Akan tetapi kondisi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015, dikarenakan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Sehingga berdasarkan data realisasi dari tahun 2011-2015, total realisasi pajak daerah berada pada angka 94,38 % .

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Retribusi**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Setelah Perubahan APBD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2011	6.000.000.000,00	5.575.794.650,38	92.93
2012	9.272.734.600,00	6.644.456.739,20	71.66
2013	10.000.000.000,00	7.442.363.470,63	74.42
2014	12.608.538.574,00	13.076.441.317,71	103.71
2015	15.870.880.000,00	10.609.109.695,45	66.85
<b>TOTAL</b>	<b>53.752.153.174,00</b>	<b>43.348.165.873,37</b>	<b>80.65</b>

Berdasarkan table diatas selama periode tahun 2011-2015, pendapatan daerah Kabupaten Bengkulu dari sisi retribusi juga bisa dikatakan belum efektif karena realisasi yang dicapai belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Target retribusi secara akumulasi sebesar Rp **53.752.153.174,00**, dan realisasinya baru sebesar Rp **43.348.165.873,37** atau 80,65 persen.

Akan tetapi jika dilihat data 2011-2014, pendapatan daerah dari sisi retribusi selalu mengalami peningkatan walaupun secara persentase pertumbuhannya bersifat fluktuatif. Kondisi ini merupakan gambaran kinerja positif pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan PAD dari sisi Retribusi dan bahkan pada tahun 2014 realisasi retribusi mampu melampaui target yang telah ditetapkan (103,71%) dan secara persentase pertumbuhan juga sangat jauh meningkat (75,70%) dari tahun sebelumnya (12,01%).

Selanjutnya untuk Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari Bagian Laba atas penyertaan Modal yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada beberapa Perusahaan Milik daerah. Hanya saja dari beberapa Penyertaan Modal yang diberikan pada Perusahaan Milik Daerah, selama ini kontribusi langsung hanya berasal dari Bagian Laba atas penyertaan Modal pada Bank Kalbar. Adapun data dapat dilihat pada table 3.7.

**Tabel 3.7**  
**Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang**  
**Dipisahkan Kabupaten Bengkayang**  
**Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Setelah Perubahan APBD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2011	2.120.241.565,43	2,120,241,565.43	100
2012	2.077.492.686,00	2,077,492,686.83	100
2013	3.500.000.000,00	1,625,350,698.23	46.44
2014	1.746.813.511,13	1,746,813,511.13	100
2015	2.379.794.370,21	2.387.121.556,12	100.31
<b>TOTAL</b>	<b>11.824.342.132,64</b>	<b>9.957.020.017,74</b>	<b>84.21</b>

Selama Periode 2011-2015, target hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. **11.824.342.132,64** realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. **9.957.020.017,74** atau 84.21 persen. Hal ini dikarenakan besarnya penerimaan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah khususnya pada rekening Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan,



tergantung pada besaran laba bersih yang diperoleh oleh Bank Kalbar dan kemudian dihitung dengan melihat besaran kontribusi modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Bank kalbar tersebut, sehingga dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi kondisi yang fluktuatif terhadap penerimaan daerah.

**Tabel 3.8**  
**Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah**  
**Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Setelah Perubahan APBD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2011	8.263.308.005,06	5.915.110.711,47	71,58
2012	5.805.507.314,00	5.188.888.999,59	89,38
2013	7.000.000.000,00	7.468.422.387,46	106,69
2014	10.547.461.426,00	13.867.551.287,47	131,48
2015	25.244.625.793,00	18.573.428.966,99	73,57
<b>TOTAL</b>	<b>56.860.902.538,6</b>	<b>51.013.402.352,98</b>	<b>89,72</b>

Penerimaan lain-lain PAD yang sah utamanya bersumber dari :

(a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan ; (b) Jasa Giro; (c) Pendapatan Bunga; (d) Tuntutan Ganti Rugi (TGR); (e) Komisi; (f) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; (g) Pendapatan denda Pajak; (h) Pendapatan Hasil eksekusi atas Jaminan; (i) pendapatan dari pengembalian; (j) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (k) pendapatan Badan Layanan umum daerah (BLUD). Selama kurun waktu 2011-2015, target penerimaan dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp **56.860.902.538,6** sedangkan untuk realisasinya mencapai Rp **51.013.402.352,98** atau mengalami pencapaian sebesar 89,72 Persen. Jika melihat data pertahunnya, pada tahun 2013 dan 2014 terjadi peningkatan penerimaan yang cukup besar, hal ini dikarenakan adanya kontribusi sumber penerimaan baru yang berasal dari dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang melekat pada urusan Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan, khususnya pada Puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Bengkayang. Selain itu terdapat kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah sehingga berdampak positif pada peningkatan penerimaan yaitu Deposito pada rekening Lembaga Keuangan (Bank) yang menghasilkan Bunga Deposito bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Data dapat dilihat pada table 3.9.

**Tabel 3.9**  
**Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015**

NO	JENIS PENERIMAAN	REALISASI				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	LAIN-LAIN PAD YANG SAH					
	a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		25.974.000,00	7.231.000,00	340.575.600,00	33.922.000,00
	b. Penerimaan Jasa Giro	3.669.982.036,78	1.726.181.336,40	1.341.068.621,93	2.208.916.626,75	2.523.150.213,03
	c. Penerimaan Bunga Deposito	1.590.855.026,00	2.340.703.869,43	5.582.616.070,83	6.763.041.440,63	8.771.014.018,56
	d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	322.864.913,02	179.311.135,76	144.830.807,20	224.855.024,00	1.031.815.506,47
	e. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	122.189.986,65	266.624.572,00	61.190.578,50	419.988.257,53	732.054.759,48
	f. Pendapatan Dari Pengembalian	178.133.040,00	650.094.086,00	465.022.470,00	1.617.354.838,56	515.903.589,18
	g. Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-		2.292.819.500,00	4.755.377.500,00
	h. Pendapatan denda Pajak	-	-	-	-	59.461.142,00
	i. Pendapatan Lain-lain	31.085.709,02	-		-	-

#### 1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diterima dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas : (a) Dana Bagi hasil Pajak/ Bukan Pajak; (b) Dana Alokasi Umum (DAU); (c) Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara keseluruhan target Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan selama periode tahun Anggaran 2011-2015 sebesar Rp **2.860.734.951.567,53** sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang setiap tahun diterbitkan, sedangkan akumulasi Dana

Perimbangan yang dapat direalisasikan sebesar Rp. **2.816.659.662.090,90** atau secara persentase realisasi yang ada mencapai 98,46 persen, disajikan pada table 3.10

**Tabel 3.10**  
**Target dan Realisasi Dana Perimbangan**  
**Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011-2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%
2011	436.486.459.591,00	429.273.733.397,00	98,35
2012	496.999.518.660,53	494.183.965.599,00	99,43
2013	575.256.856.874,00	573.787.506.295,00	99,74
2014	612.747.017.442,00	617.478.031.084,00	100,77
2015	739.245.099.000,00	701.936.425.715,00	94,95
<b>TOTAL</b>	<b>2.860.734.951.567,53</b>	<b>2.816.659.662.090,90</b>	<b>98,46</b>

Secara keseluruhan , target penerimaan dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama periode tahun anggaran 2011-2015 adalah sebesar Rp **158.793.566.567.53** sedangkan realisasinya mencapai Rp **154.671.456.090.90** atau mencapai **97,40** persen dari target, seperti yang disajikan pada table 3.11

**Tabel 3.11**  
**Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil pajak/Bukan pajak**  
**Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011-2014**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%
2011	36,808,336,591.00	29,595,610,397.90	80.40
2012	37,239,263,660.53	34,423,710,599.00	92.44
2013	26,012,201,874.00	31,713,340,295.00	121.92
2014	29,099,986,442.00	33,831,000,084.00	116.26
2015	29.633.778.000,00	25.107.794.715,00	84.73
<b>TOTAL</b>	<b>158.793.566.567.53</b>	<b>154.671.456.090.90</b>	<b>97.40</b>

Penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum selama periode tahun anggaran 2011-2015 adalah sebesar Rp **2.221.608.275.000,00** dan realisasinya juga sebesar Rp **2.221.608.275.000,00** atau **100** persen dari target, seperti yang disajikan pada table 3.12.

**Tabel 3.12**  
**Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum**  
**Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011-2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Pertumbuhan (%)
2011	340,561,423,000.00	340,561,423,000.00	100.00	
2012	399,692,985,000.00	399,692,985,000.00	100.00	17,36
2013	457,245,355,000.00	457,245,355,000.00	100.00	14,40
2014	494,245,071,000.00	494,245,071,000.00	100.00	8,09
2015	529.863.441.000,00	529.863.441.000,00	100.00	7.21
<b>TOTAL</b>	<b>2.221.608.275.000,00</b>	<b>2.221.608.275.000,00</b>	<b>100.00</b>	

Melihat data yang ada perkembangan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) selalu mengalami peningkatan, akan tetapi jika dilihat secara persentase pertumbuhan dari tahun 2011 hingga 2015 tren yang terjadi malah mengalami penurunan. Hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan, bahwa pada kenyataannya daerah di tahun-tahun kedepan harus mengurangi ketergantungan terhadap dana yang bersumber dari luar dan meningkatkan kemandirian dengan penguatan Sector Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya Secara keseluruhan , target penerimaan dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus selama periode tahun anggaran 2011-2015 adalah sebesar Rp **480.333.110.000,00** sedangkan realisasinya mencapai Rp **440.379.931.000,00** atau mencapai **91.68** persen dari target, seperti yang disajikan pada table 3.13

**Tabel 3.13**  
**Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus**  
**Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011-2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%
2011	59,116,700,000.00	59,116,700,000.00	100.00
2012	60,067,270,000.00	60,067,270,000.00	100.00
2013	91,999,300,000.00	84,828,811,000.00	92.21
2014	89,401,960,000.00	89,401,960,000.00	100.00
2015	179.747.880.000,00	146.965.190.000,00	81.76
<b>TOTAL</b>	<b>480.333.110.000,00</b>	<b>440.379.931.000,00</b>	<b>91.68</b>

Jika melihat data yang tersedia, pada tahun 2011-2014 Realisasi yang ada merupakan indikasi positif adanya penyerapan anggaran yang terjadi pada alokasi dana yang dikucurkan oleh pusat kepada daerah, karena pada dasarnya transfer dana khususnya untuk dana berasal dari DAK regular dilakukan oleh pusat dengan pertimbangan progress atau kemajuan penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan. Akan tetapi pada tahun 2015 terjadi penurunan progress yang berdampak pada rata-rata daya serap secara kumulatif dari tahun 2011-2015 yaitu hanya mencapai 91,68 persen. Hal ini disebabkan adanya kucuran dana berupa Dana Alokasi Khusus Usulan Daerah yang dialokasikan ditengah tahun berjalan sehingga berdampak pada ketidakmampuan SKPD teknis untuk mengelola dana tersebut dengan keterbatasan waktu yang tersedia.

## 2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah terdiri atas : (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya, (d) Dana Transfer Pusat, (e) Dana Insentif daerah dan (f) Lain-lain penerimaan. Target lain-lain pendapatan daerah yang sah secara akumulasi sebesar Rp. **516.149.579.157,59** sedangkan Realisasi yang ada sebesar Rp. **502.975.591.356,63** atau secara persentase mencapai 97,45 persen. Kondisi yang ada tergambar pada table 3.14

**Tabel 3.14**  
**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Setelah Perubahan APBD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2011	90,968,874,368.12	86,525,827,388.25	95.12
2012	62,039,330,431.47	62,039,330,431.47	100.00
2013	80,234,106,110.00	79,745,931,270.00	99.39
2014	103,678,881,517.00	98,135,942,640.91	94.65
2015	179.228.386.731,00	176.528.559.626,00	98.49
<b>TOTAL</b>	<b>516.149.579.157,59</b>	<b>502.975.591.356,63</b>	<b>97.45</b>

Selama periode tahun anggaran 2011-2015 Target lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya secara akumulasi sebesar Rp. **118.221.905.877,59** sedangkan Realisasi yang ada sebesar Rp. **105.487.261.916,73** atau secara persentase mencapai **89,23** persen. Kondisi yang ada tergambar pada table 3.15

**Tabel 3.15**  
**Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Setelah Perubahan APBD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2011	15,735,107,928.12	11,243,229,948.25	71.45
2012	20,623,696,431.47	20,623,696,431.47	100.00
2013	18,756,047,270.00	18,756,047,270.00	100.00
2014	23,296,178,517.00	17,753,239,640.91	76.21
2015	39.810.875.731,00	37.111.048.626,10	93.22
<b>TOTAL</b>	<b>118.221.905.877,59</b>	<b>105.487.261.916,73</b>	<b>89.23</b>

Target lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari dana penyesuaian dan otonomi khusus secara akumulasi sebesar Rp. **269.243.873.280,00** sedangkan Realisasi yang ada sebesar Rp. **268.804.529.440.00** atau secara persentase mencapai **99.84** persen. Kondisi yang ada tergambar pada table 3.16

**Tabel 3.16**  
**Target dan Realisasi Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Setelah Perubahan APBD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2011	59,021,766,440.00	59,070,597,440.00	100.08
2012	29,702,434,000.00	29,702,434,000.00	100.00
2013	38,621,858,840.00	38,133,684,000.00	98.74
2014	40,096,503,000.00	40,096,503,000.00	100.00
2015	101.801.311.000,00	101.801.311.000,00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>269.243.873.280,00</b>	<b>268.804.529.440.00</b>	<b>99.84</b>

Adapun rincian penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus selama rentang waktu 5 tahun sebelumnya, dijabarkan pada table 3.17

**Tabel 3.17**  
**Rincian Realisasi Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus**  
**Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011-2015**

NO	JENIS PENERIMAAN	REALISASI				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
1	1. DANA PENYESUAIAN DAN OTSUS					
	2. Dana Penyesuaian Bidang Pendidikan (Tunj. Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru PNS)	37.326.536.440	29.702.434.000	38.133.684.000	40.096.503.000	68.012.418.000
	3. Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah	9.900.000.000	-	-	-	-
	4. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	11.844.061.000	-	-	-	-
	5. Dana Otonomi Khusus (ADD)	-	-			33.788.893.000

Dari data yang tersedia dapat digambarkan bahwa selama rentang waktu lima tahun sebelumnya, kontribusi Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus adalah bersumber dari alokasi dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang berupa Program Khusus antara lain Dana Penyesuaian Bidang Pendidikan, Dana Penyesuaian Infrastruktur daerah dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID). Pada tahun 2011, terdapat kontribusi dana yang bersumber dari Pusat berupa Dana Penyesuaian Infrastruktur dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, akan tetapi untuk tahun-tahun berikutnya tidak lagi dialokasikan. Sedangkan untuk dana penyesuaian Bidang Pendidikan terdapat konsistensi penganggaran dari tahun ketahun walaupun secara besaran bersifat fluktuatif.

Selanjutnya, target lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya secara akumulasi sebesar Rp. **91,067,600,000.00** dan Realisasi sebesar **Rp. 91,067,600,000.00** atau secara persentase tercapai **100** persen. Kondisi yang ada tergambar pada table 3.18

**Tabel 3.18**  
**Target dan Realisasi Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Pertumbuhan
2011	16,212,000,000.00	16,212,000,000.00	100.00	
2012	11,713,200,000.00	11,713,200,000.00	100.00	(27.75)
2013	22,856,200,000.00	22,856,200,000.00	100.00	95.13
2014	40,286,200,000.00	40,286,200,000.00	100.00	76.26
2015	37.616.200.000,00	37.616.200.000,00	100.00	
<b>TOTAL</b>	<b>128.683,800,000.00</b>	<b>128.683,800,000.00</b>	<b>100.00</b>	

**Tabel 3.19**  
**Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2015**

NO	JENIS PENERIMAAN	PERTUMBUHAN				
		2011-2012 (%)	2012-2013 (%)	2013-2014 (%)	2014-2015 (%)	RATA-RATA (%)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>8,07</b>	<b>17,79</b>	<b>11,38</b>	<b>21,87</b>	<b>14,78</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>15,70</b>	<b>26,83</b>	<b>65,70</b>	<b>4,98</b>	<b>28,30</b>
1	PAJAK DAERAH	115,12	54,66	44,71	(11,31)	50,80
2	RETRIBUSI DAERAH	19,17	12,01	75,70	(18,87)	22,00
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	(2,02)	(21,76)	7,47	36,66	5,09
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	(12,28)	43,93	85,68	33,93	37,82
	<b>DANA PERIMBANGAN/ PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>15,12</b>	<b>16,11</b>	<b>7,61</b>	<b>13,68</b>	<b>13,13</b>
5	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	16,31	(7,87)	6,68	(25,78)	(2,67)
6	DANA ALOKASI UMUM	17,36	14,40	8,09	7,21	11,77
7	DANA ALOKASI KHUSUS	1,61	41,22	5,39	64,39	28,15



	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>(28,30)</b>	<b>28,54</b>	<b>23,06</b>	<b>79,88</b>	<b>25,80</b>
8	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH	83,43	(9,06)	(5,35)	109,04	44,52
9	DANA PENYESUAIAN DAN OTSUS	(49,72)	28,39	5,15	153,89	34,43
10	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI/ PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	(27,75)	95,13	76,26	(6,63)	34,25

Sumber : BPKAD Kab. Bengkulu (2015) Setelah Olah Data

Rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Bengkulu pada tahun 2011-2015 sebesar 14,78 Persen.

### 3.1.1.2 Alokasi dan realisasi Belanja Daerah

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2011-2015 disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selama periode tahun 2011-2015, dari akumulasi alokasi belanja daerah sebesar Rp. **3.796.118.655.155,39** terealisasi sebesar Rp. **3.454.454.927.108,7** atau secara peresentase realisasi yang ada sebesar 90,99 Persen, yang secara lebih terinci disajikan pada table 3.20

**Tabel 3.20**  
**Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015**

Tahun Anggaran	Alokasi Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Pertumbuhan
2011	580,794,642,651.15	526,181,757,412.29	90.60	
2012	602,933,441,005.00	541,669,728,689.27	89.84	(27.75)
2013	734,574,606,544.00	620,299,718,904.21	84.44	95.13
2014	855,616,845,963.00	806,827,238,095.75	94.30	76.26
2015	1.022.199.118.992,24	959.476.484.007,31	93.86	
<b>TOTAL</b>	<b>3.796.118.655.155,39</b>	<b>3.454.454.927.108,7</b>	<b>90.99</b>	

Belanja daerah terbagi kedalam dua kelompok belanja yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri atas (a) Belanja Pegawai, (b) belanja Bunga, (c) belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Tidak Terduga. Selama periode tahun 2011-2015, dari akumulasi Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. **1.668.879.585.884,96** terealisasi sebesar Rp. **1,587.638.790.946.7** atau secara peresentase realisasi yang ada sebesar 95,13 Persen, yang secara lebih terinci disajikan pada table 3.21

**Tabel 3.21**  
**Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Langsung**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2014**

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Pertumbuhan
2011	267,104,183,143.72	259,239,126,673.29	97.06	
2012	290,993,051,400.00	278,623,095,059.04	95.75	7.48
2013	309,807,711,365.00	291,105,580,388.71	93.96	4.48
2014	338,782,174,001.00	325,788,328,320.75	96.16	11.91
2015	462.192.465.975,24	432.882.660.504,91	93,66	
<b>TOTAL</b>	<b>1.668.879.585.884,96</b>	<b>1,587.638.790.946.7</b>	<b>95.13</b>	

Alokasi Belanja Pegawai Kabupaten Bengkulu selama periode tahun anggaran 2011-2015 sebesar Rp. **1.413.282.211.468,96**, realisasi yang ada sebesar Rp **1.350.260.241.255,75** atau secara persentase sebesar 95,54 persen. Data tersedia pada table 3.22

**Tabel 3.22**  
**Alokasi dan Realisasi Belanja Pegawai**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015**

Tahun Anggaran	Alokasi Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Pertumbuhan
2011	228,923,937,572.72	224,588,925,002.45	98.11	
2012	252,323,014,342.00	244,912,352,491.04	97.06	9.05
2013	280,329,943,382.00	263,625,785,913.71	94.04	7.64
2014	298,363,575,806.00	288,233,789,498.75	96.60	9.33
2015	353.341.740.366,24	325.857.148.437,91	92,22	13.05
<b>TOTAL</b>	<b>1.413.282.211.468,96</b>	<b>1.347.218.001.343,86</b>	<b>95.32</b>	

Rincian Alokasi dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung kabupaten Bengkayang tahun 2011-2015 tertuang pada tabel 3.23

**Tabel 3.23**  
**Alokasi dan Realisasi Rincian Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bengkayang 2012-2015**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
A	<b>Belanja Tidak Langsung</b>				
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>244,79</b>	<b>263,63</b>	<b>288,22</b>	<b>323,50</b>
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan	197,87	212,24	224,53	242,46
	2. Tambahan Penghasilan PNS	44,72	49,07	61,22	23,10
	3. Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1,94	2,01	1,96	1,96
	4. Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	0,37	0,31	0,51	0,37
	5. Tunjangan Profesi Guru				55,61
	6. Dana Tambahan Penghasilan Guru SD				2,35

Dari data yang ada, kontribusi belanja terbesar berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai dan kondisi yang terjadi disetiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian penghasilan pegawai berdasarkan masa kerja, Golongan dan Penyesuaian terhadap jabatan pegawai. Selain itu juga kenaikan tersebut untuk menjawab kebijakan Pemerintah Pusat dalam Memberi Kenaikan Gaji bagi pegawai disetiap tahunnya.

Tren kenaikan juga dapat dilihat pada item Tambahan Penghasilan PNS dari tahun 2012 hingga 2014, sedangkan untuk tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya pemisahan kode rekening Tunjangan Profesi Guru dan Dana Tambahan Penghasilan Guru SD yang awalnya melekat pada rekening Belanja Tambahan Penghasilan PNS. Sedangkan Untuk Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah bersifat fluktuatif, hal ini dikarenakan pengalokasian untuk belanja tersebut berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang terjadi di tahun sebelumnya.

Alokasi belanja Hibah Kabupaten Bengkayang selama periode tahun anggaran 2011-2015 sebesar Rp. **80.820.380.649,00** realisasi

yang ada sebesar Rp **73.258.362.500,00** atau secara persentase sebesar **90,64** persen. Data tersedia pada table 3.24

**Tabel 3.24**  
**Alokasi dan Realisasi Belanja Hibah**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Alokasi Setelah Perubahan APBD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Pertumbuhan</b>
2011	16,901,809,621.00	14,250,878,000.00	84.32	
2012	15,466,650,000.00	13,773,313,750.00	89.05	(3.35)
2013	4,172,755,000.00	3,793,898,000.00	90.92	(72.45)
2014	10,139,000,000.00	9,414,000,000.00	92.85	148.14
2015	34.140.166.028,00	32.026.272.750,00	93,81	
<b>TOTAL</b>	<b>80.820.380.649,00</b>	<b>73.258.362.500,00</b>	<b>90,64</b>	

Alokasi belanja Bantuan Sosial Kabupaten Bengkulu selama periode tahun anggaran 2011-2015 sebesar Rp. **34.944.151.000,00** realisasi yang ada sebesar Rp **30.165.056.792,00** atau secara persentase sebesar **86,32** persen. Data tersedia pada table 3.25

**Tabel 3.25**  
**Alokasi dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Alokasi Setelah Perubahan APBD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Pertumbuhan</b>
2011	5,775,000,000.00	4,897,227,440.00	84.80	
2012	4,178,000,000.00	3,689,000,000.00	88.30	(24.67)
2013	6,160,000,000.00	5,704,000,000.00	92.60	54.62
2014	5,554,500,000.00	4,953,000,000.00	89.17	(13.17)
2015	13.276.651.000,00	10.921.829.352,00	82,26	
<b>TOTAL</b>	<b>34.944.151.000,00</b>	<b>30.165.056.792,00</b>	<b>86,32</b>	

Alokasi belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Kabupaten Bengkulu selama periode tahun anggaran 2011-2015 sebesar Rp. **133.089.628.946,00** realisasi yang ada sebesar Rp **130.855.835.454,75** atau secara persentase sebesar **98,32** persen. Data tersedia pada table 3.26

**Tabel 3.26**  
**Alokasi dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015**

Tahun Anggaran	Alokasi Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Pertumbuhan
2011	14,603,435,950.00	14,603,430,228.75	100.00	
2012	16,953,200,000.00	16,092,369,818.00	94.92	10.20
2013	18,212,200,000.00	17,712,457,239.00	97.26	10.07
2014	23,886,884,415.00	23,027,538,822.00	96.40	30.01
2015	59.433.908.581,00	59.420.039.347,00	99,98	
<b>TOTAL</b>	<b>133.089.628.946,00</b>	<b>130.855.835.454,75</b>	<b>98,32</b>	

Alokasi belanja Tidak Terduga Kabupaten Bengkulu selama periode tahun anggaran 2011-2015 sebesar Rp. **6,743,213,821.00** realisasi yang ada sebesar Rp **3.152.819.108,09** atau secara persentase sebesar 46,76 persen. Data tersedia pada table 3.27

**Tabel 3.27**  
**Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Terduga**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015**

Tahun Anggaran	Alokasi Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Pertumbuhan
2011	900,000,000.00	898,666,002.09	99.85	
2012	2,072,187,058.00	156,059,000.00	7.53	(82.63)
2013	932,812,983.00	269,439,236.00	28.88	72.65
2014	838,213,780.00	160,000,000.00	19.09	(40.62)
2015	2.000.000.000,00	1.668.654.870,00	83,43	
<b>TOTAL</b>	<b>6,743,213,821.00</b>	<b>3.152.819.108,09</b>	<b>46,76</b>	

## 2. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari : (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan jasa, (c) Belanja Modal. Selama Periode tahun anggaran 2011-2015, rata-rata realisasi belanja langsung secara akumulatif belum maksimal dari alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. **2.127.239.069.270,43** hanya terserap sebesar Rp. **1.866.816.136.162,13** atau persentase penyerapan sebesar **87,76 persen**. Data tersedia pada tabel 3.28

**Tabel 3.28**  
**Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Alokasi Setelah Perubahan APBD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Pertumbuhan</b>
2011	313,690,459,507.43	266,942,630,739.00	85.10	
2012	311,940,389,605.00	263,046,633,630.23	84.33	(1.46)
2013	424,766,895,179.00	329,194,138,515.50	77.50	25.15
2014	516,834,671,962.00	481,038,909,775.00	93.07	46.13
2015	560.006.653.017,00	526.593.823.502,40	94,03	
<b>TOTAL</b>	<b>2.127.239.069.270,43</b>	<b>1.866.816.136.162,13</b>	<b>87,76</b>	

Realisasi sebesar 85.52 persen, menggambarkan bahwa tingkat penyerapan Pemerintah Daerah untuk Belanja Langsung dalam hal ini tersebar pada Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja Modal belum maksimal dan kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja daerah dalam melaksanakan Program Kerja yang telah direncanakan belum mampu diimplementasikan dengan baik.

Selama Periode tahun anggaran 2011-2015, secara akumulasi alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. **115,819,532,608.48** sedangkan untuk realisasinya Rp. **105,493,130,696.00** atau secara persentase penyerapan sebesar **91,08 persen**. Data tersedia pada tabel 3.29

**Tabel 3.29**  
**Alokasi dan Realisasi Belanja Pegawai**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Alokasi Setelah Perubahan APBD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Pertumbuhan</b>
2011	19,827,539,580.00	18,282,810,260.00	92.21	
2012	24,968,346,528.48	22,842,648,591.00	91.49	24.94
2013	30,862,782,380.00	27,789,686,490.00	90.04	21.66
2014	40,160,864,120.00	36,577,985,355.00	91.08	31.62
2015	42.107.690.901,00			
<b>TOTAL</b>	<b>157.927.223.509,48</b>	<b>105,493,130,696.00</b>	<b>91.08</b>	

Selama Periode tahun anggaran 2011-2015, secara akumulasi alokasi anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. **629,486,756,466.90** sedangkan untuk realisasinya Rp.

**583,503,437,770.73** atau secara persentase penyerapan sebesar **92.70** persen. Data tersedia pada tabel 3.30

**Tabel 3.30**  
**Alokasi dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**  
**Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Alokasi Setelah Perubahan APBD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Pertumbuhan</b>
2011	138,404,835,480.43	129,557,853,602.00	93.61	
2012	144,007,139,206.52	130,709,314,094.23	90.77	0.89
2013	167,839,089,787.00	154,797,280,832.50	92.23	18.43
2014	179,235,691,992.95	168,438,989,242.00	93.98	8.81
2015	201.921.757.166,66			
<b>TOTAL</b>	<b>831.408.513.633,56</b>	<b>583,503,437,770.73</b>	<b>92.70</b>	

Selama Periode tahun anggaran 2011-2015, secara akumulasi alokasi anggaran untuk Belanja Modal sebesar Rp. **821,926,127,178.05** sedangkan untuk realisasinya Rp. **651,225,744,193.00** atau secara persentase penyerapan sebesar **79,23%** persen. Data tersedia pada tabel 3.31

**Tabel 3.31**  
**Alokasi dan Realisasi Belanja Modal**  
**Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Alokasi Setelah Perubahan APBD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Pertumbuhan</b>
2011	155,458,084,447.00	119,101,966,877.00	76.61	
2012	142,964,903,870.00	109,494,670,945.00	76.59	(8.07)
2013	226,065,023,012.00	146,607,171,193.00	64.85	33.89
2014	297,438,115,849.05	276,021,935,178.00	92.80	88.27
2015	315.977.204.949,34			
<b>TOTAL</b>	<b>1.137.903.332.127.39</b>	<b>651,225,744,193.00</b>	<b>79.23</b>	<b>38.03</b>

Bila melihat struktur APBD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2011-2015 terlihat gambaran rasio antara alokasi belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Bengkayang. Secara akumulasi alokasi Belanja langsung (56.04%) Lebih Besar daripada alokasi Belanja Tidak Langsung (43.96%). Untuk rinciannya dapat dilihat pada table 3.32

**Tabel 3.32**  
**Perbandingan alokasi Belanja Langsung dan**  
**Belanja Tidak langsung**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>%</b>	<b>Belanja Tidak langsung</b>	<b>%</b>
2011	313,690,459,507.43	54.01	267,104,183,143.72	45.99
2012	311,940,389,605.00	51.74	290,993,051,400.00	48.26
2013	424,766,895,179.00	57.82	309,807,711,365.00	42.18
2014	516,834,671,962.00	60.41	338,782,174,001.00	39.59
2015	560.006.653.017,00	54.78	462.192.465.975,24	45.22
<b>TOTAL</b>	<b>2.127.239.069.270,43</b>	<b>56.04</b>	<b>1.668.879.585.884,96</b>	<b>43.96</b>

Proporsi Belanja langsung dan tidak Langsung Kabupaten Bengkulu pada periode tahun anggaran 2011-2015 bisa dikatakan sudah cukup baik. Hal ini terlihat bahwa secara perbandingan, bahwa porsi alokasi pendanaan untuk Belanja Langsung Kabupaten Bengkulu dari tahun ketahun lebih besar dari porsi belanja tidak langsung.

Selain itu, ketika dibandingkan struktur Belanja Pemerintah Kabupaten Bengkulu terhadap rata-rata Struktur Belanja Kabupaten/ Kota secara Nasional maka diperoleh gambaran bahwa Secara persentase alokasi pendanaan untuk Belanja Langsung Kabupaten Bengkulu lebih besar dan diatas rata-rata Nasional, data disajikan pada table 3.33

**Tabel 3.33**  
**Struktur Belanja Kabupaten Bengkulu terhadap Nasional**  
**Tahun 2011-2015 (%)**

<b>WILAYAH</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Kab/Kota Se-Indonesia</b>	<b>48.77</b>	<b>51.23</b>
<b>Kab. Bengkulu</b>	<b>56.04</b>	<b>43.96</b>

Sumber : Data Dirjen Keuangan daerah yang Diolah



### 3.1.1.3 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

#### 1). Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari : (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu (SILPA), (b) Pencairan Dana Cadangan, (c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, (d) Penerimaan Pinjaman Daerah, (e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, (f) Penerimaan Piutang Daerah.

Selama Periode 2011-2015 dari beberapa sumber penerimaan pembiayaan beberapa pos yang berkontribusi yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir. Target Penerimaan Pembiayaan selama periode tahun anggaran 2011-2014 sebesar Rp. **260,374,018,374.00** terealisasi 100,16 % atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada table 3.34

**Tabel 3.34**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan**  
**Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011-2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Setelah Perubahan APBD</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Pertumbuhan</b>
2011	38,935,504,993.00	38,935,504,993.08	100.00	
2012	43,513,118,985.00	43,513,118,985.00	100.00	11.76
2013	63,263,389,432.00	63,682,124,890.03	100.66	46.35
2014	114,662,004,964.00	114,650,669,563.52	99.99	80.04
2015	56.400.318.463,03	56.400.318.463,03	100,00	
<b>TOTAL</b>	<b>260,374,018,374.00</b>	<b>260,781,419,431.63</b>	<b>100.16</b>	

Pada tahun 2011 dan tahun 2012 telah berjalan secara ideal, realisasi yang tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada perubahan APBD ditahun berkenaan. Hal ini dikarenakan pada saat perubahan anggaran telah didapat hasil audit BPK atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA). sedangkan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 terdapat perbedaan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat sumber penerimaan dari Penerimaan Kembali dari Investasi dana bergulir.

### **3.1.2 Neraca**

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada seluruh stake holder Pemerintah daerah terhadap kondisi kekayaan atau aset dan kewajibannya serta ekuitas dana pada suatu waktu tertentu. Perkembangan neraca Kabupaten Bengkayang serta rata-rata pertumbuhannya dalam periode 2012-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.35**  
**NERACA KABUPATEN BENGKAYANG 2011-2015**

NO	URAIAN	2011 Rp	2012 Rp	2013 Rp	2014 Rp	2015 Rp
1	<b>ASET</b>					
1.1	<b>ASET LANCAR</b>					
1.1.1	Kas di Kas Daerah	48.486.183.874,08	63.742.075.291,67	121.702.759.067,61	61.261.388.406,16	106.377.672.047,49
1.1.2	Kas di Bendahara					
1.1.3	Pengeluaran	1.228.929.745,57	5.067.545.687,00	4.197.750.369,17	2.794.120.300,51	1.125.507.122,00
1.1.4	Kas di Bendahara					
1.1.4	Penerimaan	229.432.250,00	164.184.500,00	224.885.943,93	386.109.614,65	628.091.506,97
1.1.4	Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00		0,00
1.1.5	Piutang Pajak	24.508.516,00	34.363.123,00	108.580.323,00	6.786.673.795,00	0,00
1.1.6	Piutang Retribusi	81.308.196,10	18.649.900,00	18.237.000,00	63.531.500,00	0,00
1.1.7	Piutang Dana Bagi Hasil		0,00	0,00	9.754.571.081,00	0,00
1.1.8	Piutang Pendapatan		0,00	0,00	0,00	27.797.629.061,00
1.1.9	Kas Lainnya		0,00	0,00	0,00	2.415.592.576,00
1.1.10	Bagian Lancar					
1.1.10	Keterlanjuran					
1.1.10	Pembayaran Gaji					
1.1.10	Kepada					
1.1.11	PNS/Pensiunan PNS	0,00	79.889.000,00	0,00		0,00
1.1.11	Bagian lancar					
1.1.11	Tuntutan Ganti Rugi	70.850.000,00	70.850.000,00	0,00		0,00
1.1.12	Piutang Lainnya	84.775.000,00	84.775.000,00	334.957.380,00	224.916.908,00	232.411.612,00
1.1.13	Penyisihan Piutang tak tertagih			(129.370.275,30)	(4.856.320.362,10)	(5.266.039.976,75)

NO	URAIAN	2011 Rp	2012 Rp	2013 Rp	2014 Rp	2015 Rp
1.1.14	Persediaan	4.866.529.216,00	5.210.568.056,96	4.556.988.980,72	6.185.687.154,45	6.142.102.360,81
1.1.15	Belanja Asuransi Dibayar Dimuka	704.641.000,00	591.844.027,88	713.695.332,62	1.120.368.076,96	410.112.930,10
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>55.777.157.797,75</b>	<b>75.064.744.586,51</b>	<b>131.728.484.121,75</b>	<b>83.721.046.474,63</b>	<b>139.863.079.239,62</b>
1.2	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>					
1.2.1	Investasi Nonpermanen					
	Investasi Nonpermanen Lainnya	421.725.151,89	414.402.223,74	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>	<b>421.725.151,89</b>	<b>414.402.223,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	Investasi Permanen					
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya	9.390.203.070,22	8.581.800.000,00	12.081.800.000,00	12.565.000.000,00	16.940.000.000,00
	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>9.390.203.070,22</b>	<b>8.581.800.000,00</b>	<b>12.081.800.000,00</b>	<b>12.565.000.000,00</b>	<b>16.940.000.000,00</b>
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>9.811.928.222,11</b>	<b>8.996.202.223,74</b>	<b>12.081.800.000,00</b>	<b>12.565.000.000,00</b>	<b>16.940.000.000,00</b>

NO	URAIAN	2011 Rp	2012 Rp	2013 Rp	2014 Rp	2015 Rp
1.3	<b>ASET TETAP</b>					
1.3.1	Tanah	78.119.843.568,00	80.430.358.368,00	84.230.150.168,00	86.896.709.703,00	90.716.693.183,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan	159.773.511.794,63	176.394.938.399,63	206.571.887.071,63	217.426.648.803,20	244.992.962.586,20
1.3.3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	395.381.938.673,32	444.188.490.273,32	498.818.493.034,32	563.536.865.444,32	657.562.086.767,72
1.3.4	Aset Tetap Lainnya	599.497.520.373,14	641.011.338.713,14	699.772.741.478,14	883.070.793.862,14	1.009.182.352.580,94
1.3.5	Konstruksi dalam Pengerjaan	4.584.536.972,00	5.600.856.672,00	10.746.327.972,00	21.289.513.614,00	24.592.497.445,00
1.3.6	Akumulasi Penyusutan	7.702.942.100,00	5.906.299.300,00	24.421.241.114,00	15.916.213.243,18	33.233.168.299,38
1.3.7		0,00	0,00	0,00	0,00	(762.261.917.246,23)
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1.245.060.293.481,09</b>	<b>1.353.532.281.726,09</b>	<b>1.524.560.840.838,09</b>	<b>1.788.136.744.669,84</b>	<b>1.298.017.843.616,01</b>
1.4	<b>DANA CADANGAN</b>					
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5	<b>ASET LAINNYA</b>					
1.5.1	Aset Tak Berwujud	457.869.000,00	467.869.000,00	919.919.013,44	1.602.094.513,44	1.602.094.513,44
1.5.2	Aset Lain-Lain	46.995.145.820,00	47.838.548.890,22	48.287.115.584,22	49.185.841.157,22	46.426.113.102,22
1.5.3	Akumulasi Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	(891.255.708,07)

NO	URAIAN	2011 Rp	2012 Rp	2013 Rp	2014 Rp	2015 Rp
1.5.4	Aset Lainnya keterlanjuran Pembayaran Gaji Kepada PNS/Pensiunan PNS <b>Jumlah Aset Lainnya</b>	0,00    <b>47.453.014.820,00</b>	80.401.736,00    <b>48.386.819.626,22</b>	0,00    <b>49.207.034.597,66</b>	0,00    <b>50.787.935.670,66</b>	0,00    <b>47.136.951.907,59</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.358.102.394.320,94</b>	<b>1.485.980.048.162,56</b>	<b>1.717.578.159.557,50</b>	<b>1.935.210.726.815,13</b>	<b>1.501.957.874.763,22</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>					
2.1	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.180.857.786,03	5.479.213.776,36	11.201.562.853,09	7.638.125.700,00	10.797.604.832,63
2.1.9	Utang Jangka Pendek Lainnya	15.553.858.859,00	3.248.843.309,00	13.485.537.578,00	4.492.559.666,00	15.553.858.859,00
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>21.734.716.645,03</b>	<b>8.728.057.085,36</b>	<b>24.687.100.431,09</b>	<b>12.130.685.366,00</b>	<b>26.351.463.691,63</b>

NO	URAIAN	2011 Rp	2012 Rp	2013 Rp	2014 Rp	2015 Rp
2.2	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b> Jumlah Kewajiban Jangka Panjang <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	0,00 21.734.716.645,03	0,00 8.728.057.085,36	0,00 24.687.100.431,09	0,00 12.130.685.366,00	0,00 26.351.463.691,63
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>					
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>					
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	43.513.118.985,05	63.263.389.432,31	114.662.004.963,52	56.400.318.463,03	43.513.118.985,05
3.1.2	Pendapatan yang Ditanggguhkan	250.569.098,57	231.202.270,00	261.827.564,10	403.174.158,29	250.569.098,57
3.1.3	Cadangan Piutang	261.441.712,10	288.527.023,00	332.404.427,70	11.973.372.921,90	232.411.612,00
3.1.4	Cadangan Persediaan	4.866.529.216,00	5.210.568.056,96	4.556.988.980,72	6.185.687.154,45	4.866.529.216,00
3.1.5	Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	704.641.000,00	591.844.027,88	713.695.332,62	1.120.368.076,96	704.641.000,00
3.1.6	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(15.553.858.859,00)	(3.248.843.309,00)	(13.485.537.578,00)	(4.492.559.666,00)	(15.553.858.859,00)
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>34.042.441.152,72</b>	<b>66.336.687.501,15</b>	<b>107.041.383.690,66</b>	<b>71.590.361.108,63</b>	<b>34.013.411.052,62</b>

NO	URAIAN	2011 Rp	2012 Rp	2013 Rp	2014 Rp	2015 Rp
3.2	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>					
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	9.811.928.222,11	8.996.202.223,74	12.081.800.000,00	12.565.000.000,00	9.811.928.222,11
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.245.060.293.481,09	1.353.532.281.726,09	1.524.560.840.838,09	1.788.136.744.669,84	1.298.017.843.616,01
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	47.453.014.820,00	48.386.819.626,22	49.207.034.597,66	50.787.935.670,66	47.136.951.907,59
3.2.4	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	0,00	0,00			0,00
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>1.302.325.236.523,20</b>	<b>1.410.915.303.576,05</b>	<b>1.585.849.675.435,75</b>	<b>1.851.489.680.340,50</b>	<b>1.354.966.723.745,71</b>
3.3	<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>					
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>1.336.367.677.675,92</b>	<b>1.477.251.991.077,20</b>	<b>1.692.891.059.126,41</b>	<b>1.923.080.041.449,13</b>	<b>1.388.980.134.798,33</b>
	<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>1.358.102.394.320,94</b>	<b>1.485.980.048.162,56</b>	<b>1.717.578.159.557,50</b>	<b>1.935.210.726.815,13</b>	<b>1.415.331.598.489,96</b>



Aset Daerah menggambarkan informasi tentang sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah daerah. Berdasarkan tabel yang ada terlihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015 memiliki aset senilai Rp 1,5 Triliun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,82% pertahunnya. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset Tetap dengan nilai sebesar Rp 1,2 Triliun pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,8% Pertahun. Jika dilihat dari komposisi aset, maka aset tetap meliputi 86,42% dari total keseluruhan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Bengkayang pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 26,35 M. Dari tahun 2011 hingga 2015 jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan lebih bersifat fluktuatif sehingga nilai pertumbuhan yang ada tidak menggambarkan kepastian untuk memproyeksikan kewajiban ditahun-tahun berikutnya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai Ekuitas dana Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015 mencapai Rp 1,38 T dengan rata-rata nilai pertumbuhan dari tahun 2011-2015 sebesar 2,74%.

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan

Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.

Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun demikian, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam melunasi kewajibannya.

*Quick Ratio* lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Bengkayang setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

**Tabel 3.36**  
**Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Bengkayang**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Lancar ( Current Rasio )	2,57	8,60	5,34	6,90	5,31
2	Rasio Quick ( Quick Ratio )	2,34	8,00	5,15	6,39	5,07
3	Rasio Total Hutang Terhadap Total Asset	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02

Sumber : Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kab. Bengkayang

*Current ratio* dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total

hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya.

### 3.1.3 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Penggunaan anggaran disini dilihat dari besaran alokasi pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur terhadap total pengeluaran atas Belanja Daerah. Pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat dari sisi Belanja langsung dan Belanja tidak langsung, karena dikedua belanja terdapat alokasi dana untuk Belanja Pegawai. Pada Belanja Tidak langsung belanja pegawai yang ada dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Gaji yang terdiri atas: (1) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil, (2) Gaji dan Tunjangan DPRD, (3) Belanja Bupati dan Wakil Bupati, (4) Belanja Tambahan Penghasilan dan (5) Belanja Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Sedangkan Belanja Pegawai yang melekat pada sisi Belanja Langsung dipergunakan untuk memenuhi pembiayaan operasional dan rutin Pegawai serta honorarium pegawai pada Program dan Kegiatan yang ada.

Proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur cenderung Meningkat dari tahun ketahun, oleh karenanya kedepan perlu dilakukan evaluasi terhadap kenaikan yang terjadi dengan harapan untuk menjaga efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan APBD Kabupaten Bengkayang.

**Tabel 3.37**  
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2011-2015**

No	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	224,588,925,002	244,912,352,491	263,625,785,913	288,233,789,498	325.857.148.437
	Belanja Pegawai	224,588,925,002	244,912,352,491	263,625,785,913	288,233,789,498	325.857.148.437
B	Belanja Langsung	18,282,810,260	22,842,648,591	27,789,686,490	36,577,985,355	44.562.394.464
	Belanja Pegawai	18,282,810,260	22,842,648,591	27,789,686,490	36,577,985,355	44.562.394.464
<b>C</b>	<b>TOTAL</b>	<b>242.871.735.262</b>	<b>267.755.001.082</b>	<b>291.415.472.403</b>	<b>324.811.774.853</b>	<b>370.419.542.901</b>

### 3.1.4 Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus dan menutup deficit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali/ pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

**Tabel 3.38**  
**Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja**  
**Tahun 2011-2015**

TAHUN ANGGARAN	REALISASI		SURPLUS/DEFISIT Rill
	PENDAPATAN	BELANJA	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>2011</b>	531,259,371,404.26	526,181,757,412.29	5,077,613,991.97
<b>2012</b>	574,111,043,436.53	541,669,728,689.27	32,441,314,747.26
<b>2013</b>	676,353,786,699.70	620,299,718,904.21	56,054,067,795.49
<b>2014</b>	753,205,688,895.26	806,827,238,095.75	(53,621,549,200.49)
<b>2015</b>	1.007.455.173.176,30	932.260.091.951,87	75.195.081.224,5
<b>JUMLAH</b>	<b>3.542.251.526.451.05</b>	<b>3.427.238.535.053,39</b>	<b>115.146.528.558,73</b>

Sumber : Data BPKAD Yang diolah

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah realisasi pendapatan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 terus mengalami peningkatan, walaupun dengan belanja yang mengalami peningkatan juga. Jika dilihat secara perbandingan total pendapatan dan realisasi belanja selama rentang tahun 2011-2015, bahwa dari total pendapatan sebesar Rp **3.542.251.526.451.05** realisasi belanja yang terjadi sebesar Rp **3.427.238.535.053,39** atau secara persentase sebesar

96,75 persen. Pada tahun 2011 hingga 2013 secara struktur realisasi APBD Kabupaten Bengkayang bisa dikatakan mengalami surplus, hal ini dikarenakan realisasi pada sisi pendapatan lebih besar dari pada realisasi atau penyerapan pada sisi belanja. Oleh karenanya kelebihan/ surplus anggaran pada tahun sebelumnya akan tertuang dalam sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang akan dialokasi kembali pada tahun berikutnya sesuai dengan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan serapan atas belanja yang mengakibatkan kondisi surplus dari tahun 2011 hingga 2013 maka tidak mengherankan pada tahun 2014 terlihat bahwa realisasi dari sisi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan, karena terjadi pergerakan dari akumulasi SiLPA pada tahun-tahun sebelumnya yang dialokasikan kembali pada tahun 2014. Untuk mengetahui lebih lanjut deficit/surplus Pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada table 3.37

**Tabel 3.39**  
**Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten**  
**Bengkayang**  
**Tahun 2011-2014**

No	URAIAN	Proporsi Dari Defisit/Surplus Rill (Milyar Rp)			
		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA Sebelumnya	38,93	43,51	63,26	114,65
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	0,41	-
6	Penerimaan Piutang daerah	-	-	-	-

Sumber : Data BPKAD Yang diolah

**Tabel 3.40**  
**Komposisi SiLPA Kabupaten Bengkulu**  
**Tahun 2011-2014**

No	URAIAN	Proporsi Dari Defisit/Surplus Rill			
		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA Sebelumnya</b>	<b>38,93</b>	<b>43,51</b>	<b>63,26</b>	<b>114,65</b>
	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat lainnya	38,93	43,51	63,26	114,66
	Koreksi SiLPA	-	-	-	(0,01)

Sumber : Data BPKAD Yang diolah

**Tabel 3.41**  
**Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Bengkulu**  
**Tahun 2011-2015**

No	URAIAN	Proporsi Dari Defisit/Surplus Rill				
		2011	2012	2013	2014	2015
	2	3	4			
1	Realisasi Pendapatan Daerah	531,259,371,404.26	574,111,043,436.53	676,353,786,699.70	753,205,688,895.26	1.007.260.806.267,57
	Dikurangi Realisasi :	-	-	-	-	-
2	Belanja Daerah	526,181,757,412.29	541,669,728,689.27	620,299,718,904.21	806,827,238,095.75	959.476.485.007,31
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	500,000,000.00	12,691,044,300.00	5,074,187,722.00	4,628,801,900.00	5.569.553.802,43
<b>A</b>	<b>Defisit/Surplus Rill</b>	<b>4,577,613,991.97</b>	<b>19,750,270,447.26</b>	<b>50,979,880,073.49</b>	<b>(58,250,351,100.49)</b>	<b>42.214.767.456,83</b>
	Ditutup Oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4.	SiLPA	38,935,504,993.00	43,513,118,985.05	63,263,389,432.31	114,650,669,563.52	56.400.319.463,03
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	418,735,457.72	-	-
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>38,935,504,993.00</b>	<b>43,513,118,985.05</b>	<b>63,682,124,890.03</b>	114,650,669,563.52	56.400.319.463,03
6	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	<b>43,513,118,984.97</b>	<b>63,263,389,432.31</b>	<b>114,662,004,964.01</b>	<b>56,400,318,463.03</b>	<b>98.615.086.919,86</b>

Sumber : Data BPKAD Yang diolah

### 3.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

#### 3.2.1 Analisis pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

**Tabel 3.42**  
**Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Operaional (Rutin)**  
**Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012-2015**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
		<b>Milyar Rp</b>			
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>				
	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>200,18</b>	<b>214,55</b>	<b>227,01</b>	<b>244,79</b>
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan	197,87	212,24	224,53	242,46
	2. Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1,94	2,00	1,96	1,96
	3. Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	0,37	0,31	0,52	0,37
	<b>Belanja Bantuan Sosial (Khusus untuk Beasiswa Utusan Daerah)</b>				
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>56,6</b>	<b>61,29</b>	<b>68,8</b>	<b>77,17</b>
	Belanja Operasional Kantor :				
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Materai, Listrik, Air, Telpon, ATK, Penggandaan, Makan Minum Pegawai, SPPD dalam dan Luar Daerah)	44,79	47,96	50,97	63,79
	a. SPPD Dalam dan Luar daerah				
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	29,47	38,88	35,55	32,82
	3. Program Peningkatan Displin Aparatur	0,88	1,59	1,32	0,74

4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3,46	4,03	5,25	4,85
5.	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,79	3,63	3,98	3,19
6.	Prog. Penyebarluasan Informasi Pembangunan	2,10	2,49	4,66	2,50
7.	Prog. Peringatan hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	1,58	1,59	2,62	2,10
	<b>TOTAL</b>				

Pertumbuhan Belanja Periodik Prioritas Utama Untuk Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bengkulu berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Operasional KDH/WKDH dan Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi daerah masing-masing mencapai 7,83 Persen, 0,81 persen dan Fluktuatif Tergantung Penerimaan Daerah di Sektor Pajak dan Retribusi. Sedangkan untuk Belanja Langsung dilihat pada Realisasi anggaran yang melekat pada beberapa program Operasional (rutin) di SKPD, antara lain Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dimana pada program ini terkait dengan pengalokasian anggaran untuk mendukung dan menjalankan rutinitas perkantoran sehingga dianggap wajib untuk dianggarkan. Untuk Belanja Langsung ini dihitung Rata-rata pertumbuhannya mencapai 12,83 persen. Untuk program Peningkatan Displin Pegawai Rata-rata pertumbuhan dari tahun 2011-2015 yaitu sebesar 6,59 Persen, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 13,04 persen, sedangkan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan, Program Peringatan hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan Tren yang terjadi bersifat fluktuatif. Oleh karenanya perlu adanya suatu kajian terhadap Program tersebut untuk mendapat gambaran kebutuhan rutin SKPD disetiap tahunnya.



### 3.2.2 Proyeksi Kedepan

#### a. Proyeksi Pendapatan

Dalam hal proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun serta tren peningkatan yang terjadi disetiap tahunnya.

**Tabel 3.43**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang**  
**Tahun 2016 – 2020 (Milyar Rp)**

URAIAN	REALISASI	PROYEKSI									
	TAHUN	Rata	2016	Rata	2017	Rata	2018	Rata	2019	Rata	2020
	AWAL	Pertum		Pertumb		Pertum		Pertumb		Pertumb	
	(2015)	buhan		uhan (%)		buhan		uhan (%)		uhan (%)	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.007,46</b>		<b>1.034,29</b>		<b>1.098,70</b>		<b>1.147,95</b>		<b>1.199,61</b>		<b>1.254,03</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>39,66</b>		<b>39,94</b>		<b>48,99</b>		<b>50,30</b>		<b>51,46</b>		<b>52,66</b>
Pendapatan Pajak Daerah	<b>7,88</b>		<b>11,20</b>	17,43	<b>15,00</b>	14,84	<b>15,82</b>	12,92	<b>16,69</b>	11,45	<b>17,61</b>
Pendapatan Retribusi Daerah	<b>10,84</b>		<b>10,00</b>	14,26	<b>10,49</b>	12,48	<b>10,69</b>	11,10	<b>10,69</b>	9,99	<b>10,69</b>
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	<b>2,39</b>		<b>3,50</b>	5,43	<b>3,50</b>	5,15	<b>3,50</b>	4,90	<b>3,50</b>	4,67	<b>3,50</b>
Lain-lain Pendapatan	<b>18,56</b>		<b>15,24</b>	11,42	<b>20,00</b>	10,25	<b>20,28</b>	9,30	<b>20,56</b>	8,50	<b>20,85</b>
<b>DANA PERIMBANGAN</b>			<b>898,117</b>	<b>7,78</b>	<b>899,79</b>	<b>7,21</b>	<b>945,11</b>	<b>6,73</b>	<b>992,95</b>	<b>6,30</b>	<b>1.043,46</b>
Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	<b>25,11</b>		<b>29,37</b>	2,79	<b>35,00</b>	2,71	<b>36,57</b>	2,64	<b>38,22</b>	2,57	<b>39,94</b>
Dana Alokasi Umum	<b>529,86</b>		<b>577,26</b>	8,07	<b>614,79</b>	7,47	<b>652,29</b>	6,95	<b>692,08</b>	6,50	<b>734,29</b>
Dana Alokasi Khusus	<b>146,96</b>		<b>291,48</b>	7,83	<b>250,00</b>	7,27	<b>256,26</b>	6,77	<b>262,65</b>	6,34	<b>269,22</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>			<b>101,17</b>		<b>149,91</b>		<b>152,53</b>		<b>155,20</b>		<b>157,91</b>
DBH Pajak dari Prov dan Pemda Lain	<b>37,11</b>		<b>20,45</b>	13,94	<b>23,61</b>	12,24	<b>24,08</b>	10,9	<b>24,57</b>	9,83	<b>25,06</b>
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	<b>101,80</b>		<b>75,78</b>		<b>126,30</b>		<b>128,45</b>		<b>130,63</b>		<b>132,85</b>
Bantuan Keuangan dari Prov/ Pemda Lainnya	-		-		-		-		-		-

Sumber : Data BPKAD yang Diolah

a. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta prioritas Utama

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama tahun 2016-2020 diproyeksikan cenderung meningkat. Lebih rinci dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 3.44**  
**Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib, Mengikat dan Prioritas Utama, serta Pengeluaran Operasional (Rutin) Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016-2020**

NO	URAIAN	Data Tahun Dasar (2015) (Milyar Rp)	Rata-rata Pertumbuhan periode sebelumnya (%)	Proyeksi					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>302,74</b>	<b>24,83</b>	<b>377,91</b>	<b>431,54</b>	<b>452,64</b>	<b>474,02</b>	<b>494,72</b>	<b>519,12</b>
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>302,74</b>	<b>21,85</b>	<b>368,44</b>	<b>419,54</b>	<b>439,64</b>	<b>461,02</b>	<b>483,72</b>	<b>508,12</b>
	Belanja Gaji dan Tunjangan	242,46	17,51	284,89	302,32	321,46	341,81	363,44	386,45
	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1,96	2,55	2,01	6,54	6,87	7,21	7,57	7,95
	Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	0,37	5,4	0,76	1,06	1,06	1,11	1,14	1,17
	Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	57,95		80,78 (Plus Kurang bayar)	68,28	68,28	68,28	68,28	68,28
	Tunjangan Profesi Dokter				3,73	3,92	4,11	4,32	4,53
	Iuran Asuransi Kesehatan PNS dan KDH	5,66			7,12	7,26	7,41	7,56	7,71
	Uang Makan PNSD	0		0	30,49	30,79	31,1	31,41	32,04
	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>				<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
	Beasiswa Utusan Daerah	0		9,47	12	13	13	11	11
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>96,61</b>		<b>133,4</b>	<b>84,8</b>	<b>88,53</b>	<b>92,78</b>	<b>95,58</b>	<b>99,75</b>
	<b>Belanja Operasional Kantor :</b>	<b>96,61</b>		<b>133,4</b>	<b>84,8</b>	<b>88,53</b>	<b>92,78</b>	<b>95,58</b>	<b>99,75</b>
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Materai, Listrik, Air,	63,79	12,83	68,70	53,29	55,76	58,09	59,93	62,04

	Telpon, ATK, Penggandaan, Makan Minum Pegawai, SPPD dalam dan Luar Daerah)								
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	32,82		49,87	17,64	18,54	19,45	20,06	21,05
	3. Program Peningkatan Displin Aparatur	0,74	6,59	1,07	0,36	0,05	0,36	0,06	0,36
	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4,85	13,04	4,67	5,1	5,36	5,62	5,85	6,14
	5. Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,19		3,56	3,51	3,68	3,86	4,04	4,24
	6. Prog. Penyebarluasan Informasi Pembangunan	2,50		3,37	2,66	2,79	2,94	3,06	3,22
	7. Prog. Peringatan hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	2,10	2,86	2,16	2,24	2,35	2,46	2,58	2,7
<b>C</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>	<b>0,69</b>		<b>1,45</b>	<b>1,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Pembayaran Pokok Utang	0,69		1,45	1,63	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>413,42</b>		<b>512,76</b>	<b>517,97</b>	<b>541,17</b>	<b>566,80</b>	<b>590,30</b>	<b>618,87</b>

Sumber : APBD, Data diolah, DPKAD dan bappeda Kab. Bengkulu

Total belanja wajib dan pengeluaran yang mengikat, serta prioritas utama diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp 413,42 milyar ditahun 2015 menjadi sebesar Rp 613,21 Milyar ditahun 2020. Belanja tidak langsung dalam hal ini merupakan bagian yang sangat dominan dalam total belanja wajib dan pengeluaran yang mengikat serta prioritas utama. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang sangat signifikan karena dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pemberian gaji ke 14 bagi pegawai sehingga berpengaruh besar bagi alokasi gaji dan tunjangan di tahun 2016. Selain itu, hal

tersebut semakin dominan dengan masuknya belanja bantuan social pada tahun 2015 yang dikhususkan bagi pembiayaan Beasiswa utusan daerah yang dianggarkan pada rekening Belanja tidak langsung. Selanjutnya untuk belanja yang sifatnya operasional dan rutin ditekankan pada 6 (enam) Program Rutin setiap tahun yang melekat pada semua SKPD yaitu Program Pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan disiplin aparatur, program pengembangan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program penyebaran informasi pembangunan dan program peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan.

Didalam program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengadministrasian di setiap SKPD antara lain : Penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi air dan listrik, jasa administrasi keuangan, kebersihan kantor ATK, cetak dan Penggandaan, penyediaan makan minum, rapat-rapat koordinasi dan jasa tenaga administrasi. Dari proyeksi yang ada ditahun 2017 terjadi penurunan didalam program pelayanan administrasi perkantoran, hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mengkonversi penyediaan makan minum harian pegawai didalam bentuk Uang makan bagi setiap Pegawai Kabupaten Bengkayang. Selain itu turunnya proyeksi didalam program tersebut juga dipengaruhi oleh Regulasi yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terkait Standar Perjalanan Dinas yang secara besaran biaya perjalanan hampir dirata-ratakan mengalami penurunan sebesar kurang lebih 20 %.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur diproyeksi untuk kedepan lebih bersifat fluktuatif. Kontribusi terbesar pada program ini lebih kepada pengadaan Pakaian bagi Pegawai. Oleh karenanya perlu diambil kebijakan untuk melakukan efisiensi anggaran terkait pengadaan pakaian. Alokasi dana yang tersedia adalah untuk mengantisipasi terjadinya Mutasi dan Promosi Pegawai khusus bagi penyediaan pakaian Jabatan Camat, penyediaan pakaian Kerja Lapangan Rumah Sakit serta Penyediaan Pakaian Dinas Tenaga Kontrak Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya untuk 4 program lainnya diproyeksikan mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan untuk mengantisipasi tingkat kenaikan harga disetiap tahunnya.

a. Penghitungan Kerangka pendanaan

Untuk penghitungan lima tahun mendatang (2016-2021), Kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektifitas penggunaan Belanja daerah.

Berdasarkan data dalam kurun waktu 5 tahun 2011-2015, rata-rata daya serap anggaran berdasarkan Realisasi belanja terhadap Kapasitas kemampuan keuangan daerah (Pendapatan ditambah dengan pembiayaan atau silpa tahun sebelumnya) adalah sebesar 93,73 persen, artinya Realisasi belanja yang terjadi hanya mampu menyerap 93,73 persen dari pendapatan dan silpa yang ada, sehingga berpotensi terjadi sisa pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar 6,27 %.

Dari data yang ada didapat gambaran terkait silpa yang terjadi selama 5 tahun sebelumnya, sehingga kedepannya silpa Kabupaten Bengkayang akan diproyeksikan berada pada kisaran persentase yang terjadi dan bersifat fluktuatif.

Perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Untuk selengkapnya secara indikatif tersaji dalam table berikut ini.

**Tabel 3.45**  
**Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016-2021**

No	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendapatan	1.034,29	1.098,70	1.147,95	1.199,61	1.254,03	1.311,37
2	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya	98,61	68,10	59,92	65,91	63,55	84,53
	<b>Total Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah</b>	<b>1.132,29</b>	<b>1.166,80</b>	<b>1.207,87</b>	<b>1.265,52</b>	<b>1.317,58</b>	<b>1.395,90</b>

Sumber : APBD, Data diolah, DPKAD dan bappeda Kab. Bengkulu

### 3.2.3 Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi Kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas.

Kelompok prioritas I mendapatkan posisi prioritas pertama sebelum kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan Prioritas Anggaran sebagai berikut :

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:

- a. Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2016 – 2021, yang merupakan program pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat kebijakan Nasional yang definitive harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan public, memiliki pengaruh berskala besar dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas kepada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah.

- b. Program Prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi, berhubungan dengan pelayanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi Belanja-belanja Tidak Langsung, seperti : Dana Pendamping DAK, tambahan Penghasilan PNS, Belanja Hibah, belanja bantuan Sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan Desa serta belanja Tidak Terduga. Pengalokasian Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada Prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan Prioritas yang benar.

Berkaitan dengan hal tersebut, alokasi kerangka pendanaan berdasarkan prioritas tersaji dalam table sebagai berikut :

**Tabel 3.46**  
**Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Jenis Prioritas**  
**Tahun 2016 – 2021 (Juta Rp)**

	JENIS DANA	ALOKASI											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>PRIORITAS I</b>		<b>517,05</b>		<b>517,97</b>	4,48	<b>541,17</b>	4,74	<b>566,80</b>	4,15	<b>590,30</b>	4,84	<b>618,87</b>
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>		<b>382,2</b>		<b>431,54</b>	4,89	<b>452,64</b>	4,72	<b>474,02</b>	4,37	<b>494,72</b>	4,93	519,12
	Belanja Langsung		<b>133,4</b>		<b>84,8</b>	4,40	<b>88,53</b>	4,80	<b>92,78</b>	3,02	<b>95,58</b>	4,36	99,75
	Pengeluaran Pembiayaan		<b>1,45</b>		<b>1,63</b>	-100,00	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	0
<b>2.</b>	<b>PRIORITAS II</b>		<b>445,80</b>		<b>393,39</b>	1,85	<b>400,66</b>	-3,34	<b>387,27</b>	-1,40	<b>381,84</b>	26,58	<b>483,34</b>
<b>3.</b>	<b>PRIORITAS III</b>		<b>169,44</b>		<b>255,44</b>	4,15	<b>266,05</b>	3,34	<b>274,94</b>	13,71	<b>312,62</b>	-6,05	<b>293,69</b>
	<b>Belanja Tambahan Penghasilan</b>		<b>27,15</b>		<b>32,56</b>	10,00	<b>35,82</b>	5,00	<b>37,61</b>	5,00	<b>39,49</b>	5,00	41,46
	<b>Tunjangan Transportasi</b>					-		-		-		-	
	<b>Sharing Dana DAK (8%)</b>		<b>10,7</b>		<b>13,8</b>	3,62	<b>14,3</b>	3,57	<b>14,81</b>	3,58	<b>15,34</b>	3,52	15,88
	Belanja Subsidi		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Belanja Hibah		8,5		8,5	9,06	9,27	2,91	9,54	300,31	38,19	-74,26	9,83
	Belanja Bantuan Keuangan		121,09		192,33	3,16	198,41	3,19	204,73	3,23	211,35	3,27	218,27
	Belanja Tidak Terduga		2		2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2
	Penyertaan Modal		0	-	6,25	-	6,25	-	6,25	-	6,25	-	6,25
	<b>TOTAL PENDANAAN</b>		<b>1.132,29</b>	<b>3,05</b>	<b>1.166,80</b>	<b>3,52</b>	<b>1.207,87</b>	<b>1,75</b>	<b>1.229,01</b>	<b>4,54</b>	<b>1.284,76</b>	<b>8,65</b>	<b>1.395,90</b>

Sumber : Data DPKAD yang diolah

Berdasarkan Uraian yang telah ada maka dapat disusun Proyeksi APBD periode 2016-2021 didalam struktur APBD sebagai berikut :

**Tabel 3.47**  
**Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021 Setelah Disesuaikan dengan APBD 2016 (Milyar Rp)**

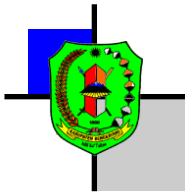
URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN											
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	
1	2		3		4		5		6		7	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.034,29</b>		<b>1.098,70</b>		<b>1.147,95</b>		<b>1.199,61</b>		<b>1.254,03</b>		<b>1.311,37</b>	
<b>BELANJA</b>	<b>1.130,84</b>		<b>1.158,92</b>		<b>1.201,62</b>		<b>1.259,27</b>		<b>1.311,33</b>		<b>1.389,65</b>	
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>540,94</b>	<b>47,84</b>	<b>666,93</b>	<b>57,55</b>	<b>709,23</b>	<b>59,02</b>	<b>758,55</b>	<b>60,24</b>	<b>845,18</b>	<b>64,45</b>	<b>886,04</b>	<b>63,76</b>
<b>Prioritas 1</b>	<b>382,20</b>	<b>33,80</b>	<b>431,54</b>	<b>37,24</b>	<b>463,73</b>	<b>38,59</b>	<b>504,68</b>	<b>40,08</b>	<b>554,15</b>	<b>42,26</b>	<b>614,48</b>	<b>44,22</b>
<b>Prioritas III</b>	<b>158,74</b>	<b>14,04</b>	<b>235,39</b>	<b>20,31</b>	<b>245,50</b>	<b>20,43</b>	<b>253,88</b>	<b>20,16</b>	<b>291,03</b>	<b>22,19</b>	<b>271,56</b>	<b>19,54</b>
a. Belanja Tamb. Penghasilan	27,15	2,40	32,56	2,81	35,82	2,98	37,61	2,99	39,49	3,01	41,46	2,98
b. Belanja Subsidi												
c. Belanja Hibah	8,50	0,75	8,50	0,73	9,27	0,77	9,54	0,76	38,19	2,91	9,83	0,71
d. Belanja Bantuan Keuangan	121,09	10,71	192,33	16,60	198,41	16,51	204,73	16,26	211,35	16,12	218,27	15,71
e. Belanja Tidak Terduga	2,00	0,18	2,00	0,17	2,00	0,17	2,00	0,16	2,00	0,15	2,00	0,14
<b>Belanja Langsung</b>	<b>589,90</b>	<b>52,16</b>	<b>491,99</b>	<b>42,45</b>	<b>492,39</b>	<b>40,98</b>	<b>500,72</b>	<b>39,76</b>	<b>466,15</b>	<b>35,55</b>	<b>503,61</b>	<b>36,24</b>
<b>Prioritas I</b>	<b>133,40</b>	<b>11,80</b>	<b>84,80</b>	<b>7,32</b>	<b>88,53</b>	<b>7,37</b>	<b>92,78</b>	<b>7,37</b>	<b>95,58</b>	<b>7,29</b>	<b>99,75</b>	<b>7,18</b>
<b>Prioritas II</b>	<b>445,80</b>	<b>39,42</b>	<b>393,39</b>	<b>33,94</b>	<b>389,56</b>	<b>32,42</b>	<b>393,13</b>	<b>31,22</b>	<b>355,23</b>	<b>27,09</b>	<b>387,98</b>	<b>27,92</b>
<b>Prioritas III</b>	<b>10,70</b>	<b>0,95</b>	<b>13,80</b>	<b>1,19</b>	<b>14,30</b>	<b>1,19</b>	<b>14,81</b>	<b>1,18</b>	<b>15,34</b>	<b>1,17</b>	<b>15,88</b>	<b>1,14</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>-96,55</b>		<b>-60,22</b>		<b>-53,67</b>		<b>-59,66</b>		<b>-57,30</b>		<b>-78,28</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>96,55</b>		<b>60,22</b>		<b>53,67</b>		<b>59,66</b>		<b>57,30</b>		<b>78,28</b>	
<b>Pendapatan Pembiayaan</b>	<b>98,61</b>		<b>68,10</b>		<b>59,92</b>		<b>65,91</b>		<b>63,55</b>		<b>84,53</b>	
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya	98,61		68,1		59,92		65,91		63,55		84,53	



<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2,06</b>		<b>7,88</b>		<b>6,25</b>		<b>6,25</b>		<b>6,25</b>		<b>6,25</b>	
<b>Prioritas I</b>	<b>1,45</b>		<b>1,63</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Prioritas III</b>	<b>0,61</b>		<b>6,25</b>		<b>6,25</b>		<b>6,25</b>		<b>6,25</b>		<b>6,25</b>	
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

4

Analysis  
Analysis  
Isu-Isu Strategis  
Isu-Isu Strategis



## *BAB IV*

# *ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS*

---

Perumusan isu-isu strategis merupakan upaya penajaman terhadap berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan antara kondisi eksisting saat ini beserta dinamika pembangunan guna menghadapi tantangan kedepan dan menjawab proyeksi masa depan.

Analisis isu-isu strategis ini dilakukan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Bengkayang. Dalam mengidentifikasi isu strategis tersebut, terdapat dua garis besar yang perlu mendapat perhatian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Aspek lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang merupakan potensi wilayah Kabupaten Bengkayang dan perlu pengembangan. Sedangkan aspek lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Bengkayang.

### **4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**

#### **4.1.1 Identifikasi Lingkungan Internal**

##### **a. Kekuatan Daerah**

- Kabupaten Bengkayang memiliki sumberdaya alam yang melimpah meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan sektor pertambangan (terutama Bauksit, Batu Bara dan Mineral Radioaktif) yang belum termanfaatkan secara optimal;
- Posisi geografis Kabupaten Bengkayang sangat strategis karena terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI-1) dan perairan lautnya berhadapan langsung ke Laut Cina

Selatan;

- Mempunyai daerah yang berbatasan langsung (Darat) dengan negara tetangga (Malaysia) yang menjadi beranda depan perekonomian wilayah;
- Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu daerah penghasil devisa yang ditandai dengan tingginya nilai ekspor dibandingkan dengan impor;
- Kabupaten Bengkayang memiliki potensi wisata yang cukup kaya dan beragam, mulai dari wisata alam, wisata sejarah dan budaya serta wisata minat khusus seperti perayaan Cap Go Meh, ritual sembahyang kubur, Eco Tourism dengan alamnya yang masih potensial;
- Kabupaten Bengkayang mempunyai bentang hutan hujan tropika basah (*tropical rainforest*) yang cukup luas dan memiliki berbagai *biodiversity* endemik bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan kerjasama dengan pihak luar negeri;
- Membaiknya kinerja lembaga-lembaga pembiayaan mikro, yang ditandai dengan meningkatnya perkembangan lembaga-lembaga tersebut seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam, termasuk pula *Credit Union* (CU) dalam mendorong perekonomian wilayah Kabupaten Bengkayang.

#### **b. Kelemahan Daerah**

- Terbatasnya infrastruktur kebutuhan dasar yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik;
- Lemahnya Daya saing Kabupaten Bengkayang karena belum berkembangnya hilirisasi industri terutama akibat terbatasnya energi;
- Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan negara dan daerah tertinggal masih sangat terbatas;
- Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional;
- Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan

aparatus birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;

- Belum optimalnya investasi swasta dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah karena belum terbangunnya infrastruktur bertaraf internasional sebagai prasyarat utama masuknya investasi;
- Degradasi lingkungan dan deforestasi sumber daya hutan masih terus terjadi sebagai akibat dari kegiatan perambahan hutan, pertambangan emas tanpa izin, serta kebakaran hutan dan lahan;
- Belum optimalnya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan;
- Daya dukung Kota Bengkayang dalam menanggung beban sebagai pusat pelayanan, pemerintahan dan perekonomian semakin berkurang yang ditandai dengan semakin padatnya lalu lintas kota;
- Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah;
- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan;
- Masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas darat, laut dan udara serta kesehatan masyarakat;
- Luasnya wilayah Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu penyebab panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang berdampak pada keterbatasan infrastruktur di daerah serta lambannya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.1.2 Identifikasi Lingkungan Eksternal**

##### **a. Peluang Daerah**

- Pengembangan kerjasama antarkawasan dan antarnegara secara lebih luas dan nyata seperti Indonesia–Malaysia–Singapore–Growth Triangle (IMS-GT) dan Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA) akan memperluas peluang investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
- Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang resmi mempunyai akses hubungan darat secara langsung dengan negara tetangga (Malaysia);
  - a. Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian wilayah kedua Negara.
  - b. Terbukanya pintu gerbang internasional Pos Lintas Batas (PLB) di Jagoi Babang-Serikin.
- Adanya komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian tujuan-tujuan Millenium Development Goals (MDGs);
- Perubahan tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;
- Belum disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)

##### **b. Ancaman Daerah**

- Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman bagi Kabupaten Bengkayang, yaitu :
  - a. Krisis ekonomi dan keuangan pada negara-negara tujuan ekspor atau menjadi mitra dagang Indonesia akan membawa dampak pada perekonomian daerah;

- b. Pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas (*Free Trade Area*) meningkatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar internasional yang berdampak pada determinasi pasar lokal (daerah) dan pasar dalam negeri;
- Arus informasi yang bersifat negatif semakin sulit dibendung akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat di daerah;
  - Globalisasi akan menguntungkan negara-negara yang memiliki daya saing tinggi.
  - Luasnya wilayah perairan teritorial Kabupaten Bengkayang masih dimanfaatkan nelayan-nelayan asing untuk mengambil sumberdaya perikanan dan kelautan;
  - Letak geografis Kabupaten Bengkayang terutama di kawasan perbatasan negara rawan terjadi *illegal trading*, *trafficking*, dan penyelundupan narkoba serta terorisme;
  - Adanya Peraturan dan perundang-undangan yang bersifat kontraproduktif terhadap jalannya proses pelaksanaan pembangunan di daerah;
  - Pengelolaan status daerah tertinggal dan persoalan perbatasan antar negara belum optimal.

#### **4.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah :

- a. Cakupan masalah yang luas.
- b. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
- c. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

#### **4.2.1 Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib/Pilihan).**

##### **1. Kelompok Bidang Infrastruktur**

###### *a. Urusan Pekerjaan Umum*

- Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa belum optimal;
- Peningkatan pelayanan air bersih masih rendah;
- Akses masyarakat terhadap sanitasi masih rendah karena pemerintah belum mampu menyediakan sanitasi yang layak bagi masyarakat; (persampahan, IPAL dan drainase);
- Sampah masih belum dapat tertangani secara optimal dan timbulan cenderung bertambah.
- Peningkatan pengendalian bencana banjir dan abrasi pantai;
- Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah;
- Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan;
- Terbatasnya pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Percepatan pembangunan jalan baru;
- Kondisi drainase yang tidak selaras dengan tata ruang dan prasarana lainnya telah menimbulkan dampak negatif pada sarana jalan dan menyebabkan banjir;

###### *b. Urusan Perumahan*

- Kawasan kumuh masih luas di Kabupaten Bengkulu dan rasio bangunan ber-IMB masing belum maksimal. Banyak lahan yang belum bersertifikat dan potensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
- Penataan hunian rumah dan permukiman yang layak dengan akses sanitasi yang memadai belum terbangun secara optimal;



- Peningkatan jumlah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni;
- Penataan permukiman kumuh.

*c. Urusan Perhubungan*

- Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar modal dan antar wilayah belum tertata dengan baik;
- Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang belum optimal;
- Tingkat kecelakaan di beberapa titik semakin tinggi. Prasarana jalan yang kurang mendukung pergerakan penduduk, karena kapasitas (jalan sempit) yang semakin terbatas dan kondisi jalan yang kurang mendukung;
- Sarana transportasi yang kurang mendukung pergerakan penduduk dari sisi kuantitas, jalur dan kenyamanan;
- Fasilitas transportasi publik yang belum memadai, sarana transportasi yang ada kurang mendukung pergerakan penduduk dari sisi kuantitas, jalur dan kenyamanan.

*d. Urusan Komunikasi dan Informatika*

- belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana dan layanan komunikasi dan informatika. Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah
- Pembangunan jaringan internet yang belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan public belum optimal.
- Pemanfaatan Iptek dan TI di masyarakat masih kurang

*e. Urusan Lingkungan Hidup*

- Penurunan Kualitas Air dan Udara;
- Masih terjadinya kerusakan lahan yang diakibatkan pembukaan lahan untuk kegiatan PETI dan kebakaran

hutan;

- Masih terjadinya degradasi lingkungan dan deforestasi;
- Kelestarian keanekaragaman Hayati;
- Kurangnya kesadaran pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
- Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuan air tanah di wilayah tangkapan air utama;
- Luas lahan terbangun dalam bentuk pertumbuhan perkebunan di Kabupaten Bengkayang semakin meningkat dan mengurangi luasan sawah dan ruang terbuka hijau;
- Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun, termasuk ketersediaan air bersih. Bahkan di beberapa wilayah pengembangan, kualitas air tidak layak untuk minum, bahkan untuk mandi dan cuci. Namun karena desakan kebutuhan, pada lokasi-lokasi tersebut tetap dibangun permukiman;
- Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;
- Sungai-sungai di Kabupaten Bengkayang juga banyak yang tercemar. Beberapa sungai belum memenuhi baku mutu parameter COD/BOD dan menjadi pembuangan sampah;
- Rawan bencana alam karena memiliki kondisi demografis;
- Peningkatan resiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman;
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
- Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan persampahan;
- Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau (RTH).

*f. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral*

- Rendahnya rasio elektrifikasi Kabupaten Bengkayang sebesar 68% disebabkan oleh penyebaran kelompok

masyarakat dan jumlah masyarakat yang ada dalam kelompok-kelompok tersebut relatif sedikit. Jarak kelompok tersebut dengan jaringan listrik PLN relatif jauh sehingga mengakibatkan belum ada nilai ekonomis bagi PLN untuk membangun jaringan listrik ke area tersebut. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pemerintah kabupaten di bidang energi dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Beralihnya kewenangan ini dapat menimbulkan perlambatan pembangunan sektor energi khususnya pengembangan jaringan listrik di kabupaten Bengkayang. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah dari pemerintah Kabupaten Bengkayang khususnya untuk mengambil langkah-langkah percepatan pembangunan jaringan listrik daerah-daerah yang kurang ekonomis tersebut.

- Beberapa permasalahan mendasar tentang rawan bencana alam tanah longsor disetiap ruas jalan Provinsi maupun jalan kabupaten masih perlu perhatian khusus. Ada beberapa kecamatan yang mempunyai potensi tanah longsor yang dominan. Oleh karena itu perlu adanya peta-peta lokasi daerah rawan tanah longsor yang mana nantinya akan menjadi acuan sebagai antisipasi jika terjadi tanah longsor atau yang nama lain dari bahasa ilmiahnya adalah pergerakan tanah. Ini semua akan terus selalu dalam pemantauan dan pengawasan pihak terkait dan juga masyarakat agar dapat mencegah serta mengantisipasi terjadinya bencana alam tersebut
- Terhambatnya pelayanan sektor perizinan di bidang pertambangan khususnya pengelolaan dan pengawasan komoditas batuan (batuan dan Pasir) akibat peralihan wewenang dari pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi, dengan proses perizinan yang lama dan berbelit-belit menyebabkan masyarakat lebih

memilih melakukan pertambangan tanpa izin dan dapat mempengaruhi PAD daerah;

- Masih maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) khususnya pertambangan mineral logam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang paling besar dan kecelakaan tambang.

## **2. Kelompok Bidang Ekonomi**

### *a. Urusan Penanaman Modal*

- perlunya dorongan peningkatan investasi melalui masuknya arus penanaman modal yang didukung dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif;
- infrastruktur yang belum mendukung, penyebab kurangnya minat investor menanamkan modal;
- Belum optimalnya kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat, dalam pengembangan dan pengelolaan promosi investasi untuk peningkatan realisasi investasi.

### *b. Urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)*

- Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi;
- Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang;
- Permasalahan pasar tradisional terdesak keberadaan pasar modern, menurunkan daya saing pasar tradisional;
- Sentra-sentra kegiatan ekonomi yang sudah terbentuk umumnya belum mendapat dukungan optimal dari pemerintah. Lebih jauh lagi pada kelompok penduduk miskin terjadi kerawanan bahan pokok akibat kenaikan harga;
- Target PDRB riil/kapita belum tercapai;
- Belum optimalnya daya beli masyarakat sebagai salah satu komponen IPM;
- Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam manajemen, organisasi, teknologi dan pemasaran; lemahnya kompetensi

kewirausahaan;

- Terbatasnya kapasitas KUMKM untuk mengakses permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya;
- Masih terdapat beberapa praktik usaha yang tidak sehat dan keterbatasan informasi dan jaringan pendukung usaha.

*c. Urusan Ketahanan Pangan*

- Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
- Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat;
- Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang;
- Masih lemahnya kelembagaan usaha ekonomi produktif di pedesaan melalui sistem penyuluhan pertanian;
- Pengelolaan lumbung pangan lokal dan cadangan pangan masyarakat belum maksimal;
- Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian masyarakat masih rendah;
- Kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih belum memadai.

*d. Urusan Pertanian*

- SDM Petani masih rendah;
- Munculnya fenomena Aging farmer (tenaga kerja pertanian di dominasi oleh tenaga kerja tua), kaum muda dengan pendidikan yang relatif tinggi tidak tertarik dengan usaha pertanian;
- Nilai tukar produk pertanian yang fluktuatif (tidak stabil);
- Terbatasnya akses petani terhadap informasi, teknologi, permodalan dan pasar.
- Tingkat ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah sangat tinggi akibat program yang dijalankan lebih bersifat Top Down/Instruktif tanpa

mempertimbangkan kebutuhan petani;

- Meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian sehingga dominasi kepemilikan petani khususnya sawah hanya 0,5 Ha. Kepemilikan lahan yang sempit mengakibatkan skala usaha tidak efisien;
- Sarana irigasi pertanian sebagian besar rusak dan tidak berfungsi;
- Perubahan iklim dan cuaca sebagai dampak El Nino atau La Nina yang menyebabkan banjir, kekeringan dan perubahan pola serangan hama dan penyakit;
- Sarana dan Prasarana transportasi belum memadai sehingga menyebabkan biaya angkutan sarana produksi dan hasil pertanian menjadi mahal sehingga dapat mengurangi daya saing;
- Sebagian besar petani masih menggunakan benih yang ala kadarnya, belum menggunakan benih unggul berkualitas;
- Tingkat kehilangan hasil (Looses) di Kabupaten Bengkayang yang masih relatif tinggi;
- Lemahnya kinerja kelembagaan petani.
- Rendahnya produksi dan populasi serta produktivitas ternak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daerah;
- Sentra-sentra pembibitan ternak belum memadai;
- Produk daging ternak segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi belum berkembang;
- Meningkatkan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis seperti rabies dan flu burung.

*e. Urusan Kehutanan*

- Belum mantapnya kawasan hutan;
- Belum optimalnya pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
- Adanya ancaman terhadap hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh faktor manusia dan

daya alam;

- Belum terwujudnya restrukturisasi dan revitalisasi industri primer hasil hutan kayu;
- Belum optimalnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kehutanan terhadap hasil hutan kayu dan non kayu;
- Masih terdapatnya lahan kritis didalam kawasan hutan yang perlu segera ditangani;
- Kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya hutan;
- Belum optimalnya pengelolaan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- Masih rendahnya produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan melalui pelaksanaan teknologi perkebunan terutama penyediaan benih/bibit unggul di antaranya melalui sistem kultur jaringan;
- Akses permodalan untuk pengembangan perkebunan rakyat belum memadai untuk dimanfaatkan petani perkebunan;
- Membangun kemitraan pekebun dengan perusahaan perkebunan dalam meningkatkan produktivitas, mutu hasil dan nilai tambah komoditas perkebunan serta mewujudkan perekonomian masyarakat yang meningkat di sektor ini.

*f. Urusan Kelautan dan Perikanan*

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah untuk mendukung usaha pada sektor kelautan dan perikanan (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan);
- *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)* masih terjadi di perairan laut Kabupaten Bengkayang;
- Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bengkayang belum dilaksanakan secara optimal dan terpadu;

- Adanya penurunan kualitas perairan akibat adanya abrasi pantai, sedimentasi, pencemaran bahan-bahan berbahaya seperti; bahan kimia cair, merkuri, dan logam berat lainnya akibat PETI, limbah industri yang tidak ramah lingkungan dan aktifitas ekonomi lainnya pada kawasan pengembangan usaha perikanan tangkap dan budidaya sehingga berakibat menurunnya produktivitas usaha perikanan masyarakat;

*g. Urusan Perdagangan*

- Keterbatasan aksesibilitas berimplikasi pada terbatasnya arus lalu lintas barang dalam perekonomian di Kabupaten Bengkulu terutama pada daerah-daerah terpencil.
- Rendahnya fasilitas pendukung dalam bentuk pasar dan terminal tentunya telah mengakibatkan arus perdagangan internal Kabupaten dan antar daerah lain menjadi terhambat
- Beberapa proses perdagangan belum berjalan optimal sebagai akibat dari belum optimalnya tata kelola dan pemanfaatan potensi arus perdagangan dan pasar yang ada terutama di daerah perbatasan.

*h. Urusan Industri*

- Populasi usaha industri yang masih terbatas dengan struktur yang belum kokoh dilihat dari (a) penguasaan usaha; (b) keterkaitan industri skala besar dan industri kecil dan menengah (IKM); dan (c) keterkaitan hulu-hilir dimana peranan IKM sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan belum optimal dalam perekonomian daerah;
- Tuntutan masyarakat global atas industri berwawasan lingkungan.
- Ketersediaan dan kualitas infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, energi/listrik, air bersih) yang belum memadai;
- Hubungan industrial dalam perburuan belum terbangun dengan baik;
- Kepastian hukum dalam mengembangkan investasi;



- Suku bunga perbankan yang relatif masih tinggi dan rendahnya insentif bagi investor dalam mengembangkan hilirisasi;

*i. Urusan Pariwisata*

- Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur dasar destinasi wisata;
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan Sapta Pesona;
- Peningkatan pengelolaan kepariwisataan yang terencana dan terpadu;
- Peningkatan investasi di bidang pariwisata;
- Peningkatan kerjasama antara pemerintah, swasta dan asosiasi pariwisata.
- Pemetaan data pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten/Kota;
- Peningkatan pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku ekonomi kreatif untuk menunjang kepariwisataan;
- Pemberdayaan dan penguatan industri-industri kreatif.

### **3. Kelompok Bidang Sosial Budaya**

*a. Urusan Pendidikan*

- Kesempatan atau partisipasi pendidikan masih terbatas;
- Kompetensi tenaga pendidik yang masih dibawah standar dan distribusi di daerah belum merata;
- Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;
- Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif;
- Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan perlu ditingkatkan.
- Tantangan di masa 5-10 tahun ke depan adalah jumlah anak usia pendidikan dasar menengah akan meningkat.;
- Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;

- Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum berjalan mantap dan sesuai harapan;
- Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki makna sosial yang sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya masing-masing daerah;
- Rendahnya kepekaan terhadap warisan budaya daerah nenek moyang sebagai bagian dari perekat budaya nasional;
- Rendahnya pemanfaatan IT;
- Belum optimalnya tata kelola sekolah menyangkut alokasi DAK untuk ruang kelas baru, dana BOS, DSP/SSP;
- Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran lembaga pendidikan masih rendah;
- Pergerakan anak bersekolah yang lintas wilayah, sehingga beban pelayanan pendidikan tidak seimbang;
- Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan masih perlu ditingkatkan mutunya;
- Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
- Nasib sekolah pinggiran yang masih minim sarana dan prasarana;
- Inkonsistensi dan tertutupan dalam Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- Biaya pendidikan sekolah menengah masih membebani orang tua peserta didik;
- Masih ada pelayanan lembaga pendidikan yang belum sesuai dengan standar nasional;
- Pelaksanaan MBS belum sepenuhnya sesuai dengan Permendiknas No.19 Tahun 2007.

*b. Urusan Kesehatan*

- Status kesehatan ibu dan anak masih rendah;
- Status gizi masyarakat masih rendah;
- Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih

tinggi;

- Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas;
- Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas;
- Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal;
- Manajemen pembangunan kesehatan belum efektif;
- Kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah masih lebar;
- Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah.
- Sistem layanan kesehatan masih menanggung beban lebih besar dibandingkan dengan kapasitasnya, termasuk mekanisme pengelolaannya;
- Kesadaran masyarakat untuk persalinan oleh tenaga medis kesehatan belum optimal yang menyebabkan target penurunan jumlah kematian ibu melahirkan belum tercapai;
- Angka fertilitas belum tercapai;
- Angka harapan hidup belum tercapai;
- Kapasitas pelayanan Puskesmas belum optimal;
- Penyebaran penyakit-penyakit endemi yang cepat dan mudah mengalami mutasi yang dapat mempengaruhi secara tiba-tiba terhadap tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Bengkayang.
- Belum optimalnya sinergitas pelayanan kesehatan antara pemerintah dengan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.

*c. Urusan Kepemudaan dan Olahraga*

- Partisipasi dan peran aktif pemuda belum optimal; Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan pemuda, antara lain terjadinya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), termasuk penularan HIV dan AIDS; serta tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda. Selain itu juga makin maraknya

pola pikir pragmatis, menurunnya nasionalisme dan tingginya tingkat pengangguran terbuka di kalangan pemuda.

- Prestasi dan budaya olahraga masih rendah; Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan budaya dan prestasi olahraga, antara lain terbatasnya prasarana dan sarana olahraga masyarakat; belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga dan pembina keolahragaan; rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi, serta belum optimalnya sistem manajemen keolahragaan.
- Rendahnya kemampuan kewirausahaan di kalangan pemuda. Beberapa permasalahan yang menyebabkan kondisi ini antara lain, tingkat keterampilan yang masih rendah serta kurangnya kesempatan untuk berkreasi.

*d. Urusan Ketenagakerjaan*

- Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi dengan perkembangan lapangan kerja yang terbatas, diantaranya adalah karena keterbatasan keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya sehingga perlu adanya perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta pengelola BLK, pemberian pelatihan dan pendidikan yang berorientasi pada pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya lokal.
- Penanggulangan pengangguran belum optimal;
- Peningkatan produktivitas tenaga kerja belum optimal
- Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja perlu ditingkatkan; Kesempatan kerja perlu diperluas secara menyeluruh hingga pedalaman dan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
- Kapasitas lembaga ketenagakerjaan masih rendah.

*e. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

- Pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi bagi anak dan remaja;
- Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;
- Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
- Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;
- Penguatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender (PUG);
- Peningkatan Perlindungan Perempuan;
- Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Belum Optimal; Permasalahan yang dihadapi oleh anak adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak yang mencakup berbagai stimulasi dini dan pelayanan tumbuh kembang anak untuk kesiapan belajar dalam memasuki jenjang sekolah; derajat kesehatan dan gizi anak; serta pengasuhan dan perlindungan anak. Disamping itu, masih terdapat anak yang tidak bersekolah yang disebabkan kemiskinan. Di bidang kesehatan, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masih tingginya kematian bayi dan balita.

*f. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*

- Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;
- Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Bengkayang diantaranya adalah karena migrasi masuk penduduk.
- Berdasarkan kecenderungan sepuluh tahun terakhir, maka di masa 5-10 tahun mendatang, proporsi penduduk umur

muda meningkat pesat. Hal dapat menjadi beban pembangunan, bahkan bila kecenderungan tersebut tidak dapat dikendalikan, dikhawatirkan jumlahnya akan terus meningkat, sehingga tidak dapat ditopang oleh daya dukung lingkungan.

- Penduduk miskin juga menjadi persoalan yang berat, karena jumlah absolut penduduk miskin yang cukup besar dan umumnya berasal dari keluarga miskin dan cenderung sulit terlepas dari kondisi tersebut.
- Pelayanan Keluarga Berencana (KB) belum Optimal; antara lain masih terbatasnya tenaga penyuluh KB; Advokasi KIE masih belum optimal; peran serta institusi masyarakat dan penggarapan kewilayah sasaran masih terbatas; akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi belum optimal;
- Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan peserta KB dan upaya peningkatan ketahanan keluarga.

*g. Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa*

- Rendahnya kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; Sebagian besar desa masih tergantung kepada layanan pemerintah karena keterbatasan asset dan akses desa terhadap sumberdaya lokal serta inisiatif dan kapasitas lokal yang lemah.
- Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat; Masih banyak masyarakat desa yang tingkat kesejahteraan sangat memprihatinkan, oleh karena itu pengembangan usaha perekonomian masyarakat perlu dioptimalkan.
- Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna.
- Rendahnya kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) dalam memotivasi partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan

ekonomi masyarakat.

- Pembangunan sarana dan prasarana desa, infrastruktur desa masih belum memadai dalam meningkatkan akses pengembangan ekonomi desa;
- Permasalahan di wilayah perdesaan, seperti tingginya lahan-lahan kritis dan tingginya risiko kerentanan petani dan pelaku usaha dipertanian akibat ketergantungan besar kepada sumber daya alam. Belum memadainya penggunaan teknologi tepat guna menjadi penyebab belum lancarnya percepatan pembangunan di perdesaan.

*h. Urusan Kebudayaan*

- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
- Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya untuk kepentingan diplomasi budaya sehingga meningkatkan citra diri, harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan dunia;
- Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;
- Kurang tersedianya sarana pertunjukan seni budaya;

Selama ini bidang seni budaya masih dianggap belum dianggap prioritas sehingga pembangun sarana dan prasaran pertunjukan mengalami perlambatan, selain dari pada itu pagelaran seni budaya baik di luar kabupaten, provinsi/luar negeri dianggap membutuhkan biaya sangat tinggi.

- Belum optimalnya pemanfaatan potensi seni budaya; Minimnya sarana dan prasarana untuk pagelaran seni budaya mempengaruhi minat masyarakat untuk mengembangkan sanggar-sanggar seni budaya di daerah.
- Kurang luasnya jangkauan layanan pendidikan seni budaya; Selama ini dirasakan kurangnya tenaga yang handal dalam mencetak SDM bidang seni budaya serta minimnya minat dan perhatian generasi muda terhadap pengembangan seni budaya.

*i. Urusan Sosial*

- Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang;
- Upaya penanggulangan kemiskinan belum maksimal dilakukan;
- Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal;
- Kualitas, Kuantitas serta kapasitas lembaga sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan belum berkembang sebagaimana diharapkan;
- Manajemen dan profesionalisme penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu semakin ditingkatkan;
- Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;
- Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum optimal;
- Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, didukung prasarana yang mencukupi dan



berkualitas, serta dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan;

*j. Urusan Ketrasmigrasian*

- Rendahnya tingkat kesejahteraan transmigrasi; Kondisi ini ditandai dengan kurang subur nya lahan serta tidak ditunjang dengan SDM transmigran, selain dari pada itu transmigran yang didatangkan memiliki tingkat keahliannya kurang sesuai dengan lokasi yang ditempati.
- Lambatnya pengembangan pembangunan kawasan transmigrasi; Kondisi di daerah transmigrasi kurang didukung dengan sarana dan prasarana yang baik seperti jalan desa dan jalan penghubung untuk distribusi hasil produksi, jaringan irigasi yang kurang memadai serta kurangnya pembinaan lokasi transmigrasi oleh aparat desa setempat.
- Lambatnya penyelesaian administrasi pertanahan bagi transmigrasi; Mendorong penyelesaian administrasi pertanahan yang selama dirasakan sangat mengganggu pelaksanaan program transmigrasi.

**4. Kelompok Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM**

*a. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian*

- Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;

- Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal;
- Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata;
- Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
- Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal;
- Penegakan supremasi hukum masih lemah;
- Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal;
- Kerjasama dengan pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat masih kurang;
- Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal;
- Kapasitas aparatur pemerintah belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi dalam manajemen pembangunan dan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Bengkayang relatif masih rendah;
- Sistem remunerasi berbasis kinerja yang masih belum terimplementasi dengan baik;
- Kelurahan dan kecamatan belum berperan optimal dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan skala lingkungan atau di tingkat masyarakat;
- Transparansi pengelolaan pemerintahan belum memadai;
- Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini;
- Sumber pembiayaan pembangunan relatif belum bervariasi;
- Koordinasi, sinergitas, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam kerjasama antara pemerintahan pada kawasan Kabupaten Bengkayang pun dirasa belum optimal, kerjasama yang dilakukan masih terbatas terutama dengan kabupaten/kota

yang terbatas, seperti tempat pembuangan sampah yang atau permasalahan sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air bersih yang masih harus disuplai dari luar Kabupaten Bengkayang;

- Masih belum optimalnya pelayanan publik serta rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- Masih belum optimalnya reformasi birokrasi;
- Perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN yang ditunjukkan dengan meningkatnya capaian indikator kinerja sehingga pembiayaan pembangunan dapat lebih efisien dan efektif;
- Masih belum optimalnya penataan kelembagaan dan pengembangan sistem ketatalaksanaan;
- Belum optimalnya sistem peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS;
- Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- Pengembangan hukum dan HAM;
- Luas wilayah, terkait panjangnya rentang kendali pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik sehingga perlu ditempuh dengan pembentukan daerah otonom baru.

*b. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

- Belum semua SKPD dan instansi pemerintah menganggap penting dan manfaat dari database kependudukan by name by address untuk pelayanan publik dan dalam perencanaan pembangunan, khususnya untuk update (crosscheck) data penduduk dalam rangka mendukung Program Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, seperti: Jamkesmas, Jampersal, Raskin, BOS (pendidikan), BOK (kesehatan);
- Terbatasnya sarana dan prasarana kerja serta SDM yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi kependudukan, baik sarana

teknologi dan informasi;

- Sistem SIAK lebih terfokus untuk bidang kependudukan, tetapi untuk bidang pencatatan sipil masih banyak Kabupaten/ Kota yang belum menggunakan SIAK karena masih sering terjadi error pada saat printout akta pencatatan sipil tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Masih belum adanya keseriusan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi persoalan rendahnya laporan kematian penduduk oleh pihak keluarganya, sehingga data penduduk yang sudah meninggal tidak terhapus dalam database kependudukan Kabupaten/ kota;
- Masih belum optimalnya koordinasi antara SKPD, terkait bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- Masih adanya penduduk yang sudah menetap di luar daerah domisilinya lebih dari 1 tahun, namun yang bersangkutan tidak mau pindah, sehingga secara de facto terdata di domisili yang baru, tetapi secara de jure mereka masih terdata di daerah asalnya;
- Jangkauan pelayanan cukup jauh antara desa-desa dengan kecamatan;
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung terselenggaranya administrasi kependudukan.

*c. Urusan Kearsipan*

- Kesadaran dan kepedulian aparatur pemerintah masih rendah sehingga menyebabkan arsip tidak dapat dikelola dengan baik;
- Kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara kearsipan masih belum optimal dan jumlah arsiparis masih belum memenuhi standar;
- Pembinaan SDM kearsipan belum berkesinambungan.
- Belum memiliki tenaga fungsional arsip (Arsiparis)

*d. Urusan Perpustakaan*

- Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal;
- Keanekaragaman koleksi bahan pustaka masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Pertumbuhan serta pengelola perpustakaan di Desa/Kelurahan belum optimal;
- Layanan perpustakaan baru sebagian kecil saja menjangkau wilayah Kabupaten Bengkayang;
- Kuantitas dan kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai;
- Kurangnya anggaran yang digunakan untuk menunjang keberhasilan program dalam bidang perpustakaan;
- Keterbatasan luas gedung/lahan untuk pengembangan perpustakaan yang memadai/standart perpustakaan kabupaten;
- Minimnya penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu sebagai penunjang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**5. Kelompok Bidang Politik, Ketentraman dan Ketertiban**

*a. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik*

- Beragamnya agama dan suku yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bengkayang, mempunyai peluang besar terjadinya gesekan antar kelompok yang akan memicu terjadinya konflik di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencegah hal-hal tersebut maka pemerintah perlu mendapatkan informasi real tentang situasi dan kondisi di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang. Informasi dari masyarakat di seluruh pelosok wilayah Kabupaten disalurkan melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang merupakan organisasi yang

melibatkan masyarakat dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di wilayah masing-masing. Untuk itu keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat perlu diadakan pembinaan dan pelatihan yang serius sebagai upaya pencegahan terhadap konflik sosial yang bisa merusak keharmonisan dalam kehidupan masyarakat;

- Keberadaan Kabupaten Bengkayang yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, memberikan dampak kurangnya pengetahuan dan kecintaan terhadap budaya dan negara sendiri. Untuk itu perlu upaya untuk lebih mengenalkan budaya Indonesia dan kegiatan yang berisikan tentang pengetahuan dan peningkatan rasa Nasionalisme di kalangan generasi muda di wilayah perbatasan;
- Organisasi masyarakat, LSM, dan OKP banyak terdapat di kabupaten Bengkayang, namun sayang belum seluruhnya mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya melaksanakan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan, sosialisasi dan penertiban Ormas, LSM, dan OKP dalam upaya meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah kabupaten Bengkayang baik itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

*b. Urusan Satuan Polisi Pamong Praja*

- Fakta saat ini kapasitas aparatur pemerintah (Satpol PP) masih sangat rendah dan sangat jarang mengikuti berbagai bentuk diklat dan peningkatan ketrampilan yang dipersyaratkan, padahal agar segala Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dapat berjalan dengan efektif efisien dibutuhkan aparatur yang cakap dan mumpuni dalam hal pengetahuan dan kemampuan menjalankan dan menegakkan perda/perbub tersebut;
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya situasi masyarakat yang tentram dan tertib. Kepatuhan terhadap segala macam PERDA/PERKADA juga relatif rendah, hal ini dapat dilihat dari rendahnya PAD Kabupaten Bengkayang,

masih maraknya bangunan yang tidak memiliki IMB, hiburan tidak sehat dsb;

- Kondisi saat ini sarana dan prasarana Satpol PP kurang memadai untuk pencapaian kinerja yang lebih maksimal dan pelaksanaan tupoksi SKPD, perlu sekali pembenahan dan peremajaan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana yang ada saat ini;
- Sinergisitas antar SKPD dalam penegakan PERDA/PERKADA dirasakan masih sangat rendah dan terkesan berjalan lambat dan sendiri-sendiri hal ini dapat dilihat dari berbagai program dan kegiatan di SKPD masing-masing.

#### **4.2.2 Identifikasi Permasalahan Bidang Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang**

Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal turut memberi dampak pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang memunculkan isu ketegangan lintas batas wilayah maupun penataan ruang wilayah.

Berbagai permasalahan tersebut menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah termasuk urusan perencanaan pembangunan dan tata ruang, karena perencanaan pembangunan dan tata ruang merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan mengoptimalkan sumber daya serta melibatkan pelaku pembangunan di daerah Kalimantan Barat.

Untuk memahami isu-isu strategis terkait dengan bidang perencanaan pembangunan dan tata ruang perlu dilihat dari pembangunan urusan perencanaan pembangunan dan pembangunan urusan penataan ruang.

##### *a. Urusan Perencanaan Pembangunan*

- Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia Perencana; Kemampuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas masih terbatas.
- Lemahnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

Keterkaitan dan konsistensi ini menjadi penting dalam proses pembangunan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Perencanaan pembangunan perlu dukungan anggaran agar keberhasilan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dapat tercapai.

- Rendahnya kualitas data dan informasi pembangunan; Data dan informasi memegang peran penting dalam merumuskan rencana pembangunan. Melalui data tersebut, maka akan diperoleh informasi tentang keberhasilan pembangunan pada tahun sebelumnya yang akan digunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan yang akan datang. Namun saat ini, kondisi saat ini kualitas data dan informasi yang mampu menggambarkan bentuk keberhasilan pembangunan dimasa lalu masih belum optimal.
- Lemahnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarurusan pemerintahan, serta antarpusat dan daerah; Untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang didukung pendanaan baik secara sektoral, lintas sektoral maupun wilayah diperlukan sinkronisasi sekaligus sinergitas antar seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
- Perlunya penguatan inovasi daerah; Dalam upaya mendorong pembangunan bidang penelitian dan pengembangan di daerah, maka pengembangan inovasi daerah menjadi sebuah tuntutan. Peran inovasi daerah sebagai upaya peningkatan daya saing daerah seharusnya dikembangkan secara terus menerus.

*b. Urusan Penataan Ruang*

- Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan;
- Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan;
- Kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat seperti kawasan perkotaan;



- Belum optimalnya pengaturan dan pembinaan penataan ruang; Belum optimalnya pengaturan dan pembinaan penataan ruang salah satunya disebabkan belum selesainya penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan amanat UU No. 26 Tahun 2007, masih kurangnya pemahaman mengenai UU No. 26 Tahun 2007 oleh pemangku kepentingan, serta lemahnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang antarsektor dan antarwilayah.
- Belum optimalnya instrument pengendalian pemanfaatan ruang; Masalah yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang adalah belum tersedianya mekanisme perizinan yang mengacu kepada RTRW, dan petunjuk pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelanggaran RTRW.
- Masih lemahnya pengawasan penataan ruang. Masalah yang terkait dengan pengawasan penataan ruang adalah belum optimalnya instrument yang mencakupi meningkatkan fungsi pengawasan dalam penataan ruang seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketersediaan Norma, Standar, Prosedur Kegiatan (NSPK).

### **4.3 ISU STRATEGIS**

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

1. Isu strategis dari dinamika nasional dan regional yang mempengaruhi Kabupaten Bengkulu.
2. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari :
  - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu 2005-2025.
  - Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan

pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang.

- Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam RPJMD ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini,

1. Kriteria-1: Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Kriteria-2: Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Kriteria-3: Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Kriteria-4: Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kriteria-5: Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Kriteria-6: Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

#### **4.3.1 Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional**

Penentuan isu strategis didahului dengan *review* terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kabupaten Bengkayang. Hasil *review* akan melengkapi draft isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kabupaten Bengkayang.

##### **1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019**

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode yang lalu dan mencermati tantangan ke depan, RPJMN menetapkan Visi Indonesia 2015-

2019, yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 misi, dimana semua misi tersebut bersinggungan dengan permasalahan riil di Kabupaten Bengkayang. Berikut Misi Pembangunan Nasional :

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara Kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Perwujudan visi dan misi RPJMN 2015-2019 dilakukan melalui Strategi Pembangunan Nasional, yang menggariskan hal-hal sebagai berikut, yaitu :

- a. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
  1. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
  2. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.
- b. Tiga Dimensi Pembangunan
  1. Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat
  2. Dimensi Pembangunan sektor unggulan dengan prioritas
  3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan
- c. Kondisi sosial, politik, hukum dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi Perlu tersebut antara lain :

1. Kepastian dan penegakan hukum;
  2. Keamanan dan ketertiban;
  3. Politik dan demokrasi; dan
  4. Tata kelola dan reformasi birokrasi
- d. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sesuai dengan visi pembangunan nasional **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup :

1. Sasaran Makro
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan
4. Sasaran Dimensi Pemerataan

5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Masing-masing agenda prioritas dan sasaran utama pembangunan nasional dijabarkan menurut prioritas –prioritas yang dilengkapi dengan uraian sasaran, arah kebijakan, strategi, indikator dan program kegiatan.

Pada setiap program, terdapat substansi inti yang berisi aspek-aspek pada sebuah program yang dilengkapi dengan target yang terukur. Substansi inti ini hendaknya menjadi target bersama yang harus dikejar oleh seluruh daerah, tidak terkecuali oleh Kabupaten Bengkulu, sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan Visi Indonesia 2015-2019.

## **2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)**

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk. Evaluasi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). EPPD meliputi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB).

EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Didalamnya terdapat arahan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengimplementasikan "Sistem Pengukuran Kinerja Mandiri" (*self assessment*) sebagaimana amanat Pasal 32 hingga 40 PP 6/2008. Untuk dapat melakukan hal tersebut Tim Nasional EPPD menyusun indikator kinerja kunci untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Berdasarkan hasil kajian dan analisis, tim penilai dapat melakukan evaluasi tahap akhir dengan membandingkan tingkat capaian kinerja masing-masing SKPD dengan:

- a. target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja SKPD;
- b. target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam RKPD;
- c. realisasi kinerja SKPD tahun sebelumnya; dan

d. seluruh realisasi kinerja SKPD

Dalam kaitannya dengan isu strategis Kabupaten Bengkayang, aspek-aspek pembangunan yang terdapat dalam Indikator Kinerja Kunci dapat dipandang sebagai aspek strategis yang harus diprioritaskan penanganannya. Tim perumus dapat melakukan identifikasi permasalahan pada aspek di Indikator Kinerja Kunci supaya dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dengan aspek tersebut.

### **3. Standar Pelayanan Minimum (SPM)**

Dalam pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), diamanatkan bahwa SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Sampai dengan pertengahan Tahun 2013, telah diterbitkan 15 (lima belas) SPM oleh kementerian/lembaga, yaitu SPM:

1. Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
2. Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
3. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.
4. Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
5. Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
6. Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

7. Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota.
8. Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
9. Bidang Pekerjaan Umum.
10. Bidang Ketenagakerjaan.
11. Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota.
12. Bidang Komunikasi dan Informasi.
13. Bidang Kesenian.
14. Bidang Penanaman Modal.
15. Bidang Perhubungan Daerah.

#### **4.3.2 Kebijakan Pembangunan Daerah**

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkayang 2005-2025.
2. Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang.
3. Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

#### **4.3.3 Penetapan Isu Strategis**

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Bengkayang dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kabupaten Bengkayang. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan isu strategis yang tepat akan menghindarkan pemerintah daerah dari merumuskan kebijakan yang salah didefinisikan. Input dari tahap ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran di bab selanjutnya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan di bidang-bidang pembangunan Kabupaten Bengkayang, maka perlu

dirumuskan isu strategis utama pembangunan. Perumusan isu strategis utama pembangunan ini diarahkan agar implementasi program dan kegiatan dapat lebih terarah, fokus, sinergi dan berkelanjutan dan dapat menjawab misi Kepala Daerah. Adapun isu strategis utama pembangunan Kabupaten Bengkayang sebagai berikut:

1. Infrastruktur
2. Pelayanan Pendidikan
3. Pelayanan Kesehatan
4. Pertanian dan Ketahanan Pangan
5. Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
6. Pariwisata dan Perdagangan
7. Perhubungan dan Komunikasi
8. Reformasi Birokrasi
9. Wilayah Perbatasan

Berbagai isu strategis dimaksud merupakan tantangan yang perlu diantisipasi juga potensi sumberdaya yang perlu dikembangkan untuk keberhasilan pencapaian cita-cita pembangunan.

1. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan komponen penting dalam pembangunan sekaligus elemen pendukung bagi seluruh sektor pembangunan pada suatu daerah. Esensi infrastruktur pada suatu daerah akan berpengaruh secara signifikan pada hasil pembangunan pada masyarakat dan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selain sebagai roda penggerak dari seluruh proses pembangunan pada semua sektor, infrastruktur juga merupakan penentu dalam keberhasilan pemerataan pembangunan yang berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Bengkayang memiliki luas areal yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit namun tersebar pada seluruh wilayah. Fenomena tersebut berimplikasi pada kebutuhan infrastruktur fisik terutama jalan dan jembatan yang sangat banyak untuk mewujudkan aksesibilitas yang optimal bagi kehidupan masyarakat. Aksesibilitas yang rendah tentunya akan mengakibatkan aktivitas masyarakat menjadi tidak lancar pada semua sektor. Lalu lintas barang dan aktivitas perekonomian akan menjadi mahal dan



sulit, proses dan hasil pembangunan akan menjadi tidak optimal, bahkan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat akan sangat sulit dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Persentase jalan dan jembatan sebagai infrastruktur transportasi masih banyak yang dalam kondisi tidak layak, bahkan masih banyak jalan yang masih belum dibangun yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang. Sampai saat RPJMD Kabupaten Bengkayang ini disusun, masih terdapat 3 Kecamatan yang tidak memiliki aksesibilitas yang layak sebagai penghubung ke kota Kabupaten, yaitu Kecamatan Siding, Suti Semarang, dan juga kecamatan Lembah Bawang.

Kegiatan perekonomian masyarakat yang memiliki aksesibilitas rendah dengan pusat perekonomian (kota kecamatan dan kota kabupaten) akan kurang efektif dan efisien bagi usaha dan bisnis masyarakat. Jarak dan waktu tempuh yang jauh tentunya akan menjadi masalah bagi lalu lintas barang yang diperlukan dan dijual oleh masyarakat. Bahkan pada beberapa kecamatan dan desa masih mengandalkan transportasi air (sungai) untuk melakukan aktivitas dan perdagangan yang memerlukan waktu dan biaya yang sangat tinggi. Kondisi tersebut tentunya sangat tidak menguntungkan untuk kegiatan bisnis dan usaha. Pada beberapa daerah pegunungan dan perbukitan beberapa desa masih mengandalkan transportasi darat yang hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Meski jauh dan membutuhkan waktu yang lama, masyarakat tetap melakukan aktivitas perekonomian untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain masyarakat tidak mempunyai pilihan mengingat kebutuhan dasar harus dipenuhi untuk tetap bertahan hidup.

Aksesibilitas yang relatif rendah berpengaruh pada kurang optimalnya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Meskipun pembangunan yang setiap tahun dilakukan untuk standarisasi dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, namun aksesibilitas yang rendah akan mempersulit kegiatan pelayanan pada kedua sektor tersebut. Pada kondisi seperti ini tentunya penerapan pelayanan publik yang merata dan berkeadilan oleh pemerintah akan sulit dilakukan.

Berkaitan dengan penjelasan di atas maka pembangunan infrastruktur masih merupakan hal yang utama dan prioritas dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang selama lima tahun kedepan. Untuk itu perencanaan pembangunan yang mempertimbangan prioritas dan bersifat terpadu adalah hal yang mutlak diperlukan. Pembangunan yang terpadu dan memperhatikan semua variabel penentu keberhasilan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat adalah penting untuk menjamin hasil pembangunan berpengaruh secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat Bengkayang.

Infrastruktur yang berkaitan dengan pemukiman masyarakat tentunya hal yang penting demi menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terdapat empat hal penting yang menjadi perhatian dalam infrastruktur fisik yang berkaitan dengan pemukiman, yaitu rumah yang layak huni, kebutuhan air, kelistrikan, dan juga kebersihan lingkungan pemukiman. Empat hal tersebut memiliki korelasi yang tinggi dengan kebutuhan dasar dan kualitas hidup masyarakat.

Setiap tahun pemerintah Kabupaten Bengkayang melakukan pembangunan pada pemukiman yang kumuh dan rumah masyarakat yang tidak layak huni. Namun demikian dengan keterbatasan sumberdaya mengakibatkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak huni. Langkah yang dapat dilakukan selama lima tahun ke depan adalah melakukan inventarisasi rumah-rumah yang tidak layak huni untuk dibangun dan melakukan pembangunan secara bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Keterbatasan pada sumber air bersih dan kelistrikan tentunya akan mempersulit kehidupan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kedua infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Masih banyak desa dan rumah tangga yang belum memiliki kedua fasilitas kebutuhan dasar tersebut. Secara keseluruhan keterbatasan penganggaran yang bisa dialokasikan serta luasan wilayah dan sebaran pemukiman merupakan kelemahan utama Kabupaten Bengkayang untuk menyediakan infrastruktur air dan

kelistrikan secara merata bagi masyarakat.

Penataan pemukiman kumuh juga merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Permasalahan infrastruktur berupa pemukiman kumuh justru menjadi pekerjaan rumah di daerah perkotaan, baik kota kecamatan maupun kota kabupaten. Dua hal penting yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pemukiman kumuh, yaitu melakukan infrastruktur fisik yang berkaitan dengan permasalahan suatu kawasan kumuh yang disertai dengan penataan melalui penegakan regulasi yang berkaitan dengan tata kota agar tidak terjadi aktivitas masyarakat yang berefek negatif pada kawasan pemukiman.

## 2. Pelayanan Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan.

Pendidikan juga merupakan salah satu variabel penting pada fungsi penyusun indikator makro pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendidikan memberikan kontribusi yang cukup besar pada IPM, dan dari beberapa parameter pembangunan sektor pendidikan Kabupaten Bengkayang memiliki permasalahan pada rata-rata lama sekolah. Idealnya rata-rata lama sekolah adalah 12 tahun, namun Kabupaten Bengkayang hanya pada angka 5,97 tahun. Untuk parameter lainnya pada sektor pendidikan, capaian yang diperoleh Kabupaten Bengkayang relatif baik dan tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya.

Jika angka rata-rata lama sekolah dapat ditingkatkan secara signifikan maka secara otomatis IPM Kabupaten Bengkayang juga pasti akan menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Berkaitan dengan hal tersebut peningkatan angka rata-rata lama sekolah adalah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah kabupaten Bengkayang. Untuk itu pada RPJMD Kabupaten Bengkayang memiliki target

peningkatan angka rata-rata lama sekolah pada akhir jabatan Bupati Bengkayang pada tahun 2021, yaitu mencapai angka sebesar 9,5 tahun.

Faktor pembentuk optimalisasi pelayan pendidikan pada masyarakat Kabupaten Bengkayang adalah berkaitan dengan tenaga pendidik, manajemen pendidikan, dan fasilitas yang berhubungan dengan infrastruktur bangunan dan fasilitas penunjang proses belajar mengajar. Meskipun sara keseluruhan hal tersebut perlu ditingkatkan untuk pelayanan pendidikan yang efektif bagi masyarakat Bengkayang, namun hal yang paling utama diperhatikan adalah pemerataan pelayanan pendidikan. Tenaga pendidikan, alat peraga pendidikan, dan manajemen pelayanan pendidikan tetap secara berkelanjutan terus dikembangkan, namun hal utama untuk peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan adalah pembangunan sekolah dan infrastruktur penunjang berupa fasilitas sekolah dan jalan untuk aksesibilitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat.

### 3. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting pada keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Upaya penting yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan Balai Pengobatan, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Klinik Kesehatan, dan Rumah sakit. Ketersediaan Puskesmas di Kabupaten Bengkayang tergolong cukup baik mengingat setiap Kecamatan telah memiliki Puskesmas. Namun permasalahannya

adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas masih sangat terbatas, oleh karena itu sampai RPJMD ini dibuat Puskesmas di Kabupaten Bengkayang belum ada yang telah terakreditasi. Pada akhir masa RPJMD periode ini, tepatnya pada tahun 2021 diharapkan seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten seluruhnya (17 unit) telah terakreditasi.

Rumah Sakit Umum yang ada di Kabupaten ada 2 unit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Bethesda (Swasta). RSUD Kabupaten Bengkayang masih kategori tipe D, dan pada akhir RPJMD periode 2016-2021 ditargetkan meningkat status menjadi tipe C. dengan peningkatan tipe pada RSUD tentunya berimplikasi pada peningkatan standar dan kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan pada masyarakat Bengkayang.

Permasalahan lain berkaitan dengan kualitas pelayanan Kesehatan di kabupaten Bengkayang adalah keterbatasan tenaga medis yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat. Setiap tahun hal ini terus diusahakan untuk diatasi oleh pihak pemerintah, melalui program beasiswa maupun melalui kerjasama dengan universitas yang menyediakan tenaga medis. Namun hal yang sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan merata adalah berkaitan dengan aksesibilitas seperti yang telah dijabarkan sebelumnya pada permasalahan infrastruktur. Dengan aksesibilitas yang masih rendah bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkayang akan sangat mempersulit mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Untuk hal itu, maka program yang terpadu berkaitan dengan pembangunan pada sektor kesehatan sangat perlu direncanakan dengan baik dan benar.

#### 4. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sektor pertanian yang dibicarakan adalah pertanian secara umum yang meliputi pertanian tanaman semusim, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Sektor pertanian merupakan hal yang sangat penting bagi Kabupaten Bengkayang terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar masyarakat Bengkayang mengandalkan sektor pertanian secara umum sebagai

mata pencarian dan aktivitas perekonomian. Hal ini sangat wajar mengingat kondisi alam Kabupaten Bengkayang memiliki potensi yang sangat besar untuk sektor pertanian.

Dengan potensi yang sangat besar, pertanian Kabupaten Bengkayang berjalan relatif lamban meski terjadi peningkatan produksi pada hampir semua komoditas. Dengan manajemen pengelolaan yang lebih efektif baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi, seharusnya peningkatan angka produksi pada seluruh komoditas pertanian lebih baik daripada yang diperoleh sampai pada saat ini. Kondisi ini memerlukan perhatian dari pihak pemerintah untuk memberikan fasilitas dan program stimulus bagi masyarakat untuk dapat mengoptimalkan hasil pertanian yang dimiliki. Beberapa komoditas pertanian secara umum yang berpotensi menjadi unggulan daerah di Kabupaten Bengkayang antara lain adalah komoditas sawit, lada, karet, dan perikanan.

Dua komoditas pertanian yang berperan penting pada ketahanan pangan di Kabupaten Bengkayang adalah komoditas padi dan jagung. Kedua komoditas tersebut sangat potensial untuk dikembangkan baik dari angka produksi maupun produktivitas. Namun demikian angka produksi pada dua komoditas tersebut justru mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Meskipun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk angka produksi masih pada angka aman untuk pangan, tetapi apabila penurunan tersebut terus terjadi dan jumlah penduduk terus meningkat maka pada suatu saat Bengkayang akan menghadapi permasalahan pada pangan.

Masalah konkret yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan produksi tanaman pangan padi adalah kesulitan dalam memperoleh benih. Masalah lainnya yang berlaku pada kedua komoditas tanaman pangan tersebut adalah terjadinya konversi lahan ke lahan perkebunan, yang selanjutnya berakibat menurunnya luas tanam dan luas panen. Memperhatikan permasalahan tersebut, maka pengembangan pada sektor pertanian merupakan prioritas pada RPJMD Kabupaten Bengkayang 2016-2021.

Kebijakan yang berkaitan dengan mempersiapkan regulasi untuk mempertahankan luas tanam komoditas tanaman pangan sangat

diperlukan untuk menjaga angka produksi. Sedangkan untuk meningkatkan angka produktivitas diperlukan program yang mengarah pada stimulus pada kegiatan meningkatkan produksi melalui jalur intensifikasi pertanian. Beberapa kegiatan yang direkomendasikan sesuai permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah menyediakan atau memfasilitasi usahatani masyarakat melalui penyediaan alsintan, irigasi, dan merevitalisasi kegiatan penyuluhan pertanian.

#### 5. Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang mempertimbangan masalah lingkungan. Peningkatan luas lahan kritis, pendangkalan sungai, pencemaran air, pencemaran udara, dan jumlah titik api pada musim kemarau di Kabupaten Bengkayang merupakan indikasi kongkret bahwa kualitas lingkungan telah mengalami degradasi. Kondisi ini tentunya harus diperbaiki dan tidak boleh dilakukan pembiaran karena akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat dimasa yang akan datang.

Mengatasi permasalahan tersebut diperlukan tindakan pencegahan dan rehabilitasi pada lingkungan yang sudah terlanjur rusak. Program sosialisasi dan penegakan regulasi diperlukan untuk pencegahan yang efektif disertai dengan program pembuatan Ruang terbuka Hijau (RTH) dan normalisasi sungai serta penataan pemukiman yang berada di bantaran sungai atau Daerah Aliran Sungai (DAS).

Lahan kritis merupakan produk dari eksploitasi lahan hutan yang berlebihan dan tidak dilakukan rehabilitasi. Kualitas tanah lahan kritis akan terus mengalami degradasi apa bila tidak dilakukan rehabilitasi yang pada akhirnya menjadi hamparan lahan yang tidak berfungsi sama sekali baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Pada kondisi yang ekstrem lahan kritis bahkan akan menyebabkan bencana yang sangat merugikan, yaitu dalam bentuk banjir maupun tanah longsor.

Pada musim kemarau aktivitas masyarakat dan fenomena alam di Kabupaten Bengkayang sering menghasilkan titik-titik api yang



sangat mempengaruhi kualitas udara, baik itu secara langsung pada kesehatan maupun secara tidak langsung pada aktivitas masyarakat. Permasalahan yang berkaitan dengan polusi udara ini tidak hanya berefek pada daerah yang menjadi sumber permasalahan, namun juga menjadi permasalahan secara nasional bahkan global. Regulasi pencegahan dan penanganan secara tepat pada kebakaran hutan dan lahan merupakan hal yang sangat penting untuk mereduksi kejadian kebakaran yang sangat merugikan tersebut.

Kasus banjir juga merupakan permasalahan tahunan yang dihadapi oleh Kabupaten Bengkayang. Menurunnya kualitas penutupan lahan dan pendangkalan aliran sungai telah mengakibatkan menurunnya kemampuan sungai untuk menampung volume air pada musim kemarau. Pada akhirnya terjadi bencana banjir yang sangat merugikan bagi masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Kasus banjir ini kian meningkat baik dalam frekwensi kejadian maupun kerugian yang ditimbulkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan aliran sungai semakin parah dan harus segera diatasi. Tindakan preventif seperti sosialisasi tentang bahayanya aktivitas pembuangan sampah ke sungai, penambangan emas tanpa izin (PETI), dan melakukan aktivitas di Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah hal yang perlu dilakukan segera. Sedangkan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi DAS yang sudah terlahjur rusak adalah dengan melakukan normalisasi sungai untuk mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya.

Sebagian besar kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan oleh aktivitas masyarakat baik pada skala besar maupun kecil. Untuk itu pada masa yang akan datang beberapa kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi sumberdaya alam sebaiknya memasukkan komponen lingkungan sebagai dasar pertimbangan utama. Untuk itu dalam kegiatan pembangunan dan investasi yang dilakukan di Kabupaten Bengkayang sebaiknya selalu diawali dengan kajian eksternalitas lingkungan (AMDAL) agar ditemukan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.



## 6. Pariwisata dan Perdagangan

Kondisi alam dan keberagaman budaya telah menjadikan Kabupaten Bengkayang memiliki potensi wisata alam dan wisata budaya yang sangat kaya. Beberapa potensi teraebut antara lain adalah wisata pegunungan, wisata pantai, wisata air terjun, dan wisata even ritual adat yang berlangsung setiap tahun. Aset yang sangat berharga tersebut tidak akan bermanfaat apabila tidak dikelola dengan baik, bahkan untuk kelestarian budaya juga akan terancam jika tradisi ritual adat dari beberapa etnis yang ada di Kabupaten Bengkayang tidak dilestarikan.

Dari sekian banyak potensi wisata alam yang ada hanya 4 yang sudah menjadi destinasi wisata. Sedangkan untuk wisata budaya pengelolaan masih mengarah pada pendekatan kelestarian saja dan belum optimal pada pendekatan ekonomis. Memperhatikan hal tersebut perencanaan yang terpadu dan alokasi penganggaran yang cukup besar diperlukan untuk bisa menjadikan potensi pariwisata di kabupaten Bengkayang menjadi aset yang dapat memberi daya ungkit dan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat.

Pariwisata dan perdagangan merupakan dua sektor yang mempunyai hubungan saling mendukung. Pariwisata akan memberikan pemasukan secara langsung bagi daerah melalui redistribusi yang berasal dari pengunjung dan juga para pelaku bisnis yang memanfaatkan aset wisata yang dikunjungi. Pada saat yang bersamaan sektor perdagangan juga akan mengalami peningkatan dengan peningkatan aktivitas pariwisata. Beberapa aktivitas perdagangan yang berhubungan langsung dengan sektor pariwisata antara lain adalah bisnis perhotelan, transportasi, restoran, bisnis kerajinan tangan dan beberapa bisnis perdagangan lainnya.

## 7. Perhubungan dan Komunikasi

Perhubungan dan komunikasi merupakan sektor yang sangat penting pada proses pembangunan dan mengoptimalkan hasil pembangunan agar dapat berpengaruh positif bagi masyarakat dan daerah. Keterbatasan infratraktur perhubungan di Kabupaten

Bengkayang telah menurunkan kualitas dan kuantitas aktivitas masyarakat Kabupaten Bengkayang. Perhubungan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memberikan dampak langsung pada pendapatan daerah, untuk itu komponen-komponen yang berkaitan dengan hal tersebut harus tersedia. Dengan topografi yang sangat lengkap dari kawasan pegunungan sampai kawasan pantai tentunya berimplikasi pada komponen perhubungan yang variatif. Adapun komponen yang sangat penting dan diperlukan pada sektor perhubungan di Kabupaten Bengkayang antara lain adalah terminal perhubungan darat, pelabuhan, dan juga fasilitas untuk uji KIR pada kendaraan angkutan darat.

Sektor komunikasi merupakan hal yang berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Informasi yang lancar dan mencakup pada seluruh wilayah daerah tentunya sangat mendukung pada seluruh aktivitas masyarakat. Komunikasi tidak hanya dipandang sebagai pendukung pemenuhan kebutuhan dasar saja namun sudah pada tahap pendukung aktivitas bisnis dan juga penguasaan ilmu dan teknologi. Pembangunan pada sektor komunikasi dapat dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi sampai tingkat desa, namun demikian dukungan dari pihak swasta yang bergerak pada bidang komunikasi juga perlu dilakukan yang menggunakan pendekatan kemitraan.

#### 8. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. *Pertama*, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik; yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi

keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu terupdate dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik setiap SKPD yang berkaitan langsung dengan fungsi pelayanan pada masyarakat diharapkan telah memiliki dan mengamalkan SOP. Namun demikian SKPD yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas masyarakat tentunya tetap melakukan manajemen kerja yang mengutamakan prinsip pelayanan mengingat hal utama yang dicapai dalam pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat.

Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk perbaikan tata kelola pemerintah daerah, namun hal ini tetap menyisakan berbagai kendala. Terkait dengan manajemen anggaran, diketahui bahwa selama ini perencanaan dan penganggaran Kabupaten Bengkayang masih terdapat inkonsistensi yang cukup tinggi. Masih sering terdapat program dan kegiatan yang terdapat pada perencanaan tidak muncul pada saat APBD ditetapkan, demikian juga sebaliknya kegiatan yang tidak direncanakan justru muncul pada program kerja di beberapa SKPD. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga masih sangat minim di Kabupaten Bengkayang, hal ini terlihat dari kecilnya presentasi kegiatan yang muncul di APBD Kabupaten Bengkayang yang berasal dari usulan masyarakat melalui musrenbang.

Kabupaten Bengkayang masih memiliki pekerjaan rumah terkait pengelolaan keuangan dan aset berkaitan dengan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Adapun salah satu kendala yang terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang adalah pada manajemen pengelolaan aset daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bengkayang masih belum optimal. Alokasi belanja pegawai yang masih cukup tinggi, mengakibatkan manfaat untuk belanja langsung bagi masyarakat

masih terbatas. Masih banyaknya keluhan masyarakat tentang beberapa jenis pelayanan umum. Misalnya, terkait pelayanan pendidikan yang masih belum merata, masih dijumpai beberapa keluhan berkaitan dengan penyediaan air bersih dan fasilitas kelistrikan, penyediaan layanan kesehatan, dan transportasi.

Salah satu kendala yang sangat penting untuk segera diatasi adalah belum optimalnya peningkatan kapasitas dan integritas aparatur sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN. Adanya beberapa kasus oknum PNS Kabupaten Bengkayang yang terlihat dalam kasus korupsi masih mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah belum sepenuhnya bebas dari KKN.

#### 9. Wilayah Perbatasan

Memiliki wilayah perbatasan membuat Bengkayang menjadi salah satu daerah unik yang berimplikasi pada tugas khusus dan wajib dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Permasalahan wilayah perbatasan tidak hanya berbicara kesejahteraan dan perekonomian tetapi juga berkaitan dengan masalah kedaulatan NKRI. Paradigma pembangunan kawasan perbatasan pada saat orde baru adalah perbatasan dijadikan sebagai beranda belakang NKRI, hal ini berimplikasi pada sebagian besar wilayah perbatasan darat termasuk daerah yang terisolasi dan tertinggal. Pengelolaan yang keliru tersebut telah berujung pada lepasnya beberapa wilayah kedaulatan NKRI ke negara tetangga. Tentunya hal tersebut merupakan hal yang patut dihindari terjadi pada kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang.

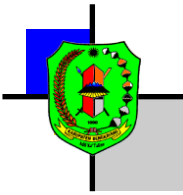
Paradigma pembangunan di wilayah perbatasan yang tepat adalah menjadikan perbatasan sebagai beranda depan negara. Perbatasan tidak hanya dipandang sebagai batas negara dan menjadi target pembangunan yang lain akhir dan tidak prioritas. Untuk mewujudkan hal tersebut maka program pembangunan infrastruktur, perekonomian masyarakat, sektor unggulan, kebutuhan dasar, serta pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang utama untuk segera diwujudkan.

Terdapat dua kecamatan yang terdapat di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang, yaitu Kecamatan Jagoi babang dan Kecamatan Siding. Wilayah perbatasan merupakan salah satu peluang namun sekaligus sebagai ancaman bagi Kabupaten Bengkayang. Perbatasan dapat menjadi potensi dalam perekonomian terutama dari sektor perdagangan dan pariwisata, demikian juga sebaliknya menjadi wilayah yang rentan terhadap kasus kriminal, seperti TKI illegal, human trafficking, penyeludupan, dan konflik dengan negara tetangga.

Pembangunan kawasan perbatasan memerlukan penganggaran yang cukup besar, jika hanya mengandalkan APBD Kabupaten Bengkayang tentu mengalami kesulitan. Memperhatikan hal tersebut diperlukan keterlibatan langsung dari pihak pemerintah pusat untuk mengelola kawasan perbatasan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Namun demikian Kabupaten Bengkayang melalui SKPD yang berkaitan dengan kawasan perbatasan harus melakukan tata kelola yang tepat untuk pembangunan di kawasan perbatasan agar sinergis dengan pemerintah pusat terutama dalam hal perencanaan.

# 5

## Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan



## BAB V

# VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN

### 5.1 VISI DAN MISI RPJMD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016-2021

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Bengkayang. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan.

Visi merupakan pencapaian kondisi optimal daerah yang selanjutnya menjadi arah pembangunan Kabupaten Bengkayang selama kepemimpinan Kepala Daerah Terpilih dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi yang dirumuskan tentunya sinergis serta mengakomodir isu strategis serta kebijakan-kebijakan nasional yang bersifat dinamis. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021, yaitu:

#### **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

**Masyarakat** : Meliputi seluruh penduduk regional Kabupaten Bengkayang baik yang berdomisili tersebar di 17

Kecamatan maupun yang sedang tidak berdomisili di Kabupaten Bengkulu; artinya ada penduduk yang pada waktu tertentu tidak berada di wilayah Kabupaten Bengkulu karena kepentingan perjalanan, tugas dan menempuh pendidikan.

**Bengkayang** : Meliputi wilayah dan sumberdaya di dalamnya; artinya Kabupaten Bengkulu yang memiliki batasan geografis yang jelas baik wilayah darat maupun air yang mengalami dinamika sejak berdiri tahun 1999 sampai saat ini.

**Sejahtera** : Suatu kondisi optimal masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar baik lahir maupun batin sehingga mampu mewujudkan manusia yang hidup harmonis sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Kesejahteraan tidak hanya dipandang sebagai kondisi pada sisi masyarakat saja tetapi meliputi kondisi lingkungan Kabupaten Bengkulu yang memberikan peluang besar untuk dapat berkreasi, berinovasi, dan berkembang baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Pada akhirnya memberikan suatu pengaruh yang positif baik internal regional maupun bagi daerah lain di sekitarnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pencapaian kesejahteraan masyarakat menggunakan pendekatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dari semua bidang terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar agar terbentuk pondasi yang kuat bagi terciptanya kemakmuran masyarakat di Kabupaten Bengkulu.

**Berdaya Saing** : Menjadi daerah yang mampu berperan positif bagi kesejahteraan masyarakat baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Kemampuan tersebut tidak hanya mencakup SDM saja tetapi meliputi daerah secara substansial yang



mampu dan selalu siap dengan fenomena global yang seiring waktu selalu dinamis.

Dalam rangka mewujudkan visi Bupati Bengkayang tersebut di atas, selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam rumusan beberapa misi agar langkah-langkah yang akan diimplementasikan dalam pembangunan menjadi jelas. Rumusan visi yang tersusun merupakan gambaran dan uraian mengenai upaya yang harus dilakukan agar visi Kabupaten Bengkayang dapat tercapai sampai pada tahun 2021. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa misi merupakan kerangka atau arah bagi kebijakan pada pembangunan di Kabupaten Bengkayang.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Berdasarkan deskripsi tersebut maka penyusun melakukan penyesuaian dan menerjemahkan berkaitan pernyataan misi dengan visi yang akan dicapai. Adapun rumusan misi kepala daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

**Penjabaran Visi dan Misi Bupati Kabupaten Bengkulu  
(2016-2021)**

Visi	Misi
<p><b>“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BENGKAYANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”</b></p>	Meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkulu dengan konsep nilai tambah dan optimalisasi
	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu yang cerdas, kreatif dan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
	Meningkatkan keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat di kabupaten Bengkulu melalui optimalisasi program partisipasi masyarakat
	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu
	Menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan organisasi kemasyarakatan
	Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional dan bersih dengan prinsip melayani
	Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan
	Menjadikan wilayah perbatasan Kabupaten Bengkulu sebagai daerah yang maju dan beranda depan NKRI

**Misi Pertama:** Meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkulu dengan konsep nilai tambah dan optimalisasi. Dimaksudkan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan

peningkatan pada pengelolaan sektor unggulan daerah, mengoptimalkan perdagangan dan perindustrian masyarakat, membangun pariwisata dengan menggunakan pendekatan ekonomis, dan meningkatkan kesempatan kerja di Kabupaten Bengkayang.

**Misi Kedua:** Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang cerdas, kreatif dan mampumenguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Bengkayang melalui peningkatan standar dan mutu pelayanan pendidikan, pemberdayaan masyarakat melalui diklat dan pendidikan non formal, dan menyediakan fasilitas media informasi dan komunikasi bagi masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang.

**Misi Ketiga:** Meningkatkan keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat di kabupaten Bengkayang melalui optimalisasi program partisipasi masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui jaminan keamanan dan ketertiban, serta mengikutsertakan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban umum.

**Misi Keempat:** Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan standar dan mutu pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata, menyediakan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis yang standar, dan meningkatkan pemahaman hidup sehat di masyarakat kabupaten Bengkayang melalui program sosialisasi.

**Misi Kelima:** Menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan organisasi kemasyarakatan. Dimaksudkan untuk meningkatkan peran kelembagaan non pemerintahan dalam proses pembangunan di Kabupaten Bengkayang dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses terbentuk dan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan.

**Misi Keenam:** Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional dan bersih dengan prinsip melayani. Dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pada perencanaan, penganggaran, dan

aparatur pemerintah yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan mutu pelayanan publik pada masyarakat.

**Misi ketujuh:** Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang tersedia dengan tetap menjaga stabilitas kualitas lingkungan.

**Misi Kedelapan:** Menjadikan wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang sebagai daerah yang maju dan beranda depan NKRI. Dimaksudkan untuk menjadikan perbatasan Kabupaten Bengkayang sebagai daerah yang berkembang baik dari sisi infrastruktur, fasilitas kebutuhan dan pelayanan dasar, perekonomian masyarakat, maupun dari sisi pembangunan kualitas sumberdaya manusianya.

## **5.2 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016-2021**

Rumusan misi yang telah tersusun, selanjutnya akan dijabarkan dalam rumusan yang lebih spesifik, yaitu dalam bentuk tujuan dan sasaran. Pada tingkat sasaran, arah pembangunan semakin jelas dalam mengakomodir isu-isu startegis yang berkembang di Kabupaten Bengkayang. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa target capaian yang sudah terukur baik secara kuantitas maupun kualitas yang selanjutnya dijadikan indikator keberhasilan capaian dari visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang 2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD.

Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah kabupaten Bengkayang menjadi

landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Memperhatikan hal tersebut maka dokumen RPJMD dan Renstra SKPD harus tersusun secara sinergis dan konsisten agar proses pembangunan yang terjadi searah dan dapat menjawab Visi dan misi Kepala daerah.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2016-2021 di Kabupaten Bengkayang adalah, sebagai berikut:

**Misi Pertama:**

Meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkulu dengan konsep nilai tambah dan optimalisasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Tujuan 1: Membangun Perekonomian Kabupaten Bengkulu yang kuat</b>											
1	Meningkatnya PAD kabupaten Bengkulu	Penerimaan Pajak Daerah	Rupiah (juta)	7.894	11.200	15.000	15.825	16.695	17.613	18.582	18.582
		Penerimaan retribusi Daerah	Rupiah (Juta)	10.609	10.000	10.498	10.697	10.697	10.697	10.697	10.697
2	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Tingkat PDRB harga konstan	Rupiah (Milyar)	4.471	4.800	5.100	5.325	5.500	5.750	6.000	6.000
		Tingkat PDRB harga pasar	Rupiah (Milyar)	5.565	5.950	6.400	6.950	7.500	8.100	8.500	8.500
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Lapangan Pekerjaan Baru	Jumlah	N/A	300	350	500	500	500	500	2.650

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Tujuan 2: Mengoptimalkan sektor perekonomian masyarakat</b>											
4	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran/kapita	Rupiah	766.919	820.000	850.00	875.00	930.00	960.00	1.000.0	1.000.000
5	Meningkatnya produksi sektor unggulan daerah	Produksi Karet/Tahun	Ton	23.073	22.970	22.900	22.900	23.000	23.100	23.200	23.200
		Produksi Lada/Tahun	Ton	1.293	1.350	1.400	1.400	1.470	1.500	1.600	1.600
		Produksi Sawit/Tahun	Ton	111.243	120.00	125.00	125.00	127.00	128.00	130.000	130.000
		Produksi Ikan Tangkap/Tahun	Ton	1.734	1.900	2.000	2.000	2.200	2.350	2.500	2.500
		Produksi Ikan Darat/Tahun	Ton	3.218	3.450	3.550	3.550	3.700	3.800	4.000	4.000
6	Berkembangnya sektor pariwisata daerah	Jumlah Destinasi Wisata	Jumlah	4	4	4	5	5	5	6	6
		Wisatawan Domestik	Orang	269.575	280.000	300.00	350.00	360.00	370.00	400.000	400.000
		Wisatawan Mancanegara	Orang	1.285	1.400	1.600	1.600	1.750	1.800	2.000	2.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Tujuan 3: Meningkatkan nilai tambah aktivitas perekonomian masyarakat</b>											
7	Berkembangnya Koperasi dan UMKM	Jumlah Pelaku UMKM	Unit	2.270	50	75	100	200	200	200	3.095
		Koperasi Aktif	%	60,75	70,00	72,00	73,00	75,00	76,00	80,00	80,00
8	Meningkatnya perekonomian pada sektor sekunder dan tersier	Kontribusi Sektor Sekunder pada PDRB	%	12,38	12,50	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	17,00
		Kontribusi Sektor Tersier pada PDRB	%	51,69	52,00	55,00	56,50	57,00	58,50	60,00	60,00



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Tujuan 4: menyediakan infrastruktur dan sarana pendukung perekonomian masyarakat dan regional</b>											
9	Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	Rasio ruas jalan dalam kondisi baik	%	49,90	54,00	58,50	63,19	67,87	72,17	76,08	76,08
10	Terwujudnya sistem transportasi publik yang representatif bagi aktivitas perekonomian masyarakat	Jumlah terminal Tipe C	Unit	5	5	6	6	8	8	10	10
		Ketersediaan Fasilitas Uji KIR angkutan umum	Ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	ada	ada	ada	ada
		Jumlah laka lantas	kasus	136	<100	<100	<80	<75	<75	<50	<50
11	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pemukiman	Luas kawasan pemukiman kumuh	Ha	156,44	140,00	130,00	110,00	90,00	80,00	65,00	65,00
12	Terwujudnya infrastruktur air bersih dan listrik yang berkualitas dan merata	Desa yang memiliki akses listrik	%	66,12	70,16	72,58	76,61	77,41	80,64	88,70	88,70
		Rumah tangga yang memiliki akses air bersih	%	28,27	35,00	38,00	40,00	45,00	47,00	50,00	50,00

Misi pertama Bupati Bengkayang ingin meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkayang dengan konsep nilai tambah dan optimalisasi. Perekonomian daerah yang kuat akan berpengaruh positif pada perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkayang, karena dengan kekuatan anggaran yang baik akan mengoptimalkan program pembangunan yang memfasilitasi dan memberdayakan kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Perekonomian Kabupaten Bengkayang akan kuat jika PAD yang diperoleh dan pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat, serta tersedianya lapangan kerja yang cukup untuk menurunkan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Bengkayang. Perolehan PAD tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pendapatan tetapi juga sebagai variabel utama dalam perhitungan bantuan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian jika terjadi peningkatan perolehan PAD maka semakin besar pula perolehan dana perimbangan dalam bentuk (Dana Alokasi Umum) DAU yang akan diperoleh Kabupaten Bengkayang.

Perolehan PAD sangat tergantung pada dua hal, yaitu penerimaan pajak dan restribusi daerah. Pada RPJMD Kabupaten Bengkayang ditargetkan besaran penerimaan pajak dan restribusi yang cukup signifikan sampai pada tahun 2021, namun peningkatan target tersebut masih kurang dari 100%. Target yang cukup optimis tersebut mempertimbangkan potensi PAD dan restribusi yang masih besar belum terinventarisir dan terpungut oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Jika melihat trend yang terjadi pada PDRB Kabupaten Bengkayang baik pada harga pasar maupun harga konstan, maka kekuatan ekonomi daerah Kabupaten Bengkayang cukup kuat. Perbedaan yang cukup besar antara APBD dan PDRB pada setiap tahun mengindikasikan bahwa aliran uang dan pendapatan masyarakat Kabupaten Bengkayang tidak terlalu tergantung pada APBD. Besaran PRDB yang mencapai 400% lebih besar dari APBD pada 3 tahun terakhir juga menjelaskan bahwa belanja yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk pembangunan telah memberikan daya ungkit yang cukup besar pada aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Perekonomian masyarakat akan mengalami peningkatan jika sektor perekonomian yang diusahakan oleh masyarakat mengalami perkembangan dan memiliki nilai tambah yang meningkat. Salah satu parameter yang dapat mendeskripsikan peningkatan perekonomian masyarakat adalah pada kemampuan daya beli masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Sektor perekonomian masyarakat yang berpotensi untuk dikembangkan sekaligus sebagai sektor unggulan daerah kabupaten Bengkayang meliputi dua hal yaitu yang berkaitan dengan sektor pertanian secara umum (*agroforestry*) dan sektor pariwisata. *Agroforestry* dan pariwisata merupakan dua sektor yang memiliki potensi paling besar di Kabupaten Bengkayang, dengan pengelolaan yang tepat tentunya akan berperan pada peningkatan pendapatan masyarakat serta memberikan peluang terciptanya lowongan pekerjaan baru di Kabupaten Bengkayang.

Pada sektor *agroforestry* terdapat beberapa komoditas unggulan daerah Kabupaten Bengkayang yang berpotensi dikembangkan baik pada angka produksi maupun produktivitas, yaitu komoditas sawit, karet, lada, dan komoditas perikanan. Secara keseluruhan angka produksi semua komoditas unggulan tersebut mengalami peningkatan setiap tahun, namun demikian perolehan tersebut relatif belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang disediakan oleh alam. Berkaitan dengan hal tersebut maka pada tahun 2021 ditargetkan capaian angka produksi yang cukup signifikan pada seluruh komoditas unggulan tersebut.

Sampai saat RPJMD ini tersusun, destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bengkayang hanya berjumlah 4 destinasi. Padahal dengan potensi wisata alam dan budaya yang kaya tentunya kawasan dan even yang dapat dikelola sebagai destinasi wisata di Kabupaten Bengkayang berjumlah sangat banyak. Pengelolaan kualitas dan kuantitas destinasi wisata yang tepat tentunya akan berpengaruh secara langsung pada perekonomian masyarakat mengingat peningkatan jumlah pengunjung atau turis pada suatu daerah akan menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun keterbatasan penganggaran tentunya merupakan kelamahan yang perlu dipertimbangkan dalam menambah destinasi wisata di Kabupaten Bengkayang. Memperhatikan hal tersebut maka

target peningkatan jumlah destinasi wisata di Kabupaten Bengkayang yang realistis adalah mencapai angka 6 destinasi (bertambah 2 destinasi) pada tahun 2021.

Meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan nilai tambah pada aktivitas perekonomian masyarakat. Sebagian besar aktivitas perekonomian masyarakat kabupaten Bengkayang masih mengandalkan sektor primer untuk memperoleh pendapatan, padahal sektor tersebut memiliki nilai tambah yang relatif kecil dibandingkan sektor sekunder dan tersier. Hal tersebut ditunjukkan pada kontribusi sektor primer pada PDRB Kabupaten Bengkayang yang cukup besar selama 3 tahun terakhir. Memperhatikan hal tersebut maka diperlukannya usaha yang keras untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat Bengkayang yang bergerak pada sektor sekunder dan sektor tersier.

Kebijakan pembangunan yang mengarah pada fasilitasi pelaku UMKM dan koperasi akan sangat berpengaruh pada perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat pada sektor sekunder dan sektor tersier. Peningkatan jumlah pelaku UMKM dan koperasi yang aktif di Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu parameter yang menjelaskan bahwa aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkayang yang mengandalkan nilai tambah mengalami perkembangan. Pada tahun 2021 ditargetkan jumlah pelaku UMKM mencapai angka 3095 pelaku dan koperasi yang aktif sekitar 80%.

Perekonomian masyarakat suatu daerah akan berkembang jika aktivitas perekonomian berjalan dengan optimal. Dukungan infrastruktur merupakan hal yang sangat esensi dalam rangka optimalisasi aktivitas perekonomian masyarakat Bengkayang yang mengandalkan sektor agroforestry dan memiliki karakteristik daerah yang cukup luas. Infrastruktur jalan dan jembatan sebagai pendukung transportasi tentunya hal yang sangat diperlukan untuk proses jual beli dan arus lalu lintas barang dan jasa masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang merupakan hal yang patut diprioritaskan agar seluruh masyarakat dapat melakukan aktivitas perekonomiannya dengan lancar. Selain sarana transportasi, bahan dasar aktivitas perekonomian berupa air

bersih dan aksesibilitas kelistrikan sebagai fasilitas pendukung juga merupakan suatu hal yang sangat penting agar aktivitas masyarakat Kabupaten Bengkulu dapat berjalan dengan optimal.

Selain keterbatasan infrastruktur jalan dan sarana transportasi yang dimiliki, persentase kondisi jalan Kabupaten Bengkulu yang dalam kondisi baik pada tahun terakhir masih relatif rendah, yaitu hanya mencapai 52,05%. Mempertimbangkan arti pentingnya dan memperhatikan kondisi kekuatan anggaran daerah, maka target yang ingin dicapai pada tahun 2021 kondisi jalan dalam kondisi baik adalah mencapai angka 70,00%. Untuk kelistrikan, sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkulu telah memiliki jaringan listrik, meski demikian esensi kelistrikan pada perekonomian masyarakat mengarahkan pada komitmen pemerintah untuk meningkatkan cakupan jaringan listrik sehingga mencapai 88,70%. Sedangkan untuk akses air bersih, masyarakat Kabupaten Bengkulu sebagian besar masih belum menikmati akses air bersih (Tahun 2015 hanya mencapai 28,27%). Mengingat air adalah kebutuhan dasar masyarakat, maka pada tahun 2021 diharapkan masyarakat yang telah memiliki akses air bersih mencapai angka 50,00%.

**Misi Kedua:**

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu yang cerdas, kreatif dan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Tujuan 1: Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata</b>											
1	Meningkatnya standar pendidikan	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	5,97	6,00	6,50	7,00	7,50	8,50	9,50	9,50
		Penduduk melek huruf	%	91,42	92,00	92,50	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00
		Guru yang berkualifikasi S-1/D-IV	%	77,89	80,00	85,00	90,00	92,00	95,00	100,00	100,00
		Rasio guru terhadap 1000 murid SD/ sederajat	Skala	14,9	15,00	16,00	16,50	17,00	17,50	18,00	18,00
		Rasio guru terhadap 1000 murid SMP/ sederajat	Skala	12,7	13,00	13,25	13,50	13,75	14,00	14,00	14,00
		Rasio guru terhadap 1000 murid SMA/ sederajat	Skala	10,5	11,00	11,25	11,60	11,75	12,00	12,00	12,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Bangunan Sekolah SD/ sederajat dalam kondisi baik	%	36,7	40,00	45,00	50,00	>50,00	>50,00	>50,00	>50,00
		Bangunan Sekolah SMP/ sederajat dalam kondisi baik	%	28,8	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	>50,00	>50,00
		Bangunan Sekolah SMA/ sederajat dalam kondisi baik	%	37,3	40,00	45,00	50,00	>50,00	>50,00	>50,00	>50,00
2	Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan	Desa/ Kelurahan yang telah memiliki PAUD	%	61,29	64,52	68,54	76,61	88,71	96,77	100,00	100,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Tujuan 2: Mengoptimalkan aksesibilitas teknologi informasi di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu</b>											
3	Tersedianya fasilitas pendukung teknologi informasi	Kecamatan yang memiliki akses internet	Jumlah	3	4	5	6	7	8	9	9
<b>Tujuan 3: Meningkatkan pelestarian seni budaya</b>											
4	Meningkatnya kelestarian aset seni dan budaya	Jumlah acara tradisi adat budaya yang dilestarikan	Jumlah	11	11	11	11	12	12	12	12
		Jumlah aset budaya yang dilestarikan	Unit	8	8	8	8	8	8	8	8
<b>Tujuan 4: Mewujudkan toleransi dan pembinaan antar umat beragama</b>											
5	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Konflik horizontal akibat SARA	Kasus	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Terwujudnya hubungan yang harmoni antar umat beragama	Tingkat pemahaman dan pengamalan masing-masing agama dan kepercayaan	Nilai	cukup	cukup	Baik	baik	baik	baik	baik	baik
		Tingkat toleransi antar umat beragama	Nilai	baik	baik	Baik	baik	baik	baik	baik	baik



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Tujuan 5: Mewujudkan kualitas hidup sumberdaya manusia yang kreatif dan berdaya saing</b>											
7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan	Jumlah beasiswa utusan daerah	Jumlah	N/A	150	150	150	150	150	150	900
		Tingkat pemberdayaan melalui pembinaan dan diklat	Skala	N/A	cukup	cukup	baik	baik	baik	baik	baik
		Angka kemiskinan	Jiwa	18.400	15.000	13.000	11.000	10.000	<10.000	<10.000	<10.000
8	Meningkatnya penanggulangan PMKS	Persentase PMKS yang terlayani	%	N/A	10,00	20,00	35,00	50,00	>50,00	>50,00	>50,00
9	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skala (%)	65,00	65,20	65,30	65,30	65,35	65,35	65,40	65,40

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Partisipasi wanita dibidang birokrasi	%	22,77	>30,00	>30,00	>30,00	>30,00	>30,00	>30,00	>30,00
		Partisipasi wanita dibidang politik	%	10,36	10,36	10,36	10,36	>15,00	>15,00	>15,00	>15,00
10	Meningkatnya program perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat	Kasus kekerasan terhadap anak	Kasus	10	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

Misi kedua Bupati Bengkayang adalah Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang cerdas, kreatif dan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini secara tegas diarahkan untuk memproduksi sumberdaya manusia Kabupaten Bengkayang yang berkualitas dan memiliki daya saing baik pada skala nasional maupun internasional. Beberapa hal yang wajib dilakukan agar misi tersebut dapat tercapai antara lain dengan mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata, mengoptimalkan aksesibilitas teknologi informasi, pelestarian seni dan budaya, mewujudkan toleransi dan pembinaan antar umat beragama, dan Mewujudkan kualitas hidup sumberdaya manusia yang kreatif dan berdaya saing.

Berdasarkan isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan, Kabupaten Bengkayang memerlukan suatu program yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan pada seluruh wilayah. Aksesibilitas yang masih rendah di Kabupaten Bengkayang telah berpengaruh pada rendahnya beberapa parameter penting pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Secara umum parameter yang berkaitan dengan pendidikan menunjukkan trend yang terus meningkat, namun angka rata-rata lama sekolah adalah parameter yang perlu mendapat perhatian khusus dan memerlukan percepatan. Pada tahun terakhir angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bengkayang masih pada angka 5,97 tahun yang idealnya pada angka 12 tahun. Beberapa kebijakan pembangunan sektor pendidikan yang direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan infrastruktur dan tenaga pendidikan baik pada pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas serta mempunyai daya saing yang tinggi, maka teknologi informasi merupakan hal yang wajib untuk dikuasai. Hampir semua sektor pembangunan telah menggunakan perangkat teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Jika tidak menguasai teknologi informasi maka dapat dipastikan sumberdaya manusia yang terbentuk akan jauh tertinggal dan tidak dapat bersaing baik pada skala nasional maupun internasional. Memperhatikan hal tersebut

maka perlu adanya peningkatan aksesibilitas media teknologi informasi di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu. Sampai akhir tahun 2015 daerah yang dapat mengakses media teknologi informasi (internet) masih sangat terbatas, yaitu sekitar 3 kecamatan saja. Diharapkan dengan beberapa program pembangunan dan kerjasama dengan pihak penyedia IT, pada tahun 2021 paling tidak 9 kecamatan (dari total 17 Kecamatan) telah memiliki akses yang baik pada media teknologi informasi.

Faktor budaya dan kehidupan beragama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas manusia tidak hanya dipandang dari sisi pengetahuan dan penguasaan teknologi saja, tetapi juga diperlukan pembinaan karakter dan mentalitas yang baik agar pada saat berperan pada pembangunan tidak memberikan efek yang negatif pada masyarakat. Untuk itu program pembangunan pada kebudayaan dan keagamaan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kemampuan dan etika yang baik serta toleransi yang tinggi pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada lingkungan sosial.

Masyarakat yang memiliki kreatifitas dan daya saing tinggi tentunya terbentuk dari lingkungan yang memiliki kualitas hidup yang baik. Untuk menciptakan kualitas hidup yang baik di lingkungan masyarakat diperlukan kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi. Namun demikian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat perlu juga direduksi, seperti kasus PMKS dan kekerasan di lingkungan keluarga. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan pada beberapa parameter sosial yang bersifat positif.

**Misi Ketiga:**

Meningkatkan keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat di kabupaten Bengkulu Tengah melalui optimalisasi program partisipasi masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Tujuan 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan kondusif</b>											
1	Terkendalinya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas	jumlah	133	<100	<50	<50	<50	<50	<50	<50
		Konflik yang terjadi	kasus	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<b>Tujuan 2: Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat akan produk hukum</b>											
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat pada produk hukum	Frekwensi program sosialisasi Perda	%	N/A	>50,00	>50,00	>50,00	>50,00	>50,00	>50,00	>50,00
3	Meningkatnya penegakkan peraturan daerah	Cakupan Penegakkan Perda	%	N/A	>75,00	>75,00	>75,00	>75,00	>75,00	>75,00	>75,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Tujuan 3: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban</b>											
4	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga ketertiban	Rasio jumlah anggota Linmas per 1000 penduduk	Skala	2,61	2,61	3,00	3,00	3,00	5,00	>5,00	>5,00
		Jumlah aktivitas demo	jumlah	N/A	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

Kesejahteraan masyarakat tidak hanya membicarakan masalah ekonomi saja, namun lingkungan yang aman dan nyaman merupakan salah satu persyaratan utama untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Hal ini sejalan dengan misi ketiga Bupati Bengkayang yang berupaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat di kabupaten Bengkayang melalui optimalisasi program partisipasi masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai pada RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2016-2021 berkaitan dengan masalah keamanan masyarakat antara lain mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan kondusif, meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat pada produk hukum, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban.

Kehidupan lingkungan masyarakat dikatakan aman dan kondusif jika angka kriminalitas yang terjadi kecil dan tidak ada terjadinya konflik horizontal yang mengganggu kenyamanan. Pada tahun terakhir angka kriminalitas yang terdata di kabupaten Bengkayang mencapai angka 133 kasus, berkaitan dengan hal tersebut seluruh pihak tentunya bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan melakukan langkah nyata mencari solusi yang terbaik untuk menurunkan angka kriminalitas tersebut. Selama 5 tahun kedepan diharapkan secara bertahap angka kriminalitas di Kabupaten Bengkayang dapat diturunkan sampai kurang dari 50 kasus.

Salah satu tindakan preventif pada kasus kriminalitas yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah melalui peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat pada produk hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukannya kegiatan penegakan hukum dan peningkatan pemahaman masyarakat pada produk hukum melalui pendekatan sosialisasi. Peran aktif masyarakat juga sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, selain bertindak secara langsung masyarakat juga sudah berperan jika tidak terlibat aktif pada kasus konflik dan demonstrasi. Salah satu program konkret keterlibatan masyarakat pada keamanan masyarakat adalah program perlindungan masyarakat (linmas) yang terdapat di setiap desa.

**Misi Keempat:**

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Tujuan 1: Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas</b>											
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Status Rumah sakit Umum daerah	Type	D	D	D	C	C	C	C	C
		Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Unit	0	2	4	3	3	3	2	17
		Angka Kematian Bayi	Rasio	105,11	<100,00	<75,00	<50,00	<25,00	<25,00	<25,00	<25,00
		Angka Kematian Ibu	Rasio	10,09	<10,00	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00
		Balita Penderita Gizi buruk	Rasio	0,58	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Angka harapan Hidup	Tahun	72,89	73,00	74,00	74,50	75,00	>75,00	>75,00	>75,00
		Jumlah Kasus DBD	Kasus	20	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
		Jumlah kasus Penyakit Menular	Kasus	1	0	0	0	0	0	0	0
		Peserta KB Aktif	%	68,93	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	>90,00	>90,00
<b>Tujuan 2. Menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah, terjangkau dan merata di seluruh wilayah</b>											
3	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dasar di seluruh wilayah	Jumlah Posyandu	Unit	328	350	360	370	380	400	>400	>400
		Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	70	75	78	80	90	95	100	100
		Jumlah Puskesmas	Unit	17	17	17	17	17	17	17	17

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Rumah Sakit Umum	Unit	2	2	2	2	2	3	3	3
		Jumlah Dokter	Orang	18	25	>25	>25	>25	>25	>25	>25
		Jumlah Bidan	Orang	154	175	200	>200	>200	>200	>200	>200
<b>Tujuan 3: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat</b>											
4	Meningkatnya peran masyarakat pada pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	Rumah Tangga yang memiliki jamban keluarga	%	N/A	>50	>50	>50	>75	>75	>75	>75
		Rumah Tangga yang memiliki sarana air minum yang memenuhi syarat	%	N/A	>50	>50	>75	>75	>75	>75	>75

Salah satu indikator yang harus terpenuhi untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang sehat baik jasmani maupun rohani. Memperhatikan hal tersebut dan isu strategis yang terdapat di kabupaten Bengkayang, maka pada misi keempat Bupati Bengkayang adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkayang masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan standar mutu pelayanan dan aksesibilitas pelayanan. Beberapa sarana pelayanan kesehatan belum berjalan optimal sebagai akibat dari keterbatasan fasilitas baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.

Terwujudnya standar pelayanan kesehatan yang bermutu berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bengkayang. RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2016-2021 terdapat Beberapa program pembangunan bidang kesehatan yang menjadi prioritas untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, antara lain meningkatkan status Rumah Sakit Umum daerah menjadi tipe C dan menjadikan Puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan menjadi Puskesmas yang terakreditasi. Kerangka pembangunan bidang kesehatan tersebut akan meningkatkan beberapa indikator bidang kesehatan seperti angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, dan menurunkan beberapa kasus penyakit menular serta kasus Demam Berdarah.

Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak berjalan dengan optimal jika sulit terjangkau dan tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah suatu daerah. Untuk itu menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang merupakan hal yang esensi pada kerangka pembangunan bidang kesehatan. Beberapa langkah konkret yang akan dilakukan untuk mewujudkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut antara lain adalah meningkatkan jumlah Posyandu, jumlah Puskesmas Pembantu, Jumlah Puskesmas, Jumlah Rumah Sakit, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis yang bertugas di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang.

Berkaitan dengan jumlah tenaga medis, target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2016-2021 tidak begitu tinggi mengingat penerimaan PNS sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Penetapan target tersebut tentunya tergantung pada beberapa faktor eksternal yang pada akhirnya mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Bupati Bengkayang pada akhir masa jabatan. Namun demikian proses penyediaan tenaga media tidak hanya melalui perekrutan PNS saja, tetapi dapat dilakukan melalui program Pegawai tidak tetap (PTT) atau tenaga kontrak. Selain program perekrutan, penyediaan dan peningkatan jumlah tenaga medis juga dapat dilakukan melalui beasiswa umum daerah yang diarahkan pada program studi bidang kesehatan.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan tidak hanya dilakukan tindakan kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga diperlukan tindakan preventif yang melibatkan masyarakat. Lingkungan yang bersih dan sehat tentunya akan memperkecil peluang timbulnya penyakit baik yang menular maupun tidak. Langkah awal yang dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat adalah dengan mengajak dan memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang mengutamakan kesehatan. Memperhatikan hal tersebut maka pada RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2016-2021 menargetkan peningkatan peranan masyarakat pada pemberdayaan dan penyehatan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki jamban setiap rumah tangga dan menggunakan sumber air yang memenuhi syarat dalam aktivitas sehari-hari.

**Misi Kelima:**

Menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan organisasi kemasyarakatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Tujuan 1: Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan</b>											
1	Berkembangnya organisasi kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum	jumlah	N/A	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5
2	Meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam program pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan kepemudaan	jumlah	5	>5	>5	>5	>10	>10	>10	>10
3	Meningkatnya peran generasi muda pada program budaya dan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	jumlah	N/A	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5
		Jumlah kelembagaan seni dan budaya yang terbentuk	jumlah	71	80	90	95	100	>100	>100	>100
		Jumlah kelembagaan seni budaya yang terlibat dalam even daerah dan nasional	jumlah	12	15	20	>20	>20	>20	>20	>20

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Tujuan 2: Meningkatkan kesadaran masyarakat pada fungsi dan peran organisasi politik</b>											
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	Tingkat partisipasi pada pemilu legislatif	%	75,89	75,89	75,89	75,89	>90,00	>90,00	>90,00	>90,00
		Tingkat partisipasi pada pemilu kepala daerah	%	67,57	67,57	67,57	67,57	67,57	67,57	>90,00	>90,00

Pemerintah daerah merupakan motor pembangunan suatu daerah, namun keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab dari semua pihak. Organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu komponen masyarakat yang diandalkan untuk bersama-sama pemerintah daerah secara sinergis membangun suatu daerah. Memperhatikan fakta tersebut maka misi kelima Bupati Bengkayang adalah menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan organisasi kemasyarakatan. Organisasi masyarakat yang efektif apabila berperan secara sinergis pada proses pembangunan, baik dalam hal fasilitasi, pemberdayaan, maupun evaluasi. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan organisasi kemasyarakatan justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya bukan berperan dalam mendukung pembangunan tetapi justru menjadi permasalahan dan penghambat pada jalannya pembangunan. Untuk itu diperlukan peran pemerintah daerah untuk melakukan tata kelola pada organisasi kemasyarakatan agar kontribusi yang diberikan oleh organisasi kemasyarakatan tersebut yang bersifat positif bagi daerah.

RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2016-2021 ingin meningkatkan perkembangan organisasi kemasyarakatan melalui peningkatan peran organisasi dalam pembangunan dan kesadaran masyarakat pada fungsi organisasi. Bentuk organisasi kemasyarakatan sangat variatif tergantung pada tujuan dan dasar organisasi tersebut terbentuk. Beberapa organisasi kemasyarakatan yang terdapat di Kabupaten Bengkayang antara lain adalah organisasi kepemudaan, organisasi berbasis agama, organisasi yang berbasis budaya, organisasi olahraga, LSM, organisasi politik, dan beberapa ormas lainnya.

Pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan di suatu daerah mengarahkan pembangunan untuk meningkatkan peranan tersebut. Program pemberdayaan dan fasilitasi pada beberapa organisasi masyarakat yang memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat dan daerah merupakan kerangka pembangunan yang wajib diagendakan dalam perencanaan pembangunan di kabupaten Bengkayang. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan kegiatan seni, kepemudaan, olah raga dan

kebudayaan semakin meningkat dan berkembang di kabupaten Bengkayang.

Agar organisasi kemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan daerah, maka tingkat kesadaran masyarakat akan fungsi dan peran dari organisasi kemasyarakatan perlu ditingkatkan. Organisasi kemasyarakatan yang memiliki peran secara langsung dalam pembangunan suatu daerah adalah organisasi yang bergerak di bidang politik. Salah satu bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan organisasi politik pada pembangunan suatu daerah dapat dilihat melalui pendekatan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Semakin tinggi peran aktif masyarakat pada kegiatan pemilu maka arah pembangunan dan keputusan politik yang diambil akan semakin baik, dan pada akhirnya keputusan politik tersebut akan kembali berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.



**Misi Keenam:**

Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional dan bersih dengan prinsip melayani

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Tujuan 1: Meningkatkan Kinerja perencanaan pembangunan</b>											
1	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel	Tersedianya dokumen RPJPD	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
		Tersedianya dokumen RTRW	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
		Tersedianya dokumen RPJMD	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
		Tersedianya dokumen RKPD setiap tahun	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase program RPJMD yang tertuang pada RKPD	%	N/A	>50,00	>85,00	>85,00	>85,00	>85,00	>85,00	>85,00
		Persentase program dan kegiatan RKPD yang tertuang pada APBD	%	N/A	>50,00	>85,00	>85,00	>85,00	>85,00	>85,00	>85,00
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan	%	N/A	>30,00	>50,00	>50,00	>50,00	>50,00	>50,00	>50,00
<b>Tujuan 2: Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tata kelola pemerintahan</b>											
4	Meningkatnya kualitas dan kinerja SKPD pelayanan publik	Jumlah SKPD yang telah memiliki dan menggunakan SOP	SKPD	N/A	3	5	5	5	5	5	5
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Kategori	N/A	baik	baik	baik	baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Tingkat capaian Kinerja daerah  Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi	Kategori  Kategori survey	CC  cukup	CC  cukup	CC  cukup	CC  cukup	CC  cukup	B  baik	B  baik	B  baik
6	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Jumlah temuan  Nilai temuan	Kasus  Rupiah	N/A  N/A	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0
		SKPD yang berindikasi penyimpangan administrasi/material	%	N/A	0	0	0	0	0	0	0
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD  Opini hasil pemeriksaan BPK	%  Kategori/ nilai	5,34  WDP	6,00  WDP	6,50  WTP	6,75  WTP	7,00  WTP	7,25  WTP	7,50  WTP	7,50  WTP

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Tujuan 3: Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan</b>											
8	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang konsisten	Rasio bangunan yang memiliki IMB	%	N/A	>30,00	>30,00	>30,00	>50,00	>50,00	>50,00	>50,00
		Rasio bangunan yang sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang	%	N/A	>20,00	>20,00	>50,00	>50,00	>50,00	>50,00	>50,00
		Persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	%	N/A	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00	<10,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Tujuan 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur</b>											
9	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur	Persentase pegawai berpendidikan Doktoral (S3)	%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06
		Persentase pegawai berpendidikan Master (S2)	%	1,84	2,00	2,15	2,25	2,30	2,50	>2,50	>2,50
10	Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur	Jumlah Pejabat struktural yang sudah mengikuti diklat PIM sesuai jenjangnya	%								
		Eteson IV:		31,4	40,00	45,00	50,00	55,00	65,00	70,00	70,00
		Eselon III:		72,7	75,00	80,00	82,50	85,00	87,00	90,00	90,00
		Eselon II:		90,0	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dalam rangka meningkatkan peluang terwujudnya visi Bupati Bengkayang maka dipandang perlu untuk melakukan tata kelola yang efektif di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang baik dalam hal sumberdaya aparatur maupun dalam hal kinerja. Hal ini tercantum pada misi yang keenam ingin Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional dan bersih dengan prinsip melayani. Beberapa hal pokok yang akan dilakukan untuk mewujudkan misi keenam tersebut antara lain dengan meningkatkan kinerja perencanaan, meningkatkan reformasi birokrasi, mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas pada sumberdaya aparatur.

Kinerja perencanaan akan ditingkatkan melalui penyusunan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas dan akuntabel, tingkat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bengkayang selalu tersusun dan tersedia setiap tahunnya, namun beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah dalam hal sistematika, kajian data, dan akuntabilitas. Dokumen perencanaan yang kurang baik akan berimplikasi pada rendahnya konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran yang ditetapkan dalam APBD. Konsistensi merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga pembangunan tetap dalam kerangka pencapaian visi kepala daerah serta mencegah peluang terjadinya KKN di lingkungan pemerintah daerah. Memperhatikan hal tersebut, maka pada akhir masa RPJMD di tahun 2021 ditarget konsistensi perencanaan sampai pada tahap penetapan APBD mencapai lebih besar dari 85%.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan hal yang wajib direalisasikan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Keterlibatan tersebut selain untuk menjamin pembangunan yang langsung dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk dari menjalankan undang-undang sistem perencanaan yang mengamanatkan bahwa perencanaan disusun melalui pendekatan teknokratif, politis, dan juga partisipatif dari masyarakat. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah kegiatan Musrenbang pada

tingkat Desa dan Kecamatan. Selama ini musrenbang selalu dianggap masyarakat suatu kegiatan yang formalitas saja karena sangat sedikit usulan yang tertampung pada perencanaan dan terealisasi di lapangan. Fenomena ini akan terus terjadi jika rendahnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran di kabupaten Bengkayang. Untuk itu pada RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2016-2021, selain peningkatan pada konsistensi perencanaan dan penganggaran juga ditargetkan peningkatan pada usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkayang.

Reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Bengkayang dilakukan melalui peningkatan kualitas kinerja SKPD pada pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, menciptakan kinerja pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta melalui peningkatan kualitas kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berkaitan dengan reformasi Birokrasi, pada RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021 ditargetkan beberapa indikator penting yang harus dicapai sampai tahun 2021. SKPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik diwajibkan memiliki dan mengamalkan SOP agar indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada tahun 2021 mencapai kategori sangat baik. Kategori tingkat capaian kinerja daerah diharapkan pada level B (baik) yang tentunya ditunjang dengan ketepatan pada ukuran dan struktur organisasi SKPD yang ada di Kabupaten Bengkayang.

Dengan adanya reformasi birokrasi yang efektif di Kabupaten Bengkayang diharapkan pada tahun 2021 tidak lagi ditemukannya permasalahan yang berkaitan dengan temuan dan indikasi kasus KKN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang. Sedangkan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, pencapaian yang ditargetkan adalah terjadi peningkatan pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total APBD setiap tahunnya dan Kabupaten Bengkayang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari opini hasil pemeriksaan BPK.

Penataan ruang merupakan hal yang sangat penting bagi suatu daerah untuk mempermudah manajemen pembangunan yang

berkelanjutan dan meminimalisir konflik horizontal yang berkaitan dengan pengelolaan pembangunan. Penataan ruang juga berperan sebagai pedoman dan regulasi dalam penetapan arah pembangunan yang akan dilakukan. Dengan penataan ruang yang efektif tentunya akan memperkecil pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pihak masyarakat dan investor. Penertiban berkaitan dengan penggunaan ruang dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga dapat lancar dilaksanakan oleh pihak pemerintah, pada akhirnya diharapkan pemanfaatan ruang akan sesuai dengan penataan ruang telah ditetapkan.

Reformasi pada aparatur pemerintah daerah merupakan salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi, dan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur. Kualitas sumberdaya aparatur dapat ditingkatkan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kapasitas dan profesionalisme, dan pendekatan kompetensi. Pendekatan kapasitas dan profesionalisme dapat dilakukan dengan menyediakan peluang bagi aparatur yang berpotensi untuk meningkatkan jenjang pendidikan formal pada tingkat master dan doktoral, baik dengan program tugas belajar maupun izin belajar. Sedangkan pendekatan kompetensi akan dilakukan melalui program pendidikan dan latihan kepemimpinan yang berjenjang, yang meliputi jenjang eselon IV, eselon III dan eselon II.



**Misi Ketujuh:**

Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Tujuan 1: Meningkatkan pengelolaan potensi SDA secara efektif</b>											
1	Tersedianya ketahanan pangan yang dinamis dan berkelanjutan	Produksi padi/tahun	Ton	81.726	85.812	90.102	94.608	99.338	104.305	109.520	109.520
		Produksi jagung/tahun	Ton	77.484	81.358	85.426	89.697	94.182	98.891	103.835	103.835
<b>Tujuan 2: Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal</b>											
2	Tersedianya hasil kajian AMDAL pada program yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan SDA	Rekomendasi KLHS dalam penyusunan RTRW	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
		Rekomendasi KLHAS dalam penyusunan RPJMD	Ada/tidak	N/A	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Dokumen AMDAL pada proses perijinan untuk investasi sektor agroforestry dan pertambangan	Ada/tidak	N/A	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Luasan lahan kritis yang di rehabilitasi	Ha	212	100	100	100	100	100	100	600
		Luasan ruang terbuka hijau yang diadakan	Ha	3,1	2	2	2	2	2	2	12
4	Menurunnya resiko bencana akibat pemanfaatan SDA	Kasus bencana banjir	Kasus	7	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
		Kasus bencana Kebakaran hutan dan lahan	Kasus	12	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
		Jumlah titik api saat musim kemarau	Jumlah	35	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10

Lingkungan hidup merupakan topik yang paling berkembang di dunia internasional. Hal ini berkaitan dengan fenomena alam yang mengindikasikan telah menurunnya kualitas lingkungan hidup secara global, seperti penipisan lapisan ozon, pemanasan global, perubahan iklim yang ekstrem, dan menurunnya areal kawasan hutan yang merupakan paru-paru dunia. Gejala-gejala degradasi kualitas lingkungan hidup juga dialami di kabupaten Bengkayang. Untuk mengurangi dan menghambat gejala-gejala tersebut maka misi ketujuh Bupati Bengkayang adalah mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sumberdaya alam erat kaitannya dengan potensi unggulan daerah bagi perekonomian masyarakat. Bengkayang merupakan Kabupaten yang memiliki potensi sektor pertanian yang sangat besar, hal ini berimplikasi pada keunggulan dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Pemanfaatan potensi yang efektif tidak hanya menjaga angka produksi pada komoditas unggulan daerah tetapi juga memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan yang baik. Dalam tiga tahun terakhir komoditas pertanian yang berkaitan dengan pangan yaitu padi dan jagung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Meskipun pada tahun 2015 angka produksi kedua komoditas tersebut masih pada angka aman untuk pangan yang dibandingkan dengan jumlah penduduk, namun apabila penurunan tersebut terus terjadi sedang jumlah penduduk terus meningkat maka pada tahun dan titik tertentu akan mencapai kondisi dimana angka produksi pangan tidak lagi mampu menyuplai makanan bagi masyarakat Bengkayang. Fenomena ini tentunya perlu disikapi oleh pemerintah daerah untuk dapat mencari alternatif solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam RPJMD kabupaten Bengkayang tahun 2016-2021 dengan tegas menargetkan angka produksi kedua komoditas tanaman pangan tersebut terus mengalami peningkatan untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Bengkayang.

Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berkelanjutan tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan hidup, baik itu yang berhubungan dengan pencegahan, rehabilitasi kerusakan lingkungan,

maupun tindakan yang berkaitan dengan bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan itu sendiri. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan juga menjadikan kajian lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu persyaratan dalam proses dan pelaksanaan pembangunan.

Beberapa kerusakan lingkungan yang sedang dan telah terjadi di kabupaten Bengkayang yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat antara lain, meningkatnya lahan kritis, pencemaran air dan udara, pendangkalan sungai, dan kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka beberapa program pembangunan yang dapat dilakukan yaitu melakukan rehabilitasi pada lahan kritis dan meningkatkan pembangunan ruang terbuka hijau. Apabila kerusakan lingkungan yang terjadi tidak direpon dengan baik maka berpotensi menyebabkan bencana yang akan sangat merugikan baik bagi daerah maupun masyarakat.

Berkaitan dengan bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan maka selain tindakan preventif, pemerintah daerah juga harus mampu mengurangi resiko yang disebabkan oleh bencana serta melakukan rehabilitasi pada daerah dan masyarakat yang tertimpa bencana. Beberapa program yang dapat dilakukan berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian sungai dan daerah aliran sungai (DAS) untuk mencegah pencemaran air dan mencegah terjadinya bencana banjir, dan juga sosialisasi berkaitan dengan tentang bahaya dan resikonya jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Penegakan hukum berkaitan dengan pemanfaatan ruang tentang DAS dan penertiban kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan 2 hal yang penting untuk dilakukan untuk pencegahan banjir selain program normalisasi sungai pada sungai yang sudah terlanjur rusak dan berpotensi terjadi banjir pada musim penghujan. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan potensi bencana alam adalah terjadinya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau dan terjadinya bencana banjir pada saat musim penghujan.

Kegiatan pembersihan lahan oleh perusahaan perkebunan dan pembuatan ladang oleh masyarakat memberikan kontribusi pada titik api yang terjadi di Kabupaten Bengkayang pada saat musim kemarau. Sedangkan pada musim penghujan terjadi peningkatan volume air pada sungai sehingga terjadi bencana banjir sebagai akibat kurang sadarnya masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian DAS. Keberadaan DAS sebagai daerah penampung volume air saat musim penghujan dan pencegah banjir akan tidak berfungsi jika DAS telah dikonversi menjadi daerah pemukiman dan aktivitas masyarakat.

Potensi bencana banjir pada musim penghujan dan kasus kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau merupakan bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bengkayang. Pada RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021 mempunyai tekad untuk mengurangi kasus pada dua jenis bencana tersebut dengan menetapkan target mengurangi kasus bencana banjir dan bencana kebakaran hutan dan lahan yang sebelumnya masing-masing mencapai 7 dan 12 kasus menjadi kurang dari 5 kasus. Sedangkan kasus titik api pada musim kemarau yang sebelumnya mencapai angka 35 kasus ditargetkan turun menjadi kurang dari 10 titik api.

**Misi Kedelapan:**

Menjadikan wilayah perbatasan Bengkulu sebagai daerah yang maju dan beranda depan NKRI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Tujuan 1: meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan</b>											
1	terwujudnya program pembinaan/diklat bidang ekonomi bagi masyarakat perbatasan	Jumlah program pembinaan	frekwensi	N/A	cukup	cukup	baik	baik	baik	baik	baik
2	Meningkatnya program stimulus ekonomi masyarakat	Program APED	Ada/tidak	N/A	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
		Program APEN	Ada/tidak	N/A	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
<b>Tujuan 2: menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan NKRI</b>											
3	Meningkatnya aksesibilitas wilayah perbatasan	Persentase desa perbatasan yang telah memiliki akses jalan ke ibu kota kecamatan	%	N/A	>50	>50	>50	>50	>50	>75	>75

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Terwujudnya wilayah perbatasan sebagai daerah prioritas untuk program pembangunan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat	Terdapat program pembangunan bidang kesehatan	Ada/tidak	N/A	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
		Terdapat program pembangunan bidang pendidikan	Ada/tidak	N/A	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
		Terdapat program pembangunan infrastruktur kelistrikan	Ada/tidak	N/A	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
		Terdapat program pembangunan infrastruktur air bersih	Ada/tidak	N/A	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Memiliki wilayah yang berbatasan darat secara langsung dengan negara lain (Malaysia) adalah salah satu pembeda dan ciri khas Kabupaten Bengkulu dibandingkan daerah lainnya, baik skala provinsi maupun nasional. Konswensi dari karakter tersebut adalah adanya kerangka pembangunan khusus yang diarahkan untuk kawasan perbatasan tersebut. Untuk mengakomodir hal tersebut maka pada misi kedelapan Bupati Bengkulu adalah menjadikan wilayah perbatasan Kabupaten Bengkulu sebagai daerah yang maju dan beranda depan NKRI.

Untuk menjadikan wilayah perbatasan menjadi beranda depan NKRI tentunya tidak hanya membangun perekonomian masyarakatnya saja tetapi juga membangun daerah perbatasan tersebut dengan infrastruktur yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar masyarakat yang memenuhi standar mutu. Pembangunan yang direncanakan selain memenuhi standar mutu juga harus berkeadilan dan merata di seluruh wilayah yang termasuk dalam kawasan perbatasan, yaitu tersebar di kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding.

Peningkatan perekonomian masyarakat kawasan perbatasan dilakukan melalui program pemberdayaan dan stimulus pada aktivitas perekonomian masyarakat perbatasan. Program pemberdayaan dapat ditempuh melalui fasilitasi dan diklat pada sumberdaya manusia masyarakat perbatasan dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan wawasan masyarakat yang berkaitan dengan dunia usaha dan bisnis. Mengingat pembangunan kawasan perbatasan merupakan program terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka stimulus aktivitas perekonomian masyarakat perbatasan akan mengandalkan program yang bersumber dari anggaran APBD dan APBN.

Kendala yang dihadapi pada proses pembangunan wilayah perbatasan adalah berkaitan dengan masalah aksesibilitas dan infrastruktur yang masih sangat minim. Hal ini disebabkan pada pemerintahan Orde Baru kawasan perbatasan merupakan daerah yang sangat sedikit disentuh oleh pembangunan karena pada saat itu paradigam pembangunan masih menjadikan kawasan perbatasan



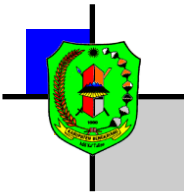
sebagai beranda belakang NKRI. Berkaitan dengan kondisi tersebut, untuk menjadikan kawasan perbatasan menjadi daerah yang berkembang dan maju memerlukan sumberdaya yang sangat besar baik dari sisi jangka waktu maupun dari sisi penganggaran.

Siding merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkayang yang belum memiliki akses jalan yang layak untuk menuju ibu kota Kabupaten. Untuk itu pada RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2016-2021 menargetkan pada akhir masa jabatan Bupati Bengkayang infrastruktur jalan Kabupaten yang menuju ibu kota Kecamatan Siding telah selesai direalisasikan. Selain jalan Kabupaten, aksesibilitas dari seluruh desa yang terdapat di daerah perbatasan juga di harapkan sudah terhubung oleh jalan yang menuju ke kota kecamatan.

Menjadi beranda depan NKRI tentunya kawasan perbatasan harus bebas dari permasalahan yang berkaitan dengan fasilitas kebutuhan dasar dan pelayanan dasar masyarakat. Untuk itu ditargetkan pada setiap tahun pada RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2016-2021 selalu terdapat program pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, kelistrikan, dan fasilitas penyediaan air bersih di kawasan perbatasan. Mempertimbangkan pekerjaan yang cukup besar pada kawasan perbatasan namun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkayang, maka program pembangunan yang diarahkan di kawasan perbatasan akan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan pusat.

# 6

## Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan Arah Kebijakan



## *BAB VI*

# *STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN*

---

### **6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu langkah yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya akan diperjelas melalui arah kebijakan yang diambil.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua :

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah
2. Perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan tiap urusan.

Perencanaan dimaksudkan untuk menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah kedalam rencana kerja yang sesuai dalam menjawab permasalahan yang dihadapi daerah. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Disamping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah daerah melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

---

Secara lebih rinci strategi dan arah kebijakan akan dijabarkan kedalam masing-masing misi Kepala Daerah terpilih berikut ini :

**MISI 1 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat kabupaten Bengkulu dengan Konsep Nilai Tambah dan Optimalisasi**

1. Urusan Otonomi Daerah :

Strategi Pertama, Membangun Sistem Pengawasan Pajak Sebagai Sistem Pengendalian yang handal, dengan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan Kompetensi dan Integritas Petugas Pelayanan Pajak

Strategi Kedua, Membangun Sistem Pelayanan Publik dalam Manajemen Pajak Daerah yang transparan, Partisipatif dan Akuntabel, dengan arah kebijakan :

- a. Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Perpajakan yang terintegrasi

Strategi Ketiga, Intensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah, dengan Arah kebijakan :

- a. Inventarisasi Potensi Penerimaan Retribusi yang didukung dengan regulasi daerah

Strategi Keempat, Optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dengan Arah Kebijakan :

- a. Pembinaan BUMD

2. Urusan Perdagangan

Strategi Pertama, Menciptakan iklim yang baik bagi kegiatan perdagangan barang dan jasa, dengan Arah kebijakan :

- a. Meningkatkan pendapatan melalui sektor perdagangan

Strategi Kedua, Menjaga Stabilitas ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok, dengan arah kebijakan :

- a. Menjaga Keseimbangan Antara Ketersediaan dan Permintaan Barang

Strategi Ketiga, Mengembangkan Investasi dan Usaha Masyarakat pada sektor sekunder dan tersier, dengan arah kebijakan :

- a. Pengembangan dan Pemberdayaan pada industri jasa dan rumah tangga

3. Urusan Industri

Strategi Pertama, Membangun sistem perekonomian yang mengarah pada peningkatan nilai sektor sekunder dan tersier, dengan Arah kebijakan :

- a. Meningkatkan Variasi Produk Barang dan Jasa yang berasal dari sektor unggulan daerah

Strategi Kedua, Menciptakan iklim yang baik bagi kegiatan perdagangan barang dan jasa, dengan Arah kebijakan :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sentra-sentra industri

4. Urusan Penanaman Modal

Strategi Pertama, Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peluang investasi, dengan Arah kebijakan :

- a. Penguatan regulasi dan unsur perencanaan melalui penyusunan kajian pengembangan investasi daerah
- b. Meningkatkan kontribusi pihak swasta untuk pengembangan sektor usaha

5. Urusan Ketenaga Kerjaan

Strategi Pertama, Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan, dengan Arah Kebijakan :

- a. Mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas

Strategi Kedua, Menciptakan iklim yang baik bagi kelangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja, dengan Arah kebijakan :

- a. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja

Strategi Ketiga, Mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan, dengan Arah kebijakan :

- a. Peningkatan penempatan dan perluasan lapangan kerja
- b. Peningkatan lapangan kerja melalui pengembangan koperasi

- c. Peningkatan lapangan kerja melalui pengembangan industri kecil dan menengah

## 6. Urusan Koperasi dan UMKM

Strategi Pertama, Mendorong dan memfasilitasi aktivitas industri masyarakat, dengan Arah kebijakan :

- a. Meningkatkan peran usaha kecil menengah masyarakat dalam perekonomian

Strategi Kedua, Mengoptimalkan potensi kelembagaan koperasi masyarakat, dengan Arah kebijakan :

- a. Optimalisasi kelembagaan koperasi

Strategi Ketiga, Mengembangkan kelembagaan dan produk UMKM, Dengan Arah Kebijakan :

- a. Pemberdayaan kelompok UMKM

## 7. Urusan Pertanian

Strategi Pertama, Meningkatkan usaha komoditas agroforestry potensial yang memiliki nilai ekonomis dan berpeluang pasar tinggi, dengan Arah kebijakan :

- a. Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing

## 8. Urusan Pariwisata

Strategi Pertama, Optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing, dengan Arah Kebijakan :

- a. Mengoptimalkan promosi dan pemasaran pariwisata melalui media yang potensial
- b. Pengembangan pada destinasi pariwisata daerah

## 9. Urusan Pekerjaan Umum

Strategi Pertama, Meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata dengan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan Pemutahiran data kondisi jalan sesuai dengan kondisi terkini daerah
- b. Mengedepankan perencanaan pada setiap proses pembangunan
- c. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan

d. Mengembangkan infrastruktur pendukung fungsional jalan dan jembatan

Strategi Kedua, Mengembangkan dan memelihara Sumber air Baku untuk penyediaan air bersih dalam rangka Meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih, dengan Kebijakan :

a. Peningkatan penyediaan sumber air baku

#### 10. Urusan Penataan Ruang

Strategi Pertama, Pengembangan Infrastruktur Jalan baru dalam rangka Mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan, dengan Arah kebijakan :

a. Pembangunan jalan dan jembatan baru melalui penguatan pada unsur kajian dan perencanaan pengembangan jalan

#### 11. Urusan Perhubungan

Strategi Pertama, Menyediakan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai, dengan Arah kebijakan :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana dasar perhubungan
- b. Menyediakan fasilitas terminal untuk perhubungan darat dan steher untuk perhubungan laut/sungai yang layak
- c. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan
- d. Meningkatkan kalayakan pengoperasian kendaraan bermotor

#### 12. Urusan Perumahan

Strategi Pertama, Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman, dengan Arah kebijakan :

- a. Meningkatkan Pemetaan dan Perencanaan Sebagai acuan penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
- b. Penataan Kawasan Kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau

#### 13. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Strategi Pertama, Mengembangkan penyediaan ketenagalistrikan yang layak dan merata bagi masyarakat, dengan Arah kebijakan :

- a. Peningkatan penyediaan bidang ketenagalistrikan

**Tabel 6.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 1**

<b>MISI 1 : Meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkulu dengan konsep nilai tambah dan optimalisasi</b>				
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	
1. Membangun Perekonomian Kabupaten Bengkulu yang kuat	1. Meningkatnya PAD Kabupaten Bengkulu	1. Membangun Sistem Pengawasan Pajak Sebagai Sistem Pengendalian Internal yang Handal	1. Meningkatkan kompetensi dan integritas petugas pelayanan pajak	
		2. Membangun sistem pelayanan publik dalam manajemen pajak daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel	1. Tersedianya sistem informasi pelayanan perpajakan yang terintegrasi	
		3. Intensifikasi Penerimaan retribusi daerah	1. Inventarisasi potensi penerimaan retribusi yang didukung dengan regulasi daerah	
		4. Optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1. Pembinaan BUMD	
	2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi daerah		1. Membangun sistem perekonomian yang mengarah pada peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan tersier	1. Meningkatkan variasi produk barang dan jasa yang berasal dari sektor unggulan daerah
			2. Menciptakan iklim yang baik bagi kegiatan perdagangan	1. Meningkatkan pendapatan melalui sektor perdagangan



		barang dan jasa	
			2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sentra-sentra industry
		3. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peluang investasi	1. Penguatan Regulasi dan Usur perencanaan melalui penyusunan kajian pengembangan Investasi daerah 2. Meningkatkan kontribusi pihak swasta untuk pengembangan sektor usaha
	3. Meningkatnya kesempatan kerja	1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan	1. Mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas
		2. Menciptakan iklim yang baik bagi kelangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja	1. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja
		3. Mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan	1. Peningkatan penempatan dan perluasan lapangan kerja
			2. Peningkatan lapangan kerja melalui pengembangan koperasi
			3. Peningkatan lapangan kerja melalui pengembangan industri kecil dan menengah
2. Mengoptimalkan	1. Meningkatnya	1. Mendorong dan	1. Meningkatkan peran

sektor perekonomian masyarakat	daya beli masyarakat	memfasilitasi aktivitas industri masyarakat	usaha kecil menengah masyarakat dalam perekonomian
		2. Menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok	1. Menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan barang
	2. Meningkatnya produksi sektor unggulan daerah	1. Meningkatkan usaha komoditas agroforestry potensial yang memiliki nilai ekonomis dan berpeluang pasar tinggi	1. Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing
	3. Berkembangnya sektor pariwisata daerah	1. Optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing	1. Mengoptimalkan promosi dan pemasaran pariwisata melalui media yang potensial 2. Pengembangan pada destinasi pariwisata daerah
3. Meningkatkan nilai tambah aktivitas perekonomian masyarakat	1. Berkembangnya Koperasi dan UMKM	1. Mengoptimalkan potensi kelembagaan koperasi masyarakat	1. Optimalisasi kelembagaan koperasi
		2. Mengembangkan kelembagaan dan produk UMKM	1. Pemberdayaan kelompok UMKM
	2. Meningkatnya perekonomian pada sektor sekunder dan tersier	1. Mengembangkan investasi dan usaha masyarakat pada sektor sekunder dan tersier	1. Pengembangan dan pemberdayaan pada industri jasa dan rumah tangga
4. Menyediakan infrastruktur dan sapsas pendukung perekonomian masyarakat dan regional	1. Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	1. Meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata	1. Meningkatkan pemutahiran data kondisi jalan sesuai dengan kondisi terkini daerah

			2. Mengedepankan perencanaan pada setiap proses pembangunan
			3. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan
			4. Mengembangkan infrastruktur pendukung fungsional jalan dan jembatan
		2. Pengembangan Infrastruktur Jalan baru dalam rangka mendukung pengembangan kawasan perkotaan	1. Pengembangan jalan dan Jembatan baru melalui penguatan pada unsur kajian dan perencanaan pengembangan jalan
	2. Terwujudnya sistem transportasi publik yang representatif	1. Menyediakan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	1. Menyediakan sarana dan prasarana dasar perhubungan
			2. Menyediakan fasilitas terminal untuk perhubungan darat dan steher untuk perhubungan laut / sungai yang layak
			3. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan
			4. Meningkatkan kalayakan pengoperasian kendaraan bermotor

	3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pemukiman	1. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	1. Meningkatkan pemetaan dan perencanaan sebagai acuan penataan kawasan kumuh perkotaan
			2. Penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau
	4. Terwujudnya infrastruktur air bersih dan listrik yang berkualitas dan merata	1. Mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk penyediaan air bersih dalam rangka meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih	1. Peningkatan penyediaan sumber air baku
		2. Mengembangkan penyediaan ketenagalistrikan yang layak dan merata bagi masyarakat	1. Peningkatan penyediaan bidang ketenagalistrikan

**MISI 2 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu yang cerdas, kreatif dan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi**

1. Urusan Pendidikan

Strategi Pertama, Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, dengan Arah kebijakan :

- a. Pengembangan pelayanan pendidikan pada tingkat dasar (sembilan tahun)
- b. Pengembangan kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran

- c. Pengembangan dan pengawasan kapasitas tenaga pendidik
- d. Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu ada standar pendidikan nasional
- e. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

Strategi Kedua, Mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, dengan Arah kebijakan :

- a. Pengembangan PAUD
- b. Penuntasan buta aksara

Strategi Ketiga, Pengembangan pendidikan agama di sekolah, dengan Arah Kebijakan :

- a. Pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah

Strategi Keempat, Mempersiapkan sumberdaya manusia yang memiliki keunggulan komparatif, dengan Arah kebijakan:

- a. Pengembangan potensi sumberdaya manusia yang merata dan berkeadilan

## 2. Urusan Perpustakaan

Strategi Pertama, Meningkatkan sarana dan prasarana Perpustakaan daerah, dengan Arah kebijakan :

- a. Pengembangan minat baca masyarakat

## 3. Urusan Komunikasi dan Informatika

Strategi Pertama, Mengembangkan sarana dan prasarana teknologi informasi, dengan Arah kebijakan :

- a. Mewujudkan aksesibilitas media informasi dan telekomunikasi yang merata

## 4. Urusan Kebudayaan

Strategi Pertama, Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi dan keragaman aset budaya, dengan Arah kebijakan :

- a. Melindungi budaya lokal melalui pengembangan

## 5. Urusan Kesatuan bangsa dan Politik dalam Negeri

Strategi Pertama, Meningkatkan pembinaan kehidupan

bermasyarakat, dengan Arah kebijakan :

- a. Pembinaan kehidupan dengan semangat kebangsaan bagi masyarakat

#### 6. Urusan Otonomi Daerah

Strategi Pertama, Meningkatkan pembinaan keagamaan, dengan Arah Kebijakan :

- a. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat

#### 7. Urusan Sosial

Strategi Pertama, Meningkatkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, dengan Arah Kebijakan :

- a. Penguatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan

Strategi Kedua, Menurunkan jumlah penduduk miskin, dengan Arah Kebijakan :

- a. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi upaya penanggulangan kemiskinan

Strategi Ketiga, Mengurangi permasalahan sosial melalui pemberian pelayanan sosial pada penyandang PMKS, dengan Arah Kebijakan :

- a. meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS

#### 8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Strategi Pertama, Meningkatkan peran perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, hukum, politik dan teknologi, dengan Arah kebijakan :

- a. Peningkatan pembinaan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera

Strategi Kedua, Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, dengan Arah kebijakan :

- a. Pengembangan peran perempuan pada kelembagaan

Strategi Ketiga, Meningkatkan fasilitasi penanganan kekerasan pada anak, dengan Arah Kebijakan :

- a. Optimalnya pemberian layanan pada anak korban kekerasan

**Tabel 6.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 2**

<b>MISI 2 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu yang cerdas, kreatif dan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata	1. Meningkatnya standar pendidikan	1. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas	1. Pengembangan pelayanan pendidikan pada tingkat dasar (sembilan tahun)
			2. Pengembangan kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran
			3. Pengembangan dan pengawasan kapasitas tenaga pendidik
			4. Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu ada standar pendidikan nasional
			5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
	2. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan	1. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan	1. Pengembangan PAUD
			2. Penuntasan buta aksara
		2. Meningkatkan sarana dan prasarana Perpustakaan daerah	1. Pengembangan minat baca masyarakat

2. Mengoptimalkan aksesibilitas teknologi informasi di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu	1. Tersedianya fasilitas pendukung teknologi informasi	1. Mengembangkan sarana dan prasarana teknologi informasi	1. Mewujudkan aksesibilitas media informasi dan telekomunikasi yang merata
3. Meningkatkan pelestarian seni budaya dan peran pemuda	1. Meningkatnya kelestarian aset seni dan budaya	1. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi dan keragaman aset budaya	1. Melindungi budaya lokal melalui pengembangan gelar seni dan budaya
4. Mewujudkan toleransi dan pembinaan antar umat beragama	1. Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	1. Meningkatkan pembinaan kehidupan bermasyarakat	1. Pembinaan kehidupan dengan semangat kebangsaan bagi masyarakat
	2. Terwujudnya hubungan yang harmoni antar umat beragama	1. Meningkatkan pembinaan keagamaan	1. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat
		2. Pengembangan pendidikan agama di sekolah	1. Pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah
5. Mewujudkan kualitas hidup sumberdaya manusia yang kreatif dan berdaya saing	1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan	1. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang memiliki keunggulan komparatif	1. Pengembangan potensi sumberdaya manusia yang merata dan berkeadilan
		2. Meningkatkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat	1. Penguatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan
		3. Menurunkan jumlah penduduk miskin	1. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi upaya penanggulangan kemiskinan
	2. Meningkatnya penanggulangan PMKS	1. Mengurangi permasalahan sosial melalui	1. Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial,



		pemberian pelayanan sosial pada penyandang PMKS	jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS
	3. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender	1. Meningkatkan peran perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, hukum, politik dan teknologi	1. Peningkatan pembinaan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera
		2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	1. Pengembangan peran perempuan pada kelembagaan
	4. Meningkatnya program perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat	1. Meningkatkan fasilitasi penanganan kekerasan pada anak	1. Optimalnya pemberian layanan pada anak korban kekerasan

**MISI 3 : Meningkatkan keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat di kabupaten Bengkayang melalui optimalisasi program partisipasi masyarakat**

1. Urusan Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Strategi Pertama, Meningkatkan fasilitasi dan preventif keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan Arah Kebijakan :

- a. Mengoptimalkan pemahaman masyarakat tentang hidup berbangsa dan bernegara

Strategi Kedua, Melakukan penataan pada produk hukum daerah, dengan Arah Kebijakan:

- a. Melakukan penegakan produk hukum daerah

Strategi Ketiga, Meningkatkan kesadaran masyarakat akan budaya taat hukum, dengan Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

2. Urusan Otonomi daerah

Strategi Pertama, Meningkatkan sosialisasi produk hukum daerah, dengan Arah Kebijakan :

- a. Tersedianya produk hukum yang efektif mendukung penyelenggaraan pemerintahan

**Tabel 6.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 3**

<b>MISI 3 : Meningkatkan keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bengkayang melalui optimalisasi program partisipasi masyarakat</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan kondusif	1. Terkendalinya keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Meningkatkan fasilitasi dan preventif keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Mengoptimalkan pemahaman masyarakat tentang hidup berbangsa dan bernegara
2. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat akan produk hukum	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat pada produk hukum	1. Meningkatkan sosialisasi produk hukum daerah	1. Tersedianya produk hukum yang efektif mendukung penyelenggaraan pemerintahan
	2. Meningkatnya penegakkan peraturan daerah	1. Melakukan penataan pada produk hukum daerah	1. Melakukan penegakan produk hukum daerah
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban	1. Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga ketertiban	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan budaya taat hukum	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

**MISI 4 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu**

1. Urusan Kesehatan

Strategi Pertama, Meningkatkan standar pelayanan kesehatan rumah sakit, dengan Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana serta manajemen Rumah sakit

Strategi Kedua, Meningkatkan penataan sistem pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin, dengan Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan pelayanan bidang kebidanan
- b. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pada perbaikan gizi

Strategi Ketiga, Meningkatkan standar pelayanan kesehatan pada masyarakat, dengan Arah Kebijakan :

- a. Terwujudnya manajemen pelayanan kesehatan yang optimal
- b. Peningkatan Pelayanan pengendalian penyakit menular

Strategi Keempat, Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat, dengan Arah Kebijakan :

- a. Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang merata melalui fasilitas kesehatan yang standar

2. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Strategi Pertama, Sosialisasi kesehatan reproduksi pada masyarakat, dengan Arah Kebijakan:

- a. Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling pelayanan KB

3. Urusan Perumahan

Strategi Pertama, Meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan, dengan Arah Kebijakan :

- a. Penguatan pemberdayaan masyarakat dan penyehatan lingkungan

**Tabel 6.4**  
**Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 4**

<b>MISI 4 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu</b>				
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	
1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan Standar pelayanan kesehatan Rumah Sakit	1. Peningkatan sarana dan prasarana serta manajemen rumah sakit	
		2. Meningkatkan penataan sistem pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin	1. Peningkatan pelayanan bidang kebidanan  2. Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pada perbaikan gizi masyarakat	
	2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	1. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan pada masyarakat	1. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan pada masyarakat	1. Terwujudnya manajemen pelayanan kesehatan yang optimal
				2. Peningkatan pelayanan pengendalian penyakit menular
		2. Sosialisasi kesehatan reproduksi pada masyarakat	1. Pembentukan, pembinaan dan pengembangan Pusat Informasi Konseling pelayanan KB	
	2. Menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah, terjangkau dan merata di seluruh wilayah	1. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dasar di seluruh wilayah	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	1. Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang merata melalui fasilitas kesehatan yang standar

3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat	1. Meningkatnya peran masyarakat pada pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	1. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	1. Penguatan pemberdayaan masyarakat dan penyehatan lingkungan
--	--	---	--

**MISI 5 : Menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan organisasi kemasyarakatan**

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri
 

Strategi Pertama, Meningkatkan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, dengan Arah Kebijakan :

  - a. Optimalisasi tata kelola pembentukan dan penyehatan organisasi kemasyarakatan

Strategi Kedua, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik , dengan Arah Kebijakan :

  - a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu
  
2. Urusan Pemuda dan Olahraga
 

Strategi Pertama, Meningkatkan kualitas organisasi kepemudaan, dengan Arah Kebijakan :

  - a. Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan

Strategi Kedua, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri, dengan Arah Kebijakan :

  - a. Peningkatan dan pembangunan gedung olah raga
  - b. Peningkatan pembinaan atlit dan olahragawan
  - c. Peningkatan peran kepemudaan pada program budaya

**Tabel 6.5**  
**Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 5**

<b>MISI 5 : Menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan organisasi masyarakat</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatkan peran organisasi masyarakat dalam pembangunan	1. Berkembangnya organisasi masyarakat	1. Meningkatkan pemberdayaan organisasi masyarakat	1. Optimalisasi tata kelola pembentukan dan penyehatan organisasi masyarakat
	2. Meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam program pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas organisasi kepemudaan	1. Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan
	3. Meningkatnya peran generasi muda pada program budaya dan olahraga	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri	1. Peningkatan dan pembangunan gedung olah raga 2. Peningkatan pembinaan atlet dan olahragawan 3. Peningkatan peran kepemudaan pada program budaya
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pada fungsi dan peran organisasi politik	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu

**MISI 6 : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional dan bersih dengan prinsip melayani**

1. Urusan Perencanaan Pembangunan

Strategi Pertama, Meningkatkan proses perencanaan pembangunan yang berkualitas, dengan Arah Kebijakan :

- a. Tersusunnya perencanaan yang sesuai dengan tata cara dan sistem perencanaan nasional menurut Undang-Undang

Strategi Kedua, Meningkatkan manajemen dan pengendalian pada sistem perencanaan pembangunan, dengan Arah Kebijakan :

- a. Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang konsisten dalam rangka menjawab permasalahan nasional dan daerah

Strategi Ketiga, Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan Arah Kebijakan :

- a. Terselenggaranya forum dan atau musyawarah konsultasi publik yang efektif dan efisien

2. Urusan Statistik

Strategi Pertama, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas data Sebagai acuan Perencanaan Pembangunan, dengan Arah Kebijakan:

- a. Penguatan pada Penyediaan data yang terintegrasi melalui sistem Teknologi Informasi

3. Urusan Otonomi Daerah

Strategi Pertama, Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD

Strategi Kedua, Mewujudkan SOPD, SOTK yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Arah Kebijakan :

- a. Terwujudnya kajian, rumusan, dan pelaksanaan perubahan SOPD dan SOTK serta Tupoksi Organisasi Pemerintah Daerah

Strategi Ketiga, Meningkatkan Fungsi Kontrol Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, dengan Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan Evaluasi terhadap Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah

Strategi Keempat, Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah, dengan Arah Kebijakan :

a. Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah

Strategi Kelima, Mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, dengan Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi pada opini BPK berkaitan pengelolaan keuangan dan aset daerah

Strategi Keenam, Meningkatkan standar kualitas dalam proses rekrutmen/mutasi/ promosi dan pemberian studi bagi aparatur, dengan Arah Kebijakan :

a. Mengkaji, merumuskan dan mengembangkan sistem dalam rekrutmen/ mutasi/ promosi aparatur dan pemberian studi serta memperkuat pengawasan pelaksanaannya

Strategi Ketujuh, meningkatkan kesempatan sumber daya aparatur dalam meningkatkan kompetensi, dengan arah kebijakan:

a. Mengadakan Pendidikan Kompetensi dan kedinasan aparatur sesuai dengan kebutuhan daerah

4. Urusan Penataan Ruang

Strategi Pertama, Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten. , dengan Arah Kebijakan :

a. Penyusunan Instrumen Pengawasan & Pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang

b. Penyempurnaan tatacara perijinan dengan memperhatikan penataan ruang sebagai instrumen pengendalian



**Tabel 6.6**  
**Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 6**

<b>MISI 6 : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional dan bersih dengan prinsip melayani</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatkan Kinerja perencanaan pembangunan	1. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel	1. Meningkatkan proses perencanaan pembangunan yang berkualitas	1. Tersusunnya perencanaan yang sesuai dengan tata cara dan sistem perencanaan nasional menurut Undang-Undang
		2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas data sebagai acuan perencanaan pembangunan	1. Penguatan pada penyediaan data yang terintegrasi melalui sistem teknologi informasi
	2. Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran	1. Meningkatkan manajemen dan pengendalian pada sistem perencanaan pembangunan	1. Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang konsisten dalam rangka menjawab permasalahan nasional dan daerah
3. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tata kelola pemerintahan	3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah	2. Terselenggaranya forum dan atau musyawarah konsultasi publik yang efektif dan efisien
		1. Meningkatkan kualitas dan kinerja SKPD pelayanan publik	1. Meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD
	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD	

	2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1. Mewujudkan SOPD, SOTK yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Terwujudnya kajian, rumusan, dan pelaksanaan perubahan SOPD dan SOTK serta tupoksi organisasi Pemerintah Daerah
		2. Meningkatkan fungsi kontrol pelaksanaan urusan pemerintahan	1. Meningkatkan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah
	3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
	4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Mewujudkan Pengelolaan dan Pelaporan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi pada opini BPK berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan	1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang konsisten	1. Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten.	1. Penyusunan instrumen pengawasan & pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang  2. Penyempurnaan tatacara perijinan penataan ruang sebagai instrumen pengendalian

5. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur	1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur	1. Meningkatkan standar kualitas dalam proses rekrutmen/ mutasi/ promosi dan pemberian studi bagi aparatur	1. Mengkaji, merumuskan, dan mengembangkan sistem dalam rekrutmen/ mutasi/promosi aparatur dan pemberian studi serta memperkuat pengawasan pelaksanaannya
	2. Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur	1. Meningkatkan kesempatan bagi aparatur dalam meningkatkan kompetensi	1. Mengadakan pendidikan kompetensi dan kedinasan aparatur sesuai kebutuhan daerah

**MISI 7 : Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan**

1. Urusan Ketahanan Pangan

Strategi Pertama, Meningkatkan pemberdayaan usahatani masyarakat, dengan Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan produktivitas usahatani komoditas pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi

2. Urusan Lingkungan Hidup

Strategi Pertama, Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berbasis lingkungan hidup, dengan Arah Kebijakan:

- a. Terwujudnya proses pembangunan yang mengutamakan kajian lingkungan

Strategi kedua, Melakukan pengendalian pada pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan Arah Kebijakan:

- a. Meningkatnya pemulihan kerusakan lingkungan dan kualitas udara
- b. Peningkatan ruang terbuka hijau

3. Urusan Otonomi Daerah

Strategi Pertama, Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana, dengan Arah Kebijakan :

- a. Meningkatnya cakupan palayanan mitigasi dan penanggulangan bencana

**Tabel 6.7**  
**Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 7**

<b>MISI 7 : Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1 Meningkatkan pengelolaan potensi SDA secara efektif	1. Tersedianya ketahanan pangan yang dinamis dan berkelanjutan	1. Meningkatkan pemberdayaan usahatani masyarakat	1. Peningkatan produktivitas usahatani komoditas pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
1 Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal	1. Tersedianya hasil kajian AMDAL pada program yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan SDA	1. Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berbasis lingkungan hidup	1. Terwujudnya proses pembangunan yang mengutamakan kajian lingkungan
	2. Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Melakukan pengendalian pada pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Meningkatnya pemulihan kerusakan lingkungan dan kualitas udara
	3. Menurunnya resiko bencana akibat pemanfaatan SDA	1. Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana	2. Peningkatan ruang terbuka hijau 1. Meningkatnya cakupan palayanan mitigasi dan penanggulangan bencana

**MISI 8 : Menjadikan wilayah perbatasan Kabupaten Bengkulu sebagai daerah yang maju dan beranda depan NKRI**

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 

Strategi Pertama, Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan, dengan Arah Kebijakan :

  - a. Tersedia sumberdaya manusia wilayah perbatasan yang memiliki kemampuan wirausaha

Strategi Kedua Meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat perbatasan melalui program stimulus yang berasal dari pendanaan APBD dan APBN, dengan Arah Kebijakan :

  - a. Tersedianya perencanaan dan program yang mengarah pada pembangunan ekonomi perbatasan
  
2. Urusan Pekerjaan Umum
 

Strategi Pertama, Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan, dengan Arah Kebijakan :

  - a. Meningkatnya infrastruktur transportasi di wilayah perbatasan

Strategi Kedua, Meningkatnya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan, dengan Arah Kebijakan :

  - a. Terwujudnya pembangunan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan yang terpadu

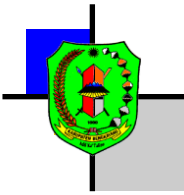
**Tabel 6.8**  
**Strategi dan Arah Kebijakan di Misi 8**

<b>MISI 8 : Menjadikan wilayah perbatasan Kabupaten Bengkulu sebagai daerah yang maju dan beranda depan NKRI</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan di wilayah perbatasan	1. Terwujudnya program pembinaan / diklat bidang ekonomi bagi masyarakat perbatasan	1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan	1. Tersedia sumberdaya manusia wilayah perbatasan yang memiliki kemampuan wirausaha

	2. Meningkatnya program stimulus ekonomi kemasyarakatan	1. Meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat perbatasan melalui program stimulus yang berasal dari pendanaan APBD dan APBN	1. Tersedianya perencanaan dan program yang mengarah pada pembangunan ekonomi perbatasan
2. Menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan NKRI	1. Meningkatnya aksesibilitas wilayah perbatasan	1. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan	1. Meningkatnya infrastruktur transportasi di wilayah perbatasan
	2. Terwujudnya wilayah perbatasan sebagai daerah prioritas untuk program pembangunan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat	1. Meningkatnya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan	1. Terwujudnya pembangunan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan yang terpadu

# 7

## Kebijakan Umum Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah



## *BAB VII*

# *KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH*

Kebijakan umum dan Program pembangunan daerah yang tertuang didalam bagian ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara kebijakan pembangunan yang diambil dan Bidang urusan pemerintahan daerah yang terdistribusi kedalam tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan kerja perangkat daerah. Melalui kebijakan umum ini, akan menjadi pedoman dalam penetapan program-program pembangunan yang dianggap paling efektif untuk menjawab Visi dan Misi lima tahun kedepan.

Dalam mewujudkan keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang periode 2016-2021 yang telah dituangkan didalam indikator kinerja sasaran pada masing-masing misi, maka telah ditetapkan program-program pembangunan sesuai dengan urusan pemerintahan yang melekat di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagai berikut :

### **Misi 1 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Bengkayang dengan Konsep Nilai Tambah dan Optimalisasi**

Adapun Program untuk mendukung Misi ini sebagai berikut :

1. Urusan Otonomi Daerah :
  - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - b. Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah
  - c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan



- d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Urusan Perdagangan
  - a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
  - b. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
3. Urusan Industri
  - a. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
  - b. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
4. Urusan Penanaman Modal
  - a. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
  - b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
5. Urusan Ketenagakerjaan
  - a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
  - c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
  - d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
  - e. Program Peningkatan Industri Kecil dan Menengah
6. Urusan Koperasi dan UMKM
  - a. Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang Kondusif
  - b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
  - c. Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Kelompok UMKM
7. Urusan Pertanian
  - a. Program Peningkatan Produksi Pertanian
  - b. Program Peningkatan Produksi Perkebunan
8. Urusan Kelautan dan Perikanan
  - a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
9. Urusan Pariwisata
  - a. Program Pengembangan Pemasaran pariwisata
  - b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
10. Urusan Pekerjaan Umum
  - a. Program Pembangunan Sistem Informasi dan Database Jalan
  - b. Program Perencanaan Bidang Kebinamargaan
  - c. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
  - d. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- e. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
  - f. Program pembangunan jalan dan jembatan
  - g. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
11. Urusan Penataan Ruang
- a. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
12. Urusan Perhubungan
- a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
  - b. Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan
  - c. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
  - d. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
13. Urusan Perumahan
- a. Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
  - b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
14. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
- a. Program Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Ketenagalistrikan

**Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang cerdas, Kreatif dan mampu menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Adapun Program untuk mendukung Misi ini sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan
  - a. Program wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan tahun
  - b. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - c. Program manajemen Pelayanan Pendidikan
  - d. Program Pendidikan Anak Usia Dini
  - e. Program Pendidikan Non Formal
  - f. Program Pengembangan Kapasitas Sumber daya Masyarakat
2. Urusan Perpustakaan
  - a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

3. Urusan Komunikasi dan Informatika
  - a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
4. Urusan Kebudayaan
  - a. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
5. Urusan Kesatuan bangsa dan Politik dalam Negeri
  - a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
6. Urusan Otonomi Daerah
  - a. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial
7. Urusan Sosial
  - a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
  - b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin
  - c. Program Pembinaan Anak terlantar
  - d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
  - e. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
  - b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

**Misi 3 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat di kabupaten Bengkulu Melalui Optimalisasi Program Partisipasi Masyarakat**

Adapun Program untuk mendukung Misi ini sebagai berikut :

1. Urusan Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri
  - a. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
  - b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Urusan Otonomi daerah
  - a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

**Misi 4 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata diseluruh Wilayah Kabupaten Bengkulu**

Adapun Program untuk mendukung Misi ini sebagai berikut :

1. Urusan Kesehatan
  - a. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/ RS Paru/ RS Mata
  - b. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
  - c. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
  - d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  - e. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
  - f. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
  - h. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
  - i. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
2. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
  - a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
  - b. Program Keluarga Berencana
3. Urusan Perumahan
  - a. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

**Misi 5 : Menciptakan Iklim yang sehat bagi Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan**

Adapun Program untuk mendukung Misi ini sebagai berikut :

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
  - a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Urusan Pemuda dan Olahraga
  - a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
  - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
  - c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
3. Urusan Kebudayaan
  - a. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri
  - a. Program Pendidikan Politik Masyarakat

**Misi 6 : Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Profesional dan Bersih dengan Prinsip Melayani**

Adapun Program untuk mendukung Misi ini sebagai berikut :

1. Urusan Perencanaan Pembangunan
  - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Budaya
  - c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Urusan Statistik
  - a. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
3. Urusan Otonomi Daerah
  - a. Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah
  - b. Program Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
  - c. Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
  - d. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
  - e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
  - f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
  - g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - h. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - i. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
  - j. Program Pendidikan Kedinasan
4. Urusan Penataan Ruang
  - a. Program Perencanaan Tataruang

**Misi 7 : Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berlandaskan pada Prinsip Keberlanjutan dan Berwawasan Lingkungan**

Adapun Program untuk mendukung Misi ini sebagai berikut :

1. Urusan Ketahanan Pangan
  - a. Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian
2. Urusan Lingkungan Hidup
  - a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
  - b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  - c. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
  - d. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
3. Urusan Otonomi Daerah
  - a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
  - b. Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan Kebakaran

**Misi 8 : Menjadikan Wilayah Perbatasan Kabupaten Bengkayang Sebagai Daerah yang Maju dan Beranda Depan NKRI**

Adapun Program untuk mendukung Misi ini sebagai berikut :

1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2. Urusan Pekerjaan Umum

Rumusan kebijakan umum dan Program Prioritas Kabupaten Bengkayang periode 2016 – 2021 dituangkan selengkapnya di dalam tabel berikut :

**Tabel 7.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1**

MISI I : Meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkulu dengan konsep nilai tambah dan optimalisasi

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<i>Tujuan 1: Membangun Perekonomian Kabupaten Bengkulu yang kuat</i>										
1	Meningkatnya PAD kabupaten Bengkulu	Membangun Pengawasan Sebagai Pengendalian Internal yang Handal	Meningkatkan kompetensi dan integritas petugas pelayanan pajak	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak	Rupiah (Juta)	7.894	18.580	Otonomi	Dispenda
		Membangun pelayanan publik dalam manajemen pajak daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel	tersedianya informasi perpajakan yang terintegrasi	Program pembinaan, pengendalian dan monitoring pajak daerah	jenis pajak yang termonitor dan terevaluasi secara optimal	Jenis	8	15	Otonomi	Dispenda

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Intensifikasi Penerimaan retribusi daerah	Inventarisasi potensi penerimaan retribusi yang didukung dengan regulasi daerah	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Penerimaan Bukan Pajak	Rupiah (Juta)	10.609	10.697	Otonomi	Setda Setwan BPKAD Dispenda
		Optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Pembinaan BUMD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pengembangan Usaha Daerah yang sehat	BUMD	2	3	Otonomi	BPKAD
2	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Membangun sistem perekonomian yang mengarah pada peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan tersier	Meningkatkan variasi produk barang dan jasa yang berasal dari sektor unggulan daerah	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pembinaan dan pelatihan	jumlah	N/A	> 10	Industri	Dinas KUMKM, PERINDAG
		Menciptakan iklim yang baik bagi kegiatan perdagangan barang dan jasa	Meningkatkan pendapatan melalui sektor perdagangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Fasilitasi dan pembinaan para pelaku usaha	Unit usaha	N/A	50	Perdagangan	Dinas KUMKM, PERINDAG



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sentra-sentra industri	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah industri potensial	jumlah	0	>5	Industri	Dinas KUMKM, PERINDAG
		Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peluang investasi	Penguatan regulasi dan perencanaan melalui penyusunan kajian pengembangan Investasi daerah	Program peningkatan iklim dan realisasi investasi	Dokumen yang disusun	Dokumen	0	>5	Penanaman Modal	Bappeda
					Regulasi yang dikeluarkan	Perda	0	1	Penanaman Modal	Bappeda
			Meningkatkan kontribusi pihak swasta untuk pengembangan sektor usaha	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Jumlah investor yang berkontribusi dalam pembangunan	perusahaan	N/A	>10	Penanaman Modal	Bappeda, Perijinan dan Diskumindag

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan	Mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas	Program peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja	Rasio kerja yang memperoleh patihan	%	N/A	>50	Ketenaga kerjaan	Dinsosnak ertrans
		Menciptakan iklim yang baik bagi kelangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	N/A	>75	Ketenaga kerjaan	Dinsosnak ertrans
		Mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan	Peningkatan penempatan dan perluasan lapangan kerja	Program peningkatan kesempatan kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah	N/A	2.650	Ketenaga kerjaan	Dinsosnak ertrans

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Peningkatan lapangan kerja melalui pengembangan koperasi	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah lapangan pekerjaan	Jumlah	N/A	500	Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM	Dinas KUMKM, PERINDAG
			Peningkatan lapangan kerja melalui pengembangan industri kecil dan menengah	Program peningkatan industri kecil dan menengah	Jumlah lapangan pekerjaan	jumlah	N/A	1000	Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM	Dinas KUMKM, PERINDAG
<b>Tujuan 2: Mengoptimalkan sektor perekonomian masyarakat</b>										
4	Meningkatnya daya beli masyarakat	Mendorong dan memfasilitasi aktivitas industri masyarakat	Meningkatkan peran usaha kecil menengah masyarakat dalam perekonomian	Program penciptaan usaha menengah kondusif	Meningkatnya UMKM yang berkualitas dan berdaya saing	unit	N/A	>50	Koperasi dan UMKM	Dinas KUMKM, PERINDAG

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Menjaga stabilitas dan ketersediaan barang kebutuhan pokok	Menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan barang	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jenis barang yang diawasi peredarannya	jumlah	4	>5	Perdagangan	Dinas KUMKM, PERINDAG
5	Meningkatnya produksi sektor unggulan daerah	Meningkatkan usaha komoditas agroforestry potensial yang memiliki nilai ekonomis dan berpeluang pasar tinggi	Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing	Program peningkatan produksi pertanian Program peningkatan produksi perkebunan	Produksi padi Produksi jagung Produksi Karet Produksi Lada Produksi Sawit	Ton Ton Ton Ton Ton	81.726 77.484 23.073 1.293 111.243	109.520 103.835 23.200 1.600 130.000	Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian	Pertanian Pertanian Hutbun Hutbun Hutbun
				Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3.218	4.000	Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	1.734	2.500	Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
6	Berkembangnya pariwisata daerah	Optimalisasi dukungan pariwisata berdaya saing	Mengoptimalkan promosi dan pemasaran pariwisata melalui media yang potensial	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Kunjungan wisatawan	Orang	270.860	402.000	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan pada destinasi pariwisata daerah	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi wisata	Lokasi	4	6	pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Tujuan 3: Meningkatkan nilai tambah aktivitas perekonomian masyarakat</b>										
7	Berkembangnya Koperasi dan UMKM	Mengoptimalkan potensi kelembagaan koperasi masyarakat	Optimalisasi kelembagaan koperasi	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Rasio koperasi yang aktif	%	60,75	80,00	Koperasi dan UMKM	Dinas KUMKM, PERINDAG
		Mengembangkan kelembagaan dan produk UMKM	Pemberdayaan kelompok UMKM	Program peningkatan mutu dan kualitas kelompok UMKM	Jumlah UMKM	Unit	2.270	3.095	Koperasi dan UMKM	Dinas KUMKM, PERINDAG
8	Meningkatnya perekonomian pada sektor sekunder dan tersier	Mengembangkan investasi dan usaha masyarakat pada sektor sekunder dan tersier	Pengembangan dan pemberdayaan pada industri jasa dan rumah tangga	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah usaha bidang jasa	unit	1.287	2.000	Perdagangan	Dinas KUMKM, PERINDAG

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Tujuan 4: menyediakan infrastruktur dan sapras pendukung perekonomian masyarakat dan regional</b>										
9	Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata	Meningkatkan Pemutahiran Kondisi Jalan dan Jembatan dengan sesuai dengan Kondisi terkini daerah	Program Pembangunan sistem Informasi dan data base jalan	Updating data kondisi jalan setiap tahun	Ada/tidak	N/A	Ada	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Mengedepankan Perencanaan pada setiap proses pembangunan	Program Perencanaan Bidang Kebinamargaan	Jumlah perencanaan teknis jalan (fulldesign) yang tersusun	dokumen	N/A	> 10	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Meningkatkan kapasitas & kualitas jaringan jalan dan jembatan	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Rasio panjang jalan & jembatan kondisi baik	%	49,90	76,08	Pekerjaan Umum	Dinas PU

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Mengembangkan infrastruktur pendukung fungsional jalan dan jembatan	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah drainase/gorong-gorong yang dibangun	unit	N/A	>100	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Pengembangan Infrastruktur jalan baru dalam rangka mendukung pengembangan kawasan perkotaan	Pembangunan jalan dan jembatan baru melalui penguatan pada unsur kajian dan perencanaan pengembangan jalan	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh Program Perencanaan Bidang kebinamargaan	Jumlah Dokumen tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	dokumen	N/A	>50,00	Penataan Ruang Pekerjaan Umum	Bappeda Dinas PU
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang pembangunan jalan dan jembatan baru	km	N/A	>50,00	Pekerjaan Umum	Dinas PU



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Terwujudnya sistem transportasi publik yang representatif	Menyediakan sarana dan prasarana yang perhubungan yang memadai	Menyediakan sarana dan prasarana dasar perhubungan	Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan	Jumlah halte yang dibangun	Unit	N/A	15	Perhubungan	Dishubkom info
			Menyediakan fasilitas terminal untuk perhubungan dan steher untuk perhubungan laut/sungai yang layak	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah terminal	Unit	5	10	Perhubungan	Dishubkom info
			Pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Jumlah pelabuhan/steher yang dibangun	Unit	N/A	10	Perhubungan	Dishubkom info
					Fasilitas LLAJ yang berfungsi dan dalam kondisi baik	%	N/A	>50,00	Perhubungan	Dishubkom info

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Meningkatkan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah fasilitas uji KIR angkutan umum	unit	0	1	Perhubungan	Dishubkom info
11	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pemukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana dasar permukiman	Meningkatkan pemetaan dan perencanaan sebagai acuan penataan kawasan kumuh perkotaan	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan Besar	Jumlah Dokumen yang tersusun	%	0,00	100,00	Perumahan	Bappeda
			Penataan Kawasan Kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan Besar	Luas kawasan permukiman kumuh	Ha	156,44	65,00	Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Program pengembangan lingkungan sehat	Jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun	unit	N/A	>1000	Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum
12	Terwujudnya infrastruktur air bersih dan listrik yang berkualitas dan merata	Mengembangkan dan memelihara Sumber air Baku untuk penyediaan air bersih dalam rangka Meningkatkan cakupan dan kontinuitas pelayanan air bersih	Peningkatan penyediaan sumber air baku	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Jumlah desa yang telah memiliki sarana air bersih	Desa	N/A	>50	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		Mengembangkan penyediaan ketenagalistrikan yang layak dan merata bagi masyarakat	Peningkatan penyediaan bidang ketenagalistrikan	Program pembinaan dan pengembangan di bidang ketenagalistrikan	Jumlah desa yang telah memiliki jaringan listrik	Desa	82	110	Energi dan SDM	Dinas ESDM

**Tabel 7.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2**

MISI 2 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu yang cerdas, kreatif dan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Tujuan 1: Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata</b>										
1	Meningkatnya standar pendidikan	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas	Pengembangan pelayanan pendidikan pada tingkat dasar (sembilan tahun)	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	APM SD/Sederajat	%	88,48	95,00	Pendidikan	Disdikbud
					APM SMP/Sederajat	%	49,25	75,00	Pendidikan	Disdikbud
			Pengembangan kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Implementasi kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran	%	N/A	80,00	Pendidikan	Disdikbud

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Pengembangan dan pengawasan kapasitas tenaga pendidik	Program peningkatan mutu pendidik tenaga kependidikan	Tingkat kualifikasi tenaga pendidik	%	77,89	100,00	Pendidikan	Disdikbud
			Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada standar pendidikan nasional	Program manajemen pelayanan pendidikan	Tingkat sertifikasi tenaga pendidik	%	N/A	>70,00	Pendidikan	Disdikbud
					Sekolah SD/ sederajat yang telah mengacu pada standar pendidikan nasional	%	N/A	>50,00	Pendidikan	Disdikbud
					SMP/ sederajat yang telah mengacu pada standar pendidikan nasional	%	N/A	>50,00	Pendidikan	Disdikbud

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Jumlah sekolah SD/Sederajat	unit	268	280	Pendidikan	Disdikbud
					Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SD/MI	%	36,70	>50,00	Pendidikan	Disdikbud
					Jumlah Sekolah SMP/Sederajat	Unit	75	80	Pendidikan	Disdikbud
					Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMP/MTs	%	28,80	>50,00	Pendidikan	Disdikbud

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan	Pengembangan PAUD	Program pendidikan anak usia dini (PAUD)	Cakupan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan anak usia dini	%	N/A	>50,00	Pendidikan	Disdikbud
			Penuntasan buta aksara	Program pendidikan formal	APK Pendidikan Non formal	%	N/A	>50,00	Pendidikan	Disdikbud
					APM Pendidikan Non Formal	%	N/A	>75,00	Pendidikan	Disdikbud
					Peningkatan Aksesibilitas pendidikan formal non formal	%	N/A	>50,00	Pendidikan	Disdikbud

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatkan sarana dan prasarana Perpustakaan daerah	Pengembangan minat baca masyarakat	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah pemustaka	Jumlah	N/A	>100	Perpustakaan	Kantor Arsip & Perpustakaan Daerah
					Cakupan perpustakaan daerah	%	N/A	>20,00	Perpustakaan	Kantor Arsip & Perpustakaan Daerah
<b>Tujuan 2: Mengoptimalkan aksesibilitas teknologi informasi di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu</b>										
3	Tersedianya fasilitas pendukung teknologi informasi	Mengembangkan sarana dan prasarana teknologi informasi	Mewujudkan aksesibilitas media telekomunikasi dan informasi yang merata	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa	Cakupan jaringan telekomunikasi  Cakupan akses internet	%  Kecamatan	N/A  3	>50,00  9	Komunikasi dan Informatika  Komunikasi dan Informatika	Dishubkom info  Dishubkom info



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Tujuan 3: Meningkatkan pelestarian seni budaya dan peran pemuda</b>										
4	Meningkatnya kelestarian aset seni dan budaya	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap tradisi keragaman budaya	Melindungi budaya lokal melalui pengembangan gelar seni dan budaya	Program pengelolaan keragaman budaya	Perlindungan peninggalan cagar budaya	Unit	8	8	Pendidikan	Disdikbud
					Pagelaran festival seni dan budaya	even	11	12	Pendidikan	Disdikbud
<b>Tujuan 4: Mewujudkan toleransi dan pembinaan antar umat beragama</b>										
5	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Meningkatkan pembinaan kehidupan bermasyarakat	Pembinaan kehidupan dengan semangat kebangsaan bagi masyarakat	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Tingkat kejadian konflik sosial	Kasus	Tidak ada	Tidak ada	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Kantor Kesbangpol

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Terwujudnya hubungan yang harmoni antar umat beragama	Meningkatkan pembinaan keagamaan	Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat	Program sosial keagamaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam forum dan hari besar keagamaan	%	N/A	100,00	Otonomi Daerah	Bagian Kesra Setda
		Pengembangan pendidikan agama di sekolah	Pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah	Program pendidikan anak usia dini	Kegiatan keagamaan di PAUD	%	N/A	80,00	Pendidikan	Disdikbud
				Program wajib Pendidikan dasar sembilan tahun	Kegiatan keagamaan di pendidikan dasar	%	N/A	80,00	Pendidikan	Disdikbud

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Tujuan 5: Mewujudkan kualitas hidup sumberdaya manusia yang kreatif dan berdaya saing</b>										
7	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan	Mempersiapkan sumberdaya manusia yang memiliki keunggulan komparatif	Pengembangan potensi sumberdaya manusia yang merata dan berkeadilan	Program beasiswa utusan daerah	Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa	Jumlah	N/A	900	Pendidikan	BPKAD, Setda
		Meningkatkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat	Penguatan partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Tingkat pembinaan kelembagaan masyarakat	skala	Cukup	Baik	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinsosnake rtrans
	Menurunkan jumlah penduduk miskin		Meningkatnya koordinasi dan upaya penanggulangan kemiskinan	Program pemberdayaan fakir miskin	Cakupan Masyarakat miskin yang memperoleh bantuan	jiwa	16.870	<10.000	Sosial	Dinsosnake rtrans

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Meningkatnya penanggulangan PMKS	Mengurangi permasalahan sosial melalui pemberian pelayanan sosial pada penyandang PMKS	meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS	Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial	Penanganan anak terlantar dan jalanan Penanganan gelandang dan eks pengguna narkoba	% %	N/A N/A	80,00 80,00	Sosial Sosial	Dinsosnake rtrans Dinsosnake rtrans
9	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender	Meningkatkan peran perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, hukum, politik dan teknologi	peningkatan pembinaan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Penanganan penyandang cacat dan eks trauma	%	N/A	80,00	Sosial	Dinsosnake rtrans
				Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Indeks Pembangunan Gender	%	65,00	65,40	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKB

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Pengembangan peran perempuan pada kelembagaan	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Peran perempuan pada kelembagaan politik	%	10,36	> 15,00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKB
					Peran perempuan pada pemerintahan	%	22,77	> 30,00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKB
10	Meningkatnya program perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan fasilitas penanganan kekerasan anak	Optimalnya pemberian layanan pada anak korban kekerasan	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Penanganan kasus	%	100,00	100,00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKB

**Tabel 7.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketiga**

MISI 3 : Meningkatkan keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat di kabupaten Bengkulu melalui optimalisasi program partisipasi masyarakat

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<i>Tujuan 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan kondusif</i>										
1	Terkendalinya keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan fasilitas preventif keamanan dan ketertiban masyarakat	Mengoptimalkan pemahaman masyarakat tentang hidup berbangsa dan bernegara	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Angka kriminalitas	kasus	133	<50	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Sat Pol PP
					Kasus konflik sosial	kasus	Tidak ada	Tidak ada	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Sat Pol PP

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Tujuan 2: Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat akan produk hukum</b>										
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat pada produk hukum	Meningkatkan sosialisasi produk hukum daerah	Tersedianya produk hukum yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan produk hukum daerah yang dihasilkan	%	N/A	>75,00	Otonomi Daerah	Sat Pol PP
3	Meningkatnya penegakkan peraturan daerah	Melakukan penataan produk hukum daerah	Melakukan penegakan produk hukum daerah	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan penegakan peraturan daerah	%	N/A	>75,00	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Sat Pol PP

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Tujuan 3: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban</b>										
4	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga ketertiban	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan budaya taat hukum	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio jumlah anggota Linmas per 1000 penduduk	Skala	2,61	>5,00	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Sat Pol PP
					Jumlah aktivitas demo	Jumlah	N/A	<5	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Sat Pol PP



Tabel 7.4

## Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keempat:

MISI 4 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Tujuan 1: Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas</b>										
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan standar pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Peningkatan sarana dan prasarana serta manajemen Rumah sakit	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS	Status RSUD	Tipe	D	C	Kesehatan	RSUD
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan kualitas dan kuantitas ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	69,95	>80,00	Kesehatan	RSUD, Dinas Kesehatan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatkan penataan sistem pelayanan kesehatan masyarakat miskin	Peningkatan pelayanan kebidanan bidang kesehatan	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka kematian ibu melahirkan	Rasio	10,09	<5,00	Kesehatan	RSUD, Dinas Kesehatan	
			Program Perbaikan Masyarakat dan gizi	Angka kematian bayi	rasio	105,11	<25,00	Kesehatan	RSUD, Dinas Kesehatan	
			Peningkatan pelayanan dan pada gizi masyarakat	Balita penderita gizi buruk	Rasio	0,58	<1,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
2	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan standar pelayanan kesehatan masyarakat	Terwujudnya manajemen pelayanan kesehatan yang optimal	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Angka harapan hidup masyarakat	Tahun	72,89	>75,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kasus DBD	Kasus	20	<10	Kesehatan	Dinas Kesehatan	

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Peningkatan pelayanan pengendalian penyakit menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kasus penyakit menular	kasus	1	0	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Sosialisasi kesehatan reproduksi pada masyarakat	Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling pelayanan KB	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	Cakupan sosialisasi pelayanan KB	%	N/A	>50,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan, BPPKB
<b>Tujuan 2: Menghadirkan pelayanan kesehatan yang mudah, terjangkau dan merata di seluruh wilayah</b>										
3	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dasar di seluruh wilayah	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dasar	Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang merata melalui fasilitas kesehatan yang standar	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas yang terakreditasi	Unit	0	17	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah Puskesmas	Unit	17	17	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	70	100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah Posyandu	Unit	328	>400	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Jumlah Dokter	Orang	18	>25	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Jumlah Bidan	Orang	154	>200	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Tujuan 3: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat</b>										
4	Meningkatnya peran masyarakat pada pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	Penguatan pemberdayaan masyarakat dan penyehatan lingkungan	Program Pengembangan Sehat Lingkungan	Rumah Tangga yang memiliki jamban keluarga	%	N/A	>75,00	Perumahan	Dinas Kesehatan, Lingkungan Hidup, Dinas PU
					Rumah Tangga yang memiliki sarana air minum yang memenuhi syarat	%	N/A	>75,00	Perumahan	Dinas Kesehatan, Dinas PU

**Tabel 7.5**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kelima**

MISI 5 : Menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan organisasi kemasyarakatan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<i>Tujuan 1: Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan</i>										
1	Berkembangnya organisasi kemasyarakatan	Meningkatkan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Optimalisasi tata kelola pembentukan dan penyehatan organisasi kemasyarakatan	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah organisasi yang berbadan hukum	jumlah	N/A	>5	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Kantor Kesbangpol
2	Meningkatnya peran organisasi kepemudaan dalam program pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kualitas organisasi kepemudaan	Peningkatan peran organisasi serta kepemudaan dalam pembangunan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pembinaan kepemudaan	jumlah	5	>10	Pemuda dan Olah raga	Kantor Pemuda dan Olah Raga

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Meningkatnya peran generasi muda pada program budaya dan olahraga	meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri	Peningkatan pembangunan gedung olah raga dan peningkatan pembinaan atlet dan olahragawan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga  Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah sarana olah raga yang terbangun  Kegiatan olah raga  Olahragawan berprestasi	jumlah  jumlah  jumlah	N/A  N/A  N/A	>3  >5  5	Pemuda dan Olah raga  Pemuda dan Olah raga  Pemuda dan Olah raga	Kantor Pemuda dan Olah Raga  Kantor Pemuda dan Olah Raga  Kantor Pemuda dan Olah Raga
			Peningkatan peran kepemudaan pada program budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kelembagaan seni budaya yang terbentuk  Keterlibatan kelembagaan seni budaya yang terlibat pada even seni dan budaya	jumlah  Jumlah	71  12	>100  >20	Kebudayaan  Kebudayaan	Disdikbud, Dinas Pariwisata  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Tujuan 2: Meningkatkan kesadaran masyarakat pada fungsi dan peran organisasi politik</b>										
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik	Peningkatan peran masyarakat dalam pemilu	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pastipasi masyarakat pada pemilu legislatif	%	75,89	>90,00	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Kantor Kesbangpol
					Partisipasi masyarakat pada pemilu kepala negara	%	N/A	>90,00	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Kantor Kesbangpol
					Partisipasi masyarakat pada pemilu kepala daerah	%	67,57	>90,00	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	Kantor Kesbangpol



Tabel 7.6

## Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keenam

MISI 6 : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional dan bersih dengan prinsip melayani

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<i>Tujuan 1: Meningkatkan Kinerja perencanaan pembangunan</i>										
1	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya proses perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tersusunnya perencanaan yang sesuai dengan tata cara dan sistem perencanaan nasional menurut Undang-Undang	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan sesuai sistem perencanaan nasional	%	100,00	100,00	Perencanaan	Bappeda
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas data sebagai perencanaan pembangunan	acuan	Penguatan pada penyediaan data yang terintegrasi melalui sistem teknologi informasi	Program pengembangan data/informasi dan statistik daerah	Aplikasi yang tersedia	jumlah	1	3	Litbang dan Statistik	Bappeda

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan anggaran	Meningkatkan manajemen dan pengendalian pada sistem perencanaan pembangunan	Terwujudnya perencanaan dan anggaran yang konsisten dalam rangka menjawab permasalahan nasional dan daerah	Program Perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya	Tersedianya informasi dan dokumen pendukung dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	%	N/A	>80,00	Perencanaan	Bappeda
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Konsistensi perencanaan dan anggaran yang tertuang dalam APBD	%	N/A	>85,00	Otonomi Daerah	Bappeda, BPKAD

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah	Terselenggaranya forum dan atau musyawarah konsultasi publik yang efektif dan efisien	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	%	N/A	>50,00	Perencanaan	Bappeda
<b>Tujuan 2: Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tata kelola pemerintahan</b>										
4	Meningkatnya kualitas dan kinerja SKPD pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan standar kualitas pelayanan SKPD	Program Pengendalian Kebijakan Kepala daerah Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP	Indeks kategori	Baik	Sangat baik	Otonomi Daerah	Setda
						SKPD	N/A	100%	Otonomi Daerah	Setda

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Mewujudkan SOPD, SOTK yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kajian, rumusan & pelaksanaan perubahan SOPD dan SOTK serta Tupoksi Organisasi Pemerintah Daerah	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi	Kategori	Cukup	Baik	Otonomi Daerah	Setda
					Ketersediaan analisa jabatan dan evaluasi jabatan	Ada/tidak	N/A	ada	Otonomi Daerah	Setda
		Meningkatkan Fungsi Kontrol Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Meningkatkan Evaluasi terhadap Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat capaian Kinerja daerah	Kategori	CC	B	Otonomi Daerah	BKDD, Ortal, Setda

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Penyelenggaraan Sistem Internal yang intensif dan profesional	Peningkatan kualitas Sumber aparat Pengawas	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa	Cakupan yang mengikuti Diklat APIP telah mengikut Pengawasan	%	N/A	100%	Otonomi daerah	Inspektoral
			Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	temuan	kasus	N/A	0	Otonomi daerah	Inspektoral, BPKAD
					SKPD yang berindikasi penyimpangan administrasi/material	%	N/A	0,00	Otonomi daerah	Inspektoral, BPKAD

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pengelolaan keuangan Daerah serta optimalisasi pada opini BPK berkaitan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah  Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	5,34	7,50	Otonomi Daerah	BPKAD, Dispenda
					Opini hasil pemeriksaan BPK	Kategori / nilai	WDP	WTP	Otonomi Daerah	BPKAD, Setda

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Tujuan 3: Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan</b>										
8	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang konsisten	Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten.	Penyusunan Instrumen Pengawasan & Pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan Kecamatan telah memiliki Perda RD/TR	Jumlah Kecamatan	0	11	Tata Ruang	Bappeda
			Penyempurnaan tatacara perijinan dengan memperhatikan penataan ruang sebagai instrumen pengendalian	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	Rasio bangunan yang sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang	%	N/A	>50,00	Tata Ruang	BPM/PPT, Bappeda
				Program Penegakan Perda dan Perkada	Persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	%	N/A	>50,00	Tata Ruang	Bappeda, BPM/PPT dan Sat Pol PP

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Tujuan 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur</b>										
9	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur	Meningkatkan standar kualitas dalam proses rekrutmen/mutasi/Promosi dan pemberian studi bagi aparatur	Mengkaji, merumuskan, dan mengembangkan sistem dalam rekrutmen/mutasi/Promosi aparatur dan pemberian studi serta memperkuat pengawasan pelaksanaannya	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya analisa kebutuhan pegawai	Ada/tidak	N/A	ada	Otonomi daerah	BKDD, Ortal
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pegawai berpendidikan Doktoral (S3)	%	0,04	0,06	Otonomi daerah	BKDD, Ortal
					Persentase pegawai berpendidikan Master (S2)	%	1,84	>2,50	Otonomi daerah	BKDD, Ortal



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi	%	N/A	>75,00	Otonomi Daerah	BKDD, Ortal
					Persentase pejabat Struktural yang telah mengikuti uji kompetensi	%	94,67	100	Otonomi Daerah	BKDD
10	Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur	Meningkatkan kesempatan sumberdaya aparatur dalam meningkatkan kompetensi	Mengadakan pendidikan kompetensi dan kedinasan aparatur sesuai kebutuhan daerah	Program Pendidikan Kedinasan	Terpenuhiya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara sesuai dengan standar	%	N/A	>50,00	Otonomi Daerah	BKDD, Ortal

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana <sup>a</sup>
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pejabat struktural yang sudah mengikuti diklat PIM sesuai jenjangnya :	%			Otonomi Daerah	BKDD, Ortal
					Eselon IV;		31,4	70,00		
					Eselon III;		72,7	90,00		
					Eselon II;		90,0	100,00		

**Tabel 7.7**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketujuh:**

MISI 1 : Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Tujuan 1: Meningkatkan pengelolaan potensi SDA secara efektif</b>										
1	Tersedianya ketahanan pangan yang dinamis dan berkelanjutan	Meningkatkan pemberdayaan usahatani masyarakat	Peningkatan produktivitas usahatani komoditas pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	Peningkatan ketahanan pangan pertanian	Tingkat produktivitas tanaman padi	Ton/ha	3,68	4,25	Ketahanan pangan	Dinas Pertanian
					Tingkat produktivitas tanaman jagung	Ton/ha	4,10	4,50	Ketahanan pangan	Dinas Pertanian

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Tujuan 2: Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal</b>										
2	Tersedianya hasil kajian AMDAL pada program yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan SDA	Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berbasis lingkungan hidup	Terwujudnya proses pembangunan yang mengutamakan kajian lingkungan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rekomendasi dalam penyusunan RTRW	Ada/tidak	Ada	Ada	Lingkungan Hidup	Bappeda, dan Lingkungan Hidup
					Rekomendasi dalam penyusunan RPJMD	Ada/tidak	N/A	Ada	Lingkungan Hidup	Bappeda, dan Lingkungan Hidup
					Dokumen AMDAL pada proses perijinan untuk investasi sektor agroforestry dan pertambangan	Ada/tidak	N/A	Ada	Lingkungan Hidup	Bappeda, dan Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Melakukan pengendalian pada pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatnya pemulihan kerusakan lingkungan dan kualitas udara	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	212	600	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup, Dishutbun
				Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Tingkat emisi udara	%	N/A	<10	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
			Peningkatan ruang terbuka hijau	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas ruang terbuka hijau	Ha	3,10	12,00	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
4	Menurunnya resiko bencana akibat pemanfaatan SDA	Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana	Meningkatnya cakupan pelayanan mitigasi dan penanggulangan bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana	Kasus bencana banjir	kasus	7	<5	Otonomi Daerah	Kantor Lingkungan Hidup, BPBD

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran	Kasus bencana kebakaran Hutan dan lahan	kasus	12	<5	Otonomi Daerah	Kantor Lingkungan Hidup, BPBD
					Jumlah titik api	titik	35	<10	Otonomi Daerah	Kantor Lingkungan Hidup, BPBD

**Tabel 7.8**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedelapan**

MISI 8 : Menjadikan wilayah perbatasan Bengkulu sebagai daerah yang maju dan beranda depan NKRI

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<i>Tujuan 1: meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan</i>										
1	Terwujudnya program pembinaan/di klat bidang ekonomi bagi masyarakat perbatasan	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan	Tersedia sumberdaya manusia wilayah perbatasan yang memiliki kemampuan wirausaha	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan atau diklat yang dilaksanakan	jumlah	N/A	>5	Industri	Diskumindag
2	Meningkatnya program stimulus ekonomi masyarakat	Meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat perbatasan melalui program stimulus yang berasal dari pendanaan APBD dan APBN	Tersedianya perencanaan dan program yang mengarah pada pembangunan ekonomi perbatasan	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal	Program stimulus dari APBD	Program	N/A	>10	Otonomi	BPKAD, Badan Pengelola Perbatasan

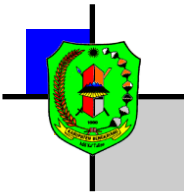
No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Program stimulus dari APBN	program	N/A	>10	Otonomi	BPKAD, Badan Pengelola Perbatasan
<b>Tujuan 2: menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan NKRI</b>										
3	Meningkatnya aksesibilitas wilayah perbatasan	Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan	Meningkatnya infrastruktur transportasi di wilayah perbatasan	Program peningkatan Akseibilitas Daerah Perbatasan	Cakupan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Perbatasan	%	N/A	>75	Pekerjaan Umum	Dinas PU, Badan Pengelola Perbatasan
4	Terwujudnya wilayah perbatasan sebagai daerah prioritas untuk program pembangunan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat	Meningkatnya sarana prasarana kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan	Terwujudnya pembangunan kebutuhan masyarakat perbatasan yang terpadu	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Cakupan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan pada pelayanan kesehatan	%	N/A	>80	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Badan pengelola Perbatasan



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Urusan	SKPD Pelaksana
							2015	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Cakupan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan pada pelayanan pendidikan	%	N/A	>80	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Badan Pengelola Perbatasan
					Cakupan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan pada air bersih	%	N/A	>50	Pekerjaan Umum	Dinas Pu dan Badan Pengelola Perbatasan
					Cakupan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan pada ketenagalistrikan	%	N/A	>50	Energi dan SDM	Dinas ESDM

# 8

## Indikasi Rencana Indikasi Rencana Program Prioritas Program Prioritas



## BAB VIII

### INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

---

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkayang berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8.1  
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN W 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PENDIDIKAN</b>														
Dinas Pendidikan														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	2.407.603.376,00	100%	1.973.000.000,00	100%	2.032.010.000,00	100%	2.087.719.100,00	100%	2.133.004.741,00	100%	2.152.769.161,25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	510.157.474,00	100%	825.500.000,00	100%	866.775.000,00	100%	910.113.750,00	100%	955.619.437,50	100%	1.003.400.409,38
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			25.000.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	157.500.000,00	100%	165.375.000,00	100%	173.643.750,00	100%	182.325.937,50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Laki SKPD oleh Inspektora/ Kemeripan		BAIK	118.389.600,00	BAIK	80.000.000,00	BAIK	84.000.000,00	BAIK	88.200.000,00	BAIK	92.610.000,00	BAIK	97.240.500,00
Program Penyeberluasan Informasi/ Pembangunan	Tertampilasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	2 Kegiatan	69.600.000,00	2 Kegiatan	75.000.000,00	2 Kegiatan	78.750.000,00	2 Kegiatan	82.687.500,00	2 Kegiatan	86.821.875,00	2 Kegiatan	91.162.968,75
Program Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan				82.885.000,00		85.000.000,00		89.250.000,00		93.712.500,00		98.398.125,00		103.318.031,25
Program Peningkatan Pengembangan dan Pendataan Aset Daerah	Terwujudnya Laporan Aset SKPD yang akurat setiap tahunnya	1	0		1 Laporan	250.000.000,00								
	APM PAUD	28,03%		3.190.482.500,00		3.950.000.000,00		4.000.000.000,00		4.050.000.000,00		4.100.000.000,00		4.150.000.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya Kuantitas Sarana PAUD di Kabupaten Bengkulu Tengah	162 Unit	4		6		4		4		4		4	
	Cakupan PAUD di setiap Desa	(62%) 76 Desa	64,52%		68,54%		76,61%		88,71%		96,77%		100,00%	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN # 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	0	3	155.648.000,00										
			2											
Program Pengelolaan Kebijakan Budaya	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				5	400.000.000,00	8	420.000.000,00	8	441.000.000,00	8	463.050.000,00	8	486.202.500,00
		5,97 Tahun	6	14.052.404.600,00	6,5	10.621.500.000,00	7	10.727.715.000,00	7,5	10.834.992.150,00	8,5	10.943.342.071,50	9,5	11.053.775.492,22
		91,42%	92		92,5		93		94			96		
		88,48	88,75		89,50		90,25		91,25		92,00		92,5	
		77,24%	78		79,00		79,50		80,00		80,50		81	
		49,25%	49,75		50,75		51,50		52,50		53,50		55,00	
		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		99,58%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		N/A	80%		80%		80%		80%		80%		80%	
		36,70%	>40		>40		>45		>45		>45		>50	
		28,80%	>30		>35		>40		>45		>45		>50	
Program Pendidikan Menengah	APK													
	SMA/SMK/MA/Paket C			2.381.689.000,00										
	APM													
	SMA/SMK/MA/Paket C													
APK	SMA/SMK/MA/Paket C													
APM	SMA/SMK/MA/Paket C													



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Menurunnya Angka Putus Sekolah Pendidikan Menengah								>20					
	Menurunnya Angka Putus Sekolah SMP													
	Persentase Peningkatan Angka Kelulusan Pendidikan Menengah													
	Persentase Peningkatan Angka Kelulusan Pendidikan Menengah													
	Kegiatan Keagamaan di Pendidikan Menengah													
	Meningkatnya Kuantitas Sarana Pendidikan Menengah di Kabupaten Bengkuluang													
	Kelengkapan Seni Budaya Yang Terbentuk	71 Sanggar	80	450.886.050,00	90	650.000.000,00	95	900.000.000,00	100	945.000.000,00	992.250.000,00	>100	1.041.862.500,00	
	Keterlibatan Kembangkan Seni Budaya yang terlibat pada even Seni dan Budaya	12	15		20		>20			>20				>20
	Jumlah Even Budaya yang dilaksanakan setiap tahunnya	4 Even Seni dan Budaya	4		4		4			4				4
	Persentase Sanggar yang dibina dan mendapatkan bantuan	N/A	5		5		16			16				16
Program Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Ujian Paket A, B, C	ada	ada	523.740.000,00	ada	260.000.000,00	ada	400.000.000,00	ada	420.000.000,00	ada	441.000.000,00	ada	463.050.000,00
	Meningkatnya Angka Melek Huruf	91,42%	92		92,5		93		94		95		96	
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Kepala Sekolah telah mengikuti Diklat Catep	N/A	40	3.698.619.100,00	40	3.690.000.000,00	40	3.700.000.000,00	40	3.700.000.000,00	40	3.700.000.000,00	40	3.800.000.000,00

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	TARGET KINERJA RPJMD 2016	DATA 5	TARGET KINERJA RPJMD 2017	DATA 7	TARGET KINERJA RPJMD 2018	DATA 9	TARGET KINERJA RPJMD 2019	DATA 11	TARGET KINERJA RPJMD 2020	DATA 13	TARGET KINERJA RPJMD 2021	DATA 15
Program Manajemen Pelayanaan Pendidikan	Jumlah Guru Honorer/ Kontrak yang memperoleh bantuan	244 Orang	244 Orang		244		244		244		244		244	
	Tingkat Sertifikasi Tenaga Pendidik	30,92%	>35		>35		>45		>45		>60		>70	
	Jumlah Sekolah SD yang telah mengacu pada Standar Pendidikan nasional			463.819.000,00		560.000.000,00		450.000.000,00		472.500.000,00		496.125.000,00		525.892.500,00
	Jumlah Sekolah SMP yang telah mengacu pada Standar Pendidikan nasional													
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Pelajar	Tersedianya Updating data base pendidikan setiap tahunnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Jumlah Even Olahraga bagi pelajar yang dilaksanakan		5	368.929.600,00	3	280.000.000,00	3,00	294.000.000,00		308.700.000,00		324.135.000,00		450.000.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Jumlah Mahasiswa Bkaya Pemuda yang terseleksi			181.815.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
	Termonitornya mahasiswa penerima beasiswa Pemda	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
<b>KESEHATAN</b>														
<b>DINAS KESEHATAN</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	8.519.291.720,00	100%	7.045.440.000,00	100%	7.226.596.408,00	100%	7.343.148.412,40	100%	7.389.717.871,40	100%	7.557.803.927,97
	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	9.593.014.100,00	100%	820.000.000,00	100%	861.000.000,00	100%	904.050.000,00	100%	949.252.500,00	100%	996.716.125,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Disiplin PNS													
	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%	404.000.000,00	100%	323.200.000,00	100%	339.360.000,00	100%	356.328.000,00	100%	374.144.400,00	100%	392.851.620,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2016	Target Kinerja RPJMD 2016	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAFA
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lajip SKPD oleh Inspektoral/Kemampuan	N/A	BAIK	341.000.000,00	BAIK	235.000.000,00	BAIK	246.750.000,00	BAIK	259.087.500,00	BAIK	272.041.875,00	BAIK	285.643.968,75
Program Penyebar Luasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyempulan Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	44.400.000,00	1 Kegiatan	48.840.000,00	1 Kegiatan	51.282.000,00	1 Kegiatan	53.846.100,00	1 Kegiatan	56.538.405,00	1 Kegiatan	59.365.325,25
Program Peningkatan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan	Terperluhinya Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	69,95%	70%	4.419.570.000,00	>75%	2.118.000.000,00	>75%	2.223.900.000,00	>80%	2.335.095.000,00	>80%	2.451.849.750,00	>80%	2.474.442.237,50
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Murid/Siswa Pada Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Screening Kesehatan	80%	83%	4.948.383.000,00	86%	507.600.000,00	89%	532.980.000,00	90%	559.629.000,00	90%	587.610.450,00	90%	616.990.972,50
	Total Fertility Rate (TFR)	0,00%	<50%		<45%		<40%		<35%		<30%		<25%	
	Angka Kelahiran Pada Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	N/A	<50		<45		<40		<35		<30		<25	
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah IRTP yang di Sedibiasi	N/A	34	109.000.000,00	34	110.000.000,00	34	115.000.000,00	34	120.000.000,00	34	125.000.000,00	34	130.000.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase RT PHBS	40%	41,48%	610.000.000,00	45,92%	925.000.000,00	50,35%	971.250.000,00	54,79%	971.250.000,00	59,22%	1.021.250.000,00	63,66%	1.072.312.500,00
	Jumlah RT yang mendapat penyuluhan/ Pembinaan langsung dari tenaga kesehatan	N/A	680 RT (17 Kecamatan)		2040 RT (17 Kecamatan)	2040 RT (17 Kecamatan)	2040 RT (17 Kecamatan)	2040 RT (17 Kecamatan)	2040 RT (17 Kecamatan)	2040 RT (17 Kecamatan)	2040 RT (17 Kecamatan)	2040 RT (17 Kecamatan)	2040 RT (17 Kecamatan)	2040 RT (17 Kecamatan)
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Kejadian Gizi Buruk	16	6	255.000.000,00	0	525.000.000,00	0	150.000.000,00	0	157.500.000,00	0	165.375.000,00	0	175.297.500,00
	Kegiatan Penyuluhan/Pembinaan/ Sosialisasi terkait Pengentasan Gizi Buruk di masyarakat	N/A	1 Kegiatan		7 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	Cakupan Penanganan Pasien Gizi Buruk		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PEKERJAAN N 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DATA	Target Kinerja RPJMD 2017	DATA	Target Kinerja RPJMD 2018	DATA	Target Kinerja RPJMD 2019	DATA	Target Kinerja RPJMD 2020	DATA	Target Kinerja RPJMD 2021	DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase KT yang Memiliki Jamban	N/A	>50	140.000.000,00	>50	715.498.000,00	>50	185.498.000,00	>75	194.772.900,00	>75	204.511.545,00	>75	214.737.122,25
	Persentase KT yang Memiliki Sarana Air Minum yang layak	N/A	>50		>50		>50		>75		>75		>75	
	Jumlah Kegiatan, Penyuluhan, Sosialisasi, Pembinaan, Pemecutan Pengembangan Lingkungan Sehat	N/A	2 kegiatan		3		2		2		2		2	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular	1	0	714.000.000,00	0	780.000.000,00	0	819.000.000,00	0	859.950.000,00	0	902.947.500,00	0	948.094.875,00
	Menurunnya Kasus DISD	20 Kasus	<10		<10		<10		<10		<10		<10	
	Menurunnya Kasus Hepatitis	2	0		0		0		0		0		0	
	Menurunnya Kasus Malaria (AP) / 1000 Penduduk	0,5	<1		<1		<1		<1		<1		<1	
	Persentase Kesembuhan TB Paru	99%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Puskesmas Terakreditasi	0	2	6.719.080.000,00	5	6.333.000.000,00	3	6.364.665.000,00	3	6.396.488.325,00	2	6.396.488.325,00	2	5.423.470.766,63
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jeringannya	Jumlah Puskesmas BLUD	0	0		2		7		12		17		17	
	Cakupan Sarana dan prasarana Puskesmas telah sesuai Standar	3	4	19.155.377.000,00	3	29.186.031.000,00	3	28.543.123.682,00	2	27.927.500.000,00	0	7.316.550.000,00	2	6.977.514.100,00
	Tersedianya Gedung Farmasi Yang memenuhi Standar	1	1		-		-		-		-		-	
	Meningkatnya jumlah Puskesmas Pembantu	70 Unit	5		3		2		10		5		5	
Program peningkatan dan pengembangan sumber daya masyarakat	Jumlah Mahasiswa Beasiswa Pemda yang terseleksi			140.000.000,00				154.350.000,00		160.524.000,00		168.550.200,00		185.405.220,00
	Persentase Mahasiswa Beasiswa Utusan daerah yang di Monitoring	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

PROGRAM	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAMA	
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86,92%	>90%	2.657.214.720,00	>90%	755.391.000,00	>90%	782.944.910,00	790.774.359,10	>95%	798.682.102,69	>95%	806.668.923,72	
	Angka Kematian Ibu/100.000 KH	105,11	<100		<75	<50			<25	<25		<25		
	Angka Kematian Bayi/1.000 KH	10,1	<10		<5	<5			<5	<5		<5		
	Jumlah Kegiatan Pertemuan/Sosialisasi/Pembinaan/Penyuluhan terkait Penanggulangan kasus Kematian pada bayi dan Ibu	N/A	2 Kegiatan		6 Kegiatan	6 Kegiatan			6 Kegiatan	6 Kegiatan		6 Kegiatan	6 Kegiatan	
Program Immunisasi	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization(UCI)	61,29%	62,96%	354.000.000,00	64,50%	385.000.000,00	66,13%	392.700.000,00	400.554.000,00	70,97%	408.565.080,00	73,39%	416.736.381,60	
	Cakupan Kunjungan Bayi	100%	100%		100%	100%			100%	100%		100%		
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Balita Gizi Buruk/1000 Balita	0,58	<1	176.000.000,00	<1			176.000.000,00	183.040.000,00	<1	192.192.000,00	<1	201.801.600,00	
	Persentase Puskesmas yang melaporkan data Kesehatan Secara Lengkap dan Tepat waktu	50%	75%	67.000.000,00	75%	85.000.000,00	80%	85.000.000,00	85.000.000,00	90%	90.000.000,00	100%	95.000.000,00	
Program Pengadaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Cakupan Alkes Di Puskesmas sesuai standar	70%	73%	6.453.530.000,00	74%					78%		80%		
	Meningkatnya Jumlah Rumah Sakit	2 Unit	0		0	0			0	1 Unit	30.000.000.000,00			
Program Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan masyarakat	Cakupan Penduduk Miskin Memperoleh Penanganan Kesehatan	N/A		3.251.194.180,00		6.320.000.000,00		6.636.000.000,00	6.967.800.000,00		7.316.190.000,00		7.581.999.500,00	
	Jumlah Masyarakat Miskin yang diakomodir dalam Program Layanan BPJS (Konversi Jambesda ke BPJS Daerah)	0	0		2500 orang	2500 orang			2500 orang		1250 orang		1250 orang	



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RSUD														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	4.265.877.004,00	100%	3.747.800.000,00	100%	3.936.355.000,00	100%	4.125.190.000,00	100%	4.306.265.000,00	100%	4.399.725.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	323.446.000,00	100%	370.000.000,00	100%	388.500.000,00	100%	407.900.000,00	100%	428.290.000,00	100%	449.704.300,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS					300.000.000,00				300.000.000,00				300.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%	499.761.000,00	100%	300.000.000,00	100%	315.000.000,00	100%	330.750.000,00	100%	347.280.000,00	100%	364.644.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Laki-laki SKPD oleh Inspektorat/Kemampuan	N/A	BAIK	73.654.000,00	BAIK	75.900.000,00	BAIK	79.695.000,00	BAIK	83.600.000,00	BAIK	87.780.000,00	BAIK	92.169.000,00
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyempalan Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19.852.000,00	1 Kegiatan	20.000.000,00	1 Kegiatan	21.000.000,00	1 Kegiatan	22.000.000,00	1 Kegiatan	23.100.000,00	1 Kegiatan	24.255.000,00
Program Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Meningkatnya Standardisasi Rumah Sakit	Tipe D	D	424.275.000,00	D	660.050.000,00	C	300.000.000,00	C	330.000.000,00	C	350.000.000,00	C	350.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS/RS	Menurunnya Jumlah Pasien yang dirujuk tahun sebelumnya	N/A	15% (Dari Jumlah Pasien yang dirujuk tahun sebelumnya)		15% (Dari Jumlah Pasien yang dirujuk tahun sebelumnya)		15% (Dari Jumlah Pasien yang dirujuk tahun sebelumnya)		25% (Dari Jumlah Pasien yang dirujuk tahun sebelumnya)		50% (Dari Jumlah Pasien yang dirujuk tahun sebelumnya)		75% (Dari Jumlah Pasien yang dirujuk tahun sebelumnya)	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS/RS	Cakupan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai Standar	N/A	75%	18.784.359.000,00	85%	26.269.250.000,00	87%	16.750.000.000,00	89%	16.917.500.000,00	92%	17.086.675.000,00	95%	17.500.000.000,00
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS/RS	Cakupan Ketersediaan Alat Kesehatan/ Medis Sexual Standar	N/A	70%		72%		74%		76%		78%		80%	
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS/RS	Cakupan Kondisi Bangunan Rumah Sakit yang layak	N/A	95%	406.469.995,00	95%	748.000.000,00	95%	400.000.000,00	95%	300.000.000,00	95%	330.000.000,00	95%	350.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAMA
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terpenuhiya Standar Minimal Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis untuk Tipe C RSUD Kab. Bengkuluang		100%	1.568.323.000,00	100%	1.600.000.000,00	100%	1.680.000.000,00	100%	1.764.000.000,00	100%	1.852.175.000,00	100%	1.944.783.750,00
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)	Cakupan JPKM bagi Masyarakat Miskin					8.464.000.000,00		8.887.200.000,00		9.331.560.000,00		9.331.560.000,00		9.400.000.000,00
<b>PEKERJAAN UMUM</b>														
Dinas Pekerjaan Umum						3.175.900.000,00								
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	3.107.032.163,00	100%	2.324.800.000,00	100%	2.441.040.000,00	100%	2.563.092.000,00	100%	2.691.246.600,00	100%	2.825.808.880,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	377.020.000,00	100%	460.000.000,00	100%	483.000.000,00	100%	507.150.000,00	100%	532.507.500,00	100%	559.132.875,00
Program Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin PNS													
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidangya	100%	100%	275.993.000,00	100%	220.000.000,00	100%	231.000.000,00	100%	242.550.000,00	100%	254.877.500,00	100%	267.411.375,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lelip SKPD oleh Inspektoral/Kemampuan	N/A	BAIK	217.690.216,00	BAIK	165.000.000,00	BAIK	173.250.000,00	BAIK	181.912.500,00	BAIK	191.008.125,00	BAIK	200.558.531,25
Program Penyebarnya Informasi Pembangunan	Terfaedahnya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	163.000.000,00	2 Kegiatan	115.000.000,00	2 Kegiatan	120.750.000,00	2 Kegiatan	126.787.500,00	2 Kegiatan	133.126.875,00	2 Kegiatan	139.783.218,75
Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan														
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				33.862.868.142,00		7.400.000.000,00								
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan	Rasio Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik + Sedang	49,9% (638,72 KM dari 1280 KM)	54%	4.114.139.859,00	58,5	950.000.000,00	63,19	1.045.000.000,00	67,87	750.000.000,00	72,17	750.000.000,00	76,08	750.000.000,00
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tersedianya Updating Data Kondisi Jalan Jembatan	N/A					ada	200.000.000,00	ada	100.000.000,00	ada	100.000.000,00	ada	100.000.000,00



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Bertambahnya panjang jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik + Sedang	647 KM	50 KM	79.174.136.851,00	60 KM	102.020.000.000,00	60 KM	122.144.000.000,00	60KM	125.222.600.000,00	40KM	100.000.000.000,00	50KM	116.000.000.000,00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Corong-gorong	Panjang Drainase Yang terbangun	N/A	100	816.407.200,00	200	720.000.000,00	200	792.000.000,00	200	871.200.000,00	200	914.760.000,00	230	960.498.000,00
Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak layak huni (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)	N/A	100	1.500.000.000,00	200	3.500.000.000,00	200	3.500.000.000,00	200	3.500.000.000,00	200	3.500.000.000,00	230	3.850.000.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jaringan Pengairan (irigasi) dalam Kondisi Baik	38% (4.144 Ha dari 10.945 Ha)	>45%	17.556.499.320,00	>50%	16.650.000.000,00	>56%	18.315.000.000,00	>62%	18.772.875.000,00	>66%	15.242.196.875,00	>70%	15.623.251.796,88
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Cakupan Desa yang telah memiliki Sarana Air Bersih	28,27%	35%	14.553.854.000,00	38%	2.050.000.000,00	40%	3.000.000.000,00	45%	3.300.000.000,00	47%	3.630.000.000,00	50%	3.993.000.000,00
Program Pengendalian Banjir	Berkurangnya kasus Banjir	7	<5	1.389.571.500,00	<5	1.350.000.000,00	<5	1.000.000.000,00	<5	1.100.000.000,00	<5	950.000.000,00	<5	1.043.000.000,00
Program Peningkatan Kemiskinan Perkotaan	Terfasilitasinya Program P2KP	100%	100%	94.300.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Terfasilitasinya Program PAMSIMAS	100%	100%	128.800.000,00	100%	200.000.000,00	100%	220.000.000,00	100%	231.000.000,00	100%	242.550.000,00	100%	254.677.500,00
Program Lingkungan Sehat	Jumlah Rumah Tangga yang diberikan Bantuan Fasilitas Sanitasi Dasar (Stimulan)	N/A	400	2.730.910.000,00	300	1.500.000.000,00	300	1.500.000.000,00	200	1.000.000.000,00	200	1.000.000.000,00	200	1.000.000.000,00
Program peningkatan kesadaran dan pencegahan bahaya kebakaran	Berkurangnya Kasus Bencana Kebakaran	12	<5	238.675.000,00	<5	385.200.000,00	<5	423.720.000,00	<5	300.000.000,00	<5	330.000.000,00	<5	363.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Berkurangnya Jumlah Titik Api	35	<30		<25		<20		<15		<15		<15	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Temptuhnya operasional keberanian	100%	100%	1.207.936.500,00	100%	3.040.000.000,00	100%	3.344.000.000,00	100%	3.511.200.000,00	100%	3.411.200.000,00	100%	3.581.760.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	11 Unit	4 Unit	418.865.000,00	4 Unit	2.750.000.000,00	5 Unit	3.000.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA	DAMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Kondisi Alat Berat dalam Kondisi Baik (Perawatan/ Service alat berat)	51,55%	<2%		81,82%	1.000.000.000,00	>85%	5.000.000.000,00	>85%		>85%		>85%		
	Cakupan Sediaan Kawasan Olahraga yang telah Terimplementasikan	<2%	<2%				>3%		>3%		>3%		>3%		
	Tersedianya Perencanaan Teknis Kawasan Olahraga				1 Dok Perencanaan Teknis										
Program Perencanaan Bidang Kehumasan	Jumlah Perencanaan Ruas Jalan Kabupaten yang dilakukan (Full Design)	N/A			6 Dokumen Perencanaan	6.000.000.000,00	5 Dokumen Perencanaan	3.000.000.000,00							
Program Perencanaan Bidang KeCiptakeayaan	Jumlah Kajian/ Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	N/A			1 Kajian (RISPAH)	400.000.000,00	1 Dok. Tidak Lajut RISPAH	250.000.000,00							
<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>															
<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	1.715.018.419,00	100%	1.124.200.000,00	100%	1.180.846.500,00	100%	1.223.988.825,00	100%	1.243.688.266,25	100%	1.281.872.679,56	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	278.010.000,00	100%	285.750.000,00	100%	300.037.500,00	100%	315.039.375,00	100%	330.791.343,75	100%	347.330.910,94	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			52.200.000,00											
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%	236.068.581,00	100%	100.000.000,00	100%	105.000.000,00	100%	110.250.000,00	100%	115.702.500,00	100%	121.850.625,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lajip SKPD oleh Inspektorat/ Kemempaan	N/A	BAIK	75.000.000,00	BAIK	123.920.000,00	BAIK	130.116.000,00	BAIK	136.621.800,00	BAIK	143.452.800,00	BAIK	150.625.534,50	
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfaasilitasnya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	72.000.000,00	1 Kegiatan	40.000.000,00	1 Kegiatan	42.000.000,00	1 Kegiatan	44.100.000,00	1 Kegiatan	46.305.000,00	1 Kegiatan	48.620.250,00	
Program Peringatan Hari-hari besar Nasional dan Keagamaan															



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020		DANA	Target Kinerja RPJMD 2021		DANA	
											12	13		14	15		
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya Dokumen Statistik Daerah	100%	1 Dok KDA	345.773.000,00	1 Dok KDA	658.750.000,00	1	910.000.000,00	1	570.000.000,00	1	1	570.000.000,00	1	1	575.000.000,00	
			100%			100%			100%			100%					
						1 Aplikasi											
Program Kerjasama Pembangunan	Tersedianya Sistem Informasi Geospasial	100%	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100%	100.000.000,00	100%	100%	100.000.000,00	
						1 Dok	850.000.000,00	1 Dok	500.000.000,00	1 Dok	400.000.000,00	1 Dok	350.000.000,00	1 Dok	350.000.000,00	1 Dok	500.000.000,00
Program Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Dokumen Kajian/Perencanaan yang tersusun	N/A			>75%		>90%		>95%		>95%		>95%		>95%		
						3 Dok	920.000.000,00	3 Dok	1.012.000.000,00	4 Dok	1.350.000.000,00	4 Dok	1.050.000.000,00	4 Dok	1.050.000.000,00		
						8 laporan		8 laporan		8 laporan		8 laporan		8 laporan		8 laporan	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan yang tersusun	8 laporan	4 Dok	1.500.000.000,00	3 Dok	920.000.000,00	3 Dok	1.012.000.000,00	4 Dok	1.350.000.000,00	3 Dok	3 Dok	1.050.000.000,00	4 Dok	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	
						8 laporan		8 laporan		8 laporan		8 laporan		8 laporan		8 laporan	
						>85		>85		>85		>85		>85		>85	
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Program RPJMD tertuang didalam RKPD	N/A	>80		>80		>80		>80		>80		>80		>80		
						2 Perda	1.225.000.000,00	2 Perda	1.850.000.000,00	3 Perda	1.625.000.000,00	2 Perda	2 Perda	1.575.000.000,00	2 Perda	2 Perda	1.850.000.000,00
						1 Dok		1 Dok		2 Dok		3 Dok		3 Dok		3 Dok	
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Dokumen Kajian/Perencanaan bidang ekonomi yang tersusun	N/A	5 Dok	1.087.850.000,00	1 Dok	1.017.380.000,00	3 Dok	1.020.000.000,00	3 Dok	950.000.000,00	3 Dok	3 Dok	1.250.000.000,00	3 Dok	3 Dok	1.250.000.000,00	
						2 Dok	1.450.000.000,00	3 Dok	1.250.000.000,00	3 Dok	1.050.000.000,00	3 Dok	3 Dok	1.250.000.000,00	3 Dok	3 Dok	1.300.000.000,00
						100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Program Perencanaan Sosial Budaya	Dokumen Kajian/Perencanaan bidang Sosial Budaya yang tersusun	N/A	4 Dok	1.300.000.000,00	2 Dok	1.450.000.000,00	3 Dok	1.250.000.000,00	3 Dok	1.050.000.000,00	3 Dok	3 Dok	1.250.000.000,00	3 Dok	3 Dok	1.300.000.000,00	
						100%		100%		100%		100%		100%		100%	
						Program PAMSIMAS		Program PAMSIMAS		Program PAMSIMAS		Program PAMSIMAS		Program PAMSIMAS		Program PAMSIMAS	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAFA
1	Program Perencanaan Prasana Wilayah dan Sumber Daya Alam	N/A		150.000.000,00	1 Dok	800.000.000,00	1 Dok	350.000.000,00	1 Dok	275.000.000,00	1 Dok	275.000.000,00	1 Dok	300.000.000,00
	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Persebaran		300.000.000,00	1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok	150.000.000,00	1 Perda	250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	N/A			1 Dok	500.000.000,00	1 Dok	500.000.000,00	1 Dok	300.000.000,00	1 Dok	300.000.000,00		300.000.000,00
	Program Penelitian dan Pengembangan	N/A	3 Dok	653.100.000,00	2 Dok	455.000.000,00	2 Dok	500.000.000,00	2 Dok	750.000.000,00	2 Dok	600.000.000,00	2 Dok	500.000.000,00
<b>PERHUBUNGAN</b>														
<b>Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>														
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.462.319.414,00	100%	949.400.000,00	100%	997.170.000,00	100%	1.020.316.000,00	100%	1.066.601.500,00	100%	1.119.000.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	556.451.200,00	100%	354.181.000,00	100%	371.890.000,00	100%	390.484.500,00	100%	410.000.000,00	100%	407.896.000,00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			133.610.000,00										
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	124.000.000,00	100%	125.000.000,00	100%	131.250.000,00	100%	137.812.500,00	100%	144.700.000,00	100%	151.935.000,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	N/A	BAIK	57.121.155,00	BAIK	75.419.000,00	BAIK	79.190.000,00	BAIK	83.149.500,00	BAIK	87.306.000,00	BAIK	91.670.000,00
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	35.680.000,00	1 Kegiatan	35.000.000,00	1 Kegiatan	36.750.000,00	1 Kegiatan	38.587.500,00	1 Kegiatan	40.510.000,00	1 Kegiatan	42.535.000,00
	Program Peningkatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan													



PROGRAM	INDIKATOR KUNERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya Dokumen Kajian/Perencanaan Bidang Perhubungan Tersedianya Pemutakhiran database perhubungan setiap tahunnya	3 IS, 1 Dok Perencanaan Teknis	ada	1.226.922.358,00	2 Dok Perencanaan Teknis Terminal	941.000.000,00	ada	150.000.000,00	ada	175.000.000,00	ada	100.000.000,00	ada	125.000.000,00
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang terbangun	14 Unit Steker, 4 Unit Halte	ada	2.381.533.623,00	2 Unit	700.000.000,00	1 Terminal	3.200.000.000,00	1 Unit Terminal 5 Unit Prasarana	5.520.000.000,00	5 Unit	500.000.000,00	1 Terminal	5.520.000.000,00
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Menurunnya kasus Kecelakaan Lalu Lintas	136 kasus	<100	1.165.805.500,00	<75	1.412.000.000,00	<60	955.000.000,00	<55	1.002.750.000,00	<50	1.052.887.500,00	<40	750.150.000,00
Program Peningkatan Keahlian Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Ketersediaan Sarana Uji Keahlian Pengoperasian Kendaraan Bermotor	0 Unit	0%	-	1 Unit	5.833.000.000,00	0%	1.000.000.000,00	85%	750.000.000,00	90%	750.000.000,00	100%	1.000.000.000,00
Program Pembinaan Pos dan Telekomunikasi	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Media Center	100%	100%	85.075.000,00	100%	75.000.000,00	100%	78.750.000,00	100%	81.900.000,00	100%	85.995.000,00	100%	89.434.000,00
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>														
Kantor Lingkungan Hidup														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	937.094.500,00	100%	678.500.000,00	100%	712.425.000,00	100%	753.077.500,00	100%	772.681.375,00	100%	780.210.443,75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	178.225.500,00	100%	192.500.000,00	100%	202.125.000,00	100%	212.200.000,00	100%	222.810.000,00	100%	233.950.500,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			9.000.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi sesuai Bidangnyanya	100%	100%	116.763.000,00	100%	80.000.000,00	100%	84.600.000,00	100%	88.830.000,00	100%	93.271.500,00	100%	97.935.075,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lapik SKPD oleh Inspektorat/ Kemempnan	N/A	BAIK	50.000.000,00	BAIK	42.000.000,00	BAIK	44.100.000,00	BAIK	46.305.000,00	BAIK	48.630.250,00	BAIK	51.051.262,50

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		DAMA
			Target Kinerja RPJMD	DAMA	Target Kinerja RPJMD	DAMA	Target Kinerja RPJMD	DAMA	Target Kinerja RPJMD	DAMA	Target Kinerja RPJMD	DAMA	Target Kinerja RPJMD	DAMA	
Program Perluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyempaiannya Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	22.734.000,00	1 Kegiatan	35.000.000,00	1 Kegiatan	36.750.000,00	1 Kegiatan	38.587.500,00	1 Kegiatan	40.516.875,00	1 Kegiatan	42.542.718,75	
Program Peringatan Hari-hari besar Nasional dan Kesagamaan															
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Uji Kualitas Air pada beberapa sampel Terlaksananya Pengukuran Emisi dari Sumber Udalak Bergerak	21 sampel Sungai dan 1 Sumber PDAM	21 Sungai dan 1 Sumber PDAM	789.856.000,00	21 Sungai dan 1 Sumber PDAM	885.000.000,00	21 Sungai dan 1 Sumber PDAM	900.000.000,00	21 Sungai dan 1 Sumber PDAM	925.000.000,00	21 Sungai dan 1 Sumber PDAM	950.000.000,00	21 Sungai dan 1 Sumber PDAM	975.000.000,00	
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luasan lahan Kritis yang direhabilitasi	212 Ha	100	370.982.000,00	100 Ha Sempadan Sungai, 4 Ha Sempadan Pantai, 2 Ha Penghijauan Lahan Eks Peti	965.000.000,00	100 Ha Sempadan Sungai, 4 Ha Sempadan Pantai, 2 Ha Penghijauan Lahan Eks Peti	1.050.000.000,00	100 Ha Sempadan Sungai, 4 Ha Sempadan Pantai, 2 Ha Penghijauan Lahan Eks Peti	1.100.000.000,00	100 Ha Sempadan Sungai, 4 Ha Sempadan Pantai, 2 Ha Penghijauan Lahan Eks Peti	1.150.000.000,00	100 Ha Sempadan Sungai, 4 Ha Sempadan Pantai, 2 Ha Penghijauan Lahan Eks Peti	1.200.000.000,00	
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam	Ketersediaan Dokumen Kajian Lingkungan dalam Proses Pembangunan Ketersediaan Updatling Data Kondisi Lingkungan Hidup	N/A	2 Dok	679.599.000,00	1 Dok	100.000.000,00	3	455.000.000,00	2	426.000.000,00	2	434.520.000,00	3	477.972.000,00	
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Tingkat Emisi Udara	N/A	<10	129.120.000,00	<10	120.000.000,00	<10	130.000.000,00	<10	150.000.000,00	<10	150.000.000,00	<10	160.000.000,00	
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Juas RTH yang dibangun Tertata dan Terpelihara RTH di Reb. Bengkuluang	3,1 Ha		16.625.000,00	2	202.000.000,00	2	400.000.000,00	2	450.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	
Program Penilaian Lingkungan Hidup		N/A				300.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>															
<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	1.353.549.100,00	100%	1.027.800.000,00	100%	1.079.190.000,00	100%	1.125.649.500,00	100%	1.181.931.975,00	100%	1.202.778.573,75	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	1.015.196.000,00	100%	210.000.000,00	100%	220.500.000,00	100%	231.535.000,00	100%	243.101.250,00	100%	255.256.312,50	



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN N 2016	Target Kinerja RPJMD 2016	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAFA
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			21.700.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%	57.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	63.000.000,00	100%	66.150.000,00	100%	69.457.500,00	100%	72.930.375,00
Program Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lelip SKPD oleh Inspektorat/ Kemempaan	N/A	BAIK	41.307.000,00	BAIK	45.000.000,00	BAIK	47.250.000,00	BAIK	49.612.500,00	BAIK	52.093.125,00	BAIK	54.697.781,25
Program Penyederhanaan Informasi Pembangunan	Terfasilitasnya Penyempulan Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	29.360.300,00	1 Kegiatan	35.000.000,00	1 Kegiatan	36.750.000,00	1 Kegiatan	38.587.500,00	1 Kegiatan	40.516.875,00	1 Kegiatan	42.542.718,75
Program Peringatan Hari-hari besar Nasional dan Kegemasaan														
Program Penataan Administrasi Kependudukan				286.625.400,00		275.000.000,00		288.750.000,00		303.187.500,00		318.346.875,00		334.264.218,75
Program Penerapan KTP Elektronik				360.808.400,00		362.400.000,00		380.520.000,00		399.546.000,00		419.523.300,00		440.499.465,00
Program Penataan Data dan Pelaporan Kependudukan				726.286.400,00		618.500.000,00		649.425.000,00		681.896.250,00		715.991.062,50		751.790.615,63
Program Penataan Penetapan Sipil				608.167.400,00		366.300.000,00		384.615.000,00		403.846.750,00		424.038.037,50		445.239.639,38
<b>BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>														
<b>Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	1.183.649.000,00	100%	609.500.000,00	100%	639.975.000,00	100%	648.168.750,00	100%	654.467.187,50	100%	687.190.546,88
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	811.185.000,00	100%	189.500.000,00	100%	198.975.000,00	100%	200.000.000,00	100%	208.923.750,00	100%	219.369.937,50
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			25.600.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%	71.820.000,00	100%	60.000.000,00	100%	63.000.000,00	100%	66.150.000,00	100%	69.457.500,00	100%	72.930.375,00

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		DAWA
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LKIP SKPD oleh Inspektoral/Kemampuan	N/A	BAIK	41.504.000,00	BAIK	68.500.000,00	71.925.000,00	BAIK	73.250.000,00	76.000.000,00	BAIK	79.800.000,00	BAIK	79.800.000,00	
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pemeliharaan	Tertulisannya Penyempakan Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	52.000.000,00	1 Kegiatan	35.000.000,00	36.750.000,00	1 Kegiatan	38.587.500,00	40.516.875,00	1 Kegiatan	42.542.718,75	1 Kegiatan	42.542.718,75	
Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan															
Program Optimalisasi Penataan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Barang SKPD Persementer	2 Laporan	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	20.000.000,00	2	20.000.000,00	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	
Program Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB aktif	68,93%	70	503.960.000,00	75	610.000.000,00	640.500.000,00	80	672.525.000,00	640.500.000,00	90	672.525.000,00	>90	672.525.000,00	
Program Kesehatan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender Perempuan	65%	65,2	414.200.000,00	65,3	220.000.000,00	231.000.000,00	65,3	242.550.000,00	254.677.500,00	65,35	267.411.375,00	65,4	267.411.375,00	
Program Penguatan Kemandirian Perempuan dan Anak	Cakupan Peningkatan Pengaduan Tindak Kekerasan Atas Perempuan dan Anak oleh Unit Layanan Terpadu	100%	100%	225.800.000,00	100%	155.000.000,00	162.750.000,00	100%	170.887.500,00	179.431.875,00	100%	188.403.468,75	100%	188.403.468,75	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Menurunnya Kasus Kekerasan Atas Anak	10	<5	60.000.000,00	<5	140.000.000,00	147.000.000,00	<5	154.350.000,00	162.067.500,00	<5	170.170.875,00	<5	170.170.875,00	
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	Menurunnya Kasus Kekerasan Atas Perempuan	7	<4		<4			<4			<4		<4		
Program Pengembangan dan Konseling KKR	Jumlah Kunjungan konseling	N/A		81.000.000,00			80.000.000,00		80.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	1 Kegiatan	80.000.000,00	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bagi Remaja	N/A	1 Kegiatan					1 Kegiatan			1 Kegiatan		1 Kegiatan		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	N/A		2.351.125.000,00		635.000.000,00	666.750.000,00		700.087.500,00	735.091.875,00		771.846.468,75		771.846.468,75	



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAFA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAFA
Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan Serta Kelengkapan Sarana kerja penyuluhan	Meningkatnya Kapasitas Penyuluh KB	100%	100%	279.500.000,00	100%	293.475.000,00	100%	293.475.000,00	100%	308.148.750,00	100%	323.856.187,50	100%	339.733.996,88
Program Peningkatan sarana dan prasarana fisik pelayanan komunikasi informasi dan edukasi Program KB				798.000.000,00		537.900.000,00		564.000.000,00		592.200.000,00		621.810.000,00		621.810.000,00
Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	N/A	100%	200.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	220.500.000,00	100%	231.525.000,00	100%	243.101.250,00	100%	243.101.250,00
<b>SOSIAL</b>														
<b>Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	1.025.583.000,00	100%	648.000.000,00	100%	648.000.000,00	100%	714.420.000,00	100%	750.141.000,00	100%	770.383.750,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	405.840.000,00	100%	205.000.000,00	100%	213.750.000,00	100%	224.325.000,00	100%	232.541.250,00	100%	240.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			60.000.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidangny	100%	100%	45.700.000,00	100%	70.000.000,00	100%	73.500.000,00	100%	77.175.000,00	100%	81.033.750,00	100%	85.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lakiip SKPD oleh Inspektori/Kemampuan	N/A	BAIK	51.343.000,00	BAIK	42.000.000,00	BAIK	44.100.000,00	BAIK	46.305.000,00	BAIK	48.620.250,00	BAIK	51.000.000,00
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasnya Penyampaian Informasi Pembangunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	34.200.000,00	1 Kegiatan	36.750.000,00	1 Kegiatan	38.587.500,00	1 Kegiatan	40.516.875,00	1 Kegiatan	42.500.000,00	1 Kegiatan	42.500.000,00
Program Peningkatan Hari-Hari Besar Nasional dan Kengamaan				69.760.000,00		78.750.000,00		82.687.500,00		86.821.875,00		91.000.000,00		91.000.000,00
Program Pembinaan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Persentase Penyandang Cacat yang memperoleh Pembinaan	N/A	20%	61.875.000,00	30%	200.000.000,00	40%	210.000.000,00	50%	220.500.000,00	65%	231.525.000,00	80%	243.101.250,00

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
1	Program pembinaan Eks penyandang penyakit Sosial(Eks Napi, Narkoba dan Penyakit lainnya)	N/A		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00
2	Persentase Penyandang Penyakit Sosial Pembinaan	N/A		231.000.000,00	20 orang	231.000.000,00	50	231.000.000,00	50	231.000.000,00	50	231.000.000,00	30	266.805.000,00
3	Jumlah Keluarga Fakir Miskin, KAT, PMKS	N/A	ada		ada								ada	
4	Persentase Data PMKS, KAT	N/A	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	60.000.000,00
5	Ketersediaan Layanan Informasi Ketenagakerjaan	N/A	100%	210.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	242.550.000,00
6	Terfasilitasi Program Transmigrasi di daerah	100%	100%	231.734.000,00	100%	231.734.000,00	100%	231.734.000,00	100%	231.734.000,00	100%	231.734.000,00	100%	242.550.000,00
7	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	N/A	20 Orang	185.000.000,00	30	185.000.000,00	30	185.000.000,00	40	204.000.000,00	40	214.200.000,00	40	224.910.000,00
8	Terlaksananya Pelatihan Bagi Pencari Kerja	N/A	ada	420.000.000,00	ada	420.000.000,00	ada	420.000.000,00	ada	420.000.000,00	ada	420.000.000,00	ada	332.750.000,00
9	Sosialisasi aturan Ketenagakerjaan	ada	ada	304.191.900,00	ada	304.191.900,00	ada	304.191.900,00	ada	304.191.900,00	ada	304.191.900,00	ada	332.750.000,00
10	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	ada	ada	86.320.000,00	100%	86.320.000,00	100%	86.320.000,00	100%	110.000.000,00	100%	121.000.000,00	100%	133.100.000,00
11	Program Pemberdayaan Kelenbagaan Kesejahteraan Sosial	100% (92 Orang)	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	500.000.000,00
12	Persentase Anak Terhantar yang memperoleh Pembinaan	N/A	20%	422.298.800,00	30%	422.298.800,00	40%	400.000.000,00	50%	500.000.000,00	65%	500.000.000,00	80%	500.000.000,00
<b>DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>														
13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.179.335.050,00	100%	844.625.000,00	100%	844.625.000,00	100%	910.000.000,00	100%	939.035.000,00	100%	985.200.000,00
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	224.259.230,00	100%	158.500.000,00	100%	158.500.000,00	100%	174.000.000,00	100%	182.700.000,00	100%	191.777.500,00
15	Program peningkatan disiplin aparatur			2.310.000,00										
16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	59.440.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	52.500.000,00	100%	57.000.000,00	100%	59.850.000,00
17	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidangny	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	N/A	BAIK	81.504.100,00	BAIK	57.375.000,00	BAIK	60.817.500,00	BAIK	63.250.000,00	BAIK	66.400.000,00	BAIK	69.720.000,00
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pemerintahan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	43.213.020,00	2 Kegiatan	55.000.000,00	2 Kegiatan	57.750.000,00	2 Kegiatan	60.300.000,00	2 Kegiatan	63.315.000,00	2 Kegiatan	66.400.000,00
	Program Peningkatan Hari-hari besar Nasional dan Keagamaan			17.671.000,00		19.500.000,00		20.475.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00
	Program pengembangan pemasaran pariwisata	269575 Orang 1285 orang	280000 1.300	272.971.800,00	300.000 1.400	520.000.000,00	350.000 1.600	520.000.000,00	360.000 1.750	525.200.000,00	370.000 1.800	545.000.000,00	400.000 2.000	572.250.000,00
	Program pengembangan destinasi pariwisata	4	4	989.054.800,00	4	800.000.000,00	4	600.000.000,00	5	650.000.000,00	5	661.500.000,00	5	650.000.000,00
	Program pengembangan kemitraan	N/A	1		3 PS (titik Leleh, Gunung Ruit, Bukit Januar)	2 Perencanaan Teknis		556.500.000,00		584.335.000,00		613.000.000,00		643.650.000,00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	27 Mahasiswa	90	63.317.300,00	2 Angkatan	75.000.000,00	2 Angkatan	50.000.000,00	2 Angkatan	50.000.000,00	1 Angkatan	50.000.000,00	1 Angkatan	50.000.000,00
	Program pengembangan ekonomi kreatif	1 Angkatan (27 Orang di STP Nusa Dua Bali)	1 Angkatan		2 Angkatan									
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	N/A	14	2.659.602.600,00	6	2.140.000.000,00	5	1.840.000.000,00	5	1.876.800.000,00	5	1.900.000.000,00	5	1.938.000.000,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	100%	770.883.700,00	1 Perda	50.000.000,00	100%	665.874.000,00	100%	665.949.835,00	100%	675.660.000,00	100%	683.963.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	176.940.000,00	100%	102.427.500,00	100%	97.550.000,00	100%	107.548.875,00	100%	112.900.000,00	100%	114.500.000,00
	Program peningkatan disiplin aparatur			11.900.000,00										
<b>KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PEENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidangnyanya	100%	100%	28.876.000,00	100%	30.319.800,00	100%	31.835.790,00	100%	33.800.000,00	100%	34.650.000,00		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lajip SKPD oleh Inspektorat/ Kemempaan	N/A	BAIK	47.200.000,00	BAIK	49.560.000,00	BAIK	52.038.000,00	BAIK	54.500.000,00	BAIK	56.000.000,00		
Program Penyacharuasan Informasi Pembangunan dan Pemencintahan	Terfasilitasinya Pevyampain Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	26.250.000,00	1 Kegiatan	27.562.500,00	1 Kegiatan	28.940.000,00	1 Kegiatan	30.387.000,00		
Program Peringatan Hari-hari besar Nasional dan Keagamaan				106.000.000,00		111.300.000,00		116.865.000,00		120.000.000,00		126.000.000,00		
Program peningkatan peran serta Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang dilaksanakan	5 kegiatan	>5	170.000.000,00	>5	180.000.000,00	>5	190.000.000,00	>5	200.000.000,00	>5	210.000.000,00		
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Pelatihan Kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			63.478.000,00										
Program Pembinaan dan Pemasvarakatan Olah Raga	Jumlah Even Olahraga yang digelar di Kabupaten Bengkuluang	N/A	>5	3.19.500.000,00	>5	380.000.000,00	>5	420.000.000,00	>5	435.000.000,00	>5	450.000.000,00		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		N/A		80.000.000,00		160.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.762.500,00		
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>														
<b>Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	480.000.000,00	100%	504.000.000,00	100%	529.200.000,00	100%	549.669.000,00	100%	568.443.000,00		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	154.000.000,00	100%	161.700.000,00	100%	169.785.000,00	100%	155.000.000,00	100%	160.000.000,00		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS													
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidangnyanya	100%	100%	40.000.000,00	100%	42.000.000,00	100%	44.100.000,00	100%	46.405.000,00	100%	48.620.250,00		



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DATA 5	Target Kinerja RPJMD 2017	DATA 7	Target Kinerja RPJMD 2018	DATA 9	Target Kinerja RPJMD 2019	DATA 11	Target Kinerja RPJMD 2020	DATA 13	Target Kinerja RPJMD 2021	DATA 15
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lektor SKPD oleh Inspektori/Kemampuan	N/A	BAIK	30.000.000,00	BAIK	42.000.000,00	BAIK	44.100.000,00	BAIK	46.305.000,00	BAIK	48.500.000,00	BAIK	50.384.450,00
			1 Kegiatan	20.000.000,00	1 Kegiatan	35.000.000,00	1 Kegiatan	36.750.000,00	1 Kegiatan	38.587.500,00	1 Kegiatan	40.526.000,00	1 Kegiatan	42.552.300,00
Program Perluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyempurnaan Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan												
Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	N/A	4 Kegiatan	469.538.000,00	4 Kegiatan	562.000.000,00	4 Kegiatan	561.450.000,00	4 Kegiatan	567.922.500,00	4 Kegiatan	570.000.000,00	4 Kegiatan	550.000.000,00
			>5	200.000.000,00	>5	310.000.000,00	>5	320.000.000,00	>5	320.000.000,00	>5	325.000.000,00	>5	330.000.000,00
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap Ormas/Lembaga Kemasyarakatan lainnya	N/A	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan	
			67,57%	75,89%	67,57%	75,89%	67,57%	75,89%	67,57%	75,89%	67,57%	75,89%	67,57%	75,89%
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Kepala daerah	67,57%	67,57%	75.000.000,00	67,57%	77.000.000,00	67,57%	80.000.000,00	67,57%	85.000.000,00	67,57%	90.000.000,00	>90%	100.000.000,00
			75,89%		75,89%		75,89%		75,89%		75,89%		75,89%	
Program Dukungan Kelancaran Pemilu	Terselenggaranya Pemilu dengan aman dan lancar	100%	-	0	-	0	-	0	100%	200.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	0
Satuan Polisi Pamong Praja														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	1.485.487.550,00	100%	982.000.000,00	100%	992.850.000,00	100%	1.041.242.500,00	100%	1.086.655.250,00	100%	1.134.272.600,00
			100%	388.246.000,00	100%	505.000.000,00	100%	530.250.000,00	100%	556.762.500,00	100%	560.000.000,00	100%	588.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Diaplin PNS	100%	100%	122.829.950,00	100%	75.000.000,00	100%	78.750.000,00	100%	82.687.500,00	100%	86.821.875,00	100%	91.162.000,00

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lapid SKPD oleh Inspektoral/Kemampuan	N/A	BAIK	93.945.500,00	BAIK	93.000.000,00	BAIK	97.650.000,00	BAIK	102.532.500,00	BAIK	107.659.125,00	BAIK	113.000.000,00
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19.745.000,00	1 Kegiatan	30.000.000,00	1 Kegiatan	31.500.000,00	1 Kegiatan	33.075.000,00	1 Kegiatan	34.728.750,00	1 Kegiatan	36.465.000,00
Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan														
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio Jumlah Linmas Per 1000 Penduduk	2,61	2,61	2.218.242.000,00	2,61	280.000.000,00	3	294.000.000,00	3	308.700.000,00	>5	324.135.000,00	>5	337.100.400,00
Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Aktivitas Demo	N/A	<5		<5		<5		<5		<5		<5	
				3.089.930.000,00		3.710.000.000,00		3.750.000.000,00		3.775.000.000,00		3.800.000.000,00		3.900.000.000,00
Program Kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan	Koordinasi Lintas Sektoral	ada	ada	271.574.000,00	ada	225.000.000,00	ada	225.000.000,00	ada	250.000.000,00	ada	250.000.000,00	ada	250.000.000,00
Program dukungan kelancaran pemilihan umum	Terelenggaranya Pemilu dengan aman dan lancar	100%							100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00		
Program penegakan Perda dan Perkada						200.000.000,00								
<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</b>														
<b>Selera Distrik</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	12.944.674.000,00	100%	13.234.787.000,00	100%	13.592.547.850,00	100%	13.924.158.872,50	100%	13.928.365.824,13	100%	14.188.863.113,41
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	16.483.041.000,00	100%	6.551.135.000,00	100%	6.875.691.750,00	100%	7.222.626.337,50	100%	7.383.757.654,38	100%	7.752.945.537,09
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			143.000.000,00		51.000.000,00		53.550.000,00		56.227.500,00		59.038.875,00		61.990.818,75



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERSENGAJARAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAHA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAHA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAHA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAHA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAHA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAHA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%	350.000.000,00	100%	1.517.600.000,00	100%	1.593.480.000,00	100%	1.673.154.000,00	100%	1.756.811.700,00	100%	1.844.652.285,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lajep SKPD oleh Inspektoral/Kemampuan	N/A	BAIK	324.000.000,00	BAIK	287.996.000,00	BAIK	302.195.800,00	BAIK	317.515.590,00	BAIK	333.391.369,50	BAIK	350.060.937,98
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	100%	100%	305.000.000,00	100%	372.000.000,00	100%	390.600.000,00	100%	410.130.000,00	100%	430.636.500,00	100%	452.168.325,00
Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan				1.094.500.000,00		1.085.000.000,00		1.139.250.000,00		1.196.212.500,00		1.256.023.125,00		1.318.824.281,25
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Urusan Kedinasan Kepala Daerah	100%	100%	3.079.000.000,00	100%	2.650.600.000,00	100%	2.677.106.000,00	100%	2.703.877.000,00	100%	2.730.915.770,00	100%	2.758.224.927,70
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan			1.727.000.000,00		2.098.267.000,00		2.119.249.000,00		2.140.441.000,00		2.161.845.410,00		2.183.463.864,10
Program Penataan Daerah Otonomi Baru				2.483.200.000,00		1.162.000.000,00		1.173.620.000,00		1.185.356.200,00		1.197.209.762,00		1.209.181.859,62
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Tingkat Capaian Kinerja Daerah	CC	CC	2.320.000.000,00	CC	2.151.638.400,00	CC	2.173.154.000,00	B	2.194.885.000,00	B	2.216.833.850,00	B	2.239.002.185,50
Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	N/A	10 kegiatan	1.369.000.000,00	10	1.613.016.400,00	10	1.629.146.000,00	10	1.645.437.000,00	10	1.661.891.370,00	10	1.678.510.283,70
	Terlaksananya Asistensi Dana Hibah dan Bantuan	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada	
Program Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Daerah	Cakupan Kegiatan Pemda yang diakomodir	N/A	100%	770.000.000,00	100%	1.151.600.000,00	100%	1.163.116.000,00	100%	1.174.747.000,00	100%	1.186.494.470,00	100%	1.198.359.414,70
Program Penataan, Pengawasan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Luas Tanah yang dibebaskan			1.849.585.000,00		2.377.000.000,00		2.400.770.000,00		2.424.777.000,00		2.449.024.770,00		2.473.515.017,70
	Cakupan Tanah yang telah dibebaskan yang telah memiliki sertifikat													

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAJPA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAJPA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAJPA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAJPA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAJPA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAJPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Berang SKPD Persemanester	2 Laporan	2	140.000.000,00	2	208.800.000,00	2	210.888.000,00	2	212.996.000,00	2	215.125.960,00	2	217.277.219,80
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				271.000.000,00		340.000.000,00		343.400.000,00		346.834.000,00		350.302.340,00		353.805.363,40
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan Pengelolaan Website Pemda setiap Tahunnya	100%	100%	714.000.000,00	100%	667.560.000,00	100%	674.235.600,00	100%	680.977.000,00	100%	687.786.770,00	100%	694.564.637,70
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Tingkat Realisasi Belanja Langsung	94,03%	>95%	2.133.000.000,00	>95%	480.000.000,00	>95%	484.800.000,00	>95%	489.648.000,00	>95%	494.544.480,00	>95%	499.489.924,80
Program Pengendalian Kebijakan Kepala daerah	Jumlah SKPD Pelayanan Publik yang telah dilakukan pengukuran IKR	11 SKPD	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
<b>Sekretariat DPRD</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	2.530.821.500,00	100%	2.279.648.300,00	100%	2.386.326.000,00	100%	2.482.209.650,00	100%	2.496.935.693,00	100%	2.712.863.937,50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	3.833.788.700,00	100%	1.325.740.000,00	100%	1.392.027.000,00	100%	1.461.628.350,00	100%	1.490.860.917,00	100%	1.610.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Disiplin PNS Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidanganya			46.800.000,00										
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ketanggunan	Penilaian Laku SKPD oleh Inspektori/Kemampuan	N/A	BAIK	146.964.500,00	BAIK	100.000.000,00	BAIK	105.000.000,00	BAIK	110.250.000,00	BAIK	115.762.500,00	BAIK	121.550.625,00
Program Peningkatan Informasi Pembangunan	Tersedianya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	386.363.950,00	2 Kegiatan	300.000.000,00	2 Kegiatan	315.000.000,00	2 Kegiatan	330.750.000,00	2 Kegiatan	347.267.500,00	2 Kegiatan	364.651.875,00
Program peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan														



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DATA 5	Target Kinerja RPJMD 2017	DATA 7	Target Kinerja RPJMD 2018	DATA 9	Target Kinerja RPJMD 2019	DATA 11	Target Kinerja RPJMD 2020	DATA 13	Target Kinerja RPJMD 2021	DAMA
1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	2 Terfasilitasinya Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3 100%	4 100%	5 16.234.025.100,00	6 100%	7 14.708.998.350,00	8 100%	9 15.003.178.000,00	10 100%	11 15.153.209.000,00	12 100%	13 15.223.056.140,00	14 100%	15 15.850.000.000,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Perda inisiatif yang diterbitkan	35.613.350,00		35.613.350,00		35.613.350,00		35.969.000,00		36.328.000,00		36.691.000,00		37.057.000,00
<b>Badan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	1.847.720.655,00	100%	1.480.555.981,00	100%	1.547.914.708,80	100%	1.562.426.494,24	100%	1.590.369.118,95	100%	1.599.574.562,50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	370.938.187,00	100%	196.944.800,00	100%	206.792.040,00	100%	217.131.642,00	100%	220.988.224,10	100%	232.037.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS	68.700.000,00		68.700.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi Sesuai Bidangny	336.304.574,00	100%	336.304.574,00	100%	250.000.000,00	100%	262.500.000,00	100%	275.625.000,00	100%	280.000.000,00	100%	293.999.437,50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lelip SKPD oleh Inspektoral/Kemampuan	N/A	BAIK	636.116.029,00	BAIK	615.430.054,00	BAIK	646.201.556,70	BAIK	678.511.634,54	BAIK	712.437.216,26	BAIK	748.059.000,00
Program Penyeberluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	27.647.084,00	1 Kegiatan	21.972.090,00	1 Kegiatan	23.070.694,50	1 Kegiatan	24.224.229,23	1 Kegiatan	25.435.440,69	1 Kegiatan	26.707.000,00
Program peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan														
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	2.444.371.102,00	WTP	2.437.319.950,00	WTP	2.449.506.000,00	WTP	2.461.753.000,00	WTP	2.474.060.000,00	WTP	2.486.430.300,00
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Terb. Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	975.754.544,00	100%	1.031.986.200,00	100%	1.037.149.000,00	100%	1.042.330.000,00	100%	1.047.540.000,00	100%	1.052.777.700,00
Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Barang SKPD Persemeester Daerah	2 Laporan	2	28.002.000,00	2	29.060.400,00	2	29.205.000,00	2	29.350.000,00	2	29.490.000,00	2	29.637.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAWA
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				159.445.825,00		156.727.825,00		157.511.000,00		158.298.000,00		159.080.000,00		159.875.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	2.000.000.000,00	100%	2.030.000.000,00	100%	2.040.150.000,00	100%	2.050.350.000,00	100%	2.060.600.000,00	100%	2.070.903.000,00
<b>Inspektoral</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	1.009.478.300,00	100%	740.000.000,00	100%	774.650.000,00	100%	778.910.500,00	100%	789.401.085,00	100%	797.442.100,45
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	2.914.797.200,00	100%	265.000.000,00	100%	278.350.000,00	100%	290.000.000,00	100%	304.500.000,00	100%	319.725.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			29.830.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%	135.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	105.000.000,00	100%	105.000.000,00	100%	105.000.000,00	100%	105.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Laku SKPD oleh Inspektoral/ Kementan	N/A	BAIK	102.390.000,00	BAIK	105.000.000,00	BAIK	110.250.000,00	BAIK	111.000.000,00	BAIK	116.550.000,00	BAIK	122.377.500,00
Program Penyebutan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	35.738.500,00	1 Kegiatan	35.000.000,00	1 Kegiatan	36.750.000,00	1 Kegiatan	38.587.500,00	1 Kegiatan	40.516.875,00	1 Kegiatan	42.542.718,75
Program peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan														
Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Belanja dan Keuangan	Persentase SKPD yang dilakukan Evaluasi AKIP			1.406.004.000,00		2.080.000.000,00		2.121.600.000,00		2.154.032.000,00		2.197.112.640,00		2.241.054.892,80
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP yang telah Mengikuti Pelatihan			179.072.000,00		310.000.000,00		316.200.000,00		322.524.000,00		328.974.480,00		335.553.969,60



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PEKERJAAN N 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersusunnya SOP dalam Pengawasan Implementasi SOP Terlaksananya Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten setiap tahunnya Terlaksananya Review terhadap Dokumen RKA	ada	ada		ada	795.000.000,00	ada	810.900.000,00	ada	827.118.000,00	ada	843.660.360,00	ada	860.533.567,20
			100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		ada	ada		ada					ada		ada		ada
		Tidak Ada	ada		ada					ada		ada		ada
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				35.000.000,00		40.000.000,00		40.800.000,00		41.616.000,00		42.448.320,00		43.297.286,40
Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujud terbit Laporan Aset SKPD Daerah	100%	100%	14.079.500,00	100%	30.000.000,00	100%	30.600.000,00	100%	31.212.000,00	100%	31.836.240,00	100%	32.472.964,80
<b>Badan Kesepakatan Daerah dan Diklat</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	895.276.140,00	100%	612.230.000,00	100%	646.800.000,00	100%	679.065.000,00	100%	693.161.250,00	100%	722.244.312,50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	212.002.026,00	100%	144.000.000,00	100%	151.200.000,00	100%	158.760.000,00	100%	165.000.000,00	100%	173.250.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS													
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%	121.590.900,00	100%	325.000.000,00	100%	341.250.000,00	100%	353.312.500,00	100%	360.000.000,00	100%	378.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Laki SKPD oleh Inspektoral/Kemampuan	N/A	BAIK	140.234.900,00	BAIK	110.000.000,00	BAIK	115.500.000,00	BAIK	121.275.000,00	BAIK	127.338.750,00	BAIK	133.705.687,50
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyampaiannya Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	35.000.000,00	1 Kegiatan	36.750.000,00	1 Kegiatan	38.587.500,00	1 Kegiatan	40.000.000,00	1 Kegiatan	42.000.000,00
Program peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan														

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAWA		
Program Pendidikan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan Pegawai yang mengikuti Diklat sesuai Tuptekninya	N/A	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00		
		-	100%	3.917.377.000,00	100%	3.950.000.000,00	100%	4.000.000.000,00	100%	4.040.000.000,00	100%	4.120.800.000,00	100%	4.120.800.000,00		
		4,65%	100%		100%		100%									
		99,94%	100%		100%		100%									
		72,50%	84%		90%		95%									
		94,67%	100%		100%		100%									
		ada	ada		ada		ada									
		0,04%	0,04%		0,04%		0,06%									
		1,84%	2,00%		2,15%		2,30%									
		100%	100%		100%		100%									
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah	Cakupan Pegawai Struktural Eselon IV yang telah Mengikuti Diklat PIM IV	31,4% (119 orang dan 379 orang Es.IV)	42% (159 Orang)	2.850.000.000,00	52,5% (199 orang)	2.850.000.000,00	63,1% (239 Orang)	200.000.000,00	73,7% (279 Orang)	200.000.000,00	90% (319 Orang)	200.000.000,00	94,8% (359 Orang)	200.000.000,00		
		72,7% (109 Orang dan 150 Orang Es. III)	80% (119 orang)		83,4% (125 orang)		87,4% (131 orang)								3.260.000.000,00	



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pejabat Struktural Eselon II yang telah Mengikuti Diklat PIM II	>90%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Jumlah CPNS yang akan mengikuti Diklat Prajabatan setiap tahunnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujud terbit Laporan Aset SKPD	100%	100%	8.165.400,00	100%	8.000.000,00	100%	8.500.000,00	100%	9.000.000,00	100%	9.500.000,00	100%	10.000.000,00
	Cakupan Pejabat di lingkungan Kabupaten Bengkulu yang menyempatkan LHKPN setiap tahunnya	N/A	100%	238.789.600,00	100%	198.393.000,00	100%	200.000.000,00	100%	205.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	210.000.000,00
<b>Kecamatan Samalantun</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	300.509.710,00	100%	206.000.000,00	100%	223.550.000,00	100%	235.727.500,00	100%	247.513.875,00	100%	258.889.568,75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	111.260.000,00	100%	86.500.000,00	100%	84.525.000,00	100%	88.751.250,00	100%	93.188.812,50	100%	97.848.253,13
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			11.400.000,00										
	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidangny		100%	2.000.000,00	100%	8.500.000,00	100%	8.925.000,00	100%	9.371.250,00	100%	9.839.812,50	100%	10.331.803,13
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/Kemampuan	N/A	BAIK	38.000.000,00	BAIK	15.000.000,00	BAIK	15.750.000,00	BAIK	16.537.500,00	BAIK	17.364.375,00	BAIK	18.238.593,75
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	1 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	26.250.000,00	1 Kegiatan	27.562.500,00	1 Kegiatan	28.940.625,00	1 Kegiatan	30.387.656,25
Program peningkatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan				15.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAFRA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAFRA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAFRA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAFRA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAFRA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAFRA
Program Penerapan KTP Elektronik	cakupan usulan Pembukaan E-KTP yang terproses	N/A	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100%	100%	6.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru				36.800.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
Program Peningkatan Keberhasilan Kota dan Jalan Kecamatan				7.200.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Terlaksananya Musrenbang di Tk. Kecamatan	100%	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00
Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah				10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				8.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
<b>Kecamatan Bengkuluang</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	333.033.000,00	100%	263.027.000,00	100%	278.465.850,00	100%	293.426.642,50	100%	307.885.474,63	100%	321.817.248,36
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	122.280.000,00	100%	112.000.000,00	100%	117.600.000,00	100%	123.480.000,00	100%	129.654.000,00	100%	136.136.700,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			12.600.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lajip SKPD oleh Inspektorat/Kemampuan	N/A	BAIK	20.831.000,00	BAIK	30.723.000,00	BAIK	32.289.150,00	BAIK	33.872.107,50	BAIK	35.565.712,88	BAIK	37.343.998,52
Program Penyediaan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19.116.000,00	1 Kegiatan	35.000.000,00	1 Kegiatan	36.750.000,00	1 Kegiatan	38.587.500,00	1 Kegiatan	40.516.875,00	1 Kegiatan	42.542.718,75
Program Peningkatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan				10.489.000,00		13.500.000,00		14.175.000,00		14.883.750,00		15.627.937,50		16.409.334,38



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DATA 5	Target Kinerja RPJMD 2017	DATA 7	Target Kinerja RPJMD 2018	DATA 9	Target Kinerja RPJMD 2019	DATA 11	Target Kinerja RPJMD 2020	DATA 13	Target Kinerja RPJMD 2021	DATA 15
Program Penerapan KTP Elektronik	cakupan usulan Pembuatan E-KTP yang terproses	N/A	100%	8.400.000,00	100%	8.500.000,00	100%	8.500.000,00	100%	8.500.000,00	100%	8.500.000,00	100%	8.500.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100%	100%		100%	5.250.000,00	100%	5.250.000,00		5.250.000,00		5.250.000,00		5.250.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	100%	100%	23.862.000,00	100%	31.500.000,00	100%	31.500.000,00	100%	31.500.000,00	100%	31.500.000,00	100%	31.500.000,00
Program Peningkatan Nilai Budaya Daerah	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			8.055.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan				20.012.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Kecamatan Ledo				10.700.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	352.792.000,00	100%	205.960.000,00	100%	222.158.000,00	100%	237.915.900,00	100%	253.211.695,00	100%	268.022.279,75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	117.180.000,00	100%	96.040.000,00	100%	100.842.000,00	100%	105.884.100,00	100%	111.178.305,00	100%	116.737.220,25
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			13.500.000,00										
Program Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lapik SKPD oleh Inspektorat/Kemampuan	N/A	BAIK	21.233.000,00	BAIK	25.000.000,00	BAIK	26.250.000,00	BAIK	27.562.500,00	BAIK	28.946.625,00	BAIK	30.387.856,25
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfaahitasnya Penyampai Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	27.070.000,00	1 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	26.250.000,00	1 Kegiatan	27.562.500,00	1 Kegiatan	28.946.625,00	1 Kegiatan	30.387.856,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAMA
Program Peningkatan Hari-hari Besar Nasional dan Keanggotaan				19.250.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00
Program Penerimaan KTP Elektronik (E-KTP)	cakupan usulan Pembuatan E-KTP yang terproses	N/A	100%	2.700.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00
Program Mengintensifikan Peningkatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Cakupan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	12.900.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru				12.800.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Terlaksananya Muevbang di Tk. Kecamatan	100%	100%	18.800.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00
Program Pemberdayaan Kelenbagaan dan Kegiatan Sosial				3.375.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00
Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan						5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				8.400.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Kecamatan Sanggau Ledo														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	390.950.000,00	100%	237.873.000,00	100%	256.141.650,00	100%	274.073.732,50	100%	291.652.419,13	100%	308.860.040,08
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	101.880.000,00	100%	63.627.000,00	100%	66.808.350,00	100%	70.148.767,50	100%	73.656.205,88	100%	77.339.016,17
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			12.000.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidangny	100%	100%		100%	10.000.000,00	100%	10.500.000,00	100%	11.025.000,00	100%	11.576.250,00	100%	12.155.002,50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/Kemampuan	N/A	BAIK	7.535.000,00	BAIK	21.000.000,00	BAIK	22.050.000,00	BAIK	23.152.500,00	BAIK	24.310.125,00	BAIK	25.525.631,25
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasnya Penyediaan Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	26.250.000,00	1 Kegiatan	27.562.500,00	1 Kegiatan	28.940.625,00	1 Kegiatan	30.387.656,25



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA	Target Kinerja RPJMD	DANA
Program Peningkatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan			100%	14.350.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.750.000,00	100%	16.537.500,00	100%	17.364.375,00
Program Penerapan KTP Elektronik (E-KTP)	cakupan usulan Pembuatan E-KTP yang terproses	N/A	100%		100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00
Program Mengintensifkan Peningkatan Penguasaan Masyarakat	Cakupan Penguasaan Masyarakat yang dilayani	100%	100%	10.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00
Program Penataan Otonomi Baru				48.650.000,00		39.500.000,00		39.500.000,00		39.500.000,00		39.500.000,00		39.500.000,00
Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan						20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Tertindakannya Muarebang di Tk. Kecamatan	100%	100%	16.570.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00
Program Pemberdayaan Kelmabagaan dan Kegiatan Sosial						13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah				11.325.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				3.350.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
<b>Kecamatan Seluas</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	383.315.000,00	100%	224.950.000,00	100%	224.950.000,00	100%	243.427.500,00	100%	261.578.875,00	100%	279.387.818,75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	93.900.000,00	100%	51.950.000,00	100%	51.950.000,00	100%	54.547.500,00	100%	57.274.875,00	100%	60.138.618,75
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			10.000.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%		100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.500.000,00	100%	11.025.000,00	100%	11.576.250,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Laku SKPD oleh Inspektorat/Kemampuan	N/A	BAIK	12.000.000,00	BAIK	25.000.000,00	BAIK	25.000.000,00	BAIK	26.250.000,00	BAIK	27.562.500,00	BAIK	28.940.625,00
Program Perluasan Informasi Pembangunan	Tertampilnya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	23.295.000,00	1 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	26.250.000,00	1 Kegiatan	27.562.500,00	1 Kegiatan	28.940.625,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAWA
Program Peningkatan Hasil Belajar Nasional dan Kegemaran				17.800.000,00		18.500.000,00		19.425.000,00		20.396.250,00		21.416.062,50		22.486.865,63
Program Penerapan KTP Elektronik	cakupan usulan Pembinaan E-KTP yang terproses	N/A	100%	6.600.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00
Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100%	100%	7.995.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru				35.550.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi						5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Program Pemberdayaan Lembaga dan Program Sosial				2.555.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00
Program Peningkatan kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan				21.600.000,00		28.600.000,00		28.600.000,00		28.600.000,00		28.600.000,00		28.600.000,00
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Terlaksananya Murenbang di Tk. Kecamatan	100%	100%	12.350.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah				11.325.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				8.040.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
<b>Kecamatan Sunggal Raya</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	340.963.500,00	100%	230.180.000,00	100%	246.888.000,00	100%	263.183.450,00	100%	279.042.622,50	100%	294.444.753,63
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	105.900.000,00	100%	90.820.000,00	100%	95.361.000,00	100%	100.129.050,00	100%	105.135.502,50	100%	110.392.277,63
Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin PNS			12.500.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidangya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaksanaan LKIP SKTP oleh Inspektori/Kemampuan	N/A	BAIK	13.731.500,00	BAIK	25.000.000,00	BAIK	26.250.000,00	BAIK	27.562.500,00	BAIK	28.940.625,00	BAIK	30.387.656,25



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Perluasan Informasi Pembangunan	Tertfasiliasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	37.530.000,00	1 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	26.250.000,00	1 Kegiatan	27.562.500,00	1 Kegiatan	28.940.625,00	1 Kegiatan	30.387.656,25
Program peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Kragamaan				16.050.000,00		25.000.000,00		26.250.000,00		27.562.500,00		28.940.625,00		30.387.656,25
Penerapan KTP Elektronik	Cakupan usulan Pembuatan E-KTP yang terproses	N/A	100%	2.400.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00
Proram Mengintensifikan Peningkatan Pengabdian Masyarakat	Cakupan Pengabdian Masyarakat yang diangan	100%	100%	32.300.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru				37.800.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00
Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan				14.400.000,00		31.000.000,00		31.000.000,00		31.000.000,00		31.000.000,00		31.000.000,00
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Terlaksananya Musrenbang di Tk. Kecamatan	100%	100%	11.025.000,00	100%	45.000.000,00	100%	45.000.000,00	100%	45.000.000,00	100%	45.000.000,00	100%	45.000.000,00
Program Pemberdayaan Lembaga dan Program Sosial						13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah						20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa						10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
<b>Kecamatan Jagoi Babang</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	410.755.000,00	100%	225.000.000,00	100%	242.250.000,00	100%	259.112.500,00	100%	275.568.125,00	100%	291.596.531,25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	124.540.000,00	100%	82.000.000,00	100%	86.100.000,00	100%	90.405.000,00	100%	94.925.250,00	100%	99.071.512,50
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			11.310.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lajip SKPD oleh Inspektori/Kemampuan	N/A	BAIK	10.000.000,00	BAIK	23.000.000,00	BAIK	24.150.000,00	BAIK	25.357.500,00	BAIK	26.625.375,00	BAIK	27.956.643,75



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAKA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAKA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAKA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAKA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Penyebutan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	18.230.000,00	1 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	27.562.500,00	1 Kegiatan	28.940.625,00	1 Kegiatan	30.387.656,25
Program peringatan Hari-hari Besar, Nasional dan Keagamaan				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		27.562.500,00		28.940.625,00		30.387.656,25
Program Penerimaan KTP Elektronik	Cakupan usulan Pembuatan E-KTP yang terproses	N/A	100%	1.200.000,00	100%	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	100%	7.000.000,00
Program Mengintensifikan Peningkatan Pengaduan Masyarakat	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100%	100%	10.000.000,00	100%	14.000.000,00	100%	14.000.000,00	100%	14.000.000,00	100%	14.000.000,00	100%	14.000.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru				28.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00
Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial				19.200.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00
Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan				3.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah						20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa						8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Terlaksananya Murenbang di Tk. Kecamatan	100%	100%	8.765.000,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00
Kecamatan Teriak														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	299.924.000,00	100%	252.500.000,00	100%	252.500.000,00	100%	287.945.000,00	100%	305.117.250,00	100%	321.898.112,50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	176.690.000,00	100%	59.000.000,00	100%	59.000.000,00	100%	65.047.500,00	100%	68.299.875,00	100%	71.714.868,75
Program Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin PNS			2.400.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi Sesuai Bidang/nya	100%	100%		100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	11.025.000,00	100%	11.576.250,00	100%	12.155.062,50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Laku SKPD oleh Inspektoral/ Kemipran	N/A	BAIK	24.400.000,00	BAIK	28.000.000,00	BAIK	29.400.000,00	BAIK	30.870.000,00	BAIK	32.413.500,00	BAIK	34.034.175,00

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
1	Program Penyebutan Informasi Pembangunan hari-hari besar nasional dan keagamaan	1 kegiatan	1 kegiatan	20.366.000,00	1 kegiatan	25.000.000,00	1 kegiatan	26.250.000,00	1 kegiatan	27.562.500,00	1 kegiatan	28.940.625,00	1 kegiatan	30.387.656,25
	Program Penerapan KTP Elektronik	N/A	100%	12.570.000,00	100%	20.000.000,00	100%	21.000.000,00	100%	22.050.000,00	100%	23.152.500,00	100%	24.310.125,00
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			7.800.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
	Program Mengintensifkan Peningkatan Perwujudan Masyarakat	100%	100%	6.650.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			42.280.000,00		42.500.000,00		42.500.000,00		42.500.000,00		42.500.000,00		42.500.000,00
	Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial			10.580.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00
	Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan			9.600.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
	Program Pengembangan Nilai Budaya			25.200.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	100%	100%	26.540.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00
	<b>Kecamatan Monterado</b>													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	308.203.000,00	100%	205.000.000,00	100%	226.625.000,00	100%	242.831.250,00	100%	258.597.812,50	100%	273.902.703,13
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	151.600.000,00	100%	84.500.000,00	100%	88.725.000,00	100%	93.161.250,00	100%	97.819.312,50	100%	102.710.275,13
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%			10.000.000,00	100%	10.500.000,00	100%	11.025.000,00	100%	11.576.250,00	100%	12.155.062,50
	Program Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	N/A	BAIK	16.862.000,00	BAIK	28.000.000,00	BAIK	29.400.000,00	BAIK	30.870.000,00	BAIK	32.413.500,00	BAIK	34.034.175,00



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	26.250.000,00	1 Kegiatan	27.562.500,00	1 Kegiatan	28.940.625,00	1 Kegiatan	30.387.656,25
Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan				20.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00
Program Penerapan KTP Elektronik	cakupan usulan Pembuatan E-KTP yang terproses	N/A	100%		100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00
Program Pengembangan data/Informasi/Statistik daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100%	100%		100%	18.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	18.000.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru				19.235.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00
Program Pemberdayaan Lembaga dan kegiatan Sosial				17.800.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00
Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan				7.200.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya				25.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				6.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Terlaksananya Musrenbang di Tk. Kecamatan	100%	100%	20.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00
<b>Kecamatan Suti Semarang</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	299.595.000,00	100%	252.000.000,00	100%	267.750.000,00	100%	284.387.500,00	100%	300.606.875,00	100%	316.387.218,75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	147.570.000,00	100%	70.000.000,00	100%	88.500.000,00	100%	92.525.000,00	100%	97.571.250,00	100%	102.449.812,50
Program Peningkatan Diplin Aparatur	Tingkat Diplin PNS			6.400.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidangny	100%	100%		100%	5.000.000,00	100%	5.250.000,00	100%	5.512.500,00	100%	5.788.125,00	100%	6.077.531,25

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAWA
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lajip SKPD oleh Inspektoral/Kemampuan	N/A	BAIK	26.490.000,00	BAIK	25.000.000,00	BAIK	26.250.000,00	BAIK	27.562.500,00	BAIK	28.940.625,00	BAIK	30.387.656,25
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	34.705.000,00	1 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	26.250.000,00	1 Kegiatan	27.562.500,00	1 Kegiatan	28.940.625,00	1 Kegiatan	30.387.656,25
Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan				22.770.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00
Program Penerapan KTP Elektronik	cakupan usulan Pembuatan E-KTP yang terproses	N/A	100%	8.600.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100%	100%	17.100.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi baru				33.810.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00
Program Peningkatan Keberhasilan kota dan Jalan Kecamatan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Terlaksananya Musrenbang di Tk. Kecamatan	100%	100%	21.500.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya				37.600.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				8.560.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
<b>Kecamatan Capkela</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	346.649.000,00	100%	217.300.000,00	100%	235.065.000,00	100%	251.468.250,00	100%	267.441.562,50	100%	282.963.745,63
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	152.875.000,00	100%	65.000.000,00	100%	88.250.000,00	100%	92.662.500,00	100%	97.295.625,00	100%	102.160.406,25
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS													
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Ekdanganya	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.500.000,00	100%	11.025.000,00	100%	11.576.250,00	100%	12.155.062,50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lajip SKPD oleh Inspektoral/Kemampuan	N/A	BAIK	16.186.000,00	BAIK	24.700.000,00	BAIK	25.935.000,00	BAIK	27.231.750,00	BAIK	28.593.337,50	BAIK	30.023.004,38



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
Program Penyacharluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyempurnaan Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	17.400.000,00	1 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	26.250.000,00	1 Kegiatan	27.562.500,00	1 Kegiatan	28.940.625,00	1 Kegiatan	30.387.656,25
Program Peningkatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan				15.640.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00
Program Pengembangan data/Informasi/Statistik daerah						10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Program Pencapaian KTP Elektronik	Cakupan, untaian Pembuatan E-KTP yang terproses	N/A	100%	5.400.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00
Program mengintensifkan penguasaan/penggunaan masyarakat yang dihargani	Cakupan Pengeduan Masyarakat yang dihargani	100%	100%	24.300.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru				21.750.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan				7.200.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah						20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial						13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Terlaksananya Muarebang di Tk. Kecamatan	100%	100%	14.700.000,00	100%	25.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				12.900.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Kecamatan Siding														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	316.396.000,00	100%	228.000.000,00	100%	244.950.000,00	100%	261.497.500,00	100%	277.622.375,00	100%	293.303.493,75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	94.004.000,00	100%	86.000.000,00	100%	84.000.000,00	100%	88.200.000,00	100%	92.610.000,00	100%	97.240.500,00
Program Peningkatan disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS													
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidangny	100%	100%	5.260.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.500.000,00	100%	11.025.000,00	100%	11.576.250,00	100%	12.155.062,50

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PEENCARAA N 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DATA 5	Target Kinerja RPJMD 2017	DATA 7	Target Kinerja RPJMD 2018	DATA 9	Target Kinerja RPJMD 2019	DATA 11	Target Kinerja RPJMD 2020	DATA 13	Target Kinerja RPJMD 2021	DATA 15
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lakiip SKPD oleh Inspektorat/ Kemempaan	N/A	BAIK	15.000.000,00	BAIK	26.000.000,00	BAIK	27.300.000,00	BAIK	28.665.000,00	BAIK	30.098.250,00	BAIK	31.603.162,50
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	12.000.000,00	1 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	26.250.000,00	1 Kegiatan	27.562.500,00	1 Kegiatan	28.940.625,00	1 Kegiatan	30.387.656,25
Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan				15.500.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00
Program Pengembangan data/Informasi/Statistik daerah						10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100%	100%	10.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru				30.340.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00		48.000.000,00
Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan				7.200.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Program Pengembangan Nilai budaya Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Program Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	Cakupan uulan Pembuatan E-KTP yang terproses	N/A	100%	9.800.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Terlaksananya Muerebang di Tk. Kecamatan	100%	100%	16.500.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00
Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial						13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				8.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
<b>Kecamatan Sungsai Betung</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	299.036.000,00	100%	258.700.000,00	100%	276.085.000,00	100%	293.089.250,00	100%	309.693.712,50	100%	325.878.398,13
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	81.369.000,00	100%	79.300.000,00	100%	83.265.000,00	100%	87.428.250,00	100%	91.799.662,50	100%	96.389.645,63
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			20.750.000,00										



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	N/A	BAIK	13.200.000,00	BAIK	28.000.000,00	BAIK	29.400.000,00	BAIK	30.870.000,00	BAIK	32.413.500,00	BAIK	34.034.175,00
	Program Penyediaan Informasi Pembangunan dan Pemertintahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	26.000.000,00	1 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	26.250.000,00	1 Kegiatan	27.562.500,00	1 Kegiatan	28.940.625,00	1 Kegiatan	30.387.656,25
	Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan			73.775.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00
	Program Pengembangan data/Informasi/Statistik daerah			10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
	Program Penerapan KTP Elektronik	N/A	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00
	Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat yang diangani	100%	100%	17.500.000,00	100%	23.500.000,00	100%	23.500.000,00	100%	23.500.000,00	100%	23.500.000,00	100%	23.500.000,00
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			37.760.000,00		50.500.000,00		50.500.000,00		50.500.000,00		50.500.000,00		50.500.000,00
	Program Peningkatan Kebersihan kota dan Jalan Kecamatan													
	Program Pengembangan Nilai budaya Daerah			12.780.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
	Program Pembinaan Olah Raga													
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	100%	100%	20.780.000,00	100%	32.000.000,00	100%	32.000.000,00	100%	32.000.000,00	100%	32.000.000,00	100%	32.000.000,00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial			26.050.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00
	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			6.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
	<b>Kecamatan Lumar</b>													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	285.253.500,00	100%	214.000.000,00	100%	230.700.000,00	100%	246.985.000,00	100%	262.834.250,00	100%	278.225.962,50



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	136.727.500,00	100%	85.000.000,00	100%	89.250.000,00	100%	93.712.500,00	100%	98.596.125,00	100%	103.318.031,25
Program Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin PNS			14.100.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidangannya	100%	100%	2.500.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.500.000,00	100%	11.025.000,00	100%	11.576.250,00	100%	12.155.062,50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lajip SKPD oleh Inspektorat/Kemampuan	N/A	BAIK	9.373.000,00	BAIK	31.000.000,00	BAIK	32.550.000,00	BAIK	34.177.500,00	BAIK	35.886.375,00	BAIK	37.680.693,75
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Tertampilannya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	33.935.000,00	1 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	26.250.000,00	1 Kegiatan	27.562.500,00	1 Kegiatan	28.940.625,00	1 Kegiatan	30.387.656,25
Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan				28.561.000,00		15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.593,75
Program Pengembangan data/Informasi/Statistik daerah														
Program Penerapan KTP Elektronik	cakupan usulan Pembuatan E-KTP yang terproses	N/A	100%	2.400.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100%	100%	12.900.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru				30.590.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00
Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial				18.290.000,00										
Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan						25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
Program Pengembangan Nilai Kebudayaan Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan Keuangan desa				6.200.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Terlaksananya Muarebang di Tk. Kecamatan	100%	100%	24.170.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Kesempatan Sempai Rava Kepulauan</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	424.890.000,00	100%	247.350.000,00	100%	264.567.500,00	100%	281.395.875,00	100%	297.815.668,75	100%	313.806.452,19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	87.350.000,00	100%	83.650.000,00	100%	87.832.500,00	100%	92.224.125,00	100%	96.835.331,25	100%	101.677.097,81
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			10.500.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Perentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi Sesuai Bidangya	100%	100%		100%	10.000.000,00	100%	10.500.000,00	100%	11.025.000,00	100%	11.576.250,00	100%	12.155.062,50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Penilaian Laku SKPD oleh Inspektora/ Kempenan	N/A	BAIK	20.580.000,00	BAIK	22.000.000,00	BAIK	23.100.000,00	BAIK	24.235.000,00	BAIK	25.467.750,00	BAIK	26.741.137,50
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	26.250.000,00	1 Kegiatan	27.562.500,00	1 Kegiatan	28.940.625,00	1 Kegiatan	30.387.656,25
Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan				11.600.000,00		15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.593,75
Program Penerapan KTP Elektronik	Cakupan usulan Pembuatan E-KTP yang terproses	N/A	100%	3.600.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00
Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100%	100%		100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru				30.800.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00
Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan				6.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00
Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial						18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah						20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Terlaksananya Musrenbang di Tk. Kecamatan	100%	100%	10.730.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				5.200.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PESENCARAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kecamatan Tujuh Belas														
Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	370.570.000,00	100%	204.400.000,00	100%	220.547.500,00	100%	236.252.375,00	100%	251.492.493,75	100%	266.244.618,44
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	83.387.000,00	100%	91.050.000,00	100%	95.602.500,00	100%	100.382.625,00	100%	105.401.756,25	100%	110.671.844,06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			29.400.000,00										
Program Peningkatan Penilaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi Sesuai Bidangny	100%	100%		100%	10.000.000,00	100%	10.500.000,00	100%	11.025.000,00	100%	11.576.250,00	100%	12.155.062,50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Laki SKPD oleh Inspektori/Kemampuan	N/A	BAIK	14.475.000,00	BAIK	26.000.000,00	BAIK	27.300.000,00	BAIK	28.665.000,00	BAIK	30.098.250,00	BAIK	31.603.162,50
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	28.040.000,00	1 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	26.250.000,00	1 Kegiatan	27.562.500,00	1 Kegiatan	28.940.625,00	1 Kegiatan	30.387.656,25
Program Peningkatan Hari-hari Besar dan Nasional				30.575.000,00		25.000.000,00		26.250.000,00		27.562.500,00		28.940.625,00		30.387.656,25
Program Penerapan KTP Elektronik	cakupan usulan Pembuatan E-KTP yang terproses	N/A	100%			5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100%	100%	13.950.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru				16.007.500,00		38.500.000,00		38.500.000,00		38.500.000,00		38.500.000,00		38.500.000,00
Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan				9.858.000,00		20.900.000,00		20.900.000,00		20.900.000,00		20.900.000,00		20.900.000,00
Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah				16.450.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				3.600.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Terlaksananya Musrenbang di Tk. Kecamatan	100%	100%	23.387.500,00	100%	31.150.000,00	100%	31.150.000,00	100%	31.150.000,00	100%	31.150.000,00	100%	31.150.000,00
Program Pemberdayaan Klembeagaan dan Kegiatan Sosial				5.300.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
Kecamatan Lembah Bawang														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	377.602.000,00	100%	280.490.000,00	100%	302.189.500,00	100%	318.473.975,00	100%	334.322.673,75	100%	349.713.807,44
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	132.075.000,00	100%	84.010.000,00	100%	88.210.500,00	100%	92.621.025,00	100%	97.252.076,25	100%	102.114.680,06
	Tingkat Disiplin PNS disiplin aparat			13.300.000,00										
	Penerbitan Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi Sesuai Bidangny		100%		100%	10.000.000,00	100%	10.500.000,00	100%	11.025.000,00	100%	11.576.250,00	100%	12.155.062,50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lajep SRPD oleh Inspektoriat/Kemampuan	N/A	BAIK	16.730.000,00	BAIK	27.000.000,00	BAIK	28.350.000,00	BAIK	29.767.500,00	BAIK	31.255.875,00	BAIK	32.818.668,75
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	24.845.000,00	1 Kegiatan	25.000.000,00	1 Kegiatan	26.250.000,00	1 Kegiatan	27.562.500,00	1 Kegiatan	28.940.625,00	1 Kegiatan	30.387.656,25
Program Peringatan Hari-hari besar nasional dan keagamaan				18.800.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00
Program Penerapan KTP Elektronik	cakupan usulan Pembuatan E-KTP yang terproses	N/A	100%	10.800.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100%	100%		100%	24.000.000,00	100%	24.000.000,00	100%	24.000.000,00	100%	24.000.000,00	100%	24.000.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru				21.630.000,00		38.500.000,00		38.500.000,00		38.500.000,00		38.500.000,00		38.500.000,00
Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kecamatan				1.300.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
Program Pengembangan nilai Budaya Daerah						20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Terlaksananya Muarabang di Tk. Kecamatan	100%	100%	22.118.000,00	100%	38.000.000,00	100%	38.000.000,00	100%	38.000.000,00	100%	38.000.000,00	100%	38.000.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial				10.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				9.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAJPA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAJPA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAJPA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAJPA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAJPA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAJPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Kelurahan Sebalo</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	228.288.100,00	100%	162.860.000,00	100%	170.000.000,00	100%	181.227.500,00	100%	192.237.500,00	100%	202.999.375,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	35.105.900,00	100%	38.140.000,00	100%	45.000.000,00	100%	47.250.000,00	100%	49.612.500,00	100%	52.093.125,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			7.000.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lalep SKPD oleh Inspektoral/Kemampuan	N/A	BAIK	11.566.000,00	BAIK	21.000.000,00	BAIK	21.500.000,00	BAIK	22.522.500,00	BAIK	23.600.000,00	BAIK	24.780.000,00
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyampaiannya Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	
Program Peningkatan Hari-hari besar Nasional dan Keagamaan				10.700.000,00		10.000.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		11.550.000,00		12.127.500,00
Program Peningkatan Peranan RT di lingkungan Masing-masing														
Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kelurahan						20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Sosial				61.740.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00
Program Mengintensipkan Peningkatan Pengaduan Masyarakat				20.600.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
<b>Kelurahan Bumi Emas</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	201.246.300,00	100%	153.200.000,00	100%	158.925.000,00	100%	167.045.000,00	100%	174.920.000,00	100%	182.431.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	21.840.000,00	100%	40.500.000,00	100%	42.525.000,00	100%	44.600.000,00	100%	46.830.000,00	100%	49.171.500,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			9.750.000,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAWA
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidangnyanya	100%	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.750.000,00	100%	16.530.000,00	100%	17.300.000,00	100%	18.165.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Laki SKPD oleh Inspektoral/Kemampuan	N/A	BAIK	21.000.000,00	BAIK	22.000.000,00	BAIK	23.000.000,00	BAIK	24.150.000,00	BAIK	25.357.500,00	BAIK	26.357.500,00
Program Penyediaan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	
Program Peningkatan Hari-hari Besar nasional dan kesertaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.500.000,00		12.075.000,00
Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
Program Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Sosial				7.567.500,00		7.567.500,00		7.567.500,00		7.567.500,00		7.567.500,00		7.567.500,00
Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kelurahan				112.234.700,00		112.234.700,00		72.800.000,00		72.800.000,00		72.800.000,00		72.800.000,00
Program Peningkatan Kebersihan Kota dan Jalan Kelurahan				15.000.000,00		15.000.000,00		17.500.000,00		20.000.000,00		22.500.000,00		25.000.000,00
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	236.500.000,00	100%	236.500.000,00	100%	247.000.000,00	100%	256.125.000,00	100%	271.610.000,00	100%	275.279.500,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	55.500.000,00	100%	55.500.000,00	100%	58.000.000,00	100%	60.890.000,00	100%	63.920.000,00	100%	65.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS													
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidangnyanya	100%	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.500.000,00	100%	16.250.000,00	100%	17.010.000,00	100%	17.860.500,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Laki SKPD oleh Inspektoral/Kemampuan	N/A	BAIK	25.000.000,00	BAIK	25.000.000,00	BAIK	26.000.000,00	BAIK	27.390.000,00	BAIK	28.650.000,00	BAIK	30.082.500,00
Program Penyediaan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	35.000.000,00	1 Kegiatan	35.000.000,00	1 Kegiatan	36.750.000,00	1 Kegiatan	38.587.500,00	1 Kegiatan	40.510.000,00	1 Kegiatan	42.535.500,00



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
Program Peningkatan Hari-hari Besar Nasional dan Keasamaan				80.410.000,00		135.000.000,00		141.750.000,00		148.837.500,00		156.200.000,00		160.000.000,00
Program Usaha Bantuan Hukum dan Sosial						98.000.000,00		100.000.000,00		102.000.000,00		107.100.000,00		109.242.000,00
Program Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Hukum				110.910.500,00										
<b>Badan, Penanaman Modal dan Pelayanan, Perilinan, Terpadu</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	1.078.077.750,00	100%	697.000.000,00	100%	732.400.000,00	100%	755.770.000,00	100%	761.880.000,00	100%	764.490.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	163.010.000,00	100%	235.000.000,00	100%	246.750.000,00	100%	259.000.000,00	100%	264.180.000,00	100%	270.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS					0								
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidangny	100%	100%	30.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	78.750.000,00	100%	82.600.000,00	100%	85.000.000,00	100%	89.250.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektoral/ Kemeran	N/A	BAIK	56.428.850,00	BAIK	52.000.000,00	BAIK	54.600.000,00	BAIK	57.330.000,00	BAIK	60.190.000,00	BAIK	63.199.500,00
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfaahitasnya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	47.240.000,00	1 Kegiatan	50.000.000,00	1 Kegiatan	52.500.000,00	1 Kegiatan	55.100.000,00	1 Kegiatan	57.850.000,00	1 Kegiatan	60.742.500,00
Program Peningkatan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan														
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terasunnya SOP Pelayanan Perijinan			811.822.450,00		788.000.000,00		790.000.000,00		805.800.000,00		821.900.000,00		838.338.000,00
	Implementasi SOP Pelayanan Perijinan													
	IKM atau Pelayanan Perijinan SKPD													
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi				130.665.000,00										
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Even Promosi Investasi yang dilakukan			682.755.950,00		703.000.000,00		720.000.000,00		734.400.000,00		749.000.000,00		763.980.000,00



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEMERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Badan Pengelola Perbatasan														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	1.758.461.000,00	100%	997.800.000,00	100%	1.077.640.000,00	100%	1.147.997.500,00	100%	1.215.490.000,00	100%	1.244.344.900,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	170.523.000,00	100%	254.500.000,00	100%	267.225.000,00	100%	280.500.000,00	100%	294.500.000,00	100%	298.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			27.900.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%	224.280.000,00	100%	100.000.000,00	100%	105.000.000,00	100%	110.250.000,00	100%	115.760.000,00	100%	121.548.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Laki SKPD oleh Inspektoral/ Kemeripan	N/A	BAIK	83.981.687,00	BAIK	72.500.000,00	BAIK	76.125.000,00	BAIK	79.930.000,00	BAIK	83.920.000,00	BAIK	88.116.000,00
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyempurnaan Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	37.625.500,00	1 Kegiatan	63.200.000,00	1 Kegiatan	66.360.000,00	1 Kegiatan	69.600.000,00	1 Kegiatan	73.080.000,00	1 Kegiatan	76.734.000,00
Program Peringatan Hari-hari besar Nasional dan Kragamaan				19.452.000,00										
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah						523.000.000,00		533.400.000,00		544.000.000,00		554.880.000,00		565.977.600,00
Program peningkatan Aksebilitas Daerah Perbatasan				166.772.250,00										
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi						49.000.000,00		51.450.000,00		54.022.500,00		56.700.000,00		59.535.000,00
Program Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal				1.029.730.828,00		1.640.000.000,00		1.672.800.000,00		1.706.200.000,00		1.740.300.000,00		1.775.105.000,00
Program Peningkatan Kerjasama Antar Negara				435.610.760,00										
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah				745.662.975,00		300.000.000,00		150.000.000,00		157.500.000,00		165.370.000,00		173.638.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	890.855.000,00	100%	497.790.000,00	100%	532.754.500,00	100%	599.467.225,00	100%	637.035.586,25	100%	670.137.365,56

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PESENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	1.117.704.000,00	100%	233.210.000,00	100%	244.870.500,00	100%	257.114.025,00	100%	269.969.726,35	100%	283.468.212,50
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			24.500.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidangannya	100%	100%	27.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	52.500.000,00	100%	55.125.000,00	100%	57.881.250,00	100%	60.775.312,50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Laki SKPD oleh Inspektoral/Kemampuan	N/A	BAIK	25.994.000,00	BAIK	22.500.000,00	BAIK	23.625.000,00	BAIK	24.806.250,00	BAIK	26.046.562,50	BAIK	27.348.890,63
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyempaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19.886.000,00	1 Kegiatan	35.000.000,00	1 Kegiatan	36.750.000,00	1 Kegiatan	38.587.500,00	1 Kegiatan	40.516.875,00	1 Kegiatan	42.542.718,75
Program Peringatan Hari-hari besar Nasional dan Keagamaan														
Program Pencegahan Daerah Rawan Bencana	Terpekatannya daerah rawan bencana		ada			650.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Program Peningkatan Kesigapan dan Pencegahan Kebakaran	Kasus Bencana Kebakaran	12	<5	100.000.000,00	<5		<5		<5		<5		<5	
Program Peningkatan Kesigapan dan Pencegahan Bencana	Bertambahnya tenaga terlatih dan terampil dalam penanganan bencana	N/A				400.000.000,00		300.000.000,00		315.000.000,00		330.750.000,00		347.287.500,00
Program Penanganan Pasca Bencana	Jumlah Lokasi Bencana yang terangani (diakukan rehabilitasi dan rekonstruksi)	N/A			5	961.500.000,00	5	1.009.500.000,00	5	1.059.900.000,00	5	1.112.800.000,00	5	1.168.440.000,00
Program Penguatan peraturan Perundang-undangan dan kapasitas kelembagaan	Peraturannya Penanggulangan Bencana		1 Perda			275.000.000,00		100.000.000,00						
Program Tanggap Darurat	cakupan bantuan logistik yang terdistribusi pada daerah bencana	100%	100%		100%	2.125.000.000,00	100%	1.850.000.000,00	100%	1.850.000.000,00	100%	1.850.000.000,00	100%	1.850.000.000,00
	Cakupan Penanganan pada Lokasi Darurat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
Dinas Pemandangan Daerah														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	1.100.470.800,00	100%	764.370.600,00	100%	807.188.150,00	100%	847.647.557,50	100%	875.669.935,38	100%	881.181.432,14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	265.005.779,00	100%	177.000.000,00	100%	185.850.000,00	100%	195.142.500,00	100%	204.899.625,00	100%	215.144.606,25
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS													
Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	Pencapaian Sumber Daya Aparatur yang mempunyai kompetensi sesuai Bidangannya	100%	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	105.000.000,00	100%	110.250.000,00	100%	115.762.500,00	100%	121.550.625,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian LKIP SKPD oleh Inspektori/Kemampuan	N/A	BAIK	113.885.946,00	BAIK	98.297.000,00	BAIK	103.211.850,00	BAIK	108.372.442,50	BAIK	113.791.064,63	BAIK	119.480.617,86
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyempadan Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	40.750.000,00	1 Kegiatan	35.000.000,00	1 Kegiatan	36.750.000,00	1 Kegiatan	38.587.500,00	1 Kegiatan	40.516.875,00	1 Kegiatan	42.542.718,75
Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan														
Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya terbit Pengeloaan Aset Daerah	100%	100%	11.652.550,00	100%	11.652.550,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00
Program peningkatan, pengembangan dan pengelolaan PAD	Meningkatnya Pendapatan Daerah Dari Sektor Pajak	7.894 Juta	11.200 Juta	3.218.234.925,00	15.000 Juta	3.313.679.850,00	15.825 Juta	3.400.000.000,00	16.695 Juta	3.468.000.000,00	17.613 Juta	3.537.360.000,00	18.582 Juta	3.608.100.000,00
	Meningkatnya Pendapatan Daerah Dari Sektor Bukan Pajak	10.609 Juta	10.000 Juta		10.498 Juta		10.697 Juta		10.697 Juta		10.697 Juta		10.697 Juta	
Program pembinaan, pengendalian dan monitoring pajak daerah	Jenis Pajak yang termonitor dan Tervaluasi secara Optimal	8 Jenis	8 Jenis		8 Jenis		8 Jenis		8 Jenis		8 Jenis		8 Jenis	
<b>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	1.031.285.000,00	100%	600.496.000,00	100%	672.645.800,00	100%	737.403.090,00	100%	782.898.244,50	100%	828.614.506,73
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	265.958.000,00	100%	196.500.000,00	100%	206.325.000,00	100%	216.641.250,00	100%	227.473.312,50	100%	238.846.978,13

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program peningkatan disiplin aparat	Tingkat Disiplin PNS													
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%	143.640.000,00	100%	74.000.000,00	100%	77.700.000,00	100%	81.585.000,00	100%	85.664.250,00	100%	89.947.462,50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Laku SKPD oleh Inspektoral/Kemampuan	N/A	BAIK	55.411.000,00	BAIK	51.504.000,00	BAIK	54.079.200,00	BAIK	56.783.160,00	BAIK	59.622.318,00	BAIK	62.603.433,90
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan SKPD	Terfasilitasinya Penyempurnaan Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	87.000.000,00	1 Kegiatan	35.000.000,00	1 Kegiatan	36.750.000,00	1 Kegiatan	38.587.500,00	1 Kegiatan	40.516.875,00	1 Kegiatan	42.542.718,75
Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Keagamaan														
Program Optimalisasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terwujudnya terbah Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	20.808.000,00	100%	22.500.000,00	100%	22.500.000,00	100%	22.500.000,00	100%	22.500.000,00	100%	22.500.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Kegiatan/ Pembinaan/ Sosialisasi/ Penyuluhan dimasyarakat	N/A	4	489.848.000,00	4	475.000.000,00	4	494.000.000,00	4	518.700.000,00	4	544.635.000,00	4	566.420.400,00
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi/ Penyuluhan bagi Lembaga Ekonomi /BUMDes	N/A	1	507.411.000,00	1	300.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa														
Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Cakupan Desa yang telah Menyusun RPJMDes	N/A	>25%	1.097.561.000,00	>50%	1.325.000.000,00	>75%	1.000.000.000,00	>90%	825.000.000,00	100%	866.250.000,00	100%	909.562.500,00
	Cakupan Desa yang telah Menyusun Profil Desa	N/A	>25%		>50%		>75%		>90%		100%		100%	
	Cakupan Desa yang telah mampu menyusun Peraturan desa													



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
Program Penguatan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan/ Sosialisasi terkait Manajemen Pemerintahan Desa Cakupan Pemerintahan Desa yang termonitor dan terevaluasi kinerjanya	N/A 100%	3 Kegiatan 100%	600.000.000,00	3 Kegiatan 100%	600.000.000,00	2 Kegiatan 100%	300.000.000,00	1 Kegiatan 100%	150.000.000,00	1 Kegiatan 100%	150.000.000,00	1 Kegiatan 100%	150.000.000,00
<b>KEARSIPAN</b>														
<b>Kantor Perustakwaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	527.613.400,00	100%	363.400.000,00	100%	378.420.000,00	100%	392.341.000,00	100%	404.783.050,00	100%	415.522.202,50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	257.636.000,00	100%	120.000.000,00	100%	126.000.000,00	100%	132.300.000,00	100%	138.915.000,00	100%	145.860.750,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			22.500.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidangny	100%	100%	36.000.000,00	100%	39.600.000,00	100%	41.580.000,00	100%	43.659.000,00	100%	45.841.950,00	100%	48.134.047,50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lakup SKPD oleh Inspektoral/ Kempenan	N/A	BAIK	16.125.000,00	BAIK	45.000.000,00	BAIK	47.250.000,00	BAIK	49.612.500,00	BAIK	52.093.125,00	BAIK	54.697.781,25
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyempulan Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	14.438.500,00	1 Kegiatan	35.000.000,00	1 Kegiatan	36.750.000,00	1 Kegiatan	38.587.500,00	1 Kegiatan	40.516.875,00	1 Kegiatan	42.542.718,75
Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Dan Kegamaan				7.380.000,00		0		0		0		0		0
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah				32.908.000,00		139.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan				441.823.000,00		358.000.000,00		370.000.000,00		388.500.000,00		407.850.000,00		428.242.500,00

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAWA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PERTANIAN</b>														
<b>Dinas Pertanian</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	2.866.479.000,00	100%	1.219.486.160,00	100%	1.230.936.879,38	100%	1.230.936.879,38	100%	1.246.478.723,34		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	5.380.484.000,00	100%	791.924.000,00	100%	811.520.200,00	100%	852.096.210,00	100%	894.701.020,50		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			91.632.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%	142.153.000,00	100%	150.000.000,00	100%	157.500.000,00	100%	165.375.000,00	100%	173.643.750,00		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lempir SKPD oleh Inspektori/Kemampuan	N/A	BAIK	30.815.000,00	BAIK	64.294.250,00	BAIK	67.508.962,50	BAIK	70.884.410,63	BAIK	74.428.631,16		
Program Penyebaran informasi: pembngunan	Terfasilitasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	746.985.000,00	1 Kegiatan	85.000.000,00	1 Kegiatan	89.250.000,00	1 Kegiatan	93.712.500,00	1 Kegiatan	98.398.125,00		
Program Peningkatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan						145.000.000,00		147.900.000,00		155.295.000,00		163.059.750,00		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian	Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah			3.401.239.000,00		2.742.070.000,00		1.860.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		2.100.000.000,00
Program Peningkatan produksi Pertanian	Meningkatnya Produksi Padi	81.726 Ton	85.812	1.003.347.000,00	90.102	979.892.315,00	94.608	600.000.000,00	99.338	650.000.000,00	104.305	650.000.000,00	109.520	850.000.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Produksi Jagung	77.484 Ton	81.358		85.426		89.697		94.182		98.891		103.835	
	Jumlah Petani yang memperoleh bantuan setiap tahunnya	N/A		233.315.000,00		360.000.000,00		378.000.000,00		396.900.000,00		396.900.000,00		600.000.000,00
	Jumlah Petani/Poktan yang memperoleh Penyuluhan/Pelatihan	N/A	190 orang											



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAKPA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAKPA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAKPA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAKPA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAKPA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAKPA
Program Peningkatan Penerapan Teknologi pertanian	Cakupan Petani yang telah memanfaatkan teknologi tepat guna dalam proses Produksi	N/A		10.032.000.000,00		10.282.800.000,00		10.539.800.000,00		10.539.800.000,00		10.539.800.000,00		11.066.750.000,00
	Persentase Poktan yang mendapatkan bantuan teknologi/ mesin pertanian	N/A												
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Even promosi yang dilaksanakan			2.523.667.492,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		850.000.000,00
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Jumlah Penyuluh pertanian yang memperoleh Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh	N/A		558.970.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		125.000.000,00
	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kinerja Penyuluh pertanian	100%	100%				100%		100%		100%		100%	
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Menurunnya Jumlah Kasus Hewan Menular			130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				3.764.721.402,00		1.000.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.102.500.000,00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah Poktan yang memperoleh Bantuan Alat-alat Peternakan	N/A		452.974.381,00		500.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		525.000.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Jumlah Rekrutmen Mahasiswa Beasiswa Utusan Daerah	35 Orang (1 Angkatan)	90 Orang (3 Angkatan)	100.000.000,00										
	Termonitornya Mahasiswa BUD setiap Tahunnya	100%	100%				100%		100%		100%		100%	
<b>KEHUTANAN</b>														
<b>Dinas Kehutanan dan Perkebunan</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	692.645.000,00		723.745.000,00		772.750.000,00		819.360.750,00		819.360.750,00		863.546.537,50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	302.000.000,00		317.100.000,00		332.955.000,00		349.602.750,00		349.602.750,00		367.082.887,50



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PEKERJAAN N 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			30.000.000,00										
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%	81.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	78.750.000,00	100%	82.687.500,00	100%	86.821.875,00	100%	91.162.968,75
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lajep SKPD oleh Inspektoral/Kemampuan	N/A	BAIK	42.749.000,00	BAIK	60.000.000,00	BAIK	63.000.000,00	BAIK	66.150.000,00	BAIK	69.457.500,00	BAIK	72.980.375,00
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terfasilitasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	47.013.000,00	1 Kegiatan	117.000.000,00	1 Kegiatan	122.850.000,00	1 Kegiatan	128.992.500,00	1 Kegiatan	135.442.125,00	1 Kegiatan	142.214.231,25
Program Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan														
Peningkatan Pemasaran Hasil Prod. Pertanian/Perkebunan	Ewen Promosi yang dilaksanakan			50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00
Peningkatan Penerapan Teknologi Pert./Perkebunan	Jumlah Poktan yang Memperoleh Bantuan Teknologi dan alat-alat Perkebunan	N/A				324.000.000,00		340.200.000,00		357.110.000,00		374.960.000,00		393.708.000,00
Peningkatan Produksi Pert./Perkebunan	Produksi Karet	23.073	23.000	4.472.410.000,00	22.970	5.259.355.000,00	22.900,00	5.259.355.000,00	23.000,00	5.259.355.000,00	23.100,00	5.259.355.000,00	23.200,00	5.259.355.000,00
	Produksi Lada	1.293	1.300		1.350		1.400		1.470		1.500		1.600	
	Produksi Sawit	111.243	115.000		120.000		125.000,00		127.000,00		128.000,00		130.000,00	
Program pembinaan dan pengendalian investasi bidang pertanian/perkebunan	Termonitornya aktivitas Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Bengkulu Tengah	N/A	100%	481.272.000,00	100%	275.000.000,00	100%	275.000.000,00	100%	275.000.000,00	100%	275.000.000,00	100%	275.000.000,00
<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>														
<b>Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral</b>														
Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	1.024.967.800,00	100%	493.000.000,00	100%	517.650.000,00	100%	596.782.500,00	100%	655.371.625,00	100%	677.390.206,25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	152.847.600,00	100%	144.000.000,00	100%	151.200.000,00	100%	158.760.000,00	100%	186.698.000,00	100%	196.032.900,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS			16.100.000,00										

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2017	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2018	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2019	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2020	DAMA	Target Kinerja RPJMD 2021	DAMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidangny	100%	100%	293.500.000,00	100%		100%		100%		100%		100%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian Lajip SKPD oleh Inspektori/Kemempian	N/A	BAIK	58.943.800,00	BAIK	28.000.000,00	BAIK	29.400.000,00	BAIK	30.870.000,00	BAIK	32.413.500,00	BAIK	34.034.175,00
Program Penyebarluasan informasi pembangunan	Tertfasilitasinya Penyampaian Informasi Pembangunan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	47.159.000,00	1 Kegiatan	35.000.000,00	1 Kegiatan	36.750.000,00	1 Kegiatan	38.587.500,00	1 Kegiatan	40.516.875,00	1 Kegiatan	42.542.718,75
Program Peningkatan hari-hari besar nasional dan kesagamaan.														
Program Pembinaan dan pengawasaan di bidang pertambangan.	Cakupan Pengawasan Kegiatan Pertambangan	100%	100%	102.020.000,00	100%	150.000.000,00	100%	165.000.000,00	100%	175.000.000,00	100%	185.000.000,00	100%	200.000.000,00
Program Pengawasan dan Pencatatan Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan				197.595.000,00				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan di Bidang Geologi						200.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		231.000.000,00		242.550.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan di bidang ketenagalistrikan.	Desa yang memiliki akses listrik	66,12 % (82 Desa dari 124 Desa & Kelurahan)	70,16%	6.996.728.800,00	72,58%	3.000.000.000,00	76,61%	4.000.000.000,00	77,41%	4.800.000.000,00	80,64%	5.000.000.000,00	85,70%	5.000.000.000,00
<b>RELAUTAN DAN PERIKAMAN Dinas Kelautan dan Perikanan</b>														
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Adm. Perkantoran	100%	100%	856.596.000,00	100%	550.500.000,00	100%	573.125.000,00	100%	591.450.000,00	100%	609.279.000,00	100%	620.816.700,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarpras Aparatur	100%	100%	156.052.000,00	100%	161.500.000,00	100%	169.575.000,00	100%	178.050.000,00	100%	186.950.000,00	100%	196.297.500,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin PNS													
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidangny	100%	100%	66.000.000,00	100%	80.000.000,00	100%	84.000.000,00	100%	88.200.000,00	100%	92.610.000,00	100%	97.240.500,00

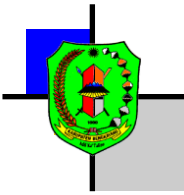


PROGRAM	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	N/A	BAIK	30.768.000,00	BAIK	49.000.000,00	BAIK	51.450.000,00	BAIK	54.000.000,00	BAIK	56.700.000,00	BAIK	59.535.000,00	
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	204.369.000,00	1 Kegiatan	85.000.000,00	1 Kegiatan	89.250.000,00	1 Kegiatan	93.700.000,00	1 Kegiatan	98.380.000,00	1 Kegiatan	103.299.000,00	
Program Peringatan Hari Besar Nasional dan Agama			42.171.000,00											
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir			425.389.000,00											
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	3.218 Ton	3.300	1.852.073.000,00	3.450	3.204.000.000,00	3.550,00	3.284.100.000,00	3.700,00	3.366.200.000,00	3.800,00	3.450.340.000,00	4.000,00	3.536.598.500,00	
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan	N/A		950.550.000,00	2	370.000.000,00	2	388.500.000,00	2	407.900.000,00	2	424.216.000,00	2	445.725.800,00	
Program pengembangan perikanan tangkap			3.073.827.000,00											
Program peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Balai Benih Ikan (BBI)	100%	100%	192.205.000,00	100%	200.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00		240.786.000,00	
<b>PERDAGANGAN</b>	<b>Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan</b>													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	740.410.114,00	100%	575.600.000,00	100%	605.880.000,00	100%	624.074.000,00	100%	624.074.000,00	100%	653.899.700,00	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	395.600.000,00	100%	225.000.000,00	100%	236.250.000,00	100%	240.062.500,00	100%	240.062.500,00	100%	252.065.625,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur			35.750.000,00											
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100.000.000,00	100%	80.000.000,00	100%	81.000.000,00	100%	88.200.000,00	100%	88.200.000,00	100%	92.610.000,00	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN 2015	Target Kinerja RPJMD 2016	DANA	Target Kinerja RPJMD 2017	DANA	Target Kinerja RPJMD 2018	DANA	Target Kinerja RPJMD 2019	DANA	Target Kinerja RPJMD 2020	DANA	Target Kinerja RPJMD 2021	DANA
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		BAIK	48.800.000,00	BAIK	55.000.000,00	BAIK	57.750.000,00	BAIK	60.637.500,00	BAIK	60.637.500,00	BAIK	63.669.375,00
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	270.000.000,00	1 Kegiatan	234.400.000,00	1 Kegiatan	246.120.000,00	1 Kegiatan	258.426.000,00	1 Kegiatan	258.426.000,00	1 Kegiatan	271.347.300,00
	Program Peningkatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan													
	Program Perlindungan Konsumen dan Perdagangan			402.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		ada											
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			5.299.532.800,00		4.000.000.000,00		4.120.000.000,00		4.243.600.000,00		4.243.600.000,00		6.130.508.000,00
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.270	50	715.000.000,00	75	535.000.000,00	100	650.000.000,00	200	650.000.000,00	200	625.000.000,00	200	600.000.000,00
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM			200.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	60,75%	70%	425.000.000,00	72,00%	420.000.000,00	73,00%	400.000.000,00	75,00%	420.000.000,00	76,00%	270.000.000,00	80,00%	283.500.000,00
	Program peningkatan Mutu dan Kualitas Kelompok UMKM	2.270	50		75	100.000.000,00	100	100.000.000,00	200	125.000.000,00	200	150.000.000,00	200	175.000.000,00

# 9

## Penetapan Indikator Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kinerja Daerah



## *BAB IX*

# *PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH*

---

Penetapan indikator kinerja daerah memiliki tujuan untuk memberikan gambaran seberapa jauh keberhasilan kinerja suatu daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan didalam RPJMD Kabupaten Bengkayang selama lima tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari besaran/ akumulasi dari capaian atas target indikator kinerja sasaran yang telah dijabarkan didalam Bab sebelumnya.

Dalam mencapai indikator kinerja daerah ini, tentunya perlu mendapat dukungan di setiap SKPD yang mempunyai peranan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang ada, melalui Program-program prioritas pembangunan yang telah disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan harapan terjadi sinergisitas didalam Perencanaan yang telah dilakukan serta terhadap pelaksanaan nantinya.

Didalam bab ini, selain akan dijabarkan indikator kinerja daerah berdasarkan aspek-aspek serta fokus pembangunan, juga akan digambarkan kondisi daerah berdasarkan indikator Pembangunan daerah secara makro serta proyeksinya selama 5 Tahun kedepan.

Target indikator kinerja daerah yang menjadi gambaran kinerja dari setiap urusan pemerintahan daerah secara umum tertuang didalam tabel dibawah ini:



**Tabel 9.1**  
**Proyeksi Indikator Makro Pembangunan**  
**Kabupaten Bengkayang**  
**tahun 2016-2021**

No.	URAIAN	SATUAN	KINERJA DIAWAL MASA RPJMD	PROYEKSI TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	<b>4,02</b>	>4	>4	>5	>5	>5	>6
2.	Tingkat Pengangguran	%	<b>3,74</b>	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3.	Inflasi	%	<b>5,29</b>	<6	<6	<6	<6	<6	<6
4.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)		<b>64,40</b>	65,00	66,32	68,39	69,80	71,25	72,68

**Tabel 9.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja**  
**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**di Kabupaten Bengkayang**

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Rpjmd	Target Capaian Tahunan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>								
	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>								
	Tingkat Inflasi Daerah	5,29 %	<6 %	<6 %	<6 %	<6 %	<6 %	<6 %	<6 %
	Pengeluaran per Kapita (riil)	766.919	820.000	850.000	875.000	930.000	960.000	1.000.000	1.000.000

	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,02 %	>4 %	>4 %	>5 %	>5 %	>5 %	>6 %	>6 %
	<b>Fokus Kesejahteraan Masyarakat</b>								
	<b>PENDIDIKAN</b>								
	Angka rata-rata lama sekolah	5,97 %	6,00 %	6,50 %	7,00 %	7,50 %	8,50 %	9,50 %	9,50 %
	Angka Melek Huruf	91,42 %	92,00%	92,50%	93,00%	94,00%	95,00%	96,00%	96,00%
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	105,50 %	105,5 %	105,5 %	105,5 %	105,5 %	105,5 %	105,50 %	105,50 %
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B	77,24 %	78,00 %	79,00 %	79,50 %	80,00 %	80,50 %	81,00 %	81,00 %
	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	50,09 %	50,50 %	51,50 %	52,50 %	53,50 %	54,50 %	60,00 %	60,00 %
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	88,48 %	88,75 %	89,50	90,25 %	91,25 %	92,00 %	92,50 %	92,50 %
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B	49,25 %	49,75 %	50,75 %	51,50 %	52,50 %	53,50 %	55,00 %	55,00 %
	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	45,12 %	46,00 %	48,00 %	50,00 %	53,00 %	55,00 %	60,00 %	60,00 %
	<b>KESEHATAN</b>								
	Angka harapan hidup	72.89	73.00	74.00	74.50	75.00	>75.00	>75.00	>75.00
	Balita Penderita gizi buruk/1000 Balita	0.58	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	Angka Kejadian Gizi Buruk	16	14	12	10	8	6	4	4
	<b>KETENAGAKERJAN</b>								
	Rasio penduduk yang bekerja	96,26%	96,5%	96,5%	96,75%	96,75%	97%	97%	97%
	<b>FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA</b>								
	Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian								

a.	Jumlah Kelembagaan Seni dan Budaya Yang terbentuk	80	90	95	100	>100	>100	>100	>100
b.	Jumlah Kelembagaan Seni dan Budaya Yang terlibat dalam even daerah dan Nasional	15	20	>20	>20	>20	>20	>20	>20
	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
	<b>FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB</b>								
	<b>PENDIDIKAN</b>								
	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>								
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28,03 %	29,03 %	31,03 %	32,03 %	34,03 %	36,03 %	40,00 %	40,00 %
	<b>Pendidikan Dasar</b>								
	Angka partisipasi sekolah	88,48	88,75	89,50	90,25	91,25	92,00	92,50	92,50
	Rasio ketersediaan sekolah/1000 penduduk usia sekolah	6,81	6,91	7,00	7,1	7,19	7,29	7,38	7,38
	Rasio guru / murid								
	• SD/ Sederajat	14,90	15,00	16,00	16,50	17,00	17,50	18,00	18,00
	• SMP/ Sederajat	12,70	13,00	13,25	13,50	13,75	14,00	14,00	14,00
	<b>Pendidikan Menengah</b>								
	Angka partisipasi sekolah	49,25	49,75	50,75	51,50	52,50	53,50	55,00	55,00
	Rasio ketersediaan sekolah / 1000 penduduk usia sekolah	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
	Rasio guru terhadap murid	7,56	7,56	7,66	7,70	7,80	7,90	8,00	8,00
	<b>Fasilitas Pendidikan</b>								
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	36,70 %	40,00 %	45,00 %	50,00 %	>50,00 %	>50,00 %	>50,00 %	>50,00 %

Rasio pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	28,80 %	30,00 %	35,00 %	40,00 %	45,00 %	50,00 %	>50,00 %	>50,00 %
Rasio pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	37,30 %	40,00 %	45,00 %	50,00 %	>50,00 %	>50,00 %	>50,00 %	>50,00 %
<b>Angka Putus Sekolah :</b>								
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,23 %	0,20 %	0,18 %	0,16 %	0,14 %	0,12 %	0,10 %	0,10 %
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,33 %	0,30 %	0,28 %	0,26 %	0,24 %	0,22 %	0,20 %	0,20 %
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1,29 %	1,25 %	1,23 %	1,21 %	1,15 %	1,10 %	1,00 %	1,00 %
<b>Angka Lulus Siswa Sekolah :</b>								
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,58 %	99,60 %	99,70 %	99,80 %	99,90 %	99,95 %	100,00 %	100,00 %
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Rasio Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	77,89 %	78,84%	79,81	80,78	81,75%	82,72%	83,68%	83,68%
Rasio guru/murid SD/sedrajat per kelas rata-rata (SPM)	14,90	15,00	16,00	16,50	17,00	17,50	18,00	18,00
Rasio guru terhadap murid SMP/sedrajat (SPM)	12,7	13,00	13,25	13,50	13,75	14,00	14,00	14,00
Rasio guru terhadap murid SMA/sedrajat per kelas rata-rata (SPM)	10,5	11,00	11,25	11,60	11,75	12,00	12,00	12,00
<b>KESEHATAN</b>								
Status RSUD	Tipe D	D	D	C	C	C	C	C
Jumlah Puskesmas Terakreditasi (dari 17 Puskesmas yang ada)	0	2	5	5	5	0	0	17
Rasio posyandu per satuan penduduk	328	350	360	370	380	400	>400	>400

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	70	75	78	80	90	95	100	100
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	2	2	2	2	2	3	3	3
Rasio Dokter per satuan penduduk	18	18	25	>25	>25	>25	>25	>25
Rasio tenaga medis per satuan penduduk (perawat & bidan)	154	160	175	200	>200	>200	>200	>200
Rasio Puskesmas per satuan penduduk	17	17	17	17	17	17	17	17
Pelayanan Kesehatan Dasar								
- Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	80%	82,5%	85%	87,5%	90%	92,5%	95%	95%
- Persentase Kelahiran yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	80%	82,5%	85%	87,5%	90%	92,5%	95%	95%
- Cakupan kunjungan bayi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	61,29%	65,25	69,21	73,17	77,13	81,09	85	85%
- Cakupan pelayanan anak balita	84,10%	86,75	89,4	92,05	94,7	97,35	100	100%
- Cakupan peserta KB aktif	68,93	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	>90,00	>90,00
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular	1	0	0	0	0	0	0	0
- Prevalensi HIV	N/A	N/A	<0,45	<0,45	<0,45	<0,45	<0,45	<0,45
- Kejadian TB Per 1000 Orang	75	<75	<75	<70	<70	<70	<65	<65

- Cakupan penderita DBD yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- Jumlah Masyarakat Miskin yang diakomodir dalam Program Layanan BPJS (Konversi Jamkesda ke BPJS Daerah)	N/A	0	2500 Orang	2500 Orang	2500 Orang	1250 Orang	1250 Orang	1250 Orang	10000 Orang
- Jumlah pukesmas rawat inap yang mampu melaksanakan pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)									
- Persentase balita ditimbang berat badan D/S									
Pelayanan Kesehatan Rujukan									
- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin									
- Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan saran kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota									
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	N/A	>50	>50	>50	>75	>75	>75	>75
Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	N/A	>50	>50	>50	>75	>75	>75	>75
Cakupan Penderita penyakit menular lainnya yang ditangani	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>PEKERJAAN UMUM</b>								
Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi Memadai (Baik+Sedang)	49,90%	54	58,5	63,19	67,87	72,17	76,08	76,08 %
Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 20 Km/Jam)	638,72 KM	50 KM	60 KM	60 KM	60 KM	40 KM	50 KM	958,72 KM
<b>PERUMAHAN</b>								
Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih	28,27%	35%	38%	40%	45%	47%	50%	50%
Persentase Desa yang memiliki akses Listrik	66,12%	70,16%	72,58%	76,61%	77,41%	80,64%	88,70%	88,70%
Luas kawasan permukiman kumuh	156,44 Ha	140,00	130,00	110,00	90,00	80,00	65,00	65,00
Jumlah Ruang terbuka hijau yang terbangun	3,1	2	2	2	2	2	2	12
<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>								
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Persentase Program RPJMD tertuang kedalam RKPD	N/A	>50%	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%
Persentase Kegiatan RKPD tertuang kedalam APBD	N/A	>50%	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%	>85%
Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir didalam Perencanaan Pembangunan	N/A	>30%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%
<b>PERHUBUNGAN</b>									
Jumlah Terminal tipe C	5 Unit	-	-	1	1	-	-	-	7 Unit
Rasio ijin trayek									
Jumlah uji kir angkutan umum	0	0	0	0	50%	75%	90%	90%	90%
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis									
Ketersediaan Fasilitas Uji KIR Angkutan Umum	Tidak ada	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
Jumlah Laka Lantas	136 Kasus	<100	<100	<75	<75	<50	<50	<50	<50
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>									
Dokumen KLHS Dalam Penyusunan Dokumen RTRW	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
Dokumen KLHS Dalam Penyusunan Dokumen RPJMD	N/A	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
Jumlah Sungai yang dilakukan pemantauan Kualitas Air Sungai	N/A	11	10	11	10	11	10	10	21 Sungai Selama 2 Tahun
Luasan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi	212 Ha	100	100	100	100	100	100	100	812

Luasan Ruang Terbuka Hijau yang diadakan	3,1 Ha	2	2	2	2	2	2	2	15,1 Ha
<b>KEPENDUDUKAN</b>									
Kepemilikan KTP	133.017								
Kepemilikan akte kelahiran per 1000 PDDK									
Ketersediaan database kependudukan	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
Indeks Pemberdayaan Gender	65%	65,2	65,3	65,3	65,35	65,35	65,40	65,40	65,40
Persentase Partisipasi Wanita didalam bidang Politik	10,36%	10,36	10,36	10,36	>15	>15	>15	>15	>15
Kasus Kekerasan Terhadap Anak	10 Kasus	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>									
Peserta KB Aktif	68,93%	70	75	80	90	95	100	100	100
<b>SOSIAL</b>									
Cakupan Pemberian bantuan bagi Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	100% (7 Unit)	-	28,58% (2 Unit)	28,58% (2 Unit)	14,29% (1 Unit)	14,29% (1 Unit)	14,29% (1 Unit)	14,29% (1 Unit)	100% (7 Unit)
PMKS yang memperoleh bantuan sosial	N/A	10,00 %	20,00 %	35,00 %	50,00 %	>50,00 %	>50,00 %	>50,00 %	>50,00 %
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	N/A	15%	30%	45%	60%	75%	100%	100%	100%
<b>KETENAGA KERJAAN</b>									
Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	N/A	20 orang	30	30	40	40	40	40	200 Orang

Pelayanan Informasi Tenaga Kerja	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,74%	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>									
Persentase Koperasi aktif	60,75 %	70	72	73	75	76	80	80%	
Usaha Mikro dan Kecil	2.270	50	75	100	200	200	200	3.095	
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM									
Jumlah BPR/LKM									
<b>PENANAMAN MODAL</b>									
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	27	27	27	28	28	28	29	29	
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1,4 M	>1,5 M	>1,75 M	>2 M	>2,25 M	>2,5 M	>2,75 M	> 2,75 M	
<b>KEBUDAYAAN</b>									
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11	11	11	11	12	12	12	12	
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	8	8	8	8	8	8	8	8	
<b>PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>									
Jumlah Organisasi Pemuda	19	>20	>20	>20	>20	>20	>20	>20	
Jumlah Organisasi Olahraga	27	28	29	30	31	32	34	34	
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	5	>5	>5	>5	>10	>10	>10	>10	
Jumlah Kegiatan Olahraga	N/A	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	
Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	0	0	0	0	0	0	1	1	
Lapangan olahraga (dibangun oleh Pemda)	N/A	0	0	1	0	0	1	2	

<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>									
Angka Kriminalitas	133 Kasus	<100	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Jumlah Konflik Sosial	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Rasio Jumlah Anggota Linmas Per 1000 penduduk	2,61	2,61	2,61	3,00	3,00	5,00	>5,00	>5,00	>5,00
Tingkat Partisipasi Pada Pemilu Legislatif	75,89%	75,89	75,89	75,89	>90	>90	>90	>90	>90
Tingkat Partisipasi Pada Pemilu Kepala Daerah	67,57%	67,57	67,57	67,57	67,57	67,57	>90	>90	>90
Kegiatan pembinaan politik daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
Kegiatan pembinaan LSM, Ormas dan OKP	N/A	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5	>5
Jumlah demo	2	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>									
PKK aktif	95,97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1,17	1,34	1,51	1,68	1,85	2	2	2
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	2,14	2,45	2,76	3,07	3,38	3,69	4	4	4
<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</b>									
Angka Kemiskinan	18.400	15.000	13.000	11.000	10.000	<10.000	<10.000	<10.000	<10.000
Jumlah SKPD yang telah Memiliki SOP									
IKM terhadap	N/A	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT	SANGAT	SANGAT	SANGAT

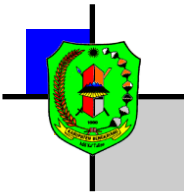
	Pelayanan Publik						BAIK	BAIK	BAIK
	Tingkat Capaian Kinerja Daerah	CC	CC	CC	CC	CC	B	B	B
	Opini Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	<b>KEARSIPAN</b>								
	Penerapan pengelolaan arsip secara baku								
	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan								
	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								
	Web site milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Pameran/expo	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Cakupan Kecamatan yang telah memiliki akses/ Jaringan Internet	17,65%	23,53%	29,41%	35,29%	41,18%	47,06%	52,94%	52,94%
	<b>PERPUSTAKAAN</b>								
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah								
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun								
	Jumlah perpustakaan								
	<b>FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>								
	<b>PERTANIAN</b>								
	Produksi padi / tahun	81.726	85.812	90.102	94.608	99.338	104.305	109.520	109.520
	Produksi jagung / tahun	77.484	81.358	85.426	89.697	94.182	98.891	103.835	103.835
	Produksi Ikan tangkap / tahun	1.734	1.820	1.900	2.000	2.200	2.350	2.500	2.500
	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	N/A	31,82	31,71	31,60	31,49	31,38	31,27	31,27
	<b>PARIWISATA</b>								
	Jumlah Destinasi Wisata	4	4	4	5	5	5	6	6



Jumlah Kunjungan Wisata									
• Wisatawan Domestik	269.575	280.000	300.000	350.000	360.000	370.000	400.000	400.000	
• Wisatawan Mancanegara	1.285	1.300	1.400	1.600	1.750	1.800	2.000	2.000	
<b>PERDAGANGAN</b>									
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB									
Nilai Ekspor Bengkulu (US\$)									
<b>INDUSTRI</b>									
Jumlah Program Pembinaan	N/A	cukup	cukup	baik	baik	baik	baik	baik	baik
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB									
Pertumbuhan Industri									
Kontribusi industri rumah tangga thd PDRB sektor Industri									
Cakupan bina kelompok pengrajin	4,31%								

10

Penutup  
Penutup



## *BAB X*

### *PENUTUP*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021 harus memuat kaidah pelaksanaan. Disamping itu, RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021 harus mencakup pedoman transisi.

#### **10.1 PEDOMAN TRANSISI**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta Prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

#### **10.2 KAIDAH PELAKSANAAN**

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih

jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh SKPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra-SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Bengkayang yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
4. Penyusunan RKPD Kabupaten Bengkayang dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Musrenbang Kota;
5. RKPD Kabupaten Bengkayang menjadi acuan bagi setiap SKPD/unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dengan pendekatan pencapaian hasil (*outcomes*);
6. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Bengkayang merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
7. Renja-SKPD yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan menjadi kontrak kinerja Kepala SKPD/Unit kerja.

Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui pendekatan teknokratik, *top-down bottom-up*, partisipatif, serta pendekatan politis, dengan melibatkan seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan di Kabupaten Bengkayang. Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah disusun, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016-2021 menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian, didalam proses pembangunan di Kabupaten Bengkayang akan tercipta kerjasama yang diistilahkan sebagai “kolaborasi” serta pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkat Pemerintahan yang diistilahkan sebagai “desentralisasi” dengan harapan seluruh *stake holder* pembangunan di Kabupaten Bengkayang akan bekerja penuh rasa tanggung jawab dan kelak meraih hasilnya bersama, mewujudkan Bandung sebagai kota yang unggul, nyaman, dan sejahtera.

**BUPATI BENGKAYANG,**

TTD

**SURYADMAN GIDOT**